



# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

**Kabupaten Padang Pariaman**  
**Tahun 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2021**



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4951);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016–2021.

Pasal...

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

## Pasal 2

RPJMD merupakan:

- a. Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah yang Disertai Dengan Kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Padang Pariaman, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, dan RPJMN.
- b. Dokumen perencanaan Daerah yang memberikan Arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Pasal...

### Pasal 3

Maksud RPJMD adalah untuk menjadi pedoman serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

### Pasal 4

Tujuan RPJMD sebagai pedoman dalam:

- a. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan Daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.
- b. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup RPJMD meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Bupati disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Bupati pada akhir masa jabatan.

### Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I Pendahuluan.
  - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.
  - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah.
  - d. BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah.
  - e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
  - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
  - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
  - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - i. BAB IX Penutup.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal...

## Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

## Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

## Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal...

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang

pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang

pada tanggal 24 Agustus 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

ALI AMRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021  
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI  
SUMATERA BARAT: (8/49/2021)

PENJELASAN...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (3) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 264 oleh sebab itu perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu lima tahun mendatang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada bulan Februari 2021 serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020–2024 yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan daerah Kabupaten Padang Pariaman, serta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, berisikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Daerah Lintas Satuan Kerja Perangkat daerah, dan indikasi Rencana Program Prioritas dan disertai Kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Padang Pariaman Tahun 2021–2026 dimaksudkan untuk dapat memayungi dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serta penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) baik, agar kegiatan pembangunan daerah tahun 2021–2026 dapat menjawab kebutuhan daerah serta dapat meminimalkan permasalahan yang ada.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7


Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
FERDIANTO AMBRA, S.H  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 70820913 201101 1 005

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 6



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama dan utama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan rahmat-Nya, maka kita bisa menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibahas dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta hal itu sudah dapat kita penuhi secara bersama-sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Tim Ahli Penyusun RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penyelesaian dokumen ini.

Akhir kata, dari lubuk hati yang paling dalam, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**Parit Malintang,     Agustus 2021**  
**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

**SUHATRI BUR**



# **DAFTAR ISI, TABEL DAN GAMBAR**



**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-9
1.3.1 Hubungan RPJMD dengan RPJMN .....	I-9
1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat .....	I-9
1.3.3 Hubungan RPJMD dengan RPJPD .....	I-10
1.3.4 Hubungan RPJMD dengan RKPD .....	I-10
1.3.5 Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah ....	I-11
1.3.6 Hubungan RPJMD dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RTRW Kabupaten Padang Pariaman .....	I-11
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-11
1.4.1 Maksud .....	I-11
1.4.2 Tujuan .....	I-12
1.5 Sistematika Penulisan .....	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II-1
2.1.2 Pola Ruang Wilayah .....	II-4
2.1.3 Struktur Ruang Wilayah .....	II-24
2.1.4 Demografi .....	II-27
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-32
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-32
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB .....	II-32
2.2.1.2 Inflasi .....	II-41
2.2.1.3 PDRB Per Kapita .....	II-41
2.2.1.4 Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio .....	II-42
2.2.1.5 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan ....	II-44
2.2.1.6 Angka Kriminalitas Tertangani .....	II-47
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-48
2.2.2.1 Angka Rata-Rata lama sekolah .....	II-50
2.2.2.2 Rata-Rata Harapan Lama Sekolah .....	II-50
2.2.2.3 Angka Harapan Hidup .....	II-50
2.2.2.4 Daya beli Masyarakat .....	II-51
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga .....	II-52
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-53
2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	II-57
2.3.1.1 Urusan Pendidikan .....	II-57
2.3.1.2 Urusan Kesehatan .....	II-64
2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ...	II-71
2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	II-73



2.3.1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	II-70
2.3.1.6	Urusan Sosial .....	II-71
2.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	II-72
2.3.2.1	Urusan Tenaga Kerja .....	II-72
2.3.2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II-74
2.3.2.3	Urusan Pangan .....	II-75
2.3.2.4	Lingkungan Hidup .....	II-77
2.3.2.5	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II-77
2.3.2.6	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .....	II-79
2.3.2.7	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-80
2.3.2.8	Urusan Perhubungan .....	II-81
2.3.2.9	Urusan Komunikasi dan Informatika .....	II-82
2.3.2.10	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	II-83
2.3.2.11	Urusan Penanaman Modal .....	II-84
2.3.2.12	Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	II-85
2.3.2.13	Urusan Statistik .....	II-85
2.3.2.14	Urusan Kebudayaan .....	II-86
2.3.2.15	Urusan Perpustakaan .....	II-87
2.3.2.16	Urusan Kearsipan.....	II-88
2.3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan .....	II-88
2.3.3.1	Urusan Perikanan .....	II-88
2.3.3.2	Urusan Pariwisata .....	II-89
2.3.3.3	Urusan Pertanian .....	II-90
2.3.3.4	Urusan Pertanian Sub. Sektor Peternakan .....	II-92
2.3.3.5	Urusan Energi dan Sumber daya Mineral .....	II-95
2.3.3.6	Urusan Perdagangan .....	II-95
2.3.3.7	Urusan Perindustrian .....	II-96
2.3.4	Fungsi Penunjang .....	II-97
2.3.4.1	Urusan Perencanaan Pembangunan .....	II-97
2.3.4.2	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian .....	II-100
2.4	Aspek Daya Saing Daerah .....	II-101
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-101
2.4.1.1	Nilai Tukar Petani (NTP) .....	II-101
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur .....	II-102
2.4.2.1	Luas Wilayah Terkena Banjir .....	II-102
2.4.2.2	Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran .....	II-102
2.4.2.3	Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel .....	II-102
2.4.2.4	Rumah Tangga/Pelanggan yang Menggunakan Listrik .....	II-103
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi .....	II-104
2.4.3.1	Angka Kriminalitas .....	II-104
2.4.3.2	Lama Proses Perizinan .....	II-107
2.4.3.3	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah .....	II-108
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia .....	II-111
2.4.4.1	Rasio Lulusan S1/S2/S3 .....	II-111
2.4.4.2	Rasio Ketergantungan .....	II-111



2.4.4.3	Indek Pembangunan Manusia ( IPM ) .....	II-112
2.4.5	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .....	II-113
2.4.6	Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	II-115
2.4.7	Capaian Indikator Pembangunan .....	II-136
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2016-2020 .....	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III-1
3.1.1.1	Pendapatan Daerah .....	III-7
3.1.1.2	Belanja Daerah .....	III-16
3.1.1.3	Pembiayaan Daerah .....	III-18
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (2016-2020) .....	III-24
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III-26
3.2.2	Analisis Pembiayaan .....	III-27
3.3	Kerangka Pendanaan .....	III-31
3.3.1	Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama .....	III-31
3.3.2	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan .....	III-32
3.3.3	Penghitungan Kerangka Pendanaan .....	III-41
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .....	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan .....	IV-1
4.1.1	Permasalahan Pembangunan Secara Makro .....	IV-1
4.1.2	Permasalahan Pembangunan menurut Urusan Pemerintahan .....	IV-3
4.1.2.1	Permasalahan Pembangunan Daerah pada Pelayanan Dasar .....	IV-4
4.1.2.2	Permasalahan Pembangunan Daerah Bukan Pelayanan Dasar .....	IV-6
4.1.2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pilihan .....	IV-10
4.1.2.4	Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan .....	IV-11
4.1.2.5	Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .....	IV-12
4.1.2.6	Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan .....	IV-13
4.2	Isu Strategis .....	IV-13
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	V-1
5.1	Visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 .....	V-1
5.2	Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 ...	V-3
5.3	Tujuan .....	V-5
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....	VI-1
6.1	Strategi Pembangunan Daerah .....	VI-1
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	VI-9
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....	VIII-1
8.1	Indikator Kerja Utama .....	VIII-1
8.2	Indikator Kinerja Daerah .....	VIII-5
BAB IX	PENUTUP .....	IX-1



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Menurut Administrasi Pemerintahan .....	II-3
Tabel 2.2	Proporsi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya .....	II-5
Tabel 2.3	Rencana Peruntukan Pola Ruang .....	II-5
Tabel 2.4	Sempadan Sungai di Kabupaten Padang Pariaman .....	II-8
Tabel 2.5	Potensi dan Penyebaran Objek Wisata Menurut Jenisnya di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 .....	II-20
Tabel 2.6	Sistem Pusat Kegiatan dan Fungsinya di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman .....	II-25
Tabel 2.7	Rencana Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman .....	II-25
Tabel 2.8	Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-27
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 .....	II-27
Tabel 2.10	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-29
Tabel 2.11	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 .....	II-29
Tabel 2.12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2020 .....	II-30
Tabel 2.13	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 .....	II-31
Tabel 2.14	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-35
Tabel 2.15	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-36
Tabel 2.16	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-37
Tabel 2.17	Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Pengeluaran terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 ...	II-39
Tabel 2.18	Hasil Perhitungan Analisis Shift Share dan Location Quotion (LQ) Struktur Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman .	II-40
Tabel 2.19	Nilai PDRB Per Kapita di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-42
Tabel 2.20	Garis Kemiskinan dan Penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 .....	II-44
Tabel 2.21	Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 .....	II-46
Tabel 2.22	Persentase Tingkat Kesejahteraan Penduduk di Kabupaten Padang Pariaman .....	II-46
Tabel 2.23	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I di	



	Kabupaten Padang Pariaman Tahun .....	II-47
Tabel 2.24	Rata Rata Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-50
Tabel 2.25	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-50
Tabel 2.26	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-51
Tabel 2.27	Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-51
Tabel 2.28	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Enam Unit Pelayanan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-55
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Pelayanan Urusan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-57
Tabel 2.30	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-58
Tabel 2.31	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-59
Tabel 2.32	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-59
Tabel 2.33	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Dasar Menengah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-61
Tabel 2.34	Rasio Ketersediaan Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-61
Tabel 2.35	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-62
Tabel 2.36	Angka Kelulusan Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-63
Tabel 2.37	Angka Putus Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-63
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-64
Tabel 2.39	Perkembangan Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-66
Tabel 2.40	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-67
Tabel 2.41	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-67
Tabel 2.42	Angka Kelahiran dan Kematian Bayi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-68
Tabel 2.43	Perkembangan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-68
Tabel 2.44	Persentase Balita Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-70
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-71
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020.....	II-73
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-74





Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-75
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-76
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-77
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-79
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-81
Tabel 2.53	Indikator dan Capaian Kinerja dari Sasaran Terwujudnya Ketersediaan Pangan Masyarakat .....	II-81
Tabel 2.54	Perkembangan Skor PPH, KOnsumsi Protein dan Energi dari Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-82
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-83
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-85
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-86
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Urusan Keluarga dan keluarga Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-86
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-87
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-88
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-89
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-90
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2020 .....	II-91
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-92
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020.....	II-92
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-93
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-94
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-95
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Urusan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-96
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-97
Tabel 2.71	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-98
Tabel 2.72	Luas Panen Produksi Padi dan Produktifitas Padi di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-98
Tabel 2.73	Perkembangan Komoditi Hortikultura di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-99



Tabel 2.74	Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-99
Tabel 2.75	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub. Sektor Peternakan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-100
Tabel 2.76	Populasi dan Pemotongan Ternak di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-100
Tabel 2.77	Populasi dan Pemotongan Unggas di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-102
Tabel 2.78	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-103
Tabel 2.79	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-104
Tabel 2.80	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-105
Tabel 2.81	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-106
Tabel 2.82	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020.....	II-107
Tabel 2.83	Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-109
Tabel 2.84	Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-110
Tabel 2.85	Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-110
Tabel 2.86	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Penelitian Tahun 2020 .....	II-111
Tabel 2.87	Daftar Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016 – 2020 .....	II-112
Tabel 2.88	Perbandingan Target dan Realisasi 2020 .....	II-113
Tabel 2.89	Angka KOnsumsi Rumah Tangga Perkapita Sebulan di Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-114
Tabel 2.90	Persentase KOnsumsi Rumah Tangga Non Pangan di Kabupaten Padang Pariaman .....	II-114
Tabel 2.91	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-115
Tabel 2.92	Nilai Tukar Petani danSub Sektor Pendukungnya di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 .....	II-115
Tabel 2.93	Nilai Produktivitas Total Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-116
Tabel 2.94	Banyaknya Kasus Kriminalitas dan Gangguan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-119
Tabel 2.95	Standar Waktu Pelayanan Perizinan di Kabupaten Padang Pariaman .....	II-121
Tabel 2.96	Rincian Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 – 2020 .....	II-123
Tabel 2.97	Rincian Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 – 2020 Target SPM Pendidikan .....	II-124
Tabel 2.98	Rasio Ketergantungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 – 2020 .....	II-125
Tabel 2.99	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 .....	II-126
Tabel 2.100	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Peringkat Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 .....	II-127



	Realisasi dan Capaian SPM Kesehatan .....	
Tabel 2.101	Capaian Indikator TPP .....	II-128
Tabel 2.102	Target SPM Pendidikan .....	II-130
Tabel 2.103	Realisasi SPM Pendidikan Tahun 2020 .....	II-131
Tabel 2.104	Target SPM Kesehatan .....	II-133
Tabel 2.105	Realisasi dan Capaian SPM Kesehatan .....	II-134
Tabel 2.106	Target Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum .....	II-139
Tabel 2.107	Realisasi Capaian Pekerjaan Umum .....	II-139
Tabel 2.108	Target Capaian SPM Bidang perumahan Rakyat .....	II-141
Tabel 2.109	Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat .....	II-141
Tabel 2.110	Target Indikator SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	II-142
Tabel 2.111	Realisasi Penerapan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	II-142
Tabel 2.112	Target SPM Bencana Daerah .....	II-145
Tabel 2.113	Realisasi Penerapan SPM Bencana Daerah Tahun 2020 .....	II-146
Tabel 2.114	Target Penerapan SPM Sosial .....	II-148
Tabel 2.115	Realisasi Penerapan Penerapan SPM Sosial .....	II-148
Tabel 2.116	Perhitungan Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Luar Panti .....	II-149
Tabel 2.117	Perhitungan Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Luar Panti .....	II-149
Tabel 2.118	Perhitungan Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Luar Panti .....	II-150
Tabel 2.119	Perhitungan Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Luar Panti .....	II-150
Tabel 2.120	Perhitungan Korban Bencana kabupaten yang Memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial .....	II-150
Tabel 2.121	Hasil Analisis Gambaran Umum KOndisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman .....	II-152
Tabel 3.1 (Tabel T-C.2)	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 (%) .....	III-2
Tabel 3.2	Rata-Rata Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-7
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-5
Tabel 3.4	Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-8
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-9
Tabel 3.6	Realisasi dan Proporsi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-9
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-10
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-11
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020..	III-11
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Lain Lain PAD yang Sah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 .....	III-12



Tabel 3.11	Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-15
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-15
Tabel 3.13	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-17
Tabel 3.14	Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-18
Tabel 3.15	Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-18
Tabel 3.16	Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-19
Tabel 3.17	Rata rata Pertumbuhan Neraca Daerah (dalam rupiah) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-20
Tabel 3.18	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-23
Tabel 3.19	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-27
Tabel 3.20	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-28
Tabel 3.21	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-28
Tabel 3.22	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-29
Tabel 3.23	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	III-30
Tabel 3.24 (T-C.8)	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 .....	III-34
Tabel 3.25	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 .....	III-38
Tabel 3.26	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 (%) .....	III-41
Tabel 3.27	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 .....	III-42
Tabel 4.1	Target Kinerja Nasional Tahun 2024 dalam RPJMN 2020-2024 .....	IV-17
Tabel 5.1	Keselaran Visi RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 .....	V-3
Tabel 5.2	Keselaran Misi RPJMN 2020-2024, RPJMD PROVINSI 2021-2026 RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 .....	V-4
Tabel 5.3	Tujuan dan Sasaran Misi I .....	V-6
Tabel 5.4	Tujuan dan Sasaran Misi II .....	V-7
Tabel 5.5	Tujuan dan Sasaran Misi III .....	V-9
Tabel 5.6	Tujuan dan Sasaran Misi IV .....	V-10
Tabel 5.7	Tujuan dan Sasaran Misi V .....	V-11
Tabel 5.8	Tujuan dan Sasaran Misi VI .....	V-13
Tabel 5.9	Tujuan dan Sasaran Misi VII .....	V-15
Tabel 5.10	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2021-2026 .....	V-16
Tabel 5.11 (T.C-11)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 .....	V-36



Tabel 5.11	Persandingan Tujuan dan Sasaran Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Padang Pariaman	V-43
Tabel 6.1 (T-C.12)	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Padang Pariaman .....	VI-2
Tabel 6.2 (T-C.13)	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 .....	VI-10
Tabel 6.3	Persandingan Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Padang Pariaman .....	VI-15
Tabel 7.1 (T.C-15)	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 .....	VII-3
Tabel 7.2 (T-C.16)	Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 ...	VII-4
Tabel 8.1 (T- C.17)	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman .....	VIII-2
Tabel 8.2 (T-C.18)	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman .....	VIII-5



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 .....	I-4
Gambar 1.2	Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I-9
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Padang Pariaman .....	II-2
Gambar 2.2	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman .....	II-2
Gambar 2.3	Sebaran Objek Wisata Kabupaten Padang Pariaman .....	II-22
Gambar 2.4	Piramida Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 .....	II-28
Gambar 2.5	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 .....	II-29
Gambar 2.6	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 .....	II-30
Gambar 2.7	Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2020 .....	II-31
Gambar 2.8	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 .....	II-38
Gambar 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) Kabupaten Padang Pariaman .....	II-33
Gambar 2.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) Kabupaten Padang Pariaman .....	II-34
Gambar 2.11	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 (%). .....	II-35
Gambar 2.12	Laju Inflasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-41
Gambar 2.13	Indikator Makro Ekonomi yang ditunjukkan melalui Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-43
Gambar 2.14	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Pariaman dan Sumatera Barat Tahun 2016-2020 .....	II-45
Gambar 2.15	Persentase penduduk miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat .....	II-45
Gambar 2.16	Grafik Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 .....	II-47
Gambar 2.17	Angka Kriminalitas dan Gangguan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-48
Gambar 2.18	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana dan Gangguan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-48
Gambar 2.19	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-49
Gambar 2.20	Jumlah dan Jenis Objek Wisata di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-52
Gambar 2.21	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-53
Gambar 2.22	Jumlah Hotel dan Penginapan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-117
Gambar 2.23	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 .....	II-117
Gambar 3.1	Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Khusus .....	III-16
Gambar 4.1	Misi Presiden 2020-2024 .....	IV-14



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Salah satu indikasi perencanaan yang baik adalah mengacu atau berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan pedoman dan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya.

Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Daerah Padang Pariaman telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 di dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010. Salah satu substansi strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tersebut adalah menetapkan **Visi daerah, yaitu: Padang Pariaman 2025 Unggul dibidang agribisnis dan perdagangan berdasarkan sumberdaya manusia yang berkualitas**, yang didalamnya memuat indikator dan target capaian kinerja. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2005-2010), Tahap II (2011-2015), Tahap III (2016-2021), Tahap IV (2021-2026).

Dengan dilantikannya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Sumatera Barat, maka Suhatri Bur, SE, MM dan Drs. Rahmang, MM resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk periode 2021-2024. Salah satu





target oleh Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman setelah dilantik adalah segera menyusun RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 meskipun perodesasi masa pemerintahan adalah 2021-2024. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, yang menyatakan bahwa perodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga perodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah 2021-2026.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, Rencana Tata Ruang Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode dari tahun 2022 hingga tahun 2026 sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Selanjutnya penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 70 Ayat (2), ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. Pada Pasal 71 dijelaskan bahwa apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), anggota DPRD dan Kepala Daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang mana proses penyusunannya melibatkan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun ini juga telah

diintegrasikan dengan rencana tata ruang serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta disesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, merupakan Tahap IV (keempat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya, disusun berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas bawah dan bawah atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari nagari, kecamatan dan kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

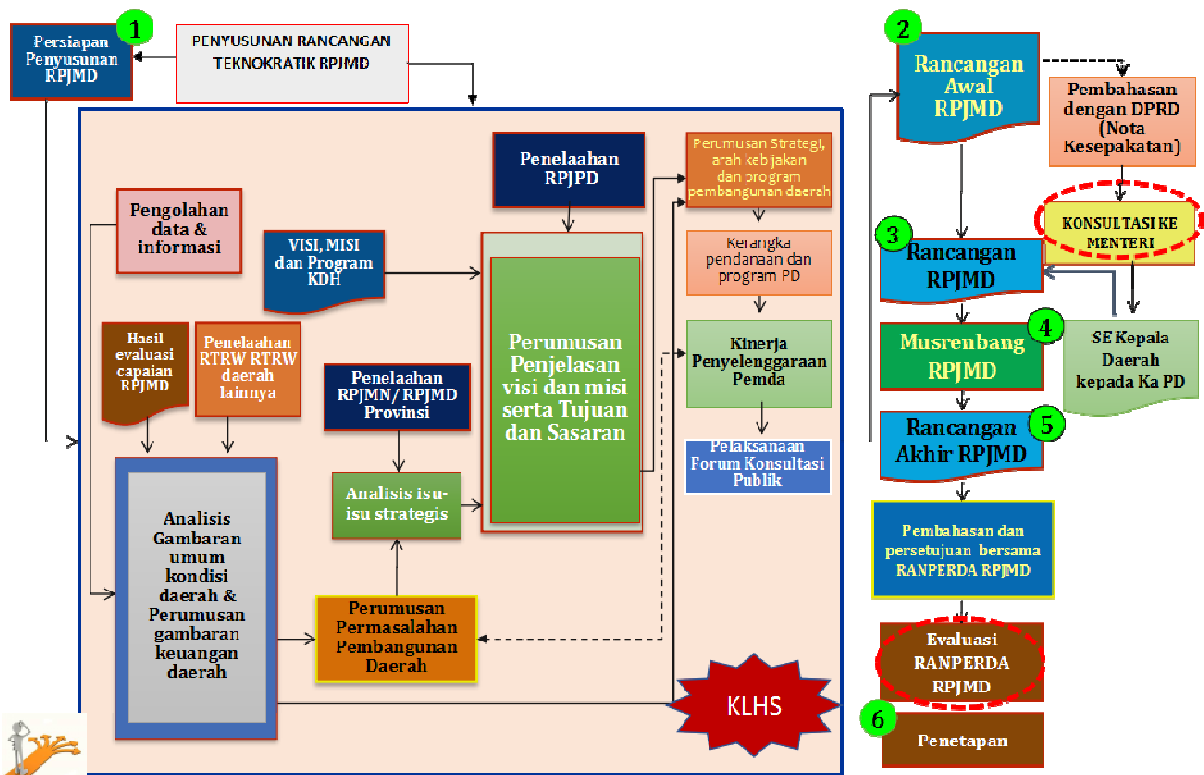
1. Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Terakhir, pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yang mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kepala daerah

menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders atau pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman**  
**Tahun 2021-2026**



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. Media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. Alat atau instrumen pengendalian bagi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Bapelitbangda;

5. Alat ukur tingkat pencapaian kinerja kepala OPD selama 5 (lima) tahun;
6. Pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan provinsi;
7. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan penyaluran Bantuan Sosial dan/atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD;
  33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

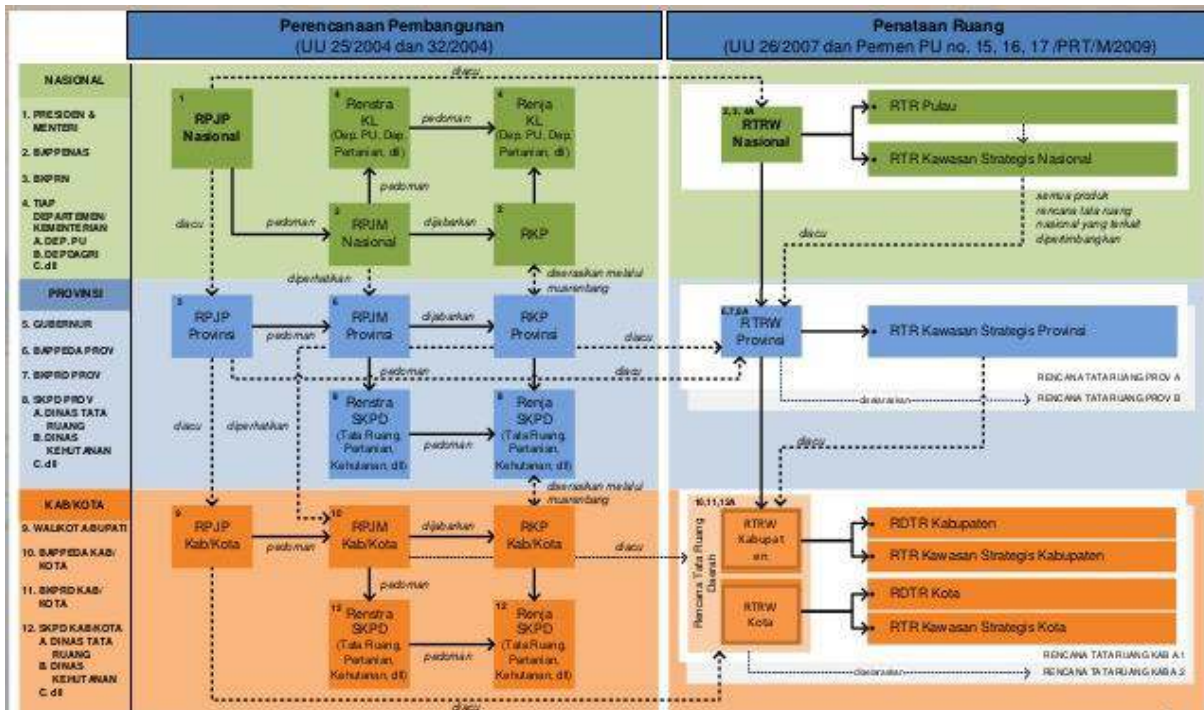
- Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
  35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Padang pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 2).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040. Agar RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain (Kabupaten Agam, Solok, Tanah Datar, Kota Padang dan Kota Pariaman).

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari Gambar 1.2.

**Gambar 1.2**  
**Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

### 1.3.1 Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telah dilakukan terhadap isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Padang Pariaman juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

### 1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 juga harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Padang Pariaman.

### 1.3.3 Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD penjabaran dari tahap IV RPJPD. Pada Tahapan ke IV ini, Kabupaten Padang Pariaman harus



sudah dapat mewujudkan Visi jangka panjang daerah, yaitu “Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas”. Upaya-upaya untuk mewujudkan hal tersebut diarahkan kepada peningkatan produktifitas, dan efisiensi usaha disemua sektor ekonomi. Struktur perekonomian daerah sudah mencapai tahap industrialisasi dengan tekanan pada agroindustri (kakao). Sektor lain, seperti perdagangan, UKM sudah berkembang dengan pesat, termasuk kegiatan perikanan, peternakan, dan pertanian, industri kecil maupun besar dan lainnya.

Guna mewujudkan agribisnis dan perdagangan, maka andil serta para pelaku lokal diberi kesempatan seluas-luasnya, sehingga mampu berkembang sejajar dengan pengusaha dari luar daerah. Terobosan, dengan menjalin hubungan yang lebih intensif dengan dunia luar, dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki, termasuk menjadikan dunia luar menjadi pasar yang sangat strategis. Dengan demikian penyerapan tenaga kerja akan dapat dilakukan seluas-luasnya, sehingga masyarakat golongan miskin pada phase ini sudah pada angka terendah.

Pada phase ini tingkat pendidikan masyarakat sudah baik secara merata antar kecamatan, karena sarana dan prasarana pendidikan sudah tersedia dengan lengkap, demikian juga tingkat kesehatan sudah berada pada tingkat sangat baik. Dengan kondisi demikian, kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai titik tertinggi dan produktif (IPM 79,8).

#### **1.3.4 Hubungan RPJMD dengan RKPD**

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja perangkat daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat nagari, kecamatan, dan kabupaten. Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Prioritas pembangunan daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

### **1.3.5 Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

### **1.3.6 Hubungan RPJMD dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RTRW Kabupaten Padang Pariaman**

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Padang Pariaman juga harus mengacu kepada RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RTRW Kabupaten Padang Pariaman. Kesesuaian Rancangan Awal RPJMD dengan RTRW baik pada aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan struktur dan pola ruang pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan kata lain, pendekatan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

### **1.4.1 Maksud**

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

### 1.4.2 Tujuan

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, bertujuan antara lain:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Renstra perangkat daerah periode 2021-2026;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021- 2026.
5. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman periode 2021-2026.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri atas 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Padang Pariaman secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) geografi dan demografi, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) pelayanan umum, serta (4) daya saing daerah. sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah,

serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) kinerja keuangan masa lalu, (2) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta (3) kerangka pendanaan.

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.

### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam jangka menengah.

### **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

### **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

### **BAB IX PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman lima tahun kedepan.



## **BAB II**

# **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara astronomis, menurut data BPS Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021, Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°19'15.68" Lintang Selatan 0°48'59.868" Lintang Selatan dan 99°57'43.325" Bujur Timur 100°27'28.94" Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.343,09 Km<sup>2</sup> atau sekitar 3,20% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (42.012,89 Km<sup>2</sup>). Membentang di pesisir barat pulau Sumatera, Kabupaten Padang Pariaman memiliki kontur wilayah yang beragam mulai dari bibir pantai sampai dengan perbukitan. Titik tertinggi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman berada di Kecamatan Patamuan dengan tinggi wilayah mencapai 1925 mdpl. Batas wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Agam,
- Sebelah Selatan dengan Kota Padang,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar,
- Sebelah Barat dengan Kota Pariaman.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki garis pantai yang cukup panjang yaitu mencapai 42,11 Km, yang terbagi ke dalam wilayah enam kecamatan. Meskipun memiliki garis pantai yang cukup panjang, Padang Pariaman tidak memiliki banyak pulau. Sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 1999, tercatat hanya ada dua pulau kecil saja yang masih masuk ke wilayah Padang Pariaman.

Sesuai dengan Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka tahun 2021 yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 Kecamatan, dengan Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam memiliki wilayah paling luas, yakni 188,55 Km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Ulakan Tapakis memiliki luas terkecil, yakni 23,01 Km<sup>2</sup>. Ibukota Kabupaten Padang Pariaman berada di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung dengan luas wilayah 34,28 Km<sup>2</sup>.

Untuk lebih jelasnya wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman dan luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2.

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Administratif Kabupaten Padang Pariaman**



**Gambar 2.2**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman**





Kabupaten Padang Pariaman memiliki 103 nagari dan 600 korong, sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Administrasi Nagari. Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto yang mempunyai 12 (dua belas) nagari, sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki nagari adalah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung dan Batang Gasan yang hanya mempunyai 3 (tiga) nagari. Kecamatan VII Koto masih merupakan kecamatan yang memiliki korong terbanyak, yakni 66 korong, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, yakni 12 korong.

**Tabel 2.1**  
**Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Menurut Administrasi Pemerintahan**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Nagari	Nama Nagari	Jumlah Korong
1	Batang Anai	Pasar Usang	8	Sungai Buluh	58
2				Sungai Buluh Timur	
3				Sungai Buluh Barat	
4				Sungai Buluh Utara	
5				Sungai Buluh Selatan	
6				Kasang	
7				Ketaping	
8				Buayan Lubuk Alung	
9	Lubuk Alung	Lubuk Alung	9	Lubuk Alung	46
10				Sungai Abang Lubuk Alung	
11				Singguliang Lubuk Alung	
12				Salibutan Lubuk Alung	
13				Balah Hilia Lubuk Aluang	
14				Aie Tajun Lubuk Alung	
15				Pasie Laweh Lubuk Alung	
16				Sikabu Lubuk Alung	
17				Punggung Kasiak Lubuk Alung	
18	Sintuk Toboh Gadang	Sintuk	5	Sintuk	29
19				Toboh Gadang	
20				Toboh Gadang Selatan	
21				Toboh Gadang Timur	
22				Toboh Gadang Barat	
23	Ulakan Tapakis	Ulakan	8	Ulakan	53
24				Padang Toboh Ulakan	
25				Sungai Gimba Ulakan	
26				Seulayat Ulakan	
27				Manggopoh Palak Gadang	
28				Ulakan	
29				Sandi Ulakan	
30				Kampung Galapuang Ulakan	
31	Nan Sabaris	Pauah Kamba	9	Kapalo Koto	46
32				Pauah Kamba	
33				Padang Bintungan	
34				Padang Kandang Pulau Aie	
35				Padang Bintuang	
36				Kurai Taji	
37				Kurai Taji Timur	
38				Sunua	
39				Sunua Tengah	
40	2 X 11 Enam Lingkung	Sicincin	3	Sicincin	12
41				Lubuk Pandan	
42				Sungai Asam	
43	Enam Lingkung	Pakandangan	5	Koto Tinggi	27
44				Parit Malintang	
45				Pakandangan	
46				Gadua	
47				Toboh Ketek	
48	2 X 11 Kayu Tanam	Kayu Tanam	4	Kayu Tanam	21





No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Nagari	Nama Nagari	Jumlah Korong
49	VII Koto	Sungai Sariak	12	Guguak	66
50				Anduriang	
51				Kapalo Hilalang	
52				Balah Aie	
53				Balah Aie Utara	
54				Balah Aie Timur	
55				Sungai Sariak	
56				Ambuang Kapua Sungai Sariak	
57				Bisati Sungai Sariak	
58				Lareh Nan Panjang Sei Sarik	
59				Limpato Sungai Sariak	
60				Lurah Ampalu	
61				Lareh Nan Panjang	
62	Lareh Nan Panjang Selatan				
63	Lareh Nan Panjang Barat				
64	Patamuan	Tandikek	6	Tandikek	41
65				Tandikek Utara	
66				Tandikek Selatan	
67				Tandikek Barat	
68				Sungai Durian	
69				Kampung Tanjung Koto Mambang Sungai Durian	
70	Padang Sago	Padang Sago	6	Koto Baru	24
71				Koto Dalam	
72				Koto Dalam Barat	
73				Koto Dalam Selatan	
74				Batu Kalang	
75				Batu Kalang Utara	
76	V Koto Kampung Dalam	Kampung Dalam	8	Campago	49
77				Campago Barat	
78				Campago Selatan	
79				Sikucua	
80				Sikucua Utara	
81				Sikucua Timur	
82				Sikucua Tengah	
83				Sikucua Barat	
84	V Koto Timur	Kudu Gantiang	4	Kudu Gantiang	28
85				Kudu Gantiang Barat	
86				Limau Puruik	
87				Gunuang Padang Alai	
88	Sungai Limau	Sungai Limau	4	Kuranji Hilir	28
89				Pilubang	
90				Guguak Kuranji Hilir	
91				Koto Tinggi Kuranji Hilir	
92	Batang Gasan	Gasan Gadang	3	Malai V Suku	15
93				Malai V Suku Timur	
94				Gasang Gadang	
95	Sungai Geringging	Sungai Geringging	4	Kuranji Hulu	27
96				Malai III Koto	
97				Batu Gadang Kuranji Hulu	
98				Sungai Sirah Kuranji Hulu	
99	IV Koto Aur Malintang	Batu Basa	5	III Koto Aur Malintang	30
100				III Koto Aur Malintang Utara	
101				III Koto Aur Malintang Selatan	
102				III Koto Aur Malintang Timur	
103				Balai Baiak Malai III oto	

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2020

### 2.1.2 Pola Ruang Wilayah

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten terdiri rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Proporsi rencana pola ruang Kabupaten Padang Pariaman untuk

kedua fungsi tersebut yaitu peruntukan kawasan lindung 31.839 Ha (23,7%) dan proporsi kawasan budidaya 102.469 Ha (76,3%).

**Tabel 2.2**  
**Proporsi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya**

Rencana Peruntukan Fungsi Kawasan	Luas	
	(Ha)	%
Peruntukkan Fungsi Kawasan Lindung	31.839	23,7
Peruntukan Fungsi Kawasan Budidaya	102.516	76,3
<b>Luas Kabupaten</b>	<b>134.356</b>	<b>100</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040, (2020)

Rencana peruntukan ruang Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan pembagian fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budidaya yaitu seperti terlihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Rencana Peruntukan Pola Ruang**

No	Peruntukan Lahan	Luas (Ha)	%
<b>A</b>	<b>Kawasan Peruntukan Lindung</b>	<b>31.839</b>	<b>23,7</b>
1	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	13.133	9,67
	a. Kawasan Hutan Lindung	13.133	9,78
2	Kawasan Perlindungan Setempat	3.265	2,42
	a. Kawasan Sempadan Pantai	362	0,26
	b. Kawasan Sempadan Sungai	2.903	2,16
3	Kawasan Konservasi	15.154	11,28
	a. Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam)	14.156	2,89
	b. Kawasan Perlindungan Alam (Taman Wisata Alam)	1.001	0,75
4	Kawasan Lindung Geologi		
	a. Kawasan Sempadan Mata Air	118	0,09
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	167	0,12
<b>B</b>	<b>Kawasan Peruntukan Budidaya</b>	<b>102.516</b>	<b>76,3</b>
1	Kawasan Hutan Rakyat	2.287	1,71
2	Kawasan Pertanian	78.918	60,02
	a. Kawasan Tanaman Pangan	19.091	14,09
	b. Kawasan Hortikultura	3.922	2,60
	c. Kawasan Perkebunan	55.929	43,33
3	Kawasan Pertambangan dan Energi		
4	Kawasan Peruntukan Industri	465	0,34
5	Kawasan Pariwisata	122	0,09
6	Kawasan Permukiman	16.797	12,57
	a. Kawasan Permukiman Perdesaan	8.200	5,75
	b. Kawasan Permukiman Perkotaan	11.036	6,82
7	Kawasan Pertahanan dan Keamanan		
8	<b>Peruntukan Lainnya</b>		
	a. Kawasan Transportasi	223	0,17
	b. Kawasan Sumber Daya Air	1.243	0,92
	<b>LUAS TOTAL</b>	<b>134.356</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040, (2020)

### 2.1.2.1 Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung adalah kawasan yaitu kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah.



A. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Dengan demikian kawasan hutan lindung (HL) adalah kawasan hutan yang memiliki karakteristik yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung tersebut dilakukan dengan memelihara dan mempertahankan tutupan vegetasi hutan kawasan hutan lindung.

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK 35/Menhut/-II/2013 yang tersebar di Kecamatan Sungai Geringging, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Patamuhan, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai dengan luas 13.133 Ha.

B. Kawasan Perlindungan Setempat

1. Sempadan Pantai

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2015 tentang batas sempadan pantai, ditetapkan dengan kriteria Kawasan Sempadan pantai yang memanjang di pesisir pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Penetapan batas sempadan pantai ini dilakukan untuk melindungi dan menjaga:

- a. Kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan wilayah-wilayah kecil dari ancaman bencana alam;
- c. Alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
- d. Alokasi ruang untuk saluran air dan limbah

Kabupaten Padang Pariaman memiliki kawasan sempadan pantai yang memanjang pada pesisir pantai yang meliputi Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan Batang Gasan seluas kurang lebih 362 Ha.

## 2. Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan terhadap kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Tujuan ditetapkan kawasan sempadan sungai adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Kriteria kawasan sempadan sungai adalah sekurang-kurangnya (Permen PU No. 28 Tahun 2015): Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) km<sup>2</sup> atau lebih, garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

- a. Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) km<sup>2</sup>, garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- b. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas :
  - sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) km<sup>2</sup>; dan
  - sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) km<sup>2</sup>.
  - Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
  - Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Kawasan sempadan sungai yang perlu dilindungi di Kabupaten Padang Pariaman seluas 2.903 Ha. Sungai terbesar yang melewati Kabupaten Padang Pariaman hanya memiliki luas DAS 382,8 km<sup>2</sup> sehingga sempadan sungai di Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan 50 m dari tepi sungai.

**Tabel 2.4**  
**Sempadan Sungai di Kabupaten Padang Pariaman**

No	Nama Sungai	Daerah Yang Dilalui (Kecamatan)	Debit (M/dt)		Panjang Sungai (Km)	Sempadan Sungai (m)
			Max	Min		
1	Batang Sungai Limau	Sungai Geringging - Sungai Limau	45	7,77	14.00	50
2	Batang Kamumuan	Sungai Geringging - Sungai Limau	-	-	12.00	50
3	Batang Paingan	Sungai Geringging - Sungai Limau	36	3,98	16.00	50
4	Batang Gasan	IV Koto Aur Malintang - Sungai Limau - Batang Gasan	60	9,2	20.00	50
5	Batang Sungai Sirah	Sungai Geringging - Sungai Limau	45	7,32	18.00	50
6	Batang Naras	V Koto Kp. Dalam - Sungai Limau	33,8	0,91	20.00	50
7	Batang Piaman	VII Koto Sungai Sarik - Pariaman	19,4	2,62	12.00	50
8	Batang Mangau	Patamuan - VII Koto Sungai Sarik - Nan Sabaris	55,9	7,57	46.00	50
9	Batang Ulakan	2 X 11 Enam Lingkung, Nan Sabaris, Ulakan Tapakis	60	36	19.00	50
10	Batang Anai	2 X 11 Kayu Tanam - Lubuk Alung - Batang Anai	52,96	37,58	54.60	50
11	Batang Tapakis	Lubuk Alung - Sintuk Toboh Gadang - Nan Sabaris - Ulakan Tapakis	-	-	46.00	50

Sumber : RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040, (2020)

### C. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- Kawasan suaka alam berupa cagar alam dengan luas kurang lebih 14.156 hektar, meliputi Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Batang Anai, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
- Kawasan pelestarian alam berupa taman wisata alam dengan luas kurang lebih 1.001 hektar, meliputi Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Batang Anai.
- Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil berupa Taman Pesisir Batang Gasan di Kecamatan Batang Gasan. Luas kawasan tersebut dicadangkan lebih kurang 708 hektar.

### D. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan fenomena yang ada, Kabupaten Padang Pariaman rentan akan bencana. Bencana yang dikategorikan tinggi di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

- Kawasan rawan bencana tsunami dan gelombang ekstrim dan abrasi, meliputi seluruh kawasan pesisir di kecamatan Batang Anai, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan Batang Gasan.

- b. Kawasan rawan letusan gunung api meliputi Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Patamuan, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Padang Sago, dan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.
- c. Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai limau, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang.

#### 1) Kawasan Rawan Gempa

Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar (patahan), aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan. Karakter bahaya berupa guncangan gempa yang dapat dirasakan di daerah pedataran dan perbukitan dengan percepatan gempa 0,25-0,60 g. yang akan mengancam seluruh wilayah yang merupakan areal terbangun dan tidak terbangun. Wilayah Kabupaten Padang Pariaman merupakan zona gempa paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat, terutama di daerah Sungai Limau, ke Tikau Utara berbatasan dengan Sungai Geringging Bagian Barat serta seluruh daerah Pesisir Padang Pariaman. Adanya aktivitas gempa tersebut menyebabkan Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah rawan gempa. Hal ini dapat dilihat pada peta zona gempa, di mana Kabupaten Padang Pariaman merupakan zona gempa dengan skala intensitas menempati zona V dan VIII dengan *episentrum* yang relatif dangkal dan sedang.

Berdasarkan mikro zonasi gempa bumi yang dikelompokkan atas empat tingkatan klasifikasi berikut:

- a. Zona amplifikasi sangat tinggi (>9 kali) adalah daerah yang memiliki kerentanan paling tinggi terhadap terjadinya kerusakan wilayah jika terlanda gempa bumi. Zona ini memiliki penguatan/amplifikasi getaran gempa bumi sangat tinggi (diatas 9 kali). Pada zona ini, lapisan sedimen lunaknya (*soft soil*) paling tebal.
- b. Zona amplifikasi tinggi (7-9 kali) adalah daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap terjadinya kerusakan wilayah jika terlanda gempa bumi. Zona ini memiliki penguatan/amplifikasi getaran gempa bumi tinggi (7-9 kali). Pada zona ini, lapisan sedimen lunaknya (*soft soil*) tebal.
- c. Zona amplifikasi sedang (4-6 kali) adalah daerah yang memiliki kerentanan sedang terhadap terjadinya kerusakan wilayah jika terlanda gempa bumi. Zona ini memiliki penguatan/amplifikasi getaran gempa bumi sedang (4-6 kali). Pada zona ini, lapisan sedimen lunaknya (*soft soil*) tidak terlalu tebal.
- d. Zona amplifikasi rendah (1-3 kali) adalah daerah yang memiliki kerentanan rendah terhadap terjadinya kerusakan wilayah jika terlanda

gempa bumi. Zona ini memiliki penguatan/amplifikasi getaran gempa bumi rendah (1-3 kali).

## 2) Kawasan Rawan Bencana Tsunami, Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Ancaman dari tsunami dan gelombang ekstrem dan abrasi adalah seluruh wilayah pesisir. Kondisi Kabupaten Padang Pariaman yang mempunyai perairan di bagian barat merupakan salah satu wilayah yang diperkirakan akan mendapatkan bencana tsunami. Adapun prakiraan wilayah berdasarkan pengelompokan jangkauan tsunami sebagai berikut:

- a. Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tinggi, adalah daerah yang memiliki resiko ancaman terhadap tsunami (dalam hal tinggi dan jangkauan genangan). Kawasan ini relatif memiliki potensi paling besar dalam hal kerusakan atau kehancuran aset yang akan ditimbulkan apabila terlanda tsunami serta memiliki ancaman terhadap resiko keselamatan penduduk lebih parah. Karakteristik pantai di kawasan ini sebagian merupakan pantai berpasir dengan morfologi landai dan relatif rendah dengan bentuk pantai lurus, sedangkan sebagian lagi merupakan pantai berbatu dengan morfologi tinggi dengan bentuk pantai berteluk. Permukiman dan aktivitas penduduk pada kawasan ini cukup padat dengan jarak dari garis pantai kurang dari 50 meter dari garis pantai. Kawasan kerawanan tinggi meliputi sepanjang pantai di daerah penelitian dengan elevasi kurang dari 5 meter di atas permukaan laut.
- b. Kawasan Rawan Bencana Tsunami Menengah adalah kawasan dengan potensi resiko tsunami lebih rendah dari kawasan tinggi. Kawasan ini relatif memiliki potensi kerusakan aset lebih kecil dibanding dengan di daerah kawasan kerawanan tinggi. Kawasan menengah meliputi daerah dengan garis ketinggian 5 meter hingga 7 meter di atas permukaan air laut dengan kemiringan lereng cukup terjal.
- c. Kawasan Rawan Bencana Tsunami Rendah adalah daerah yang memiliki potensi kerusakan paling kecil dibandingkan kawasan lainnya. Rute evakuasi dan lokasi pengungsian sementara dapat diarahkan ke kawasan ini apabila terjadi tsunami. Kawasan rawan tsunami rendah meliputi daerah dengan garis ketinggian hingga 9 meter di atas permukaan laut. Wilayah pesisir dengan morfologi curam dan relief tinggi termasuk ke dalam kawasan rawan tsunami rendah.

## 3) Kawasan Rawan Banjir

Penyebab dari bencana alam banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu dipengaruhi oleh curah hujan cukup tinggi, tipe dan karakter daerah, kondisi daerah tangkapan air sedikit, kurangnya kualitas dan kuantitas drainase dan kurangnya pengelolaan daerah konservasi. Secara umum bencana banjir yang terjadi adalah akibat kondisi drainase yang kurang baik sehingga saat hujan terjadi genangan serta terjadinya kerusakan hutan di hulu sungai yang mengakibatkan erosi dan banjir. Daerah rawan banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan V Koto Kampung Dalam,



Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Batang Gasan, dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.

4) Kawasan Rawan Gunung Berapi

Potensi rawan bencana gunung api di Kabupaten Padang Pariaman adalah keberadaan Gunung Api Tandikek. Kawasan rawan bencana Gunung Api Tandikek di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kecamatan Patamuan berada di KRB II dengan radius 8 Km yang berpotensi terlanda aliran awan panas, larva, dan lahar hujan serta berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu (pijar). Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam berada di KRB I dengan radius 8 km berpotensi terhadap lahar hujan serta hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu (pijar). Selanjutnya Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan VII Koto, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung berpotensi terhadap aliran lahar hujan.

E. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Penetapan pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli cagar budaya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Kawasan cagar budaya yang ada di Padang Pariaman meliputi:

- a. Bangunan cagar budaya adalah Surau Gadang Bintungan Tinggi, Makam Syekh Abdul Rahman dan Benteng Belanda di Kecamatan Nan Sabaris, Surau Atap Ijuk di Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Surau Gadang dan Makam Syekh Burhanuddin di Kecamatan Ulakan Tapakis, Masjid Taqwa Kampung Dalam di Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
- b. Makam cagar budaya adalah Makam Angku Sumanik di Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Gobah Tanah Dingin di Kecamatan Batang Anai, Makam Tuanku Johok, Mesjid Raya Batang Piaman dan Rumah Silaga Laga di Kecamatan V Koto Timur, Makam Syekh Tampek Talang di Kecamatan Sungai Geringging; dan
- c. Situs cagar budaya adalah Benteng Jepang Sarang Gagak dan Masjid Pakandangan di Kecamatan Enam Lingkung, Tugu Batas Renville, Makam Pejuang Empat Lima dan Benteng Jepang Sintuk di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Situs Batu Lesung Keramat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Benteng Jepang Pungguang Kasiak dan Surau Ambacang di Kecamatan Lubuk Alung, Benteng Jepang Sungai Limau di Kecamatan Sungai Limau, Benteng Jepang Paguh, Masjid Tuo Lubuk Bareh dan Masjid Tua Lurah Ampalu di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak.



#### F. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan sempadan mata air seluas lebih kurang 118 Ha berada di Kecamatan Patamuan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kecamatan Patamuan, Kecamatan Sungai Geringging, dan Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

#### G. Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis dan sub tropis, yang didominasi oleh beberapa jenis pohon yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Padang Pariaman meliputi Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Batang Gasan dengan luas lebih kurang 167 Ha.

### 2.1.2.2 Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya adalah kawasan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi budidaya sesuai dengan potensi pemanfaatan sumber daya alam. Kawasan budidaya meliputi berbagai fungsi meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman. Pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Padang Pariaman seluas 102.476 Ha mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong kawasan budidaya dan penyangga serta sesuai dengan Keputusan menteri Kehutanan Nomor 35 tahun 2013 tentang penunjukkan kawasan hutan.

#### A. Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan budidaya hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Kriteria penetapan kawasan hutan rakyat adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat di luar kawasan hutan suaka alam, hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi. Kawasan budidaya hutan merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan hasil hutannya yang bernilai ekonomis oleh masyarakat dengan tidak merusak fungsinya yang bersifat lindung dengan eksploitasi hasil hutan yang terbatas.

Alokasi peruntukkan kawasan hutan rakyat yaitu pada kawasan dengan kelerengan lebih dari 40% diluar kawasan hutan dan kawasan yang berdasarkan karakteristik lahannya berada pada lahan perbukitan yang rawan longsor kalau vegetasi hutannya tidak dipertahankan. Kawasan hutan rakyat dialokasikan di Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung,



Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Batang Anai, Kecamatan V Koto Sungai Sariak dengan Luas 2.287 Ha.

## B. Kawasan Pertanian

### 1. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan lahan pertanian di Kabupaten Padang Pariaman bersifat rekomendasi pemanfaatan lahan berdasarkan kesesuaian pemanfaatan lahannya sehingga yang dimaksud kedalam peruntukan lahan tertentu adalah pemanfaatan lahan dominan yang cocok untuk kondisi agroekologi kawasan. Perlu diperhatikan bahwa pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Padang Pariaman lebih bersifat campuran karena pengusahaannya umumnya berupa pertanian rakyat. Sehingga kalau dalam rencana peruntukan pertanian diarahkan untuk pemanfaatan tertentu artinya adalah peruntukan tersebut lebih dominan dan lebih sesuai dengan karakteristik agroekologi dengan tidak menutup kemungkinan cocoknya untuk berbagai jenis pemanfaatan pertanian lainnya.

Lahan yang diperuntukan untuk pertanian tanaman pangan seluas 19.091ha merupakan lahan pertanian sawah eksisting dan pengembangan lahan yang potensial. Pengembangan pertanian tanaman pangan secara ekstensifikasi masih dimungkinkan untuk ditingkatkan. Kawasan pertanian tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan.

### 2. Kawasan Hortikultura

Kawasan campuran lahan kering dan hortikultura adalah kawasan yang dominan sesuai ditanami berbagai tanaman pangan lahan kering seperti jagung, ubi dan hortikultura buah-buahan atau sayur-sayuran.

Khusus untuk kawasan pengembangan pertanian hortikultura buah-buahan pada lahan yang bergelombang berfungsi juga sebagai konservasi tata air dengan mengembangkan tanaman pepohonan yang mampu menjaga fungsi konservasi tata air seperti tanaman hortikultura buah-buahan bernilai ekonomis dan produksi khas daerah seperti manggis, lansek dan durian. Selain itu diarahkan juga budidaya tanaman kehutanan dan masih dimungkinkan budidaya perkebunan dengan vegetasi pohon seperti karet.

Kawasan hortikultura diarahkan pada hampir seluruh kecamatan dengan luas lahan 3.922 ha, meliputi Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Enam Lingkung.

### 3. Kawasan Perkebunan

Kawasan peruntukkan perkebunan di Kabupaten Padang Pariaman seluas 55.929 Ha. Peruntukan luas perkebunan umumnya berupa perkebunan rakyat.

Peruntukkan perkebunan tersebar di semua kecamatan. Zona Agroekologi perkebunan terdapat pada lahan yang berfungsi penyangga

dengan kelerengan yang dominan 25-40%. Tanaman perkebunan yang sesuai untuk dibudidayakan adalah tanaman dengan vegetasi yang dapat menjaga tata air dan erosi tanah.

#### 4. Kawasan Peternakan

Kawasan Peternakan adalah merupakan gabungan dari sentra-sentra peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen pembangunan di wilayah serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya dan keberadaan infrastruktur penunjang.

Pengembangan kawasan Peternakan dimaksudkan untuk menjamin ketahanan pangan nasional, pengembangan dan penyediaan bahan baku bioindustri, serta penyediaan bahan bakar nabati melalui peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, berdaya saing dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat di dalamnya secara berkeadilan.

Untuk menuju kondisi ideal yang diharapkan dalam pengembangan kawasan Peternakan, maka secara garis besar dapat dirumuskan langkah-langkah pengembangan kawasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penguatan perencanaan pengembangan kawasan
- b. Penguatan kerjasama dan kemitraan
- c. Penguatan sarana dan prasarana
- d. Penguatan sumber daya manusia
- e. Penguatan kelembagaan
- f. Percepatan adopsi teknologi bioindustri dan bioenergy
- g. Pengembangan industri hilir

Pengembangan Kawasan Peternakan, di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan, meliputi:

- a. Pengembangan sentra peternakan ternak besar dikembangkan berupa sapi dan kerbau di Kecamatan VII Koto, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan Patamuan, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang.
- b. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil berupa kambing dikembangkan di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan IV Aur Malintang, Kecamatan Sungai Geringging.
- c. Pengembangan sentra peternakan unggas berupa ayam buras, ayam ras dan itik di Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan Batang Anai, kecamatan Patamuan, Kecamatan Sungai limau dan Kecamatan Sungai Geringging, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam.
- d. Pengembangan kawasan integrasi kambing dan kakao, sapi dan kakao di Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

## 5. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 22.735 hektar, yang termasuk dalam kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura, tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.

### C. Kawasan Perikanan

Pengembangan Sektor Perikanan di Padang Pariaman diarahkan pada Budidaya Air Tawar, Budidaya Air Payau dan Rawa. Budidaya air tawar pada dasarnya dapat dilakukan di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Namun secara khusus pengembangan kegiatan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

- a. Perikanan tangkap di wilayah pesisir meliputi Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan V Koto Kampung, Kecamatan Sungai Limau, dan Kecamatan Batang Gasan.
- b. Perikanan budidaya air tawar di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kecamatan Patamuan, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dan Kecamatan Sungai Geringging.
- c. Kegiatan Budidaya Air Payau dan Rawa, di sepanjang pesisir pada 6 (enam) kecamatan pesisir Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan kegiatan budidaya air payau tersebut dapat dilakukan di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan V koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan Batang Gasan.
- d. Kawasan sentra Perbenihan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 366/KEP/BPP-2015, dimana Kawasan Inti Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, kawasan Pengembangan di Kecamatan Patamuan, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.
- e. Kawasan Minapolitan, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 315/KEP/BPP-2014, dengan Kawasan inti Nagari Sungai Asam Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, dan Kawasan Hinterland: Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Patamuan, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.
- f. Kegiatan perikanan dapat diintegrasikan dengan padi sawah dengan program minapadi yang dapat dikembangkan di seluruh kecamatan.
- g. Sarana penunjang kawasan perikanan meliputi:
  - 1) Pelabuhan perikanan serta sarana pendukungnya di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai limau dan Kecamatan Ulakan Tapakis
  - 2) Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Ulakan Tapakis dan Kecamatan Sungai Limau

3) Sentra pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Sungai Limau

D. Kawasan Pertambangan dan Energi

Potensi tambang yang ada di Kabupaten ada berupa mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan mineral batuan. Kawasan potensi pertambangan mineral logam berada di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan Patamuhan, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

Kawasan pertambangan mineral bukan logam berada di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kecamatan Patamuhan, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

Potensi pertambangan yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten berupa pertambangan mineral batuan meliputi:

- a. Tanah uruk berbatu yang terdapat di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kecamatan Patamuhan, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Sungai Geringging, dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang.
- b. Obsidian atau batu kaca yang terdapat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang dan Kecamatan Sungai Geringging.
- c. Perlit terdapat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang.
- d. Sirtukil yang terdapat di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kecamatan Patamuhan, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Limau dan tersebar di sepanjang sungai-sungai di Kabupaten Padang Pariaman.
- e. Andesit yang terdapat di Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan Patamuhan dan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Batang Gasan.
- f. Potensi batu kapur dan granit di bagian perbukitan timur Kabupaten.

Pengelolaan pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, oleh karena itu dalam RTRW Kabupaten perencanaan peruntukan kawasan pertambangan dan ketentuan pengendaliannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh RTRW Provinsi.

#### E. Kawasan Peruntukan Industri

Untuk mendukung fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman berpotensi untuk pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan industri manufaktur karena:

- Potensi hasil pertanian dan hasil hutan seperti manggis, coklat, kelapa dan lainnya membutuhkan peningkatan nilai ekonomi melalui pengolahan lebih lanjut bernilai tambah.
- Potensi pengolahan hasil laut.
- Potensi hasil kerajinan penduduk.
- Kabupaten Padang Pariaman berada pada posisi sentral di Provinsi Sumatera Barat dan dilalui oleh jalan lintas tengah Sumatera memudahkan akses menuju outlet regional di pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau sehingga Kabupaten Padang Pariaman dapat menjadi sentra industri pengolahan hasil pertanian berorientasi ekspor Provinsi Sumatera Barat.

Lokasi kawasan industri memenuhi kriteria lokasi: berada pada jalur akses regional (arteri primer atau kolektor primer) dan memenuhi persyaratan tapak industri seperti:

- a. Untuk industri yang polutif berjarak minimal 5 Km dari kawasan permukiman.
- b. Tidak berada pada lahan relatif datar bukan lahan pertanian produktif dan walaupun ada perlu disiapkan lokasi penggantian lahannya.
- c. Tersedia sumber air baku yang mencukupi.

Rencana pengembangan kawasan industri dikembangkan dalam bentuk kawasan peruntukan industri, lingkungan industri kecil, maupun industri rumah tangga dan berdasarkan skala berupa industri besar, industri sedang dan industri kecil.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Padang Pariaman seluas kurang lebih 465 (empat ratus enam puluh lima) hektar berada di Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam terdiri dari:

- a. Kawasan industri Padang dengan jenis industri besar seluas 339 ha.
- b. Kawasan Industri Padang Pariaman dengan lokasi berdekatan dengan PIP dengan jenis industri kecil dan menengah seluas 76 ha.
- c. Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) yang diarahkan pengembangannya sebagai berikut:
  1. Kawasan sentra industri coklat di Malibou Anai.
  2. Sentra IKM Alsintan, alat industri pertanian di VII Koto.
  3. Sentra IKM Makanan ringan di Kecamatan Sungai Garingging, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.
  4. Sentra IKM Alas kaki di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.
  5. Sentra IKM industri bordir dan sulam di Kawasan strategis PALAPA.
  6. Sentra IKM Kakao produktif di Kecamatan Sungai Geringging, Kecamatan Padang Sago dan Kecamatan Kampuang Dalam.
  7. Kawasan peruntukan industri sedang berupa industri pengolahan hasil laut dikembangkan di Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan

Sungai Limau dan Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Nan Sabaris.

8. Pengembangan industri rumah tangga diarahkan sebagai industri penunjang industri besar, industri sedang dan kegiatan pariwisata tersebar pada kawasan permukiman.

#### F. Kawasan Pariwisata

Rencana pengembangan jenis wisata yang dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas:

- a. Jenis Wisata Budaya dan Sejarah terutama wisata religi di Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintoga, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang serta pengembangan wisata budaya lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Jenis Wisata Alam berupa wisata bahari, dan wisata lansekap alam perbukitan dan pegunungan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten.
- c. Jenis Wisata Buatan meliputi pemandian Tirta Alami, Malibou Anai, gelanggang pacu kuda di Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak.

Kawasan peruntukan pariwisata Kabupaten Padang Pariaman terbagi atas empat Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yaitu:

- a. KSPD Ulakan Tapakis – Nan Sabaris dan sekitarnya sebagai kawasan wisata religi, kuliner, dan bahari, dengan program utama:
  1. Pemantapan Kawasan Makam Syech Burhanuddin sebagai Kawasan Wisata Religi dan Edukasi Islam di Sumatera Barat.
  2. Pemantapan Pantai Tiram sebagai Kawasan Rekreasi Pantai Keluarga dan Kuliner.
  3. Mengembangkan Kawasan Pulau Pieh sebagai Daerah Tujuan Wisata Bahari Kabupaten Padang Pariaman.
  4. Pengembangan Kawasan Ulakan Tapakis-Nan Sabaris sebagai Kawasan Wisata Ziarah dan Sejarah.
- b. KSPD Batang Anai Lubuk Alung dan sekitarnya sebagai pintu gerbang Sumatera Barat, rekreasi alam dan water-front resort, dengan program utama:
  1. Pemantapan Citra Kabupaten Padang Pariaman sebagai Gerbang Pintu Masuk Sumatera Barat (Minangkabau Internasional Airport).
  2. Pengembangan Adventure Tourism dan Rekreasi Wisata Alam Pegunungan Lubuk Alung dan Sekitarnya.
  3. Pencanaan Kawasan Pantai Gosong sebagai Kawasan Investasi Water-Front Resort berbasis Eco-lodge.
  4. Dermaga Wisata.

- c. KSPD Kayu Tanam – Patamuan dan sekitarnya sebagai kawasan rekreasi alam, dengan program utama:
1. Pengembangan Kawasan Malibou Anai Resort sebagai Kawasan Rekreasi Alam.
  2. Pembangunan Rest Area dan Sentra Kuliner di Sekitar Kawasan Malibou Anai Resort.
  3. Pencanangan Kawasan Malibou Anai Resort sebagai Kawasan MICE.
  4. Mempersiapkan Kawasan Malibou Anai Resort sebagai Jalur Distribusi Cable Car yang menghubungkan Padang Pariaman-Padang Panjang-Bukittinggi.
  5. Mengembangkan desa-desa di Kawasan Gunung Tigo sebagai Kawasan Rantai Desa Wisata.
- d. KSPD Enam Lingsung dan sekitarnya sebagai kawasan wisata sejarah, pendidikan dan budaya. Pengembangan Jalur Wisata Sejarah Enam Lingsung dan sekitarnya, dengan program utama:
1. Pengembangan sarana utilitas dan infrastruktur penunjang di Kecamatan Enam Lingsung.
  2. Pengembangan Kawasan Enam Lingsung dan sekitarnya sebagai Kawasan Pendidikan, Budaya dan Sejarah.
  3. Pengembangan Taman Wisata Kota di Kecamatan Enam Lingsung sebagai Ruang Terbuka Hijau Masyarakat.

Selain itu terdapat tiga Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

- a. KPPD Sungai Limau–Batang Gasan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pesisir berbasis relaksasi keluarga, dengan program utama :
1. Pengembangan Pantai Arta Indah dan Pantai Arta Permai sebagai Pantai Rekreasi Keluarga dan Outbound.
  2. Pengembangan Pantai Baselona sebagai Kawasan Wisata Pantai berbasis Rekreasi.
- b. KPPD Sungai Geringging–V Koto Kampung Dalam sebagai kawasan agrowisata dan ziarah, dengan program utama:
1. Pengembangan IV Koto Aur Malintang Dalam sebagai Kawasan Agrowisata.
  2. Pengembangan Jalur Wisata Ziarah dan Sejarah Sungai Geringging.
- c. KPPD Koto Timur-Sungai Sarik dan sekitarnya, dengan program utama :
1. Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Koto Timur-Sungai Sariak.
  2. Pengembangan Kawasan Wisata Agro-Culture.

Namun peruntukan kawasan pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan dengan luas lebih kurang 122 ha yang berada di Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam.

Daya tarik wisata Kabupaten Padang Pariaman berupa wisata alam, budaya, sejarah, serta minat khusus yang tersebar di seluruh kecamatan seperti yang dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.3.



**Tabel 2.5**  
**Potensi dan Penyebaran Objek Wisata Menurut Jenisnya**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020**

Kecamatan	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata	Jarak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Batang Anai	Aie Tajun Sarasah	Sungai Buluh	Wisata Alam	35 km dari BIM	
	Candi Bukit Raf	Pasar Usang	Wisata Budaya	11 KM dari BIM	
	Gosong Muaro Anai	Katapiang	Wisata Alam	7 KM dari BIM	
	Lubuak Kandih	Batang Anai	Wisata Alam	8 KM dari BIM	
	Panorama Bukik Apik	Lubuk Apik	Wisata Alam	-	
	Singa Pasar Usang	Batang Anai	Wisata Sejarah	8 KM Dari BIM	
2. Lubuk Alung	Aie Tajun Belek	Lubuk Alung	Wisata Alam	-	
	Aie Tajun Ngalau Aia Hilang	Lubuk Alung	Wisata Alam	-	
	Aie Tajun Pelangi	Lubuk Alung	Wisata Alam	-	
	Aie Tajun Nyarai	Salibutan	Wisata Alam	15 Km dari BIM	
	Goa Salibutan	Lubuk Alung	Wisata Alam	-	
	Lubuk Cimantung	Lubuk Alung	Wisata Alam	22 KM dari BIM	
	Mesjid IV Lingkung	Lubuk Alung	Wisata Sejarah	-	
	Pemandian Tapian Puti	Sikabu	Wisata Alam	16 KM dari BIM	
	Pincuran Tujuh	Lubuk Alung	Wisata Alam	21 KM dari BIM	
3. Sintuk	Benteng Jepang	Sintuk	Wisata Sejarah	29 KM dari BIM	
	Toboh	Makam Pejuang 45	Sintuk	Wisata Sejarah	-
	Gadang	Embung	Sintuk	Wisata Budaya	-
		Tugu Batas Renvill	Sintuk	Wisata Sejarah	-
4. Ulakan	Makam SiBohong	Ulakan	Wisata Sejarah	-	
	Tapakis	Makam Syekh Burhanudin	Ulakan	Wisata Budaya	15 KM dari BIM
		Makam Tuangku Nan Basaruang	Ulakan	Wisata Sejarah	-
		Mesjid Tapakis	Tapakis	Wisata Sejarah	15 KM dari BIM
		Pantai Tiram Ulakan	Ulakan	Wisata Pantai	11 KM dari BIM
		Pantai Tirta Bahari	Tapakis	Wisata Pantai	10 KM dari BIM
		Pulau Pieh	Ulakan	Wisata Bahari	23 KM dari BIM
		S. Besar Syekh Burhanudin	Ulakan	Wisata Sejarah	-
		S. Tua Syekh Burhanudin	Ulakan	Wisata Sejarah	-
		Surau Pondok	Ulakan	Wisata Sejarah	-
	Green Talao Park	Ulakan	Ekowisata dan Edukasi	-	
5. Nan Sabaris	Benteng Belanda	Pauh Kambar	Wisata Sejarah	-	
		Benteng Jepang	Pauh Kambar	Wisata Sejarah	-
		Ikan Larangan	Pauh Kambar	Wisata Minat khusus	24 KM dari BIM
		Benteng Belanda	Pauh Kambar	Wisata Sejarah	-
		Benteng Jepang	Pauh Kambar	Wisata Sejarah	-
		Ikan Larangan	Pauh Kambar	Wisata Minat	24 KM dari BIM
		Makam Syekh A.Rahman	Pauh Kambar	Wisata Sejarah	-
		Makam Syekh M.Hatta	Kapalo Koto	Wisata Sejarah	-
		Pantai Sunur	Sunur	Wisata Pantai	23 KM dari BIM
		Surau Bintangan Tinggi	Bintangan Tinggi	Wisata Sejarah	-
6. 2 X 11 Enam Lingkung	Benteng Jepang	Sicincin	Wisata Sejarah	-	

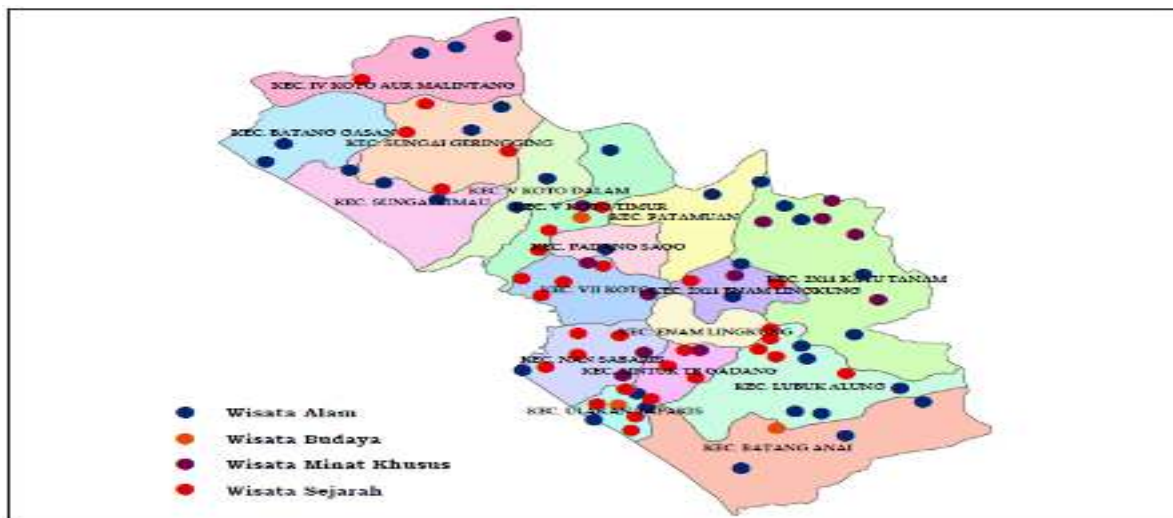


Kecamatan	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata	Jarak
	Ikan Gadang	Sicincin	Wisata Minat Khusus	33 KM dari BIM
	Panorama Puncak Kiambang	Sungai Asam	Wisata Alam	28 KM dari BIM
	Surau Atap Ijuk	Sicincin	Wisata Sejarah	-
	Surau Pejuang 45	Sicincin	Wisata Sejarah	-
	Terowongan Jepang	Sicincin	Wisata Sejarah	-
7. Enam Lingkung	Makam Gujarad	Gadur	Wisata Sejarah	28 KM dari BIM
	Masjid Pincuran Tujuh	Pakandangan	Wisata Sejarah	26,5 KM dari BIM
8. 2 X 11 Kayu Tanam	Air Terjun Batang Piaman	Kayu Tanam	Wisata Alam	-
	Air Terjun Ngungun	Anduriang	Wisata Alam	-
	Bumi Perkemahan	Asam Pulau	Wisata Minat Khusus	-
	Bumi Perkemahan Sipisang	Anduriang	Wisata Alam	-
	Dempo Anailand	Guguk	Wisata Alam	45 KM dari BIM
	Lubuk Bonta	Kapalo Hilalang	Wisata Minat Khusus	-
	Paket Durian	Guguk	Wisata Minat Khusus	45 KM dari BIM
	Malibo Anai	Guguk	Wisata Alam	45 KM dari BIM
	Pemandian Tirta Alami	Kandang Ampek	Wisata Alam	45 KM dari BIM
	Rumah Putih	Kapalo Hilalang	Wisata Alam	40 KM dari BIM
	Water Bom	Guguk	Wisata Minat Khusus	-
9. VII Koto Sungai Sariak	Agro Wisata Lebah Madu	Lurah Ampalu	Wisata Minat Khusus	-
	Ariza Farm (Agro)	Limpato	Wisata Agro Pelatihan	26 KM dari BIM
	Gelangang Pacu Kuda	Balah Aie	Wisata Minat khusus	30 KM dari BIM
	Gobah Tuangku Saleh	Sungai Sariak	Wisata Sejarah	20 KM dari BIM
	Makam Tuangku Madinah	Lareh Nan Panjang	Wisata Sejarah	-
	Masjid Tua Lubuk Barih	Sungai Sariak	Wisata Sejarah	-
	Masjid Tua Barangan	Lurah Ampalu	Wisata Sejarah	-
	Masjid Tua VII Koto	Lareh Nan Panjang	Wisata Sejarah	-
	Panorama Bukik Salasih	Sungai Sariak	Wisata Alam	33 KM dari BIM
	Surau syekh Lagundi	Ambung Kapur	Wisata Sejarah	-
10. Patamuan	Aie Tajun Baburai Sipisang	Tandikek Utara	Wisata Alam	-
	Bumi Perkemahan Sijangek	Sungai Durian	Wisata Alam	-
	Makam Kalik-kalik Jantan	Tandikek Utara	Wisata Sejarah	-
	Masjid Raya Katik Sangko	Tandikek	Wisata Sejahtah	-
	Ngungun Indah	Tandikek Utara	Wisata Alam	44 KM dari BIM
	Panorama Gunung Tigo	Tandikek Barat	Wisata Alam	-
	Tugu / Monument Gempa	Tandikek Utara	Wisata Sejarah	-
11. Padang Sago	Makam Tuangku Saliah	Koto Dalam	Wisata Sejarah	46 KM dari BIM

Kecamatan	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata	Jarak
12. V Koto Kampung Dalam	Air Terjun Baburai	Sikucur	Wisata Alam	-
	Air Terjun Langkuik	Sikucur	Wisata Alam	-
	Pantai Pasir Bru	Cimpago	Wisata Pantai	-
13. V Koto Timur	Laga-laga Batang Piaman	Batang Piaman	Wisata Budaya	-
	Makam Tuangku Johok	Limau Purut	Wisata Sejarah	-
	Mesjid Tua Batang Piaman	Padang Alai	Wisata Sejarah	50 KM dari BIM
	Masjid Tua Limau Purut	Limau Purut	Wisata Sejarah	-
14. Sungai Limau	Benteng Jepang	Kuranji Hilir	Wisata Sejarah	43 KM dari BIM
	Pantai Arta Indah	Sungai Paku	Wisata Pantai	46 KM dari BIM
	Pantai Arta Permai	Sungai Paku	Wisata Pantai	45 KM Dari BIM
	Pantai Baselona	Kuranji Hilir	Wisata Pantai	43KM Dari BIM
15. Batang Gasan	Muara Gasan Lestari	Gasan Gadang	Wisata Pantai	-
	Pantai Aru Gasan	Gasan Gadang	Wisata Pantai	60 KM dari BIM
16. Sungai Geringging	Aie Mancua Batu Basurek	Sungai Sirah Kuranji Hulu	Wisata Alam	-
	Bukik Siriah/Mountai View	Malai Tigo Koto	Wisata Alam	63 KM dari BIM
	Makam Syekh Tampek Talang	Sungai Sirah Kuranji Hulu	Wisata Sejarah	-
17. IV Koto Aur Malintang	Bukik Bulek	Batu Basa	Wisata Alam	-
	Ikan Larangan	Aur Malintang	Wisata M.Khusus	67 KM dari BIM
	Lesung Keramat	Batu Basa	Wisata Sejarah	-

Sumber : BPS, Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka, 2020

**Gambar 2.3**  
**Sebaran Objek Wisata Kabupaten Padang Pariaman**



Sumber : RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040, (2020)

Rencana pengembangan kawasan pariwisata berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Barat, Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) II meliputi koridor Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dominasi atraksi adalah jenis wisata bahari seperti pantai, pulau-pulau, serta MICE, peninggalan sejarah, budaya, kesenian, pegunungan, sungai, dan hutan dengan pusat layanan di Kota Padang.

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 – 2040 pada pasal 6 ayat (2) poin (B) bahwa kawasan pariwisata yang dari rencana pengembangan jenis wisata yang dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman salah satunya adalah jenis wisata alam yang berupa wisata bahari dan wisata lansekap alam perbukitan dan pegunungan yang tersebar diseluruh kecamatan.

## **G. Kawasan Permukiman**

Luas lahan peruntukan untuk kawasan permukiman di Kabupaten Padang Pariaman 19.248 Ha yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

### **1. Kawasan Permukiman Perkotaan**

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas 11.036 Ha atau lebih kurang sepertiga dari luas kawasan permukiman keseluruhan adalah kawasan yang memiliki kelengkapan fasilitas perkotaan dengan dominasi kegiatan penduduk non pertanian dalam jarak pencapaian pusat kegiatan minimal pusat perdagangan dan kantor administrasi kecamatan.

Kawasan permukiman perkotaan seluas lebih kurang 9.061 (sembilan ribu enam puluh satu) hektar yang berada di Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Sungai Geringging, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan Patamuan, Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan Sungai Limau.

#### Pusat kegiatan Perkantoran

Pusat pemerintahan kabupaten diarahkan di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Parit Malintang. Area pengembangan fasilitas perkantoran perlu memperhatikan daya dukung lahan selain kedekatan fasilitas. Pengembangan pusat pemerintahan dilakukan dengan peningkatan kapasitas jalan di kawasan; pembangunan fasilitas perkantoran sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan kawasan; dan mitigasi gerakan tanah pada kawasan perkantoran yang merupakan Kawasan Perkantoran di Ibu Kota Kabupaten di Parit Malintang seluas 46 ha.

#### Pusat kegiatan Pendidikan

Kawasan Pendidikan meliputi kawasan Politeknik pelayaran di Kecamatan Ulakan Tapakis dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam seluas 734 ha. Kawasan pendidikan yang berada di 2x11 Kayu Tanam merupakan kawasan strategis tarok yang dikembangkan menjadi pusat pendidikan terpadu yang berskala nasional. Pengembangan kawasan perlu didukung dengan penyediaan sarana transportasi dan pusat perdagangan dan pariwisata.



### Pusat kegiatan Olahraga

Kawasan olahraga yang direncanakan di kabupaten Padang Pariaman yang berada di Kecamatan Lubuk Alung seluas 55 hektar. Pada kawasan tersebut telah dibangun stadion utama Sumatera Barat.

Dalam skala pelayanan kabupaten, perlu dikembangkan pusat kegiatan olahraga untuk pelayanan bagian wilayah kabupaten dengan fasilitas stadion mini dan dilengkapi sarana olah raga lainnya untuk basket, voli dan bulu tangkis. Lokasi pengembangannya diarahkan pada pusat pelayanan bagian wilayah kabupaten yaitu di Ibu Kota Kecamatan (IKK) Sungai Geringging, IKK Sungai Limau dan IKK Sungai Sariak.

### 2. Kawasan Permukiman Perdesaan.

Kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan dengan dominasi kegiatan penduduk pertanian. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar pada kawasan pertanian pada seluruh kecamatan. Luas kawasan permukiman perdesaan 8.212 Ha.

### H. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan kemiliteran, sehingga penyediaan ruang untuk mengakomodir aktivitas kemiliteran. Kawasan pertahanan dan keamanan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:

- a. Koramil 02 Sungai Limau di Kecamatan Sungai Limau;
- b. Koramil 03 Sungai Sarik di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak;
- c. Koramil 04 Sicincin di Kecamatan 2X11 Enam Lingkung;
- d. Koramil 05 Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung;
- e. Koramil 06 Kampung Dalam di Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
- f. Koramil 07 Pauh Kamba di Kecamatan Nan Sabaris;
- g. Koramil 08 Sungai Geringging di Kecamatan Sungai Geringging;
- h. Koramil 09 Batang Anai di Kecamatan Batang Anai; dan
- i. Kepolisian Resor (Polres) Padang Pariaman di Kecamatan Enam Lingkung.

### I. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi di Kabupaten Padang Pariaman adalah kawasan Bandar Udara Internasional Minangkabau yang dengan luas kurang lebih 223 hektar berada di Kecamatan Batang Anai.

### J. Kawasan Sumber Daya Air

Kawasan Sumberdaya air di Kabupaten Padang Pariaman meliputi badan sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Kawasan sumber daya air tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman seluas 1.243 ha.

### 2.1.3 Struktur Ruang Wilayah

Pusat kegiatan perkotaan di wilayah kabupaten merupakan hirarki pusat-pusat kegiatan di wilayah yang merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat yang terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten; dan
- c. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
  1. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
  2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan lebih dari satu kecamatan dengan fungsi utama:
    - a. pelayanan perdagangan dan jasa (barang kebutuhan primer dan sekunder; jasa perbankan dan penginapan),
    - b. pelayanan kesehatan (puskesmas rawat inap)
  3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan kecamatan dengan fungsi utama:
    - a. Pelayanan perdagangan harian (kebutuhan pokok)
    - b. Pelayanan kesehatan (puskesmas) dan pendidikan (SLTA)

Pusat kegiatan yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman yaitu PKN, PKL, PPK dan PPL. Sementara PKW terdapat di Kota Pariaman.

**Tabel 2.6**  
**Sistem Pusat Kegiatan dan Fungsinya di Wilayah**  
**Kabupaten Padang Pariaman**

No	Sistem Pusat Kegiatan	Fungsi
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	▪ Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
2.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	▪ Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	▪ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan
4.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	▪ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa

Sumber: RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040, (2020)

Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040 dapat dilihat pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7**  
**Rencana Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman**

No	Rencana Pusat Kegiatan	Lokasi Kawasan	Fungsi
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	▪ Lubuk Alung	▪ Pelayanan kegiatan ekonomi kawasan Metropolitan PALAPA ▪ Pusat kegiatan perdagangan dan jasa



No	Rencana Pusat Kegiatan	Lokasi Kawasan	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Simpul transportasi</li> <li>▪ Pusat kegiatan olahraga</li> <li>▪ Kawasan pariwisata</li> </ul>
2.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	▪ Parit Malintang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat pemerintahan kabupaten</li> </ul>
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	▪ Sungai Limau di Kecamatan Sungai Limau	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kecamatan</li> <li>▪ Pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian</li> <li>▪ Pusat kegiatan sosial</li> </ul>
		▪ Kayu Tanam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat kegiatan pendidikan dan kesehatan</li> <li>▪ Kawasan pariwisata berwawasan lingkungan</li> <li>▪ Kawasan perkantoran</li> <li>▪ Simpul transportasi</li> </ul>
		▪ Sungai Geringging	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat kegiatan perdagangan dan jasa</li> <li>▪ Pusat perdagangan dan jasa</li> <li>▪ Sentra pertanian</li> <li>▪ Sentra perkebunan</li> <li>▪ Industri kecil menengah</li> <li>▪ Simpul transportasi</li> </ul>
		▪ Sungai Sariak di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kecamatan</li> <li>▪ Pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian</li> <li>▪ Pusat kegiatan sosial</li> </ul>
		▪ Pauh Kamba di Kecamatan Nan Sabaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kecamatan</li> <li>▪ Pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian</li> <li>▪ Pusat kegiatan sosial</li> </ul>
		▪ Kudu Gantiang di Kecamatan V Koto Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kecamatan</li> <li>▪ Pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian</li> <li>▪ Pusat kegiatan sosial</li> </ul>
		▪ Pasa Usang di Kecamatan Batang Anai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat permukiman perkotaan</li> <li>▪ Pusat perdagangan dan jasa</li> <li>▪ Pusat transportasi</li> <li>▪ Pusat perindustrian</li> </ul>
5.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sintuk di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;</li> <li>▪ Tandikek di Kecamatan Patamuan;</li> <li>▪ Ulakan di Kecamatan Ulakan Tapakis;</li> <li>▪ Sicincin di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung;</li> <li>▪ Padang Sago di Kecamatan Padang Sago;</li> <li>▪ Kampung Dalam di Kecamatan V Koto Kampung Dalam;</li> <li>▪ Gasan Gadang di Kecamatan Batang Gasan;</li> <li>▪ Batu Basa di Kecamatan IV Koto Aur Malintang;</li> <li>dan</li> <li>▪ Pakandangan di Kecamatan Enam Lingkung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat kegiatan sosial dalam Kecamatan.</li> <li>▪ Pusat kegiatan administrasi dalam Kecamatan.</li> <li>▪ Pusat kegiatan perdagangan kebutuhan harian.</li> </ul>

Sumber: RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040, (2020)

### 2.1.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 adalah 430.626 jiwa yang terdiri dari 215.038 jiwa laki-laki dan 215.588 jiwa perempuan. Hal ini penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 431.224 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 214.735 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 216.489 jiwa. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 sebesar 99,74 persen. Artinya setiap 99 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Untuk Laju perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.8 berikut:

**Tabel 2.8**  
**Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Tahun	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
2016	201.130	207.472	408.612	96,94	308
2017	202.400	208.603	411.003	97	309
2018	203.602	209.670	413.272	97,11	308
2019	214.735	216.489	431.224	99,19	321
2020	215.038	215.588	430.626	99,74	321

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Untuk sebaran penduduk, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Batang Anai yaitu berjumlah 52.844 jiwa. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena Kecamatan Batang Anai berbatasan langsung dengan Kota Padang. Penduduk akan cenderung mendekat ke daerah yang memiliki faktor ekonomi tinggi, dalam hal ini Kota Padang selain berperan sebagai pusat pemerintahan juga sekaligus sebagai pusat ekonomi Sumatera Barat. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Padang Sago dengan jumlah 8.674 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Padang Pariaman adalah 321 jiwa, artinya setiap 1 Km<sup>2</sup> terdapat 321 jiwa yang menempati wilayah tersebut. Kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Batang Gasan sebanyak 144 jiwa dan tertinggi di Kecamatan Ulakan Tapakis sebanyak 898 jiwa. Pada Tabel 2.9 berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk menurut Kecamatan.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020**

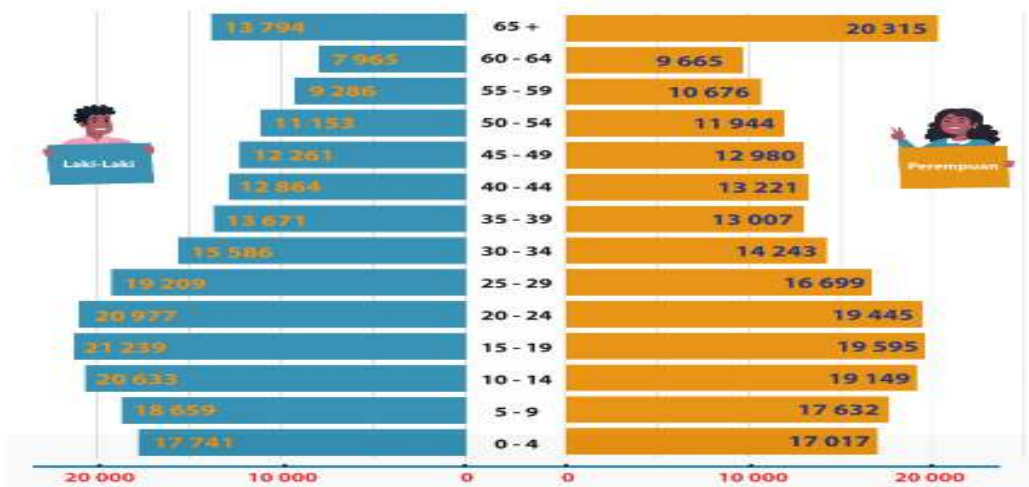
No	Kecamatan	Tahun 2020				
		Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk
1.	Batang Anai	26.741	26.103	52.844	102,44	321
2.	Lubuk Alung	23.725	23.170	46.895	102,40	376
3.	Sintuak Toboh Gadang	9.465	9.803	19.268	96,55	590
4.	Ulakan Tapakis	10.328	10.324	20.652	100,04	898
5.	Nan Sabaris	14.877	15.158	30.035	98,15	454
6.	2x11 Enam Lingkung	9.200	9.536	18.736	96,48	461
7.	Enam Lingkung	10.305	10.304	20.609	100,01	601
8.	2x11 Kayu Tanam	14.057	13.994	28.051	100,45	149
9.	VII Koto	17.474	18.050	35.524	96,81	560
10.	Patamuan	8.712	8.769	17.481	99,35	224



No	Kecamatan	Tahun 2020				
		Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk
11.	Padang Sago	4.246	4.428	8.674	95,89	248
12.	V Koto Kampung Dalam	11.968	11.722	23.690	102,10	354
13.	V Koto Timur	7.211	7.239	14.450	99,61	217
14.	Sungai Limau	14.941	14.833	29.774	100,73	330
15.	Batang Gasan	5.487	5.462	10.949	100,46	144
16.	Sungai Geringging	16.016	16.005	32.021	100,07	297
17.	IV Koto Aur Malintang	10.285	10.688	20.973	96,23	249
<b>Jumlah</b>		<b>215.038</b>	<b>215.588</b>	<b>430.626</b>	<b>99,74</b>	<b>321</b>

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

**Gambar 2.4**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020**



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Apabila dilihat secara komposisi pada Gambar 2.4, kelompok penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan dengan kelompok penduduk usia tua, yang tergolong menonjol adalah usia pendidikan dasar (10-14 tahun) atau dalam usia wajar sembilan tahun dan kemudian usia pendidikan tinggi (20-24 tahun) atau usia awal usia kerja, artinya jumlah masyarakat usia produktif relatif besar yang merupakan modal dasar bagi pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari piramida penduduk yang cenderung mengerucut ke atas. Bentuk piramida penduduk Kabupaten Padang Pariaman ini sejalan dengan bentuk piramida penduduk nasional.

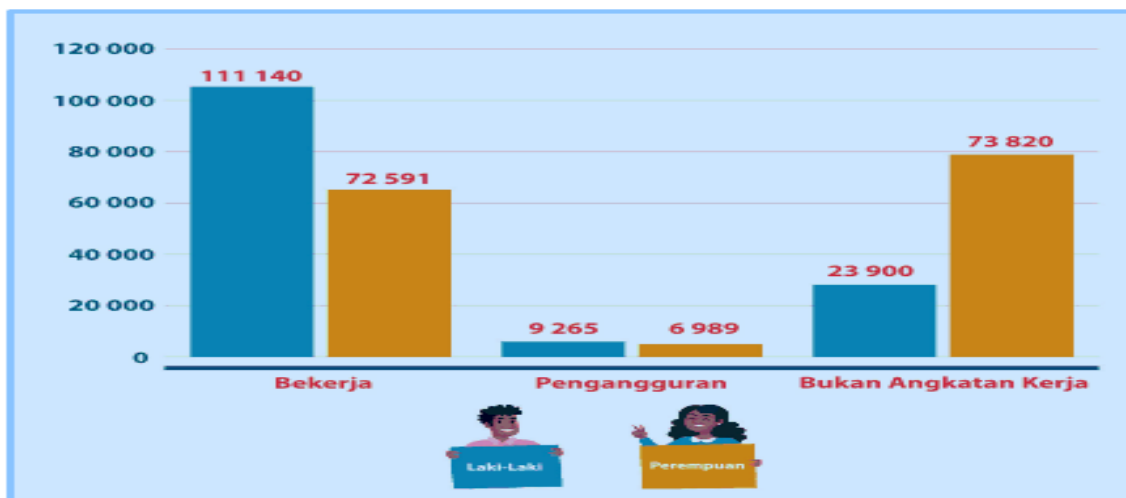
Selanjutnya, penduduk Berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan Gambar 2.5. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2020 terdiri dari 111.140 jiwa laki-laki dan 72.591 jiwa perempuan. Dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan dengan selisih angka yaitu 38.549 dari jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah total 183.731 jiwa. Jumlah pengangguran pada tahun 2020 sebanyak 9.265 jiwa laki-laki dan 6.989 jiwa perempuan.

**Tabel 2.10**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Jenis Kelamin	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja	
	Bekerja	Pengangguran		
Laki-Laki	111.140	9.265	23.900	
Perempuan	72.591	6.989	73.820	
<b>Jumlah</b>	<b>2020</b>	<b>183.731</b>	<b>16.254</b>	<b>97.720</b>
	<b>2019</b>	<b>170.516</b>	<b>10.828</b>	<b>107.053</b>
	<b>2018</b>	<b>173.608</b>	<b>12.874</b>	<b>99.234</b>
	<b>2017</b>	<b>169.769</b>	<b>12.095</b>	<b>101.758</b>
	<b>2016</b>	...	...	...

Sumber : BPS, Kabupaten Padang Pariaman, 2021

**Gambar 2.5**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020**



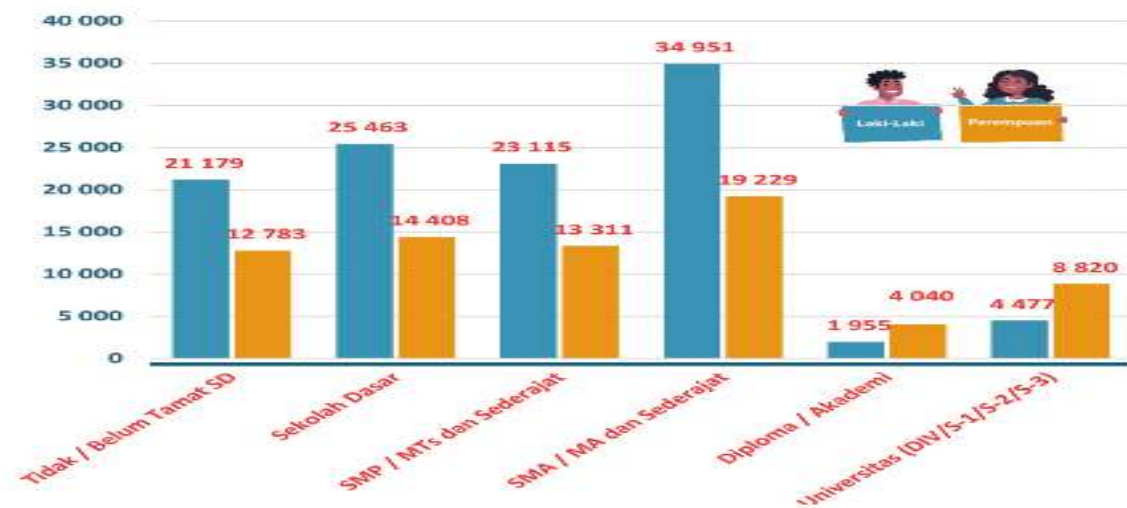
Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

**Tabel 2.11**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020**

Pendidikan yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja		
	Bekerja		Pengangguran			
	Laki-Laki	Perempuan			Jumlah	
Tidak Tamat SD	21.179	12.783	33.963	841	23.325	
Sekolah Dasar (SD)	25.463	14.408	39.871	1.338	19.671	
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	23.115	13.311	36.462	2.359	27.684	
Sekolah Menengah Atas (SMA)	34.951	19.229	54.180	8.224	23.461	
Diploma/Akademi	1.955	4.040	5.995	1.918	887	
Universitas (DIV/S-1/S-2/S-3)	4.477	8.820	13.297	1.574	2.692	
<b>Jumlah</b>	<b>2020</b>	<b>111.140</b>	<b>72.591</b>	<b>183.731</b>	<b>16.254</b>	<b>97.720</b>
	<b>2019</b>	<b>105.401</b>	<b>65.115</b>	<b>170.516</b>	<b>10.828</b>	<b>107.053</b>
	<b>2018</b>	<b>105.106</b>	<b>68.502</b>	<b>173.608</b>	<b>12.874</b>	<b>99.234</b>
	<b>2017</b>	<b>104.510</b>	<b>65.259</b>	<b>169.769</b>	<b>12.095</b>	<b>101.758</b>
	<b>2016</b>	...	...	...	...	...

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

**Gambar 2.6**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020**



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Kondisi ketenagakerjaan suatu daerah dapat dilihat menggunakan dua indikator yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Sedangkan TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, yang diharapkan dari kondisi dua indikator tersebut adalah TPAK yang naik dan TPT yang menurun. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 83,44 persen dan perempuan sebesar 51,88 persen. Untuk tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 menunjukkan kecenderungan yang positif dimana untuk pengangguran terbuka laki-laki sebesar 7,69 persen dan perempuan 8,78 persen. Untuk lebih jelasnya perkembangan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2016- 2020, dapat dilihat pada Tabel 2.12 dibawah ini:

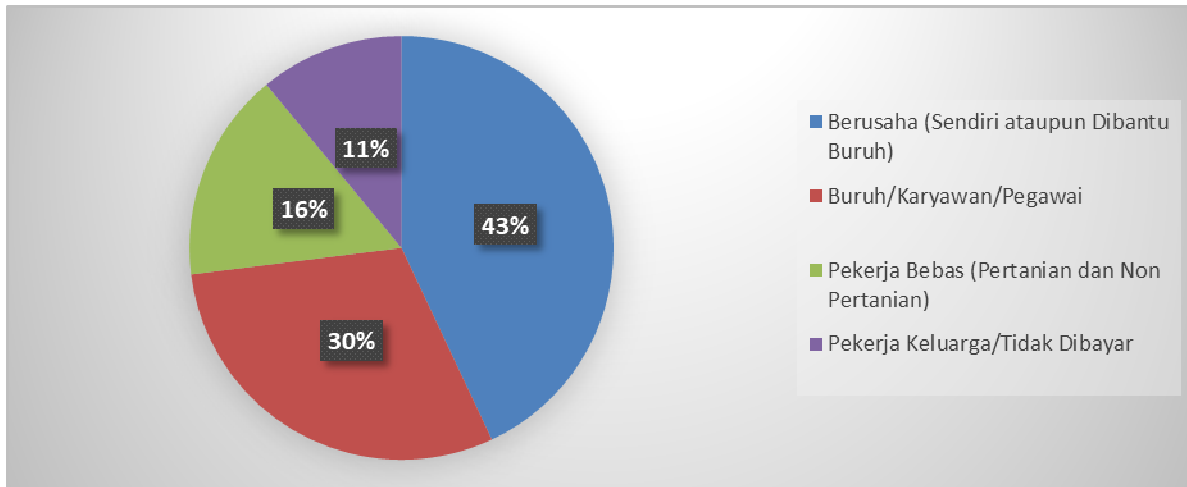
**Tabel 2.12**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2020**

Pendidikan yang Ditamatkan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Tidak Tamat SD	81,08	41,84	2,22	2,74
Sekolah Dasar (SD)	87,64	48,09	3,70	2,44
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	73,80	42,68	6,41	5,50
Sekolah Menengah Atas (SMA)	87,64	55,76	12,46	14,45
Diploma/Akademi	94,70	87,33	33,28	18,92
Universitas (DIV/S-1/S-2/S-3)	89,55	82,56	5,71	12,87
Jumlah <b>2020</b>	<b>83,44</b>	<b>51,88</b>	<b>7,69</b>	<b>8,78</b>
<b>2019</b>	<b>79,81</b>	<b>47,02</b>	<b>5,33</b>	<b>6,99</b>
<b>2018</b>	<b>81,14</b>	<b>50,42</b>	<b>6,21</b>	<b>7,95</b>
<b>2017</b>	<b>78,87</b>	<b>49,42</b>	<b>4,44</b>	<b>9,99</b>
<b>2016</b>	...	...	...	...

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.7 dan Tabel 2.13. Menurut status pekerjaan utama penduduk yang bekerja, sebanyak 43 persen berstatus berusaha, baik berusaha sendiri maupun dibantu oleh buruh dibayar ataupun buruh tidak dibayar. Kemudian 30 persen sebagai buruh, karyawan atau pegawai, 16 persen sebagai pekerja bebas dan 11 persen sebagai pekerja keluarga.

**Gambar 2.7**  
**Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2020**



Sumber : Data Olahan Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, 2021

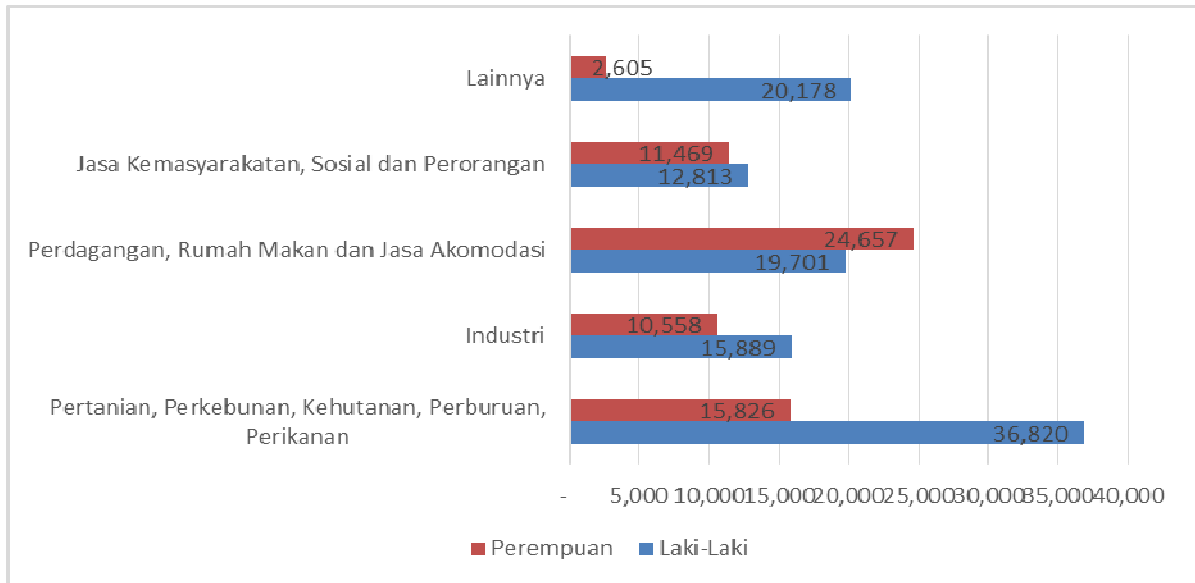
**Tabel 2.13**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020**

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Berusaha Sendiri	29.310	17.164	46.474
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	21.582	14.175	35.757
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	2.857	1.415	4.272
Buruh/Karyawan/Pegawai	28.755	18.239	46.994
Pekerja Bebas di Pertanian	10.330	4.399	14.729
Pekerja Bebas di Non Pertanian	7.433	2.171	9.604
Pekerja Keluarga	10.873	15.028	25.901
<b>Jumlah</b>	<b>111.140</b>	<b>72.591</b>	<b>183.731</b>

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Wilayah yang luas, memiliki garis pantai yang cukup panjang dan daerah perbukitan yang subur membuat pertanian masih menjadi lapangan usaha yang paling dominan di Kabupaten Padang Pariaman. Kategori lapangan usaha pertanian terdiri dari: pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Pelaku lapangan usaha pertanian masih didominasi oleh penduduk laki-laki sebanyak 36.820 jiwa atau sebesar 69,94%. Sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan lebih mendominasi di lapangan usaha perdagangan sebanyak 24.657 jiwa atau sebesar 55,59% yang diantaranya meliputi: perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi.

**Gambar 2.8**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020**



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain:

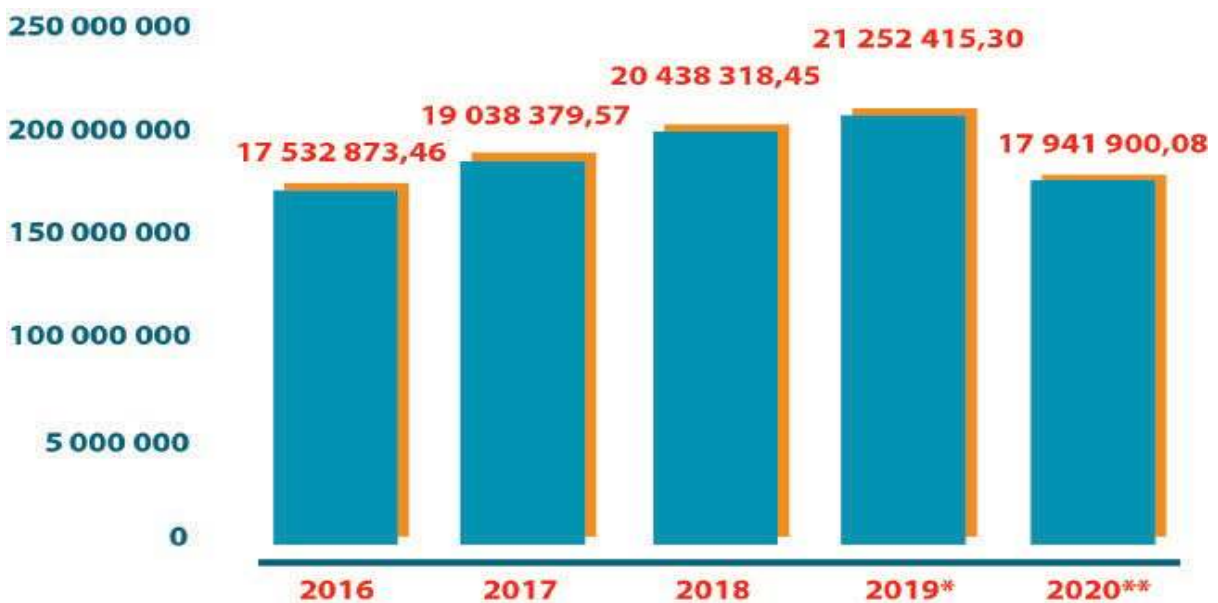
1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB per kapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

Nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku maupun harga konstan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk PDRB atas harga berlaku pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp. 17.941.900,08 juta rupiah dari Rp. 21.252.415,30 juta rupiah pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar Rp 3.310.515,22 juta rupiah. Penurunan nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini mencerminkan dampak yang ditimbulkan atas produktivitas ekonomi secara riil, karena penurunan ini masih mengandung unsur inflasi.

Begitupun dengan PDRB atas harga konstan yang dapat menggambarkan produktivitas ekonomi secara riil juga mengalami penurunan sebesar Rp. 1.395.445,48 juta rupiah dari tahun 2020. Pada tahun 2019 nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga konstan tersebut hanya Rp. 13.334.921,66 juta rupiah dan pada tahun 2020 menjadi Rp.11.939.475,18 juta rupiah.

Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas harga berlaku dan konstan ini dapat dilihat pada Gambar 2.9 dan 2.10.

**Gambar 2.9**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

**Gambar 2.10**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**



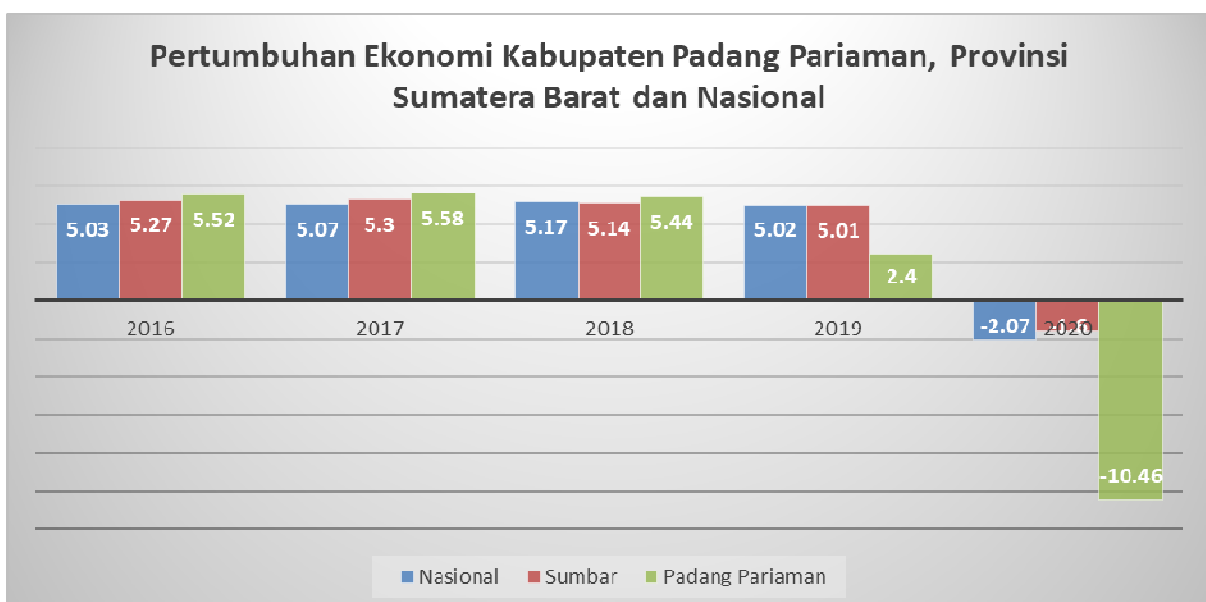
Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Tingkat pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara tahun 2016 sampai 2020, memperlihatkan kecenderungan yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 5,52 dan 5,58 persen menurun pada tahun 2018 dan 2019, berturut-turut menjadi 5,44 dan 2,40 persen, serta akibat pandemi covid-19 berkontraksi -10,46 persen pada tahun 2020. Penurunan tersebut tidak terlepas lesunya sektor transportasi udara sebagai penopang utama PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Akibat adanya kebijakan kenaikan harga tiket pesawat, penerbangan domestik yang datang dan berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau mengalami penurunan yang signifikan. Kontraksi ekonomi terjadi pada seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang melanda Sumatera Barat sejak Maret 2020.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman cenderung menurun demikian juga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang juga cenderung menurun dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 5,27 dan 5,30 persen, menurun pada tahun 2018 dan 2019, berturut-turut menjadi 5,14 dan 5,10 persen, serta akibat pandemi berkontraksi -2,07 persen pada tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 tercatat sebesar -10,46 persen, menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,4 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman adalah yang paling rendah. Penurunan tersebut tidak terlepas lesunya sektor transportasi udara sebagai penopang utama PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Akibat adanya kebijakan kenaikan harga tiket pesawat, penerbangan domestik yang datang dan berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau mengalami penurunan yang signifikan.

**Gambar 2.11**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)**



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

**Tabel 2.14**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,54	4,03	3,52	4,26	0,29
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	2,21	4,24	7,32	7,52	-1,76
<b>C</b>	Industri Pengolahan	4,24	2,71	0,58	1,48	-1,88
<b>D</b>	Pengadaan listrik dan Gas	10,70	4,08	4,13	2,59	-5,20
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	6,54	4,04	3,92	9,84	3,58
<b>F</b>	Konstruksi	3,67	6,29	8,85	10,71	-4,28
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	6,10	5,41	5,18	7,00	-0,60
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	9,14	8,22	7,46	-8,60	-47,30
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,95	6,46	7,46	10,60	-9,12
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	9,64	6,87	6,98	9,41	8,78
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,11	2,85	1,54	3,36	1,10
<b>L</b>	Real Estat	4,36	3,99	4,57	6,68	1,12
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	6,60	2,91	4,63	6,31	-1,34
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,87	4,41	6,05	6,86	-1,72
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	8,21	9,42	8,27	9,19	5,53
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,54	8,62	7,32	8,82	6,99
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya	9,41	6,60	8,23	9,08	-6,24
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5,52</b>	<b>5,58</b>	<b>5,46</b>	<b>2,51</b>	-10,46

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021





**Tabel 2.15**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.484.872,07	19,90	3.731.537,40	19,33	3.812.952,92	18,65	4.082.657,32	19,18	4.065.464,15	22,66
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.028.331,72	5,87	1.097.524,80	5,70	1.203.451,46	5,89	1.345.212,18	6,32	1.331.498,07	7,42
3.	Industri Pengolahan	1.886.153,21	10,74	1.949.723,60	10,20	1.968.470,27	9,63	1.987.865,76	9,34	2.007.600,23	11,19
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5.005,45	0,03	6.001,90	0,03	6.265,25	0,03	7.024,17	0,03	6.734,92	0,04
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.253,14	0,04	7.483,4	0,04	8.003,42	0,04	9.094,93	0,04	9.431,47	0,05
6.	Konstruksi	1.279.854,75	7,37	1.415.070,80	7,32	1.559.941,43	7,63	1.796.923,03	8,44	1.822.694,62	10,16
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.485.558,17	8,42	1.596.549,60	8,27	1.691.872,49	8,28	1.899.436,03	8,92	1.889.587,52	10,53
8.	Transportasi dan Pergudangan	5.597.003,05	31,92	6.372.815,90	33,42	6.917.139,60	33,84	6.452.168,41	30,31	2.930.076,35	16,33
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	149.494,65	0,84	159.050,9	0,83	174.482,98	0,85	202.157,67	0,95	187.959,41	1,05
10.	Informasi dan Komunikasi	434.219,37	2,53	480.487,60	2,50	526.445,61	2,58	606.812,81	2,85	658.822,73	3,67
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	244.400,48	1,39	261,229,30	1,34	268.299,06	1,31	287.080,508	1,35	293.799,14	1,64
12.	Real Estat	156.247,62	0,89	164.989,10	0,86	174.809,94	0,86	194.395,32	0,91	197.594,63	1,10
13.	Jasa Perusahaan	12.334,60	0,07	12.987,20	0,07	13.733,18	0,07	15.045,48	0,07	15.121,66	0,08
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	737.175,70	4,20	778.378,60	4,22	858.410,35	4,20	960.236,99	4,51	1.018.986,39	5,68
15.	Jasa Pendidikan	725.032,80	4,14	847.757,90	4,23	912.205,49	4,46	1.046.230,07	4,91	1.110.491,59	6,19
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87.264,90	0,50	95.178,90	0,50	102.402,77	0,50	115.643,28	0,54	126.682,06	0,71
17.	Jasa Lainnya	200.981,70	1,15	228.280,8	1,14	243.021,11	1,19	279.288,42	1,31	269.355,16	1,50
	<b>PDRB</b>	<b>17.521.183,33</b>	<b>100,00</b>	<b>19.205.407,50</b>	<b>100,00</b>	<b>20.441.906,97</b>	<b>100,00</b>	<b>21.287.271,95</b>	<b>100,00</b>	<b>17.941.900,08</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara



**Tabel 2.16**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2.478.821,72	21,20	2.580.351,20	4,03	2.671.238,18	3,52	2.785.158,52	4,26	2.791.280,42	-1,76
2.	Pertambangan dan penggalian	668.102,74	5,71	696.430,30	4,24	747.407,18	7,32	803.593,28	7,52	789.481,61	-1,88
3.	Industri pengolahan	1.551.134,37	13,27	1.596.125,90	2,71	1.602.324,04	0,58	1.626.096,37	1,48	1.595.271,93	-5,20
4.	Pengadaan listrik dan gas	3.647,57	0,03	3.796,20	4,08	3.952,99	4,13	4.055,35	2,59	3.844,29	3,58
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6.027,20	0,05	6.270,90	4,04	6.516,44	3,92	7.157,44	9,84	7.410,50	-4,28
6.	Konstruksi	926.580,89	7,92	999.829,40	6,29	1.071.968,52	8,85	1.186.824,98	10,71	1.135.142,55	-0,60
7.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1.156.316,40	9,89	1.213.926,6	5,41	1.282.096,19	5,18	1.371.871,09	7,00	1.362.734,99	-47,30
8.	Transportasi dan pergudangan	2.719.975,71	23,26	2.931.746,50	8,22	3.165.376,92	7,46	2.893.059,35	-8,60	1.518.951,95	-9,12
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	93.852,21	0,80	99.911,90	6,46	107.362,02	7,46	118.743,07	10,60	107.914,29	8,78
10.	Informasi dan komunikasi	459.815,45	3,93	491.790,8	6,95	525.665,36	7,29	575.115,29	9,41	625.067,08	1,10
11.	Jasa keuangan dan asuransi	185.581,04	1,59	190.868,8	2,85	193.816,91	1,54	200.36,95	3,36	202.547,86	1,12
12.	Real Estat	118.295,91	1,01	123.015,90	3,99	128.640,18	4,57	137.229,77	6,68	138.767,43	-1,34
13.	Jasa Perusahaan	9.963,16	0,08	10.252,80	2,91	10.727,71	4,63	11.404,48	6,31	11.252,22	-1,72
14.	Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib	584.431,70	5,00	610.200,00	4,41	647.113,11	6,05	691.517,01	6,86	679.148,50	5,53
15.	Jasa pendidikan	518.998,23	4,44	567.775,20	9,42	614.735,76	8,27	671.235,26	9,19	708.375,78	6,99
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	68.923,22	0,59	74.864,40	8,62	80.342,80	7,32	87.430,38	8,82	93.565,31	-6,24
17.	Jasa lainnya	142.998,92	1,22	152.430,20	6,60	164.973,57	8,23	179.952,17	9,08	168.718,46	-1,76
	<b>PDRB</b>	<b>11.693.363,44</b>	<b>100</b>	<b>12.346.587,00</b>	<b>100</b>	<b>13.024.257,87</b>	<b>100</b>	<b>13.350.780,76</b>	<b>100</b>	<b>11.939.475,18</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

PDRB pengeluaran merupakan besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (ekspor dikurang impor).

Pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman didukung oleh peningkatan semua komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,42 persen dan menyumbang 50,87 persen terhadap PDRB Padang Pariaman. PMTB yang merupakan kontributor terbesar kedua tumbuh sebesar 5,41 persen. Selain itu komponen konsumsi LNPR tumbuh sebesar 9,19 persen dan konsumsi pemerintah sebesar 4,19 persen.

**Tabel 2.17**  
**Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Pengeluaran terhadap PDRB**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020**

Uraian	Distribusi	Pertumbuhan
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,87	4,42
Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,10	9,19
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,77	4,19
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	27,70	5,41
Perubahan Inventori	-0,04	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	11,61	-

Sumber : BPS, Statistik Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Analisa *shiftshare* dan *Location Quotient* (LQ) terhadap data PDRB Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa sektor yang paling berkembang di Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan serta sektor jasa pendidikan.

Dari analisis data dan fakta, maka diperoleh sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Kedua sektor tersebut dipilih karena selain berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah, kedua tersebut merupakan sektor yang memiliki potensi besar dan mempunyai keterkaitan yang cukup erat dan dapat saling mendukung dalam pengembangan ekonomi daerah. Pengembangan sektor pertanian sebagai sektor primer mempunyai arti penting sebagai sektor yang menyediakan sumber bahan baku untuk sektor industri pengolahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk mengembangkan sektor-sektor andalan tersebut melalui penyusunan arah strategi dan kebijakan untuk pengembangan sektor industri pengolahan yang didukung dengan peningkatan produksi pertanian untuk produk-produk unggulan daerah Kabupaten Padang Pariaman.

**Tabel 2.18**  
**Hasil Perhitungan Analisis *Shift Share* dan *Location Quotient (LQ)***  
**Struktur Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman**

NO	LAPANGAN USAHA	SHIFT SHARE ANALYSIS			LQ
		REGIONAL SHARE	MIXED SHIFT	DIFFERENTIAL SHIFT	
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	543264.5652	-250078.7867	72813.88146	Non Basis
2	Pertambangan & Penggalian	146791.816	-42827.79092	45964.82487	Basis
3	Industri Pengolahan	334173.1109	-265796.8016	69646.12067	Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	739.9567965	91.34058331	-70.97737983	Non Basis
5	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan Daur Ulang	1270.47741	-140.4504416	369.973032	Non Basis
6	Konstruksi	200719.9558	91064.16747	1234.246768	Non Basis
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	244734.3748	70925.04113	-33591.28597	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	560065.8084	155208.8592	-316190.1675	Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19706.92039	14961.67413	-3680.504519	Non Basis
10	Infomasi dan Komunikasi	94182.87366	75530.66934	-13994.893	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	39647.53025	-15038.33606	-822.8241947	Non Basis
12	Real Estat	25454.9288	667.6178194	-2243.65662	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	2098.862168	109.4944343	-150.1166025	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	125149.6062	11146.34993	-2070.54617	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	107687.463	70619.79206	13395.38491	Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14392.67092	6198.354376	2748.744703	Non Basis
17	Jasa lainnya	29351.51929	18828.99321	1069.247499	Non Basis
	<b>JUMLAH</b>	<b>2489432.44</b>	<b>-58529.81202</b>	<b>-165572.5481</b>	
	<b>Persentase</b>	<b>110%</b>	<b>-3%</b>	<b>-7%</b>	

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2021 (diolah)

Berdasarkan dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Padang Pariaman yang telah disusun, telah disepakati beberapa komoditas unggulan daerah yang akan dilakukan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Kakao, Kelapa, jagung, padi (putiah papanai), dan jambu biji.

Secara umum strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan produk unggulan ini adalah dengan klasterisasi industri produk unggulan daerah tersebut. Klasterisasi industri produk unggulan daerah tersebut bertujuan untuk menghimpun segala jenis usaha yang saling terkait dengan suatu produk unggulan yang akan saling mendukung dalam proses produksi produk. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk (*competitive advantage*) Kabupaten Padang Pariaman.

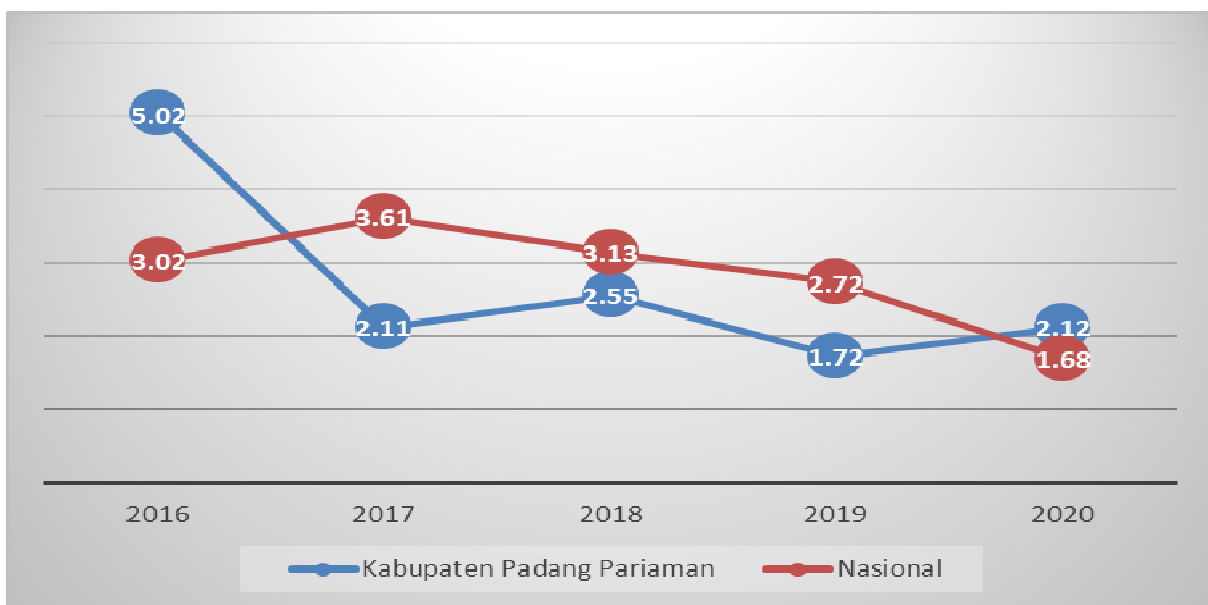
Melalui rencana strategi tersebut, diharapkan akan dapat membantu akselerasi peningkatan daya saing daerah secara holistik, sistematis dan serentak untuk peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

### 2.2.1.2 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Laju Inflasi Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, karena sangat dipengaruhi dan bergantung pada kondisi perekonomian baik secara nasional maupun global. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.12 di bawah ini.

Oleh karena perhitungan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat hanya diwakili oleh Kota Padang dan Kota Bukittinggi, maka tingkat inflasi Kabupaten Padang Pariaman mengikuti angka tingkat inflasi dari Kota terdekat yaitu Kota Padang. Tingkat inflasi di Padang Pariaman pada tahun 2020 yaitu 2,12 dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2019 sebesar 1,72. Secara umum, penurunan daya beli masyarakat akibat dari pandemi Covid 19 yang menyebabkan merosotnya sebagian besar sektor ekonomi masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat secara luas.

**Gambar 2.12**  
**Laju Inflasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**



Sumber : Diolah dari data BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per Kapita. PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Selama periode tahun 2016-2020, PDRB per kapita Padang Pariaman cukup mengalami fluktuasi. PDRB per kapita Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 adalah sebesar 42.908,37 ribu rupiah. Pada tahun 2020 nilai PDRB per kapita Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga

berlaku sebesar 42.781,67 ribu rupiah, berarti terdapat penurunan sebesar 6.583,1 ribu rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan terjadinya kontraksi perekonomian akibat pandemi Covid-19. PDRB per kapita Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga konstan pada tahun 2016 adalah sebesar 28.626,28 ribu rupiah. Angka ini mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 yaitu 30.960,20 ribu rupiah. Pada tahun 2020 nilai PDRB per kapita Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga konstan mengalami penurunan menjadi 28.126,18 ribu rupiah, berarti terdapat penurunan sebesar 2.834,02 ribu rupiah. Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.19.

**Tabel 2.19**  
**Nilai PDRB Per Kapita di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB	Juta Rupiah	17.532.873,46	19.038.379,57	20.441.906,97	21.287.271,95	17.941.900,08
PDRB ADHK	Juta Rupiah	11.697.039,96	12.350.186,95	13.024.257,87	13.350.780,76	11.939.475,18
PDRB/Kapita ADHB	Ribu Rupiah	42.908,37	46.321,75	49.463,57	49.364,77	42.781,67
PDRB/Kapita ADHK	Ribu Rupiah	28.626,28	30.048,90	31.514,98	30.960,20	28.126,18
Penduduk	Jiwa	408.612	411.003	413.272	431.224	430.626

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita yang cenderung mengalami peningkatan menyiratkan pertumbuhan penduduk terutama migrasi dari luar daerah lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDRB per kapita ini akan semakin meningkat apabila terciptanya perluasan kesempatan kegiatan ekonomi untuk mendukung pertambahan angkatan kerja baru, sekaligus mengembangkan kerjasama dengan pihak investor dari luar.

Dalam hal meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Padang Pariaman dapat dilakukan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan kualitas pendidikan, optimalisasi program keluarga berencana dan perluasan lapangan pekerjaan.

#### **2.2.1.4 Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio**

Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan sebagai contoh sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pada variabel tertentu (misalnya

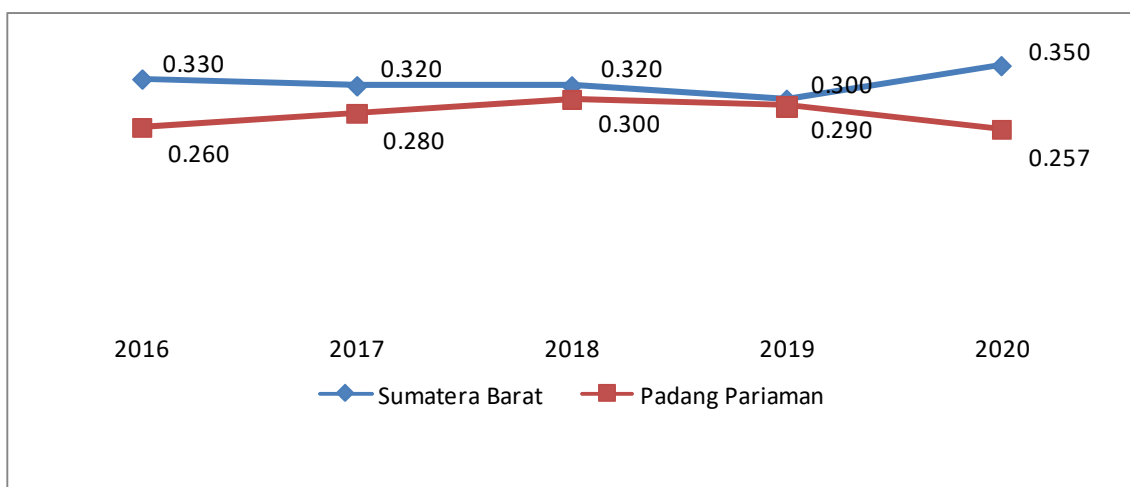
pendapatan) dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995):

- $GR < 0.4$  : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0.4 < GR < 0.5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- $GR > 0.5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Salah Satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini (Gini Ratio). Koefisien Gini di Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2016-2020 relatif fluktuatif dengan nilai berkisar 0,26 - 0,30 sebagaimana yang ditunjukkan Gambar 2.13.

**Gambar 2.13**  
**Indikator Makro Ekonomi yang ditunjukkan melalui Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Pada rentang tahun 2016-2020, indeks gini Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren fluktuatif. Nilai indeks gini mengalami kenaikan pada tahun 2018 dengan nilai 0,30 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan nilai 0,257. Dengan rentang nilai Koefisien Gini 0,28-0,30 tersebut, Kabupaten Padang Pariaman termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah (nilai  $< 0,2$ ). Keadaan ini merupakan gambaran bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan pembangunan yang hasilnya telah dapat dinikmati oleh penduduk Kabupaten Padang Pariaman, baik oleh penduduk yang

berpenghasilan tinggi maupun penduduk yang memiliki ekonomi rendah dan pemerataan terus menuju capaian yang maksimal.

Salah satu upaya pemerintah kabupaten Padang Pariaman untuk mempersempit ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya penduduk miskin melalui berbagai program antara lain PPMK, pengembangan UMKM dan peningkatan peran koperasi serta upaya mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.

#### 2.2.1.5 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Selain koefisien gini, indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah penduduk miskin. Secara makro, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata pengeluaran per bulan perkapita. Metode penghitungan penduduk miskin melalui metode ini dilakukan dengan menghitung komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2020 garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp455.463,- dengan jumlah penduduk miskin sebesar 6,95% dari total penduduk Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 28,98 ribu jiwa di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya perkembangan garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut ini :

**Tabel 2.20**  
**Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

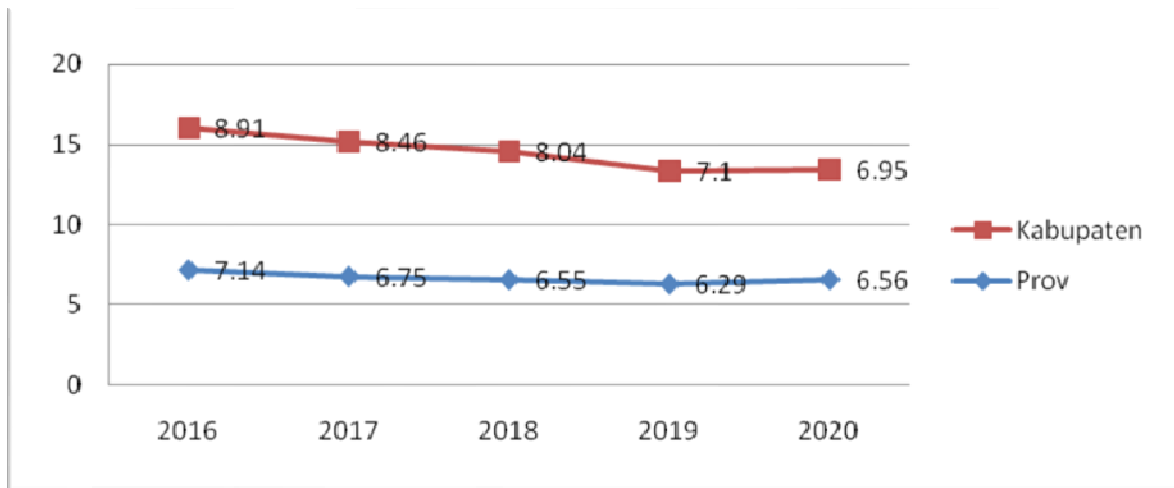
Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
		Jumlah (ribu jiwa)	%		
2016	374.636	36,34	8,91	1,36	0,38
2017	385.736	34,70	8,46	1,13	0,23
2018	402.960	33,20	8,04	1,25	0,29
2019	411.182	29,48	7,10	1,02	0,21
2020	455.463	28,98	6,95	0,67	0,11

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Selanjutnya, untuk persentase penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman, dapat dilihat pada Gambar 2.14 di bawah ini.



**Gambar 2.14**  
**Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Pariaman dan Sumatera Barat Tahun 2016-2020**

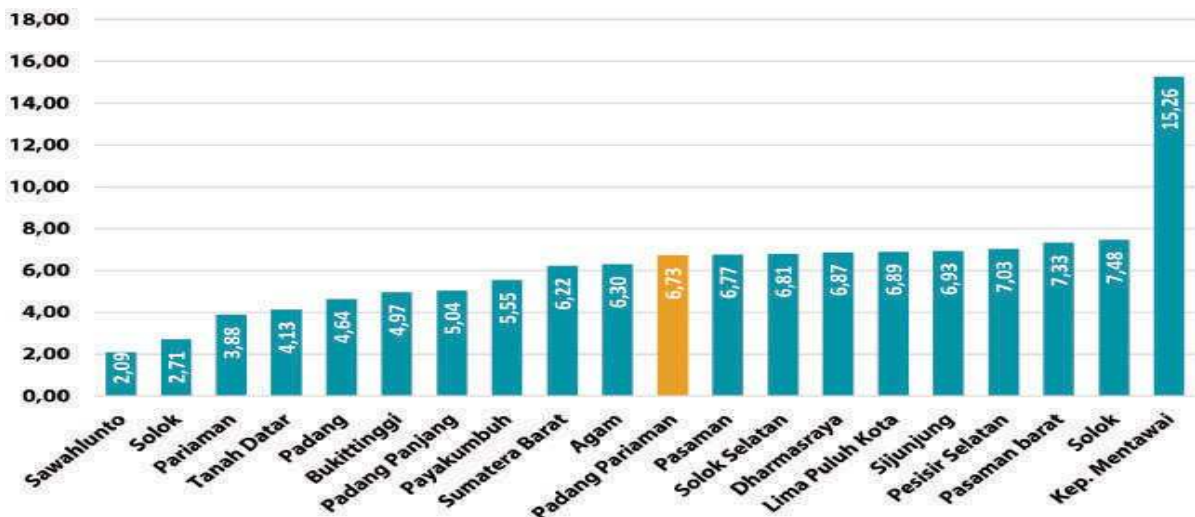


Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Gambar 2.14 di atas, dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin berjumlah 6,95 persen sehingga penduduk yang berada di atas garis kemiskinan berjumlah 93,05 persen. Namun walaupun demikian, penduduk miskin masih rentan terhadap perubahan harga terutama kebutuhan pokok, biaya angkutan dan biaya kesehatan dan sebagian besar penduduk miskin tersebut berusaha di sektor informal dan rentan terhadap perubahan lingkungan sekitar.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman, jika dilihat dari persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 8,91% dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2020 yaitu sebesar 6,95%. Perbandingan persentase penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.15 dibawah ini:

**Gambar 2.15**  
**Persentase penduduk miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Tingkat kesejahteraan digunakan untuk melihat kondisi sosial dan ekonomi dari masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Tingkatan kesejahteraan dikelompokkan berdasarkan kondisi perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Jumlah penduduk menurut tingkat kesejahteraannya dapat dilihat pada Tabel 2.21.

**Tabel 2.21**  
**Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020**

No	Kecamatan	Tahapan Keluarga Sejahtera					Jumlah
		Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III Plus	
1	Batang Anai	184	1.187	3.885	4.436	199	9.891
2	Lubuk Alung	696	1.265	4.598	3.085	557	10.201
3	Sintuk Toboh Gadang	148	1.582	1.686	845	34	4.295
4	Ulakan Tapakis	58	1.346	2.050	929	88	4.471
5	Nan Sabaris	198	1.331	3.391	1.918	305	7.143
6	2 X 11 Enam Lingkung	183	1.220	2.265	832	275	4.775
7	Enam Lingkung	46	1.188	1.841	1.050	321	4.446
8	2 X 11 Kayu Tanam	43	1.544	2.371	2.564	417	6.939
9	VII Koto Sungai Sariak	566	3.264	2.803	1.248	165	8.046
10	Patamuan	83	578	2.765	532	73	4.031
11	Padang Sago	115	1.122	771	202	0	2.210
12	V Koto Kampung Dalam	766	2.400	1.581	780	8	5.535
13	V Koto Timur	927	1.104	1.013	896	0	3.940
14	Sungai Limau	928	1.739	2.452	1.094	19	6.232
15	Batang Gasan	592	1.264	617	241	39	2.753
16	Sungai Geringging	304	3.134	2.234	1.758	16	7.446
17	IV Koto Aur Malintang	423	1.807	2.092	822	53	5.197
<b>Jumlah</b>		<b>6.260</b>	<b>27.075</b>	<b>38.415</b>	<b>23.232</b>	<b>2.569</b>	<b>97.551</b>

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman 2021

**Tabel 2.22**  
**Persentase Tingkat Kesejahteraan Penduduk**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020**

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Pra Sejahtera	6.260	6,4
2	Sejahtera I	27.075	27,8
3	Sejahtera II	38.415	39,4
4	Sejahtera III	23.232	23,8
5	Sejahtera III Plus	2.569	2,6
<b>Total</b>		<b>97.551</b>	<b>100</b>

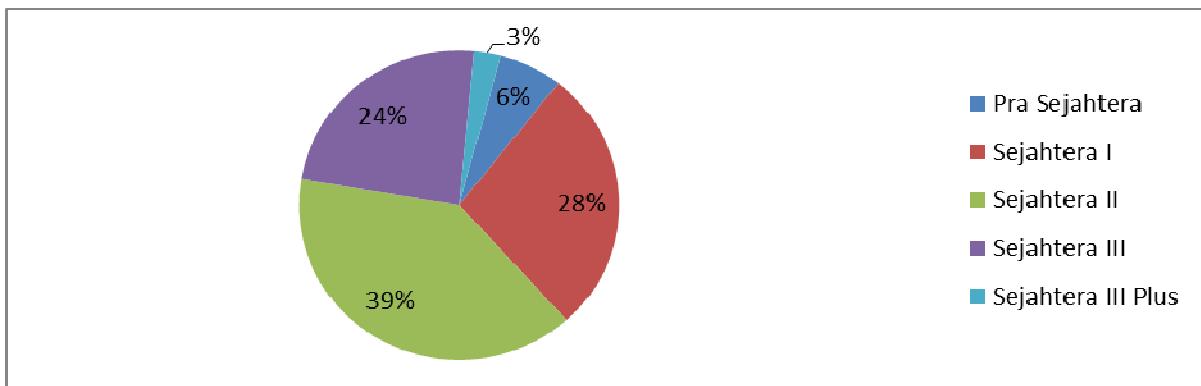
Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariama, 2021

Berdasarkan Tabel 2.22 dapat dilihat bahwa masyarakat Kabupaten Padang Pariaman didominasi oleh masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan Sejahtera II, yakni sebanyak 38.415 orang, hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Padang Pariaman dominan telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologisnya namun belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan keluarganya. Sedangkan untuk tingkat kesejahteraan Sejahtera III Plus terdiri dari 2.569 orang, dapat disimpulkan bahwa hanya 2,6 % masyarakat Kabupaten

Padang Pariaman yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan dapat memberikan sumbangan secara teratur terhadap kegiatan masyarakat yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Keluarga yang berada pada kelompok keluarga pra sejahtera dan sejahtera I merupakan keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal dan kebutuhan sosial psikologisnya. Untuk masyarakat yang berada pada tahap keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kabupaten Padang Pariaman terdapat sebanyak 6,4 % dan 27,8 %. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan di Kabupaten Padang Pariaman belum merata. Gambar 2.16 dan Tabel 2.23 menggambarkan sebaran keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kabupaten Padang Pariaman.

**Gambar 2.16**  
**Grafik Tingkat Kesejahteraan Penduduk**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020**



Sumber : RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040, (2020)

**Tabel 2.23**  
**Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I**  
**di Kabupaten Padang Pariaman**

No	Kecamatan	Tahapan Keluarga Sejahtera		Persentase (%)	
		Pra Sejahtera	Sejahtera I	Pra Sejahtera	Sejahtera I
1	Batang Anai	184	1.187	2,9	4,4
2	Lubuk Alung	696	1.265	11,1	4,7
3	Sintuk Toboh Gadang	148	1.582	2,4	5,8
4	Ulakan Tapakis	58	1.346	0,9	5,0
5	Nan Sabaris	198	1.331	3,2	4,9
6	2 X 11 Enam Lingkung	183	1.220	2,9	4,5
7	Enam Lingkung	46	1.188	0,7	4,4
8	2 X 11 Kayu Tanam	43	1.544	0,7	5,7
9	VII Koto Sungai Sariak	566	3.264	9,0	12,1
10	Patamuan	83	578	1,3	2,1
11	Padang Sago	115	1.122	1,8	4,1
12	V Koto Kampung Dalam	766	2.400	12,2	8,9
13	V Koto Timur	927	1.104	14,8	4,1
14	Sungai Limau	928	1.739	14,8	6,4
15	Batang Gasan	592	1.264	9,5	4,7
16	Sungai Geringging	304	3.134	4,9	11,6
17	IV Koto Aur Malintang	423	1.807	6,8	6,7
Jumlah		6.260	27.075	100	100

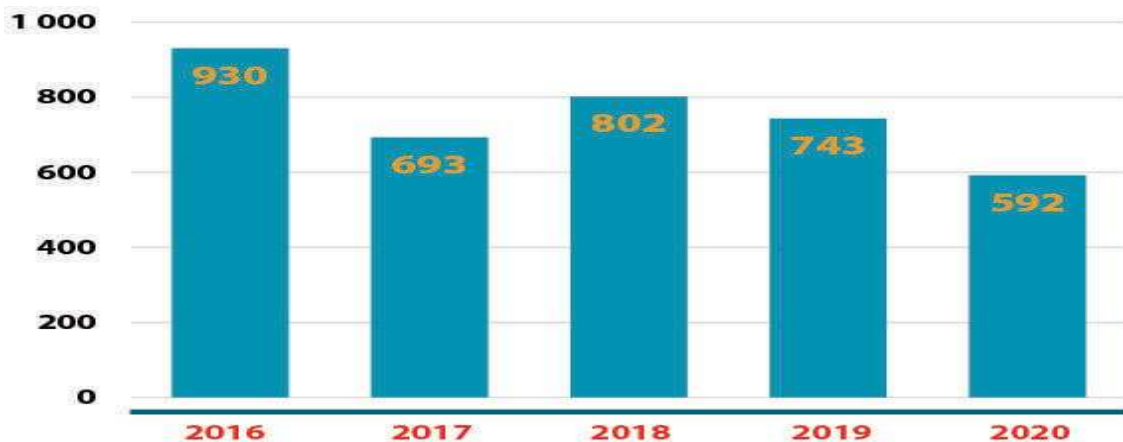
Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 2.2.1.6 Angka Kriminalitas Tertangani

Letak Kabupaten Padang Pariaman yang strategis, disamping daerah penyangga ibukota provinsi Sumatera Barat, juga perlintasan terhadap

mobilitas dari kabupaten/kota lainnya. Oleh sebab itu, Kabupaten Padang Pariaman dihadapkan pada masalah kerentanan akan kriminalitas. Data statistik menunjukkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, masih bersifat fluktuatif. Berikut adalah rincian kriminalitas dan gangguan baik dari jumlah kasus maupun yang tertangani pada tahun 2016-2020 di Kabupaten Padang Pariaman.

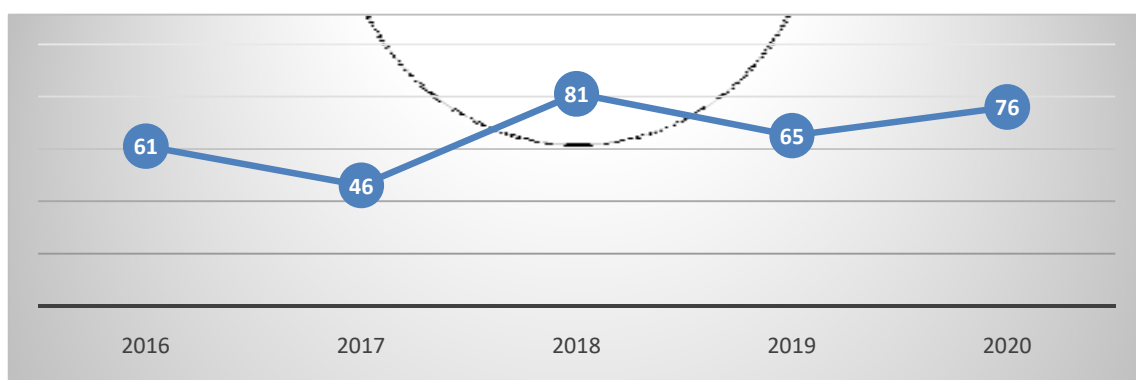
**Gambar 2.17**  
**Angka Kriminalitas dan Gangguan**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman 2021

Dari data olahan di atas, dapat digambarkan persentase penyelesaian tindak pidana dan gangguan di Kabupaten Padang Pariaman pada grafik di bawah ini :

**Gambar 2.18**  
**Persentase Penyelesaian Tindak Pidana dan Gangguan**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021 (Data Olahan)

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

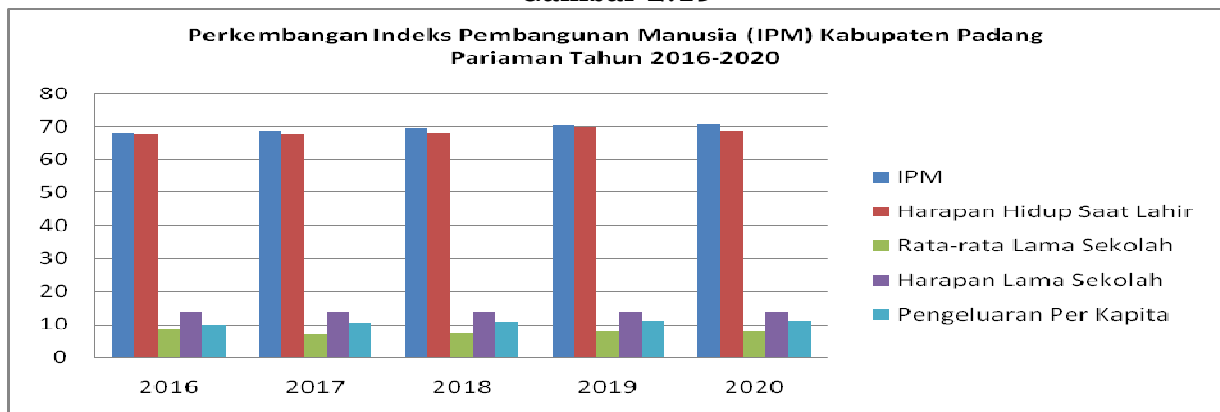
Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga kesehatan dan pendidikan. Dalam subbab ini akan diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap indikator yang relevan. Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus berorientasi kepada masyarakatnya,

yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai manusia.

Pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi pokok, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli (standar kehidupan layak) dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di suatu wilayah. Mulai tahun 2016 IPM dihitung menggunakan metode yang baru, mengikuti rekomendasi dari *United Nations Development Programme* (UNDP). Perubahan metode tersebut adalah pada penggunaan variabel rata-rata lama sekolah serta rata-rata indeksinya dihitung dengan rata-rata geometrik. Menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya, UNDP mendefinisikan tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

IPM Kabupaten Padang Pariaman tercatat selalu meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Padang Pariaman sebesar 70,61. Secara umum, besaran nilai IPM tersebut tergolong berstatus tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi-dimensi tersebut, digunakan komponen Umur Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan. Perkembangan indeks pembangunan manusia dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.19 di bawah ini:

**Gambar 2.19**



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman 2021

Data BPS di atas, menunjukkan bahwa nilai IPM di Kabupaten Padang Pariaman di bawah rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Untuk meningkatkan posisi IPM di Kabupaten Padang Pariaman, memang diperlukan terobosan dan kerja keras secara simultan dan terus menerus terutama pada pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, karena variabel utama dalam penghitungan IPM sangat ditentukan oleh keberhasilan peningkatan kualitas manusia dari segi pendidikan dan kesehatan dan ditunjang dengan pendapatan per kapita yang lebih baik dari waktu ke waktu. Memperpanjang angka harapan hidup, memperpanjang angka rata-rata lama sekolah dan meningkatkan pendapatan perkapita.

### 2.2.2.1 Angka Rata-Rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 Kabupaten Padang Pariaman terus menunjukkan perbaikan. Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 10 tahun dan maksimal 15 tahun. Perkembangan yang relatif baik untuk angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.24.

**Tabel 2.24**  
**Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

Kabupaten	2016 (tahun)	2017 (tahun)	2018 (tahun)	2019 (tahun)	2020 (tahun)
Kabupaten Padang Pariaman	7,00	7,21	7,50	7,86	7,87
Provinsi Sumatera Barat	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 2.24 di atas dapat dijelaskan bahwa, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2016-2020, rata-rata lama sekolah berada di 7,87 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa program belajar 9 tahun akan masih dioptimalkan.

### 2.2.2.2 Rata-Rata Harapan Lama Sekolah

Angka rata-rata harapan lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata harapan lama sekolah di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2016-2020 rata-rata harapan lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan peningkatan, dapat dilihat pada Tabel 2.25.

**Tabel 2.25**  
**Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

Kabupaten	2016 (tahun)	2017 (tahun)	2018 (tahun)	2019 (tahun)	2020 (tahun)
Kabupaten Padang Pariaman	13,55	13,56	13,57	13,62	13,67
Provinsi Sumatera Barat	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 2.2.2.3 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program

pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.26.

**Tabel 2.26**  
**Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Padang Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

Kabupaten	2016 (tahun)	2017 (tahun)	2018 (tahun)	2019 (tahun)	2020 (tahun)
Kabupaten Padang Pariaman	67,80	67,96	68,23	68,58	68,79
Provinsi Sumatera Barat	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 2.26 di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 angka harapan hidup di Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan dengan angka harapan hidup di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020 angka harapan hidup di Kabupaten Padang Pariaman meningkat menjadi 68,79. Ini menandakan adanya perbaikan status sosial ekonomi dan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman.

#### 2.2.2.4 Daya beli Masyarakat

Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Daya beli masyarakat ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli antar daerah berbeda-beda, semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir daya beli masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman relatif mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.27.

**Tabel 2.27**  
**Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Padang Pariaman	10.455	10.579	10.919	11.158	N/A
Provinsi Sumatera Barat	10.126	10.306	10.638	10.925	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman 2021

Dari Tabel 2.27 di atas dapat dilihat bahwa kemampuan daya beli masyarakat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, daya beli masyarakat Kabupaten Padang Pariaman mencapai Rp. 11.158 ribu per unit barangnya. Selama tahun 2016-2020, daya beli masyarakat

Kabupaten Padang Pariaman, selalu berada di atas rata-rata daya beli masyarakat di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pengembangan seni budaya, kepemudaan, dan olahraga menjadi kegiatan yang penting. Salah satu kinerja pengembangan seni dan budaya berdampak terhadap kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan, tidak terkecuali Padang Pariaman. Pada tahun 2020, Padang Pariaman memiliki 38 objek wisata sejarah; 33 objek wisata alam; 10 objek wisata pantai; 9 objek wisata minat khusus dan 3 objek wisata budaya.

**Gambar 2.20**  
**Jumlah dan Jenis Objek Wisata di Kabupaten Padang Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman 2021

Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara selama periode 2016-2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan domestik sebanyak 395.904 orang dan mancanegara sebanyak 886 orang, mengalami penurunan pada tahun 2020 dimana jumlah kunjungan wisatawan domestik sebanyak 208.808 orang dan mancanegara sebanyak 64 orang, dapat dilihat pada Gambar 2.21.

Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, karena melalui perbaikan sarana dan prasarana seni dan budaya, diharapkan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara tersebut, mengingat efek domino yang akan dirasakan oleh masyarakat Padang Pariaman terutama untuk masyarakat di sekitar objek wisata. Selanjutnya untuk olahraga, melalui event-event olahraga bertaraf internasional seperti Tour De Singkarak, diharapkan dapat memicu pergerakan ekonomi masyarakat. Perbaikan sarana dan prasarana terhadap olahraga terus dilakukan.



**Gambar 2.21**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman 2021

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelayanan publik yang berkualitas masih menjadi kendala bagi pemerintah karena berbagai hambatan-hambatan baik dari segi sikap, perilaku dan mentalitas SDM dalam hal ini PNS sebagai aparatur pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan melayani dan bukan untuk dilayani. Sekaligus berupaya mempertahankan dukungan, kepercayaan masyarakat dengan mereformasi wawasan berfikir dan mengevaluasi kinerja sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Upaya-upaya menuju peningkatan kualitas pelayanan tersebut dengan memahami: unsur-unsur dan jenis pelayanan publik, kegiatan pelayanan, penyelenggaraan publik, azas, prinsip, standar pelayanan publik, kualitas dan dimensi pelayanan agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami formulasi aspek-aspek pelayanan publik diharapkan pegawai sebagai aparatur negara dapat meningkatkan produktivitas pekerjaannya dalam hal pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan publik yang berkualitas.

Unit pelayanan yang menjadi sampel pada survey indeks kepuasan masyarakat ini dari tahun 2017-2020 adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Rumah Sakit Umum Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hasil survey indeks kepuasan masyarakat masing-masing unit pelayanan diatas dapat kita lihat pada Tabel 2.27 berikut ini:



**Tabel 2.28**  
**Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Enam Unit Pelayanan**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Unit Pelayanan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				82,02	B	Baik	83,01	B	Baik	86,27	B	Baik	90,42	A	Sangat Baik
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian				72,90	C	Kurang Baik	77,24	B	Baik	80,27	B	Baik	88,52	A	Sangat Baik
3	Rumah Sakit Umum Daerah				75,17	C	Kurang Baik	76,97	B	Baik	82,41	B	Baik	86,50	B	Baik
4	Perusahaan Daerah Air Minum				70,61	C	Kurang Baik	76,69	B	Baik	74,81	C	Kurang Baik	78,15	B	Baik
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				68,39	C	Kurang Baik	70,22	C	Kurang Baik	78,90	B	Baik	77,24	B	Baik
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				-	-	-	-	-	-	76,60	C	Kurang Baik	79,15	B	Baik
7.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,09	C	Kurang Baik
	Rata-rata				73,82			76,83			79,88			78,61		

Sumber: Hasil Executive Report Bagian Organisasi dan PAN, 2021

Nilai survey indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 dengan sampel unit pelayanan tersebut memperoleh nilai rata-rata 78.61 dengan kategori B. Nilai tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2019.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada urusan konkuren pemerintahan terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 urusan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan dan urusan pemerintahan pilihan terdiri 8 urusan, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

### 2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman diarahkan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kabupaten Padang Pariaman memiliki kewenangan atas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan usia dini dan pendidikan non formal. Adapun perkembangan pelayanan urusan Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.29 berikut ini.

**Tabel 2.29**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pendidikan**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>PENDIDIKAN</b>					
<b>Pendidikan dasar:</b>					
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	99,23	99,87	94,40	98,73	99,15
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	63,47	210,90	131	170	170
Rasio guru/murid	13,60	13,28	12,35	15,67	14,240
<b>Fasilitas Pendidikan:</b>					
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi ruang kelas baik	98,25	97,00	90,47	93	99
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas baik	88,00	86,00	82,61	96	95
<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):</b>					
Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA	8.773	8.240	9.665	8.448	4.643
Angka melek huruf	93,50	98,31	98,00	98,3	99,48
Angka rata-rata lama sekolah	8,50	8,40	7,50	7,86	7,87
Angka Partisipasi Kasar	68,03	70,07	30,55	23,50	20,45

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 2.29 diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2020 sebanyak 99.15%, meningkat dari tahun 2019, dengan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah meningkat sebesar 170,

rasio guru/murid sebesar 1 : 14,28. Angka partisipasi sekolah pada pendidikan dasar pada tahun 2020 untuk kelompok usia 7 hingga 12 tahun sebesar 99,84%, dan umur 13 hingga 15 tahun sebesar 97,98%. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah naik sebesar 170. Sedangkan fasilitas pendidikan untuk sekolah pendidikan SD/MI kondisi ruang kelas baik sebesar 99%, Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas baik sebesar 95.00%. Angka melek huruf mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu 99,48%.

### 1) Angka Partisipasi Sekolah

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Pendidikan anak tidak hanya pada sekolah formal seperti SD, SMP, dan SMA, namun pendidikan anak dimulai sejak anak usia balita (bawah lima tahun), bahkan batita (bawah tiga tahun). Diyakini bahwa masa balita seorang anak adalah masa keemasan pertumbuhan otaknya. Dimasa keemasan ini akan sangat berpengaruh saat mereka dewasa nantinya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada tingkat dasar, APS merupakan jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar 7-12 tahun atau setara SD dan usia 13-15 tahun atau setara SMP yang sedang bersekolah di SD dan SMP per 1.000 jumlah penduduk usia SD dan SMP. Berikut adalah Tabel 2.30 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Padang Pariaman tahun Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.30**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Kelompok Usia	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Pendidikan Dasar</b>					
7-12 tahun	99,44	99,87	99,49	99,83	99,84
13-15 tahun	96,95	98,30	98,52	97,63	97,98

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka, 2021

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa APS untuk pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2019 pada anak usia 7-12 tahun. Sedangkan untuk anak pada usia 13-15 tahun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan, pada anak dengan rentang usia 7-12 tahun keinginan dari masyarakat penduduk Kabupaten Padang Pariaman untuk mendapatkan pendidikan dan arti pentingnya pendidikan bagi masa depan selalu meningkat setiap tahunnya.

## 2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama, ditampilkan melalui Tabel 2.31 berikut ini:

**Tabel 2.31**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>Angka Partisipasi Murni</b>					
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	98,00	87,71	101,42	99,24	99,36
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	71,00	56,51	87,39	76,14	76,77

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2020 mencapai 99,36% namun ditingkat SMP/MTS baru mencapai 76,77%. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman relatif berfluktuasi dari tahun 2016 hingga 2020, untuk jenjang pendidikan SD/MI Kabupaten Padang Pariaman

## 3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2016-2020. Secara lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.32.

**Tabel 2.32**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>Angka Partisipasi Kasar</b>					
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	68,03	70,07	30,55	23,50	20,45
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	103,39	101,29	116,45	109,60	109,76
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	90	74,1	115,44	90,20	92,08

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 mencapai 109,76% dan di tingkat SMP/MTS yaitu 92,08% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa APK untuk pendidikan dasar maupun menengah di Kabupaten Padang Pariaman relatif mengalami peningkatan dari tahun 2016

hingga tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2019 mengalami penurunan. Khusus untuk APK tingkat pendidikan dasar dengan persentase 100% menunjukkan bahwa adanya siswa yang rentang umurnya melebihi standar umur untuk menempuh tingkat pendidikan dimaksud tapi masih menunjukkan kesadaran akan pentingnya pendidikan masih tinggi walaupun ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi seperti kemudahan mendapat akses pendidikan di tingkat dasar.

#### **4) Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah**

Dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar, pemerintah kabupaten Padang Pariaman senantiasa menyediakan sarana fasilitas pendidikan. Pembangunan sekolah baru tentunya harus mempertimbangkan keberadaan anak usia sekolah yang berada pada wilayah tersebut. Dalam melihat keterbandingan jumlah sekolah dengan penduduk usia sekolah dapat dilihat angka rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Pada Tabel 2.33 dapat dilihat rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar terhadap penduduk usia sekolah dasar menengah pada tahun 2019 sebesar 1 : 170 yang berarti 170 sekolah tingkat pendidikan dasar tersedia untuk 10.000 penduduk usia pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan tahun 2020 rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar mengalami perbaikan menjadi 1:161.



**Tabel 2.33**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Dasar Menengah**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Kelompok Usia	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rasio Ketersediaan Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rasio Ketersediaan Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rasio Ketersediaan Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rasio Ketersediaan Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Rasio Ketersediaan Sekolah
Pendidikan Dasar (Usia 7-15)	468	78.669	1 : 168	468	79.030	1 : 169	469	64.099	1 : 136	498	79.542	1:170	471	75.991	1:161

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

**Tabel 2.34**  
**Rasio Ketersediaan Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Kelompok Usia	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Ketersediaan Guru dan Murid	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Ketersediaan Guru dan Murid	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Ketersediaan Guru dan Murid	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Ketersediaan Guru dan Murid	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Ketersediaan Guru dan Murid
Pendidikan Dasar	6390	77135	1 : 12	5064	70050	1 : 14	5.064	70.050	1 : 14	4.662	73.076	1 : 17	4.656	66.304	1 : 14

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

## 5) Rasio Guru Terhadap Murid

Penunjang keberhasilan program pendidikan akan sangat tergantung ketersediaan tenaga pengajar/guru. Keterbandingan jumlah guru dan murid dapat dilihat dari besaran rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio guru terhadap muridnya pada jenjang pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Dari Tabel 2.34 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2020 pada pendidikan dasar, satu orang guru mendidik 14 murid. Padahal sesuai dengan PP 74 tahun 2008 tentang Guru, untuk TK, RA, atau yang sederajat memiliki rasio 15:1; untuk SD atau yang sederajat 20:1; untuk MI atau yang sederajat 15:1; untuk SMP atau yang sederajat 20:1; untuk MTs atau yang sederajat 15:1. Hal ini membuktikan kita di Kabupaten Padang Pariaman masih memerlukan tambahan tenaga pendidik disamping masih belum adanya pemerataan guru di tiap daerah.

## 6) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa profesi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Persyaratan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas belajar mengajar.

Pada Tabel 2.35 dapat dilihat perkembangan persentase Guru tingkat pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Padang Pariaman.

**Tabel 2.35**  
**Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	89,23	94,00	91,88	93,21	93,26

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 2.35 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2020 guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Padang Pariaman mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 93,26. Hal ini menunjukkan bahwa mutu guru di Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan dari tahun 2018 akan tetapi masih perlu ditingkatkan fungsi UKG sebagai salah satu syarat untuk mengukur kualitas guru serta memaksimalkan fungsi LPTK di daerah.



## 7) Angka Kelulusan Sekolah (AL)

Angka Kelulusan Sekolah (AL) dan Angka Putus Sekolah (APS) juga mempengaruhi nilai IPM. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Banyak faktor yang jadi penyebab dari ketidak tercapaiannya rata-rata lama sekolah selama 12 tahun, antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan, yang dianggap belum menjanjikan, serta mahalnya biaya pendidikan menjadi kendala selanjutnya. Untuk angka kelulusan sekolah di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.36.

**Tabel 2.36**  
**Angka Kelulusan Sekolah**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>Angka Kelulusan:</b>					
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,95	100,00	99,61	100,00	100,00
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,86	99,89	98,10	98,20	100,00
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	70,85	99,50	98,40	93,20	99,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 2.36 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2020 angka kelulusan sekolah di Kabupaten Padang Pariaman relatif cukup tinggi. Dimana pada tahun 2020 angka kelulusan (AL) SD/MI yaitu 100% mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2018 yaitu di angka 99,61%. Untuk angka kelulusan (AL) SMP/MTs yaitu 100% di tahun 2020, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yaitu 98,20%. Hal ini mengindikasikan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup baik disamping faktor lain yang mendukung capaian dimaksud.

## 8) Angka Putus Sekolah

Salah satu indikator untuk menilai kinerja pendidikan yaitu angka putus sekolah adalah jumlah siswa yang *drop out* dibandingkan dengan seluruh siswa yang ada di sekolah.

**Tabel 2.37**  
**Angka Putus Sekolah**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>Angka Putus Sekolah:</b>					
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,03	0,12	0,10	0	0,25
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,08	0,16	0,76	0,8	0,1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 2.37 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2020 angka putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Padang Pariaman relatif cukup rendah yaitu 0,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa mutu pendidikan

di Kabupaten Padang Pariaman sudah baik, hal ini karena ada beberapa faktor-faktor yang mendukung masyarakat untuk dapat tetap menerima layanan pendidikan seperti adanya program beasiswa yang diberikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

### 2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Permasalahan yang sering kali dihadapi dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan yaitu kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang belum optimal, kualitas pelayanan kesehatan masyarakat belum maksimal sesuai dengan SPM kesehatan serta pemerataan dan perluasan kesempatan kerja belum memenuhi target. Adapun perkembangan pelayanan urusan Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.38 berikut ini.

**Tabel 2.38**  
**Capaian Kinerja Urusan Kesehatan**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>KESEHATAN</b>					
Rasio posyandu per satuan balita x 1000	22,41	22,88	19,86	19,12	1,99
Rasio puskesmas per satuan penduduk x 1000	0,06	0,0608	0,06	0,06	0,06
Rasio pustu per satuan penduduk x 1000	0,18	0,165	0,19	0,19	0,20
Persentase rumah tangga pengguna air bersih/jumlah seluruh rumah tangga	60	62,49	66,5	71,86	71,95
Persentase Rumah tangga Bersanitasi Layak	63,7	66,61	63,15	61,66	99,79
Rasio polindes/poskesri per satuan penduduk x 1000	0,18	0,1460	0,20	0,21	0,22
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk x 1000	0,002	0,0024	0,002	0,002	0,002
Rasio dokter per satuan penduduk x 1000	0,107	0,0802	0,117	0,122	0,079
Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000	1,18	1,102	1,21	1,23	1,61
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	82,00	100,83	99,2	102,72	88,5
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	91,00	86	89,67	96	69,0
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100,00	87,05	82,8	82,6	27,5



Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	86,10	74,7	78	85,9	21,3
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	132	37
Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui pengembangan Jamkesmas dan Jemkesda	82,00	82,67	133,87	73,8	74,99
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	8,70	99,27	108,18	95,00	95
Cakupan kunjungan bayi (%)	91,00	95,02	92,71	98,9	91,3
Cakupan puskesmas (%)	142,36	143,36	143,36	143,53	143,53
Cakupan pembantu puskesmas (%)	38,58	39,08	39,08	39,08	39,08
Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar dari RS (Net Death Rate=NDR= Angka kematian neto) 2.5%	0,03	3,5	3,1	1,26	0,15
Waktu tunggu pasien di rawat jalan ≤ 60 menit	30 menit	20	50	15	15
Angka kematian Umum untuk setiap 1.000 penderita keluar RS (Gross Death Rate=GDR 4.5%)	0,05	22,9	6	2,95	0,3
Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana RS (100%)	1,00	1,00	1,00	1,00	85
Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien (≥90%)	90	90	90	90	95
Persentase limbah cair & padat RS yang memenuhi baku mutu (BOD <30 mg/l, COD <80 mg/l, TSS < 30 mg/l dan PH 6 -9) mencapai (100%)	100	100	100	100	100
Angka pemanfaatan Tempat Tidur RS (Bed occupancy Rate=BOR) (60% – 85%)	0,36	29,24	55	62,69	49,44

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, 202

### 1) Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Kesehatan Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/pilihan. Kegiatan utama mencakup: kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana; imunisasi; gizi; serta pencegahan dan penanggulangan diare. Semua anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar yang ada di Posyandu terutama: bayi dan anak balita; ibu hamil; ibu nifas; dan ibu menyusui; pasangan usia subur serta pengasuhan anak.

Salah satu upaya untuk mengurangi angka kematian anak balita adalah dengan melakukan pemeliharaan kesehatannya. Pemeliharaan kesehatan anak balita dititikberatkan kepada upaya peningkatan kesehatan dan pada pengobatan dan rehabilitasi. Pelayanan kesehatan anak balita ini dapat dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu, polindes terutama di posyandu. Untuk rasio posyandu persatuan balita di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.39.

**Tabel 2.39**  
**Perkembangan Jumlah Posyandu dan Balita**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	22,41	22,88	24,36	19,12	1,99

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 2.39 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2020 rasio posyandu persatuan balita mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 sebesar 1,99 menurun bila dibandingkan dari tahun 2019 yaitu 19,12. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 posyandu melayani 2 orang balita dari 1000 balita yang ada. Hal ini masih dirasa sangat jauh dari kondisi ideal mengingat pentingnya peran posyandu dalam menyiapkan generasi yang berkualitas. Untuk itu perlu diadakan revitalisasi Posyandu dimasa yang akan datang.

## 2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Indikasi peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan diantaranya ditunjukkan dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi AKHB, Angka Kematian Bayi AKB dan Angka Kematian Balita AKABA. AKHB adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari satu tahun pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran.

Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 adalah sebesar 993,81. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu 999,961. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.40 di bawah ini:

**Tabel 2.40**  
**Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Angka kelangsungan hidup bayi	993,11	998,23	993,00	999,961	993,81

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

## 3) Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas

menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Adapun perkembangan angka usia harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.41 berikut ini.

**Tabel 2.41**  
**Angka Usia Harapan Hidup**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Angka harapan hidup	69,55	67,98	69,76	69,87	68,79

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 2.41 di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 angka usia harapan hidup menunjukkan penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 68,79. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah, khususnya menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang harus terus meningkat dari tahun ke tahun.

#### 4) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 adalah sebesar 22 orang lahir mati dari kelahiran hidup yaitu 6.847 orang. Mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2019, dimana angka kematian bayi 9 orang dan yang lahir hidup 7.726 orang. Jumlah kelahiran dan kematian menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.42.

**Tabel 2.42**  
**Angka Kelahiran dan Kematian Bayi**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

NO	KECAMATAN	LAHIR HIDUP	LAHIR MATI	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Batang Anai	864	-	864
2.	Lubuk Alung	833	3	836
3.	Sintuk Toboh Gadang	337	3	340
4.	Ulakan Tapakis	343	-	343
5.	Nan Sabaris	421	2	423
6.	2 x 11 Enam Lingkung	371	2	373
7.	Enam Lingkung	308	1	309
8.	2 x 11 Kayu Tanam	315	-	315
9.	VII Koto	629	2	631
10.	Patamuan	258	4	262
11.	Padang Sago	142	1	143
12.	V Koto Kampug Dalam	363	-	363
13.	V Koto Timur	224	-	224
14.	Sungai Limau	446	-	446
15.	Batang Gasan	174	1	175
16.	Sungai Geringging	487	1	488
17.	IV Koto Aur Malintang	332	2	334
	<b>Jumlah</b>	<b>2020</b>	<b>22</b>	<b>6869</b>
		<b>2019</b>	<b>9</b>	<b>7735</b>
		<b>2018</b>	<b>19</b>	<b>7699</b>
		<b>2017</b>	<b>14</b>	<b>7938</b>
		<b>2016</b>	<b>19</b>	<b>7252</b>

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

## 5) Balita Gizi Buruk

Perkembangan persentase gizi buruk dan gizi kurang selama periode 2016-2020 selalu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 persentase gizi buruk dan gizi kurang tercatat 11%. Namun pada tahun 2020 angka ini berhasil ditekan sampai 4,8%. Data lengkap perkembangannya dapat dilihat pada Tabel 2.43.

**Tabel 2.43**  
**Perkembangan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang	11,00	10,01	9,8	9,34	4,8
Persentase Cakupan Pelayanan Gizi Buruk	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

## 6) Prevalensi Balita Stunting

Terjadinya penurunan Stunting di Kabupaten Padang Pariaman dalam 5 tahun terakhir ini dikarenakan adanya komitmen yg kuat serta dukungan dari semua lintas program dan lintas sektor yg ada, baik ditingkat Kabupaten, kecamatan dan nagari. Intervensi Spesifik dan sensitif yg terintegrasi selain itu Intervensi Stunting pada sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dilakukan dari hulu ke hilir nya, Adanya program pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan Pos Gizi, Duta Gizi, Pelatihan PMBA pada Kader, serta program inovasi dari Nagari. Pendekatan penyampaian intervensi, yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi dan bersama-sama untuk mencegah stunting, kepada sasaran prioritas.

Aksi Konvergensi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan, yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, dalam pencegahan dan penurunan stunting. Aksi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor (dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota) agar program dan kegiatan intervensi gizi tepat sasaran.

Efektifitas penurunan stunting sangat ditentukan oleh seberapa menyeluruh atau terpadunya intervensi gizi, yang menysasar lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Semakin lengkap dan terpadunya intervensi gizi di lokasi dan kelompok sasaran prioritas, maka upaya percepatan penurunan stunting akan semakin efektif.

Upaya percepatan penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi gizi, diantaranya:

1. Spesifik (bila cakupan 90%, kontribusi penanganan stuntingnya 20-30%)

Intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek

- a) Ibu Hamil
  - ✓ Suplementasi besi folat
  - ✓ Pemberian makanan tambahan
  - ✓ kelas ibu hamil
  - ✓ PMT pada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
  - ✓ Penanggulangan kecacingan
  - ✓ Suplementasi kalsium
  - ✓ Pemberian kelambu dan pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria
- b) Ibu Menyusui
  - ✓ Promosi menyusui
  - ✓ Komunikasi perubahan perilaku untuk memperbaiki pemberian makanan pendamping ASI
- c) Bayi 0-23 Bulan
  - ✓ Suplementasi zink
  - ✓ Zink untuk manajemen diare
  - ✓ Suplemen vitamin A
  - ✓ Pemberian garam iodium
  - ✓ Pencegahan kurang gizi akut
  - ✓ Pemberian obat cacing
  - ✓ Kegiatan suplementasi

## 2. Sensitif (berkontribusi 70-80% pada penanganan stunting)

Intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1.000 HPK

- a) Penyediaan air bersih dan sanitasi
  - Meningkatkan kualitas dan fasilitas air bersih, sanitasi serta integrasi dengan lokus masalah gizi
- b) Ketahanan pangan dan gizi
  - Budidaya sumber pangan local (memperkuat program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
  - Distribusi dan konsumsi pangan
    - Perluasan pengawasan garam beryodium dan implementasi tindak lanjut hasil pengawasan
- c) Keluarga Berencana
  - Pelatihan dan penguatan PLKB
  - Mengembangkan kurikulum kursus calon pengantin
- d) Pengentasan Kemiskinan
  - Penyediaan data dan program PKH, BPJS dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
- e) Akses terhadap pangan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, penyediaan anggaran pada APBD Desa
- f) Jaminan Kesehatan Dasar
  - Meningkatkan kualitas layanan
- g) Kebijakan terkait pelabelan, promosi dan iklan susu formula, makanan olahan serta terkait fortifikasi

- h) Pendidikan Gizi Masyarakat  
Memperkuat strategi KIE dan perubahan perilaku serta pelaksanaan PAUD-HI
- i) Intervensi untuk Remaja Perempuan  
Pendidikan kesehatan reproduksi, tumbuh kembang, ASI Eksklusif, MP-ASI
- j) Pendewasaan usia pernikahan, pendidikan gizi dan kesehatan di madrasah serta pondok pesantren
- k) pekerja anak, ruang laktasi di perusahaan
- l) Revitalisasi posyandu, distribusi tenaga kesehatan, PKK
- m) Kampanye stunting
- n) Advokasi kebijakan, penguatan koordinasi perencanaan dan penganggaran

Peran masyarakat adalah membantu memastikan intervensi gizi dapat diakses secara lengkap oleh setiap Rumah Tangga.

**Tabel 2.44**  
**Persentase Balita Stunting**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Prevalensi Balita Stunting (%)	N/A	20.5	19.5	16.1	15,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1) Pekerjaan Umum

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah setiap tahunnya agar dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 Tahun 2014 urusan wajib/pelayanan dasar PU yaitu Sumber daya air/pengairan (bidang infrastruktur pengairan/irigasi, termasuk operasional/pemeliharaan), Jalan dan Jembatan (Bidang infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk pemeliharaan), Cipta Karya (Bidang Infrastruktur jaringan air bersih/air minum, sanitasi/MCK, Bangunan Gedung, Drainase, dan Jalan Lingkung) dan Penataan Ruang (Bidang Perencanaan/Pengendalian Ruang Kawasan).

Jalan merupakan faktor pendukung utama pembangunan, baik pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya maupun infrastruktur lain. Sampai dengan tahun 2020 terdapat panjang jalan 2.251,74 Km yang terdiri dari jalan Negara 83,57Km, jalan Provinsi 95,77 Km, jalan Kabupaten 2.072,4 Km.

Sejak tahun 2019 dalam rangka mengantisipasi perkembangan volume lalu lintas yang ditandai dengan bertambah padatnya arus lalu lintas pada jalur jalan Negara Padang- Bukittinggi setiap tahunnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah merintis pembangunan jalan lingkaran dari Duku - Sicincin dan Sicincin - Malalak, serta pembangunan



jalan Tol Padang-Pekan Baru. Dalam rangka mengantisipasi arus lalu lintas Ibu Kota Kabupaten-Kota Pariaman-Bandara Internasional Minangkabau (BIM) maka dilakukan pelebaran jalan terutama dari Pakandangan menuju Sicincin dan Pasar Usang menuju Bandara Internasional Minangkabau. Disamping itu untuk meningkatkan lingkungan permukiman yang tertata, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan pembangunan dan pembenahan jalan lingkungan termasuk saluran lingkungannya.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2016-2020 dapat terlihat dari Tabel 2.45 dibawah ini :

**Tabel 2.45**  
**Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>PEKERJAAN UMUM</b>					
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	45,36	46,71	62,28	63,68	67,00
Panjang jalan dilalui Roda 4	1.855,5 Km	1.878 Km	1.878 Km	1.878 Km	1.666,00
Persentase Jalan Mantap (%)	57,75	59,47	62,28	63,68	64,28
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40)KM/Jam )	893,40 Km	968,02 Km	1053,75 Km	1274,06 Km	701,70
Rasio Jaringan Irigasi (%)	40,13	43,00	47,12	55,26	85,37
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	39,35	42,45	62,84	65,98	75,00
Panjang Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (M)	52,00	55,00	55,10	55,10	2.417,28
Persentase Gedung Kantor yang terbangun di kawasan Ibukota Kabupaten	0,38	0,46	0,56	0,57	0,57
Rumah tangga pengguna air bersih (%)	60	62,49	66,5	71,86	71,95
Terbangunnya jaringan air bersih (%)	40,13	43,00	47,12	55,26	66,7
Rumah tangga bersanitasi layak (%)	59	60,7	62,67	63,26	63,78

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Untuk rumah tangga pengguna air bersih terjadi peningkatan sebesar 8,06% pada tahun 2019 bila dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini karena terbangunnya jaringan air bersih yang juga mengalami peningkatan sebesar 17,28% pada tahun 2019. Sementara rumah tangga bersanitasi layak juga mengalami peningkatan sebesar 0,94% pada tahun 2019 bila dibandingkan pada tahun 2018.

#### **a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik**

Dari Tabel 2.45 diatas menunjukkan bahwa kecendrungan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2019 sebesar 63,68% sampai tahun 2020 sebesar 67,00%, naik sebesar 3,32%.

**b. Panjang Jalan Dilalui Roda 4**

Panjang jalan dilalui roda 4 terjadi penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2020, minus sebesar 212 Km karena tingkat kerusakan lebih tinggi dari tingkat perbaikan/pembangunan.

**c. Persentase Jalan Mantap**

Persentase jalan mantap mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2018 sebesar 62,28% sampai tahun 2019 sebesar 63,68%, naik sebesar 1,4%. dan pada tahun 2020 sebesar 64,28 mengalami kenaikan sebesar 0,6%.

**d. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/jam)**

Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/jam) mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2018 mencapai 1053,75 Km dan tahun 2019 mencapai 1.274,06 Km, naik sebesar 2,25% atau 220,31 Km dan pada tahun 2020 terjadi penurunan yaitu 701,70 Km.

**e. Rasio Jaringan Irigasi**

Rasio Jaringan Irigasi merupakan perbandingan antara panjang jaringan irigasi dengan luas area persawahan yang diairi, mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sebesar 30,11 %.

**f. Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik**

Luas irigasi dalam kondisi baik terjadi peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sebesar 9,02 persen.

**g. Panjang Drainase dalam Kondisi Baik**

Panjang drainase dalam kondisi baik terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 yaitu 55,10 dan sampai tahun 2020 yaitu sebesar 2.417,28.

**h. Persentase Gedung Kantor yang Terbangun di Kawasan Ibukota Kabupaten**

Gedung kantor yang terbangun di Kawasan Ibukota Kabupaten sampai tahun 2020 yaitu Gedung Kantor Dinas PUPR, Gedung Kantor Inspektorat, Gedung Kantor Bapelitbangda/BKPSDM, Masjid Raya Padang Pariaman dan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD.

**2) Penataan Ruang**

Urusan penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan dalam pelayanan dasar. Pemenuhan akan kebutuhan penataan ruang merupakan salah satu kebutuhan dasar yang terus diupayakan oleh pemerintah dengan jalan memberikan kemudahan dan menciptakan iklim yang dapat mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat serta membina agar pelaksanaan pembangunan perumahan dapat berlangsung dengan tertib.

**Tabel 2.46**  
**Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>PENATAAN RUANG</b>					
Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	895	905	895	905	943,99
Jumlah bangunan ber- IMB per satuan bangunan	143	125	143	125	55,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Dari Tabel 2.46 diatas menunjukkan bahwa rasio luas ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020, dimana pada tahun 2019 adalah 905 dan terus meningkat tiap tahun hingga pada akhir tahun 2020 adalah 943,99. Jumlah bangunan ber-IMB persatuan bangunan dilihat dari Tabel 2.44 mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan 2018 sebesar 143.

#### **2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Urusan perumahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan dalam pelayanan dasar. Pemenuhan akan kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terus diupayakan oleh pemerintah dengan jalan memberikan kemudahan dan menciptakan iklim yang dapat mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat serta membina agar pelaksanaan pembangunan perumahan dapat berlangsung dengan tertib. Pembangunan perumahan pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri, namun demikian pemerintah tetap berkewajiban dan terus mengupayakan keterlibatan dan peranan yang lebih aktif dari masyarakat dalam pembangunan perumahan, baik melalui swasta, koperasi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Hasrat masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki dan menempati rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat merupakan sasaran dan mendapat perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dapat dilihat dengan dianggarkannya melalui dana APBD untuk membantu pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak tahun 2016-2020. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selalu berupaya untuk meraih program pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan agar semakin besar lapisan masyarakat dapat menempati rumah dengan lingkungan permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi yang dilengkapi dengan sarana pelayanan dasar seperti air bersih dan listrik.

Pada Tabel 2.47 berikut ini dapat dilihat perkembangan perumahan masyarakat yang menggunakan air bersih, listrik dan rumah layak huni.

**Tabel 2.47**  
**Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>PERUMAHAN</b>					
Persentase rumah tangga pengguna listrik	93,01	95,60	99,07	99,09	99,11
Lingkungan pemukiman kumuh (Ha)	3.996,15	3.996,15	3.996,15	886,77	886,85
Persentase luas pemukiman yang tertata (%)	20	22	24	26	27
Rasio rumah layak huni (%)	58,7	60,1	62,3	65,5	63,1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas LHPKPP, 2021

Dari Tabel 2.47 diatas dapat dilihat bahwa rumah tangga pengguna listrik dari tahun 2016 s/d tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 cakupan rumah tangga pengguna listrik sebesar 93,01% hingga pada tahun 2020 sudah mencapai 99,11%, terjadi kenaikan sebesar 6,1%. Pada tahun 2020 terjadi pengurangan Lingkungan pemukiman kumuh sebesar 3.109,46 Ha, dimana pada tahun 2018 lingkungan pemukiman kumuh sebanyak 3.996,15 Ha dan pada tahun 2020 sebanyak 886,85 Ha. Sedangkan luas pemukiman yang tertata terjadi peningkatan sebesar 8,33% pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya.

### **2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ini diletakkan dalam suatu arah kebijakan dan prioritas pembangunan melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas, meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat serta meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik dan hukum. Secara Nasional Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pendayagunaan dan mengoptimalkan seluruh potensi masyarakat. Adapun perkembangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.48 berikut ini.

**Tabel 2.48**  
**Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan**  
**Perlindungan Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	3	4	5	6	7
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>					
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	1	1	1,00
Kegiatan pembinaan politik daerah	11	13	11	11	8,00



Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	3	4	5	6	7
Jumlah LSM yang dibina oleh Kesbangpol	105	115	108	113	108,00
Angka kriminalitas (kasus)	570	528	586	372	592
Jumlah demo (kasus)	1	1	1	0	0

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri pada beberapa Indikator pada umumnya mengalami kenaikan seperti adanya penurunan angka kriminalitas yang merupakan suatu keberhasilan dari segi capaian kinerja. Seterusnya untuk 3 indikator lainnya tidak menunjukkan peningkatan karena angka pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan angka pada tahun selanjutnya relatif berfluktuasi. Dari indikator kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2019 mengalami penurunan, yang biasanya dilakukan 2 kali setahun, namun pada tahun 2019 hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun. Kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 11 kegiatan, tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, jumlah LSM yang dibina mengalami peningkatan sebanyak 5 LSM, dimana pada tahun 2019 jumlah LSM yang dibina sebanyak 113 dan tahun 2018 sebanyak 108 LSM. Angka kriminalitas menurun sebanyak 106 kasus, dimana pada tahun 2019 sebanyak 372 kasus dan tahun 2018 sebanyak 586 kasus.

### 2.3.1.6 Urusan Sosial

Yang dimaksud dengan masalah sosial adalah suatu kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal, atau definisi masalah sosial yaitu ketidaksesuaian unsur-unsur masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal, maksudnya selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata maka masalah sosial akan tetap selalu ada didalam kehidupan. Objek dari penyandang masalah ini disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Adapun perkembangan Urusan Sosial Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.49 berikut ini.

**Tabel 2.49**  
**Capaian Kinerja Urusan Sosial**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>SOSIAL</b>					
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	13	7	7	7	7
PMKS yg memperoleh bantuan sosial	85,01	1,360	42,351	37,089	29,05
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	85,01	1,360	42,351	37,089	29,05
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)	91,09	91,54	91,96	92,90	92,46
Jumlah penduduk miskin(ribu jiwa)	36,34	34,7	33,20	29,48	23,67
Tingkat kemiskinan (%)	8,91	8,46	8,04	7,10	5,79

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Dari Tabel 2.49 dapat dilihat bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 mengalami penurunan dari segi jumlah dari tahun 2019 yaitu sebesar 8,03%. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 0,44%, dimana pada tahun 2019 mencapai 92,90% mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 92,46%. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan pada tahun 2020.

### **2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja**

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, produktifitas dan berdaya saing tinggi dengan pelatihan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan keterampilan berorientasi penempatan dan kemandirian tenaga kerja. Hal ini sebagai upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas kelembagaan, produk wajar dan peningkatan kinerja dinas. Isu strategis dalam urusan tenaga di kerja yaitu masih tingginya angka pengangguran dan pencari kerja, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Padang Pariaman sebagai dampak ekonomi serta perlunya program pelatihan bagi pencari kerja untuk menciptakan wirahusaha baru. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem informasi pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh.

Permasalahan yang dihadapi pada bidang ketenagakerjaan antara lain masih tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja, kurangnya kompetensi pencari kerja serta masih banyaknya pencari kerja yang tidak memiliki sertifikasi keahlian pencari kerja. Masalah ketenagakerjaan lainnya, seperti kasus pemogokan, perselisihan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kasus pekerja anak, dan sebagainya, juga turut mewarnai bidang ketenagakerjaan. Belum lagi masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya yang bekerja di sektor rumah tangga, juga menuai banyak masalah karena minimnya pengawasan dan perlindungan. Permasalahan ketenagakerjaan memiliki dampak yang bersifat multidimensional. Untuk itu penyelesaian masalah ketenagakerjaan diarahkan untuk dilaksanakan secara sistematis dan efektif dengan tidak hanya dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja tetapi juga penciptaan ketenangan dan

kenyamanan berusaha. Adapun perkembangan Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut ini:

**Tabel 2.50**  
**Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>KETENAGAKERJAAN</b>					
Angka partisipasi angkatan kerja	70,91	64,51	67,58	48,90	52,25
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	121,74	69,57	40	6	8
Tingkat partisipasi angkatan kerja	1,5	1,6	2,56	2,65	1,85
Pencari kerja yang ditempatkan (%)	38,02	60,02	65	65	5,10
Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,56	7,25	7,15	5,97	5,97
Keselamatan dan perlindungan (%)	58,26	58,26	50	58,25	57,7
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	2
Jumlah mencari Pekerjaan	2.478	4.148	3.500	3.423	3.439

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, 2021

Dari Tabel 2.50 diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Angkatan Kerja mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu 52,25% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 48,90%. Hal ini tidak memberikan gambaran tentang penduduk Padang Pariaman pada pertumbuhan ekonomi kearah yang positif, namun pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2019 dan sampai tahun 2020.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 adalah 5,97 persen. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Padang Pariaman relatif mengalami penurunan mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yaitu dari 7.25% turun sampai 5,97%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menurunkan angka pengangguran masuk kategori “Sangat Berhasil”. Walaupun dalam kondisi Covid 19, namun tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 ini sama jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Hal ini menunjukkan jumlah pengangguran tidak ada perubahan sama sekali di Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dapat diartikan angkatan kerja yang telah diterima bekerja telah sesuai dengan target yang direncanakan.

Dari segi iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman ada terjadi 2 (dua) kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja hal ini dapat dilihat pada Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang ada pada tahun 2020. Hal ini terjadi akibat dampak pandemi Covid 19, dimana dunia usaha banyak yang tidak beroperasi yang akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja hal ini terjadi pada BUMN, BUMD dan Swasta.

### 2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000, PUG didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan-kebijakan dan program-program dan kebutuhan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penganggaran dari semua kebijakan, program dan kegiatan disemua bidang kehidupan dan juga melalui peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengintegrasikan perbedaan permasalahan-permasalahan, pengalaman-pengalaman. Untuk memperkuat Inpres Nomor 9 tahun 2000 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah. Dalam Keputusan Mendagri ini, ditegaskan bahwa pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga pemerintahan di Propinsi, Kabupaten dan Kota yang pengaturan lebih lanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah di semua tingkatan hingga Kelurahan/Desa. Demikian pula dalam rangka menjalankan fungsi keluarga yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak sesuai dengan hak dan martabatnya diterbitkan undang undang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah menjamin dan melindungi anak dan haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat 2, UU No 23/2002). Adapun perkembangan pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.51.

**Tabel 2.51**  
**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0,12	8,50	6,62	14,28	15,00
Rasio KDRT (%)	0,22	0,002	0	0	0
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (orang)	20	28	18	26	23

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Dari Tabel 2.51 diatas dapat dilihat bahwa persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah sudah tinggi. Artinya dari segi jumlah keterwakilan wanita dalam pemerintahan sudah cukup besar. Untuk rasio KDRT di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan. Akan tetapi angka tersebut masih belum bisa menjadi patokan pasti bahwa kejadian KDRT sudah berkurang, hal ini masih kejadian yang laporannya sudah sampai pada P2TP2A sedangkan kemungkinan masih ada kejadian yang tidak terdeteksi. Begitu juga dengan jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang juga



mengalami fluktuasi dari tahun 2016 walaupun tidak terlalu signifikan. Oleh sebab itu masih perlu sosialisasi tentang aturan-aturan yang mengatur tentang KDRT seperti Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selanjutnya, sebagai upaya dalam memenuhi hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pemerintah daerah berkomitmen mewujudkan Kabupaten yang ramah anak hingga tingkat Nagari dengan menetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak.

Komitmen ini menunjukkan progres yang cukup baik dengan didapatkannya penghargaan pada tahun 2019 untuk Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penghargaan untuk KLA pada tahun pertama. Akan tetapi, pada tahun 2020 penghargaan KLA ditiadakan karena terkendala kondisi pandemi Covid-19. Selanjutnya capaian pada tahun 2021 meningkat satu level dengan mendapatkan penghargaan KLA kategori Madya.

Faktor utama penentu keberhasilan yang sudah dicapai pada tahun 2019 hingga tahun 2020 adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan, walaupun secara kuantitas sangat terbatas. Disamping itu dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja. Permasalahan yang dihadapi terutama dalam keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan tugas serta pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

### **2.3.2.3 Urusan Pangan**

Urusan merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, dimana Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Dilihat dari pengertiannya bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,

dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan dimaksud ada beberapa indikator yang bisa diukur sebagaimana terlihat pada Tabel 2.52 dibawah ini.

**Tabel 2.52**  
**Capaian Kinerja Urusan Pangan**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>KETAHANAN PANGAN</b>					
Nilai PDRB Sektor Pertanian (juta)	2.499.408,7	2.624.586,7	3.812.952,29	4.082.657,32	4.065.464,15
Persentase Nilai Tukar Petani	96,45	96,97	95,16	95,99	100,58
Jumlah Produksi beras (000/Ton)	155,90	174,55	152,62	159,334	283,127
Regulasi Ketahanan Pangan	1	1	1	0	0
Ketersediaan pangan utama kg/1000 pddk	702.490,38	695.430,89	656.413,95	709.848,01	
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	5,23	5,26	4,51	4,75	4,77
Kontribusi sektor pertanian Tan. Pangan terhadap PDRB (%)	19,90	19,33	18,65	19,19	22,66

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Pada Tabel 2.52 dapat dilihat nilai PDRB Sektor Pertanian sedikit mengalami penurunan sebesar 0.4% pada tahun 2020 bila dibandingkan pada tahun 2019, demikian juga nilai tukar petani yang mengalami peningkatan sebesar 4.59% pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar sebesar 4,77 ton/ha pada tahun 2020, meningkat sebesar 20 kg/ha pada tahun 2019 dimana produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar sebesar 4,75 ton/ha. Sedangkan distribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB adalah sebesar 22,66% pada tahun 2020, meningkat sebesar 3,46% bila dibandingkan pada tahun 2019.

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur ketersediaan pangan dan pengembangan distribusi/akses pangan masyarakat yaitu Skor pola pangan harapan (PPH).

**Tabel 2.53.**  
**Indikator dan Capaian Kinerja dari Sasaran Terwujudnya Ketersediaan Pangan Masyarakat**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Prediket/kategori
Skor pola pangan harapan (PPH)	88,5	88,1	99,55	Berhasil

Sumber : Laporan Kinerja DistanKP Tahun 2021

Untuk mengukur kinerja sasaran mewujudkan ketersediaan pangan dan mengembangkan distribusi/akses pangan masyarakat menggunakan indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Realisasi kinerja indikator ini memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 99,55% (Berhasil). Dimana Skor PPH ditargetkan sebesar 88,5 terealisasi sebesar 88,1. Skor pola pangan harapan (PPH) merupakan angka yang menunjukkan kualitas gizi dan keragaman konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Semakin tinggi angka/skor PPH maka semakin bergizi dan beragam pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Secara nasional sampai tahun 2020 skor PPH rakyat Indonesia ditargetkan mencapai angka 90. Dibandingkan dengan angka target nasional tahun 2020, skor PPH Kabupaten Padang Pariaman masih berada dibawah, yakni masih terpaat sebesar 1,9 poin.

Dalam upaya pemenuhan target skor PPH ini, seiring dengan pemenuhan kebutuhan energi dan protein yang dikonsumsi oleh masyarakat. Baik yang bersumber dari nabati maupun hewani. Konsumsi protein dan energi merupakan angka yang menunjukkan jumlah konsumsi protein dan energi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman per kapita per hari. Angka konsumsi protein Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 sebesar 645,85 gram/kap/hari naik dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2019 sebesar 64,40 gram/kap/hari. Angka konsumsi energi juga mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2019, dimana pada tahun 2019 sebesar 2.277,8 Kkal/kap/hari, menjadi 2.289,8 Kkal/kap/hari. Dibandingkan standar konsumsi energi nasional, konsumsi energi Kab. Padang Pariaman berada diatas angka nasional, dimana angka ideal nasional sebesar 2.150 Kkal/kap/hari. Sama halnya dengan konsumsi energi, konsumsi protein Kab. Padang Pariaman juga berada diatas angka kecukupan protein nasional yakni sebesar 57 gram/kp/hari. Berikut perkembangan Skor PPH, Konsumsi Protein dan Energi dari tahun 2016.

**Tabel 2.54**  
**Perkembangan Skor PPH, Konsumsi Protein dan Energi**  
**dari Tahun 2016 s/d 2020**

No.	Uraian	Tahun					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Skor pola pangan harapan (PPH)	83,5	84,2	87,5	88,0	88,1	
2.	Konsumsi protein (gram/kap/hari)	45,3	46,5	62,28	64,4	65,85	
3.	Konsumsi energi (Kkal/kap/hari)	1.809	1.835	2.251,4	2.277,8	2.289,8	

Sumber : Laporan Kinerja DistanKP Tahun 2021

Berbagai upaya selama tahun 2020 telah dilaksanakan oleh DistanKP untuk mewujudkan ketersediaan pangan dan mengembangkan distribusi dan akses pangan masyarakat, baik melalui kegiatan yang bersumber pendanaan dari APBD Padang Pariaman maupun APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN. Dalam hal ketersediaan keragaman pangan, DistanKP telah berupaya melakukan kegiatan pemanfaatan pekarangan masyarakat melalui kelompok wanita tani (KWT). Bagaimana pekarangan masyarakat bisa ditanami dengan beraneka ragam tanaman sayuran dan buah-buahan. Disamping bibit tanaman juga diberikan ternak unggas berupa ayam buras. Dari hasil ternak dan tanaman ini diharapkan kebutuhan gizi rumah tangga dapat terpenuhi.

#### 2.3.2.4 Urusan Lingkungan Hidup

Dalam Urusan Lingkungan Hidup yang terkait dalam hal ini adalah Penanganan Persampahan, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk, Penanganan Pencemaran Air, Pengawasan AMDAL dan UKL-UPL dan Penanganan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.55. Pada Tabel 2.55 dapat dilihat presentase penanganan sampah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,95% bila dibandingkan pada tahun 2019 yang didukung dengan 2 (dua) Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada di Padang Olo Kecamatan sungai Limau untuk menampung sampai belahan utara Kabupaten Padang Pariaman dan di Ladang Laweh untuk TPS yang menampung sampah belahan selatan dan timur wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 79,37 ke tahun 2020 sebesar 75,77.

**Tabel 2.55**  
**Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>					
Persentase penanganan sampah	40,50	43,00	44,95	60,85	55,9
Pencemaran status mutu air yang ditangani	71,43%	80,33%	81,17%	82,83%	82,83%*



Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal dan UKL-UPL	37.93%	34%	30%	28%	31%
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	78,54	78,91	78,8	79.37	75,77
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Terpelihara	48	48	48	48	48
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	59	47,6	48,7	49,8	55,42
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	86	97,83	97,83	94,42	93,32
Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	35	37	46	48,78	48

Sumber : DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 2.3.2.5 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan secara baik.

Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Karena sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang mendukungnya masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan lainnya. Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan sebagai ciri dari penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa kinerja pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain-lain, dewasa ini belum memuaskan. Masih kurangnya kinerja pelayanan masyarakat tersebut dampaknya sangat besar terutama terhadap bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat pada era reformasi sekarang ini semakin kritis dan semakin menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik,

sedangkan Pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat belum mampu memenuhi tuntutan tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU No. 23/2006 tentang Adminduk. Ada juga payung hukum lain yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Adapun perkembangan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.56 berikut ini.

**Tabel 2.56**  
**Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>					
Persentase kepemilikan KTP elektronik	79	80,00	100,00	98	99,28
Persentas kepemilikan akte kelahiran	65	71,00	85,00	87	89,89
persentase penerbitan akta kematian	100	78,00	94,00	100	100,00
persentase ketersediaan elemen data per NIK pada database kependudukan	83	80,00	78,00	80	80,00
IKM (indeks kepuasan masyarakat)	B	B	B	B	A

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 2.56 diatas dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan KTP elektronik tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu 1,28%. Angka dimaksud menunjukkan masyarakat berusia > 17 tahun atau sudah menikah sebahagian besar atau hampir semuanya sudah memiliki KTP. Hal ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Daerah untuk memberi kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki KTP. Hal ini juga didukung dengan Data Kepemilikan KK dan Akta Catatan Sipil yang sudah mendekati dan mencapai 100%.

### 2.3.2.6 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat lumrah dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa saat ini kedepan, apalagi jika dilihat dari skill masyarakat Indonesia kurang baik

sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Adapun perkembangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.57. Berdasarkan Tabel 2.57 diatas dapat kita lihat jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tahun 2020 sebanyak 103. Pada Indikator jumlah posyandu aktif pada tahun 2020 sebesar 70,70%. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 68,50%.

**Tabel 2.57**  
**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &amp; NAGARI</b>					
Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	60	70	90	100	103,00
Tingkat partisipasi masyarakat dan swadaya terhadap program pemberdayaan masyarakat	35	35	35	33	32,00
Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Persentase peningkatan kemampuan nagari dan pengurus nagari	20	20	20	19	20,00
Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) yang terbentuk dan berfungsi dengan baik	9	20	61	18	20,00
Persentase PKK Aktif	42,31	51,28	70,00	68,60	100,00
Persentase Posyandu aktif	70,70	70,70	70,70	68,50	70,70
Posyandu Purnama dan Mandiri	38,89	42,48	70,72	82,35	85,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

### 2.3.2.7 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana menurut Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 (tentang kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya pendewasaan usia perkawinan, upaya pengaturan kelahiran, upaya pembinaan ketahanan keluarga, dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. Adapun perkembangan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.58 berikut ini.

**Tabel 2.58**  
**Capaian Kinerja Urusan Keluarga dan Keluarga Sejahtera**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>					
Total Fertility Rate (TFR)	2.6	2,59	2,48	3,13	3,13
Contraceptive Prevalence Rate (CPR) (%)	64,00	64,38	66,10	32,4	32,4
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	32,00	27,52	25,42	23,46	23,64

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021 dan Susenas 2019

Dari Tabel 2.58 diatas dapat dilihat bahwa angka pertumbuhan penduduk (TFR) di Kabupaten Padang Pariaman mengalami kenaikan. Ini berarti bahwa rata-rata jumlah anak perkeluarga mengalami kenaikan setiap tahunnya dari yang awalnya 2,6 pada tahun 2016 menjadi 3,13 pada tahun 2019. Angka ini mengalami stagnasi pada tahun 2020. Hal ini berbanding terbalik dengan rasio akseptor KB serta cakupan peserta KB aktif yang masih mengalami kenaikan pada tahun 2019. Sedangkan untuk Indikator Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I mengalami Penurunan setiap tahunnya. Ini menunjukkan peningkatan status keluarga dari Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi lebih baik.

### 2.3.2.8 Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana di Kabupaten Padang Pariaman penekanan pelayanannya mulai tahun 2016 s/d 2020 hanya pada layanan transportasi darat menyangkut layanan angkutan jalan raya. Penyelenggaraan urusan perhubungan ini juga didorong oleh kestrategisan letak Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan jalur lalu lintas jalan negara yang dilalui oleh Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), disamping Angkutan Desa dan Angkutan Kota lainnya. Guna mendukung kelancaran angkutan tersebut penyediaan terminal orang dan terminal barang yang layak serta kondisi jalan yang baik yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas yang memadai merupakan suatu keharusan yang mesti disediakan oleh Pemerintah Padang Pariaman. Adapun perkembangan pelayanan Urusan Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.59.

**Tabel 2.59**  
**Capaian Kinerja Urusan Perhubungan**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>Perhubungan</b>					
Jumlah arus penumpang angkutan umum	4.932.364,45	5.178.951,02	5.204.846	5.803.000	5.995.318,60
Rasio ijin trayek	27	38	38	48	50
Jumlah uji keur angkutan umum	5.266	5.433	6.309	5.510	5.600
Jumlah terminal bis	2	2	3	2	3
Jumlah pelabuhan laut	2	2	2	2	2
Jumlah bandar udara (bandara)	1	1	1	1	1
Jumlah angkutan darat / jumlah penumpang angkutan darat x 100%	15.00	16	16	16.7	17
Kepemilikan KIR angkutan umum	2.634	2700	2.132	2.800	2.800
Lama pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) dan berlaku selama 6 bulan	1	1	1	1	20
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	53,500	53,500	53.500	53.500	53.500,00
Pemasangan Rambu-rambu	325	445	558	900	975,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, 2021



Dari Tabel 2.59 diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum terjadi peningkatan dari 5.803.000 pada tahun 2019 meningkat menjadi 5.995.318,60 pada tahun 2020. Jumlah angkutan umum yang mengurus izin keur sebanyak 5.600 pada tahun 2020, mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 5.510 dengan pelaksanaan uji keur kendaraan 2 x setahun (1xenambulan). Pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2020 bertambah menjadi 975 Unit dari 900 pada tahun 2019. Terminal yang ada di Padang Pariaman yang dikategorikan type C ada 3 yaitu: Terminal Kasang, Terminal Sicincin dan Terminal Sungai Limau.

Disamping perhubungan angkutan jalan raya sebagaimana tersebut di atas, di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2006 sudah ditunjang dengan adanya pelabuhan udara Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang berefek sangat signifikan terhadap kenaikan PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Pada Tahun 2020 PDRB Kabupaten Padang Pariaman turun sangat signifikan yang dipengaruhi PDRB pada jenis lapangan usaha transportasi dan pergudangan karena dipengaruhi lemahnya penumpang angkutan udara. Dalam rangka pengembangan urusan perhubungan di Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun-tahun mendatang sedang diupayakan pembangunan jalur perhubungan laut dengan pembangunan Dermaga di Pantai Tiram Kecamatan Ulakan Tapakis.

### 2.3.2.9 Urusan Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dimana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, perusahaan, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan LSM. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan. Adapun perkembangan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.60 berikut ini.

**Tabel 2.60**  
**Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
Jumlah jaringan komunikasi	112	112	112	112	112,00
Rasio wartel terhadap penduduk 10000	1	1	1	1	1,00

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Rasio warnet terhadap penduduk 10000	6	7	7	7	10,00
Jumlah surat kabar nasional/lokal	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1,00
Persentase perangkat daerah dan unit kerja yang mengimplementasikan IT dengan baik	10	50	75	85	90
Jumlah penyiaran radio Lokal	3	3	3	3	3,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Jika dilihat dari Tabel 2.60 capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika terdapat beberapa indikator. Dilihat dari jumlah jaringan komunikasi pada tahun 2020 sebesar 112, rasio wartel terhadap 10.000 penduduk sebesar 1% dan rasio warnet terhadap 10.000 penduduk sebesar 10%.

### 2.3.2.10 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, namun sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat. Ada 3 indikator kinerja daerah yang diukur disini seperti; keaktifan koperasi, jumlah UMKM dan jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom yang dapat dilihat pada Tabel 2.61 berikut ini:

**Tabel 2.61**  
**Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3		5	6
<b>KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>					
Persentase koperasi aktif	75,75	60,65	75	40	40
Jumlah UMKM	11.579	11.656	13.061	12.936	13.324
Jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom	51	51	31	31	50
Jumlah BPR/LKM	18	18	18	21	22
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	97,92	97,93	97,42	98,01	98,01

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2021

Perkembangan koperasi aktif rata-rata menurun selama periode 2016-2020 sebesar 8.94%, sementara pertumbuhan jumlah UMKM rata-rata meningkat sebesar 51.4% selama periode 2016-2020. Begitu juga dengan jumlah koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam cenderung berfluktuasi dan bahkan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,05% selama periode 2016-2020. Jumlah BPR/LKM mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,3% selama periode 2016-2020, dan persentase usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan rata-rata 0,31% selama periode 2016-2020.

Peningkatan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman yang terjadi setiap tahunnya tidak terlepas dari program-program pengembangan kewirausahaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah

Daerah diantaranya berupa: pelatihan kewirausahaan, fasilitasi kredit perbankan, bantuan packaging produk, dan pembinaan terhadap perkembangan kelompok UKM. Namun dari hasil evaluasi, pada tahun 2020 program yang dijalankan tidak berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari target 30 UKM yang akan difasilitasi kemitraannya dan akan dilatih kewirausahaannya ternyata hanya terlaksana untuk 15 UKM. Yang artinya adalah tingkat keberhasilan program tersebut hanya mencapai 50%. Salah satu hal yang menyebabkan turunnya pencapaian target ini disinyalir adalah kurangnya pendanaan yang bersumber dari APBD akibat kapasitas fiskal daerah yang semakin kecil, terlebih pada masa pandemi Covid 19. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi keberlanjutan usaha penciptaan jumlah *entrepreneur* di Kabupaten Padang Pariaman.

Melihat kondisi diatas, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sangat menyambut baik dan mendukung adanya program penciptaan milenial *intrepreneur* dan *women entrepreneur* di berbagai bidang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

#### **2.3.2.11 Urusan Penanaman Modal**

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan.

Dengan meningkatnya investasi diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas produksi tersebut dapat diperoleh melalui investasi swasta (Private Investment) yang bisa disebut dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA), dimana untuk kinerja daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap investasi PMA dan PMDN serta bagaimana serapan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 2.62.

**Tabel 2.62**  
**Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	45	45	52	73	116
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	145	183	192,2	53,2	462,3
Rasio daya serap tenaga kerja (%)	100	100	70,87	75,28	100
Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	2.700	1.983	-	2.577	3039

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, 2021  
: Didagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya investasi diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas produksi tersebut dapat diperoleh melalui investasi swasta (Private Investment) yang bisa disebut dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA), dimana untuk kinerja daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap investasi PMA dan PMDN serta bagaimana serapan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 2.62.

#### **2.3.2.12 Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan pembinaan terhadap urusan pemuda dan olah Raga. Jumlah Organisasi olah Raga mengalami penurunan dari tahun 2016 yakni 40 buah sampai tahun 2020 yakni 36 buah. Namun jumlah gelanggang olah raga mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kegiatan Kepemudaan juga mengalami fluktuasi dari tahun 2016 berjumlah 9 buah sampai dengan tahun 2020 berjumlah 2 buah. Perkembangan capaian Kinerja urusan Pemuda dan Olah Raga tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.63 dibawah ini.

**Tabel 2.63**  
**Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>					
Jumlah organisasi pemuda	10	52	52	52	10
Jumlah organisasi olahraga	40	41	35	35	36
Jumlah kegiatan kepemudaan	9	18	22	20	2
Jumlah kegiatan olahraga	5	10	36	36	36
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	104	108	110	112	112
Lapangan olahraga	265	270	279	279	246
Rasio klub olahraga/penduduk	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 2.3.2.13 Urusan Statistik

Capaian kinerja urusan statistik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.64. Indikator capaian kinerja urusan statistik meliputi Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten.

**Tabel 2.64**  
**Capaian Kinerja Urusan Statistik**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>STATISTIK</b>					
Buku "kabupaten dalam angka"	1	1	1	1	1
Buku "PDRB kabupaten"	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 2.3.2.14 Urusan Persandian

Capaian kinerja urusan persandian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.65. Indikator capaian kinerja urusan persandian adalah Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

**Tabel 2.65**  
**Capaian Kinerja Urusan Persandian**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>PERSANDIAN</b>					
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	-	-	2,27	4,54	9,09

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 2.3.2.15 Urusan Kebudayaan

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi

serta globalisasi yang sedikit banyak menimbulkan efek negatif bagi perkembangan budaya lokal, pemerintah berkewajiban membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian daerah. Dalam pembangunan bidang kebudayaan, Kabupaten Padang Pariaman memprioritaskan program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian, penggalan nilai-nilai budaya. Upaya pengenalan kebudayaan daerah kepada generasi muda diwujudkan melalui memberikan ruang bagi penampilan kebudayaan lokal dalam event-event baik yang berskala Kecamatan, Kabupaten maupun Nasional. Dan juga pelestarian terhadap benda, status dan kawasan agar budaya juga perlu dilakukan. Dari Tabel 2.66 dapat dilihat perkembangan capaian kinerja Urusan Kebudayaan dari tahun 2016-2020.

**Tabel 2.66**  
**Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>KEBUDAYAAN'</b>					
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Kali)	4	0	4	57	5
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Lokasi)	2	3	3	19	4
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	37	25	24	25	45
Rasio grup kesenian/10.000 penduduk	0,68	0,5	1,20	1,35	1,05

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 2.66 diatas dapat dilihat bahwa beberapa indikator mengalami penurunan yang sangat drastis seperti intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya yang menunjukkan penurunan dari tahun 2016 yang awalnya 4 kali hingga akhir tahun 2019 sebanyak 57 kali penyelenggaraan, namun pada tahun 2020 sebanyak 5 kali hal ini sangat terkait dengan pandemic Covid 19. Pada tahun 2020 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 45 buah. Begitu juga dengan rasio grup kesenian per-10.000 penduduk pada tahun 2020 sebesar 1,05 mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 1,35. Dari beberapa indikator yang telah dijelaskan diatas kita mengharapkan wabah pandemic Covid 19 ini berakhir dan harapan kedepan adanya upaya maksimal dari perangkat daerah terkait nantinya supaya lebih merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran guna meningkatkan capaian secara keseluruhan pada urusan Kebudayaan ini.

### 2.3.2.16 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu institusi unit kerja yang menyimpan koleksi bahan pustaka secara sistematis dan mengelolanya dengan cara khusus sebagai sumber informasi dan dapat digunakan oleh pemakainya. Namun, saat ini pengertian tradisional dan paradigma lama mulai tergeser seiring perkembangan berbagai jenis perpustakaan, variasi koleksi dalam

berbagai format memungkinkan perpustakaan secara fisik tidak lagi berupa gedung penyimpanan koleksi buku.

Banyak kalangan terfokus untuk memandang perpustakaan sebagai sistem, tidak lagi menggunakan pendekatan fisik. Sebagai sebuah sistem perpustakaan terdiri dari beberapa unit kerja atau bagian yang terintegrasikan melalui sistem yang dipakai untuk pengolahan, penyusunan dan pelayanan koleksi yang mendukung berjalannya fungsi-fungsi perpustakaan.

Perkembangannya menempatkan perpustakaan menjadi sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. Dari istilah pustaka, berkembang istilah pustakawan, kepustakaan, ilmu perpustakaan, dan kepustakawanan. Adapun perkembangan Urusan perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.67 berikut ini:

**Tabel 2.67**  
**Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>PERPUSTAKAAN</b>					
Jumlah perpustakaan	1 pustaka daerah, 60 pustaka nagari, 5 perpustakaan TBM, 9 perpustakaan Pesantren, 6 perpustakaan mesjd, 10 perspustakaan sekolah	1 pustaka daerah, 103 pustakaan nagari, 5 perpustakaan TBM, 7 perpustakaan Pesantren, 6 perpustakaan anmesjid, 20 perpustakaan Sekolah	65 ( 1 perpustakaan daerah; 54 perpustakaan Nagari; 10 TBM)	85 (1 perpustakaan andaerah; 64 perpustakaan nagari; 10 TBM, 10 perpustakaan sekolah)	85 ( 1 Perpustakaan Daerah; 74 Perpustakaan Nagari; 10 TBM)
Persentase pengunjung perpustakaan per tahun (%)	1,7	1,7	3	4	5
Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	13,33	15,60	24,17	42,86	53

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 2.67 diatas dapat dianalisa bahwa secara keseluruhan indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan pada urusan Perpustakaan mengalami kenaikan yang cukup besar seperti jumlah perpustakaan 1 Pustaka daerah, 74 pustaka nagari, 10 perpustakaan TBM di tahun 2020. Persentase pengunjung perpustakaan selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, dan pada tahun 2020 jumlahnya tercatat sebesar 5%.

### 2.3.2.17 Urusan Kearsipan

Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Mengingat arti pentingnya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kearsipan. Hal ini

terbukti dengan diperlukannya beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang kearsipan Nasional. Adapun perkembangan Urusan Kearsipan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada table 2.68 berikut ini.

**Tabel 2.68**  
**Capaian Kinerja Urusan Kearsipan**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>KEARSIPAN</b>					
Persentase Pengelolaan arsip secara baku (%)	2,72	2,72	4,76	6,8	8,84
Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	7	8	20	30	40

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari tabel capaian diatas dapat kita lihat bahwa untuk urusan kearsipan dengan indikator Pengelolaan Arsip Secara Baku pada tahun 2020 dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Target tahun 2020 yang ditetapkan yakni sebesar 8,84% dengan realisasi juga sebesar 8,84%. Artinya capaian untuk indikator ini dapat dilaksanakan 100%. Indikator pengelolaan arsip secara baku merupakan jumlah OPD yang memiliki nilai LAKI (Laporan Audit Kearsipan Internal) yang baik. Jumlah OPD yang mendapatkan nilai LAKI yang baik pada tahun 2020 adalah sebanyak 4 OPD dari total 43 OPD dan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. 4 OPD di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman sudah dapat dikatakan sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Capaian indikator ini didukung oleh kegiatan Audit Kearsipan, dimana pada tahun 2020 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melakukan audit tata kelola kearsipan kepada 43 OPD dan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pengelolaan arsip secara baku yakni kegiatan Pengumpulan Data, Kajian Sistem Administrasi Kearsipan, Pendataan dan Penelusuran arsip dan kegiatan monev kearsipan juga turut mendukung indikator kinerja ini. Secara umum output maupun outcome dari kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung pengelolaan arsip secara baku di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan, untuk indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2020 dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 40% jumlah SDM pengelola kearsipan. Capaian target ini dapat direalisasikan karena adanya dukungan program dan kegiatan tahun 2020 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Program dan kegiatan yang mendukung pada indikator kinerja tersebut adalah adanya kegiatan sosialisasi/ penyuluhan kearsipan serta kegiatan diklat kearsipan. Dimana output maupun outcome dari kegiatan ini dapat menghasilkan SDM pengelola kearsipan yang bersertifikasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah petugas pengelola kearsipan OPD, Kecamatan dan Nagari di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.



### 2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 2.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Perikanan merupakan salah satu sektor yang ikut menjadi penggerak perekonomian yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

**Tabel 2.69**  
**Capaian Kinerja Urusan Perikanan**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	26.604,60	25.472,20	23.080,10	22.298,90	26.339,05
Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	54.677,49	57.239,70	58.211,18	54.079,33	62.911,63
Jumlah produksi ikan olahan (Ton)	200,76	206,78	213,87	220,29	204,98
Tingkat konsumsi ikan (Kg / kapita / Tahun)	32	32,78	36,06	40,60	35,00

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2019 sebesar 22.298,90 ton. Angka ini mengalami peningkatan produksi tahun 2020 sebesar 18,12%. Penyebab meningkatnya produksi perikanan tangkap antara lain : 1) penangkapan menggunakan alat tangkap trowl oleh nelayan sudah memadai, 2) karena kondisi alam yang sangat mendukung, 3) aktifitas penangkapan ikan oleh nelayan pada bulan-bulan meningkat.

Jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2019 sebesar 54.079,33 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 62.911,63 ton, juga mengalami peningkatan produksi sebesar 6,29%. Meningkatnya produksi budidaya perikanan disebabkan karena banyak kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, untuk itu perlu dipertahankan kegiatan yang ada serta menambah kegiatan sebagai penunjang produksi pada tahun 2020.

#### 2.3.3.2 Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang cukup penting mempunyai peran dalam memacu pembangunan. Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan di sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya potensi destinasi wisata di Kabupaten Padang Pariaman, apabila dikelola dengan baik akan dapat menjadi sektor yang dapat menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini dimungkinkan karena sektor pariwisata dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Untuk itu pembangunan kepariwisataan harus memberi perhatian pada pariwisata alternatif, seperti pariwisata minat khusus dan pariwisata yang berbasis komunitas seperti adventure travel, *cultural* travel dan *ecotourism*. Pengembangan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan adanya peningkatan promosi wisata juga faktor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Adapun indikator kinerja daerah tentang pariwisata dapat dilihat pada Tabel 2.70 berikut di bawah ini.

**Tabel 2.70**  
**Capaian Kinerja Urusan Pariwisata**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>PARIWISATA</b>					
Jumlah Kunjungan wisata (orang)	48.000	156.445	183.600	396.790	208.872
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	6.180.717,00	7.012.354,04	7.012.354,04	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 2.70 di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan kunjungan wisata dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dimana pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisata mencapai 396.790 orang. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini karena telah tersedianya sarana dan prasarana yang membuat kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung dan pada tahun 2020 dengan adanya pandemic Covid 19 maka jumlah kunjungan wisata kembali terjadi penurunan yaitu 208.872 orang jika dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 396.790 orang.

Jumlah destinasi wisata daerah yang sesuai dengan standar selalu ada peningkatan setiap tahunnya, dimana Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya kedepan merencanakan 1 (satu) Destinasi setiap tahun, sedangkan Jumlah destinasi wisata daerah yang sesuai dengan standar pada saat ini terdiri dari :

1. Objek Wisata Khusus Tracking Air Terjun Nyarai di Salibutan Kecamatan Lubuk Alung
2. Objek Wisata Kuliner Pantai Tiram di Kecamatan Ulakan Tapakis Objek Wisata Alam
3. Pemandian Rumah Putih Lubuk Bonta di Kecamatan 2 x 11 Kayutanam

### 2.3.3.3 Urusan Pertanian

Urusan sektor pertanian secara umum terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan serta perikanan. Sektor pertanian merupakan komoditi utama pembentuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2020, dimana laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada sektor

pertanian mencapai 0,29% terdapat penurunan yang signifikan dari tahun 2019 mencapai 4,22 persen.

Padi merupakan makanan pokok masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2020, rata-rata produksi padi di Kabupaten Padang Pariaman 5,15 ton/ha. Luas panen pada tahun 2020 mencapai 59.331,00 ha dengan produksi 283.127,72 ton. Luas panen pada tahun 2020 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi tingkat produksi padi tahun 2020 meningkat dari tahun 2019.

**Tabel 2.71**  
**Capaian Kinerja Urusan Pertanian**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>PERTANIAN</b>					
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	5,23	5,26	4,51	4,75	5,15
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	10,06	9,74	11,07	11,07	11,07
Distribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB (%)	19,90	19,33	18,65	19,18	7,53
Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	3,23	3,20			3,54
Regulasi ketahanan pangan	2	2	1 (Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	0	2,00
Ketersediaan pangan utama (kg/1000 pddk)	702.490,38	695.430,89	656.413,95	709.848,01	708.310,82
Tumbuhnya kelembagaan ekonomi petani (%)	30			N/A	70,00
Jumlah produksi beras (Kg)	155.904,59	174.550	152.562,14	159.334,11	150.134,40
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (ratio)				N/A	48,19
Nilai tukar petani (%)	96,45	96,97	95,16	95,99	97,50
Nilai PDRB sektor pertanian (Rp. Jutaan)	2.499.408,7	2.624.586,7	3.812.952,29	4.082.657,32	2.736.277,17

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

**Tabel 2.72**  
**Luas Panen Produksi Padi dan Produktifitas Padi**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Rata-Rata Produksi (ton/ha)
2016	55.408	287.046	5,18
2017	61.134	321.376	5,26
2018	62.306,8	280.892,00	4,51
2019	61.708,1	293.360,31	4,75
2020	59.331,00	283.127,72	4,77

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Selain pengembangan tanaman pangan untuk mendukung upaya ketahanan pangan, pertanian Kabupaten Padang Pariaman juga ditanami berbagai macam tanaman hortikultura, antara lain: Jambu biji, pepaya pisang, dan manggis.

**Tabel 2.73**  
**Perkembangan Komoditi Hortikultura**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Tahun	Jambu Biji		Pepaya		Pisang		Manggis	
	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
2016	74,24	540,43	194,49	16.501,51	1.288,72	19.616,19	691,59	4.839,53
2017	73,67	805,90	196,39	19.862,28	1.234,50	16.665,48	765,88	6.350,22
2018	52,25	815,85	168,20	23.249,11	616,56	17.152,59	321,74	6.414,14
2019	54,81	861,17	170,82	22.690,32	716,65	20.778,60	241,27	5.270,78
2020	56,02	893,64	134,83	18.285,30	632,61	19.029,31	154,31	3.611,62

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

**Tabel 2.74**  
**Produksi Tanaman Perkebunan**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Tahun	Karet	Kelapa	Kulit Manis	Cengkeh	Kopi	Pinang	Kakao
	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)
2016	3.088,49	35.435,95	4.800,09	77,77	301,05	339,19	7.595,14
2017	3.079,33	35.612,85	4.483,24	73,86	298,43	359,27	5.434,54
2018	3.075,00	36.556,31	3.851,77	70,27	262,00	401,1	5.131,37
2019	3.384,96	37.420,46	3.785,57	67,02	295,27	435,28	5.019,13
2020	3.290,38	37.666,19	3.608,40	63,26	288,68	445,82	4.851,89

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Walaupun Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah yang tidak mengandalkan pertanian dan perkebunan sebagai komoditi utama, Kabupaten Padang Pariaman menghasilkan beraneka tanaman perkebunan seperti karet, kelapa, kulit manis, cengkeh, kopi, pinang, dan kakao. Tanaman perkebunan yang memiliki produksi tanaman paling banyak adalah kelapa sebanyak 37.666,19 ton pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan daerah pesisir pantai mendominasi luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Tanaman pangan yang menjadi prioritas utama antara lain tanaman padi dan jagung. Peningkatan produksi tanaman pangan diwujudkan dalam hal penyediaan bibit/benih unggul, peningkatan sarana dan prasarana pertanian seperti sarana irigasi, jalan usaha tani, pengadaan mesin dan

alat-alat pertanian, pemberantasan hama penyakit, penerapan teknologi dalam budidaya.

Pada bidang perkebunan yang menjadi perhatian adalah penurunan populasi tanaman kelapa yang merupakan salah satu ikon perkebunan Padang Pariaman. Dimana sebahagian masyarakat memanfaatkan pokok/batang kelapa untuk pembangunan atau kebutuhan perumahan. Untuk menanggulangi hal ini diperlukan peremajaan tanaman kelapa secara bertahap. Disamping itu, dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman kelapa DistanKP terus berupaya menggandeng kelompok tani untuk memberantas tupai yang merupakan hama utama tanaman kelapa. Selain tanaman kelapa, yang menjadi ikon sektor perkebunan Kabupaten Padang Pariaman adalah tanaman coklat (kakao). DistanKP telah melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait dalam upaya meningkatkan produksi atau nilai tambah dari produk kakao. Selama tahun 2020 DistanKP telah menyalurkan bantuan sarana dan prasarana untuk pengembangan komoditas kakao. Disamping dua komoditi perkebunan diatas, beberapa tahun terakhir DistanKP telah mengembangkan jenis tanaman perkebunan baru yakni tanaman Pinang Wangi. Pengembangan tanaman ini disambut baik oleh masyarakat tani. Pinang Wangi merupakan tanaman yang mempunyai peluang untuk dikembangkan kedepannya, karena hasil tanaman ini mempunyai nilai jual ekspor ke negara lain. Harga jual yang cukup tinggi dan relatif stabil, serta tanaman ini lebih cepat berproduksi dibandingkan pinang lokal lainnya

#### 2.3.3.4 Urusan Pertanian Sub. Sektor Peternakan

**Tabel 2.75**  
**Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub. Sektor Peternakan**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>PETERNAKAN</b>					
Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	185.619,2	190.297,6	199.738,38	199.654,40	204.332.,80
Jumlah Produksi Daging (Ton)	2.814,69	2.814,69	2.978,29	2.339,14	3.151,69
Jumlah Hewan yang sehat	-	7.253.324	7.449,360	7.645.395	7.841,431
Jumlah Hewan yang dikelola	24,00	25,00	31,00	29	35.00

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021

**Tabel 2.76**  
**Populasi dan Pematangan Ternak**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)					Jumlah Pematangan (ekor)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Sapi	38.633	38.863	40.984	41.787	43.629	4.185	4.330	4.034	3.476	2.668
Kerbau	13.926	13.633	14.544	14.801	14.953	1.743	1.925	1.745	1.735	1.551
Kambing	34.425	32.479	33.840	34.090	35.005	4.043	4.138	4.661	5.245	2.224

Sumber :BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021



Daging ternak merupakan sumber protein hewani yang dibutuhkan untuk melengkapi nilai gizi masyarakat selain Kabupaten Padang Pariaman juga terhadap warga Kota Padang. Ternak yang dihasilkan oleh Kabupaten Padang Pariaman antara lain sapi, kerbau dan kambing. Jumlah pemotongan daging ternak dapat memenuhi jumlah konsumsi masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah populasi yang melebihi jumlah pemotongan. Jumlah populasi dan pemotongan terbesar adalah sapi potong, jika dibandingkan dengan ternak besar lainnya seperti kerbau.



**Tabel 2.77**  
**Populasi dan Pemotongan Unggas**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)					Jumlah Pemotongan (ekor)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Ayam Buras	952.843	790.171	799.109	809.967	843.520	1.333.980	1.106.240	1.118.753	1.133.955	1.180.928
Ayam Ras Petelur	1.778.076	1.984.871	2.019.551	2.294.020	2.678.403	1.066.845	1.190.923	1.211.730	1.376.412	1.607.042
Ayam Ras Broiler	6.640.736	6.733.254	6.084.404	6.115.346	6.600.941	6.638.744	6.731.233	6.082.578	6.113.512	6.204.885
Itik	145.216	130.900	138.237	142.649	144.647	87.129	78.540	82.983	84.784	86.788

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 2.3.3.5 Urusan Energi dan Sumber daya Mineral

Terkait dengan upaya penuntasan kebutuhan listrik masyarakat dusun telah dilakukan kegiatan Pengadaan Jaringan Listrik Perdesaan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan semakin meluasnya jangkauan pelayanan energi listrik bagi masyarakat, dampak yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah meningkatnya anggota masyarakat yang bisa menikmati listrik. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Padang Pariaman dari 99.091 di tahun 2019 menjadi 123.822 di tahun 2020. Demikian pula dengan daya yang dibutuhkan, dimana pada tahun 2019 tercatat 123.575 watt naik menjadi 151.073 watt pada tahun 2020. Dalam pemenuhan kebutuhan akan listrik bagi masyarakat miskin/kurang mampu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program bantuan listrik untuk KK miskin melalui dana APBD. Disamping itu masyarakat juga diupayakan memanfaatkan sumber listrik dari energi terbarukan dan mikro hidro seperti, biogas dan lain sebagainya serta upaya pemerintah untuk memperoleh bantuan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berupa listrik tenaga surya. Adapun sebagai gambarannya dapat dilihat pada Tabel 2.78 berikut ini.

**Tabel 2.78**  
**Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>					
Jumlah Pelanggan Listrik	122.075	130.159	136.078	99.091	123.822
Jumlah Daya Listrik	138.919	148.120	159.011	123.575	<b>151.073</b>

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 2.3.3.6 Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu pembangunan ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor



industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Sektor perdagangan di Kabupaten Padang Pariaman lebih didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung dan eceran tradisional dengan komoditas utama hasil pertanian dan produk hasil usaha kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM sebagai pelaku industri kreatif merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekspor maupun pasar domestik dengan didukung penataan sistem distribusi yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk domestik. Untuk indikator kinerja daerah Urusan Perdagangan dapat dilihat pada Tabel 2.79.

**Tabel 2.79**  
**Capaian Kinerja Urusan Perdagangan**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>PERDAGANGAN</b>					
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	8.57	8,45	8,45	8,47	8,55
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	61.	67,05	60	60	67,25
Rata-rata ratio koefisien variasi harga komoditi tertentu	5.89	5,71	5,54	5,54	5,55

Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 2.79 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tidak begitu signifikan, hanya mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 8,55% dan pada tahun-tahun berikutnya cenderung mengalami penurunan. Jika dilihat kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 0,02%. Sementara cakupan bina kelompok pedagang/usaha normal cenderung fluktuatif dan pada tahun 2018 dan 2019 terjadi kembali penurunan. Sedangkan rata-rata rasio koefisien variasi harga komoditi tertentu juga sangat fluktuatif dan jika dibandingkan antara tahun 2017 dengan 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi peningkatan 0,01.

### 2.3.3.7 Urusan Perindustrian

Untuk terwujudnya tujuan industri kecil menengah yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing berbasis agroindustri diukur dengan indikator kinerja pertumbuhan industri dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB untuk mencapai sasaran berkembangnya industri kecil menengah.

**Tabel 2.80**  
**Capaian Kinerja Urusan Perindustrian**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>PERINDUSTRIAN</b>					
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	10,74	10,20	9,63	9,34	12,02
Pertumbuhan Industri	3,00	2,8	3,76	1,15	1,92
Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	35	45	52	73	75

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPPT) Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 2.80 diatas dapat terlihat bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDRB selalu mengalami penurunan dari tahun ketahun. Hal ini berbanding lurus dengan tren pertumbuhan industri yang hanya mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 12,02%. Dimana pada tahun 2019 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 9,34%, artinya dari tahun 2019 ke tahun 2020 kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami sedikit kenaikan sebesar 2,68%.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dari tahun ketahun terjadi peningkatan yaitu tahun 2016 berjumlah 45, tahun 2017 tetap 45 dan pada tahun 2018 dan 2019 meningkat secara signifikan yaitu 52 pada tahun 2018 dan pada 2019 berjumlah 73 sedangkan tahun 2020 masih terjadi peningkatan Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) menjadi 75 perusahaan. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB mengalami fluktuasi seperti pada tahun 2016 s/d 2019 mengalami penurunan dari 11,11% menjadi 10,74%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari 9,35% menjadi 11,19% pada tahun 2020 artinya Kontribusi sektor industri pengolahan terjadi kenaikan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 1,84%.

### **2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

#### **2.3.4.1 Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah sebagai sebuah Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah Mempunyai Fungsi:

- 1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif pada instansi daerah;
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Selama Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.81**  
**Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET KINERJA	REALISASI	PERSEN (%)
1	Meningkatnya dukungan dan fasilitasi lembaga keagamaan	Persentase Lembaga Keagamaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	80 %	100%	125%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Setda Kabupaten Padang Pariaman	BB	A	120%
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah indikator kinerja kunci Sekretariat Daerah yang berkategori sangat tinggi	80%	85%	106%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rata2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Unit Pelayanan Publik	B	B	100%

Sumber : Lakip Sekretariat Daraeah Kabupaten Padang Pariaman, 2020

#### 2.3.4.2 Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman selaku lembaga teknis yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sekretariat DPRD sebagai lembaga teknis di bidang kesekretariatan DPRD mencoba untuk mensinergikan perencanaan pembangunan melalui :

Adapun Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel. 2.82**  
**Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jumlah produk hukum daerah	Persentase capaian Prolegda	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase tingkat kepuasan anggota DPRD	85 %

Sumber : *Lakip Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, 2021*

### 2.3.5 Unsur Penunjang Urusan pemerintahan

#### 2.3.5.1 Perencanaan

Pelaksanaan Unsur Penunjang Perencanaan merupakan embrio dari semua pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Perencanaan adalah basis dalam mencapai suatu tujuan karena perencanaan merupakan arahan dan pedoman kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Rencana pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan yang memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal yang dalam pelaksanaannya menggunakan 5 pendekatan yaitu ; teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dimana prioritas pembangunan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah yaitu memperkuat sistem perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam semua bidang pemerintahan dengan mewujudkan sistem perencanaan yang berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang lebih mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Mekanisme penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkatan penyelenggara pemerintahan terbawah sampai pada tingkatan kabupaten merupakan proses penggalian gagasan atau ide dari seluruh komponen masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam mewujudkan *Good Governance*.



Dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan perencanaan masih terdapat kendala dan permasalahan, yaitu: belum efektifitasnya koordinasi dan hasil perencanaan pembangunan daerah; belum seimbangya perencanaan sosial budaya dengan perencanaan ekonomi maupun prasarana perwilayahan sumberdaya alam; belum efektifitasnya pelaksanaan musrenbang; dan belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan untuk mendukung proses perencanaan.

Adapun dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Nomor 2 Tahun 2010 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, dimana Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan RPJMD Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang merupakan periode ketiga dari RPJPD. Sementara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan setiap tahunnya melalui Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam hal ini ukuran capaian kinerja perencanaan pembangunan pada suatu daerah dapat dilihat dari ketersediaan dokumen Fungsi Penunjang Urusan perencanaan pada daerah tersebut, baik dokumen perencanaan bersifat jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Adapun dokumen tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.83 berikut ini.

**Tabel 2.83**

**Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	3	3	4	5	6
<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>					
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	ada	ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	97,61	98,6	100	100	93,00
Persentase Peningkatan kualitas Musrenbang	75,00	80,00	85,00	93,00	93,00
Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD	90,00	92,00	95,00	93,00	93,00
Peningkatan Kualitas SDM perencanaan	77,00	79,00	80,00	80,00	85,00

Sumber : Lakip Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Pada urusan Perencanaan Pembangunan rata-rata pencapaian kinerja tetap stabil sesuai indikator yang diukur, namun sinkronisasi antara Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD terjadi peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2016 hanya 90% dan tahun 2020 menjadi 93%. Hal ini berarti dalam penyusunan RKPD sudah mengacu pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

**2.3.5.2 Keuangan**

Sesuai peraturan daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan peraturan bupati Padang pariaman Nomor 68 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

Pada urusan Keuangan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.84**

**Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2016-2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					%	Interpretasi
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Temuan	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	90	Cukup Berhasil
2.	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	Jumlah Temuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Berhasil
3.	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah	Persentase	5,55	7,90	8,16	8,50	9,10	16,79	36,84	12,39	16,73	-13,41	970,18	Berhasil

Sumber : Lakip BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 2.3.5.3 Kepegawaian

Pada urusan kepegawaian capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumberdaya Manusia tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.85**  
**Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumberdaya Manusia tahun 2016-2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah					Realisasi Jangka Menengah					%	Interpretasi
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya kompetensi ASN Daerah	persentase pegawai yang memiliki sertifikat peningkatan kompetensi manajerial	%	70	73	76	79	81	26,35	28,18	37,33	44,03	0	0	Tidak Berhasil
2	Meningkatnya disiplin ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	80	80	85	85	90	100	70,45	80	50	100	95,42	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Kepegawaian yang tepat waktu dan akurat	Persentase peningkatan penerbitan SK tepat waktu dan akurat	%	67	69	71	73	77	97,7	88,26	115,13	108,32	85,60	139,09	Sangat Berhasil
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Nilai	63	70	75	75	85	63,73	70,61	76,69	78,90	77,24	100,07	Berhasil
4	Meningkatnya Pengelolaan Pejabat Daerah	Persentase pengisian jabatan sesuai formasi dan kompetensi	%	96	97	97	97	97	96,08	96,08	91,27	97,61	92,35	97,81	Berhasil

Sumber : Lakip Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 2.3.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Tahun 2016 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah mendiklat sebanyak 226 orang pejabat eselon II, III, dan IV dan jumlah pejabat struktural di Kabupaten Padang Pariaman pada saat itu adalah 846 orang sehingga diperoleh capaian persentase gawai yang memiliki sertifikat peningkatan kompetensi manajerial sebesar 26.71 % dari target sebesar 70 % dengan capaian sebesar 38.16 %. Selanjutnya pada tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah mengirim lagi sebanyak 33 orang untuk mengikuti Diklat PIM III dan PIM IV yang terdiri dari: 3 orang pejabat eselon III dan 30 orang pejabat eselon IV. Jumlah pejabat struktural di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 adalah sebanyak 920 orang sehingga diperoleh capaian persentase pegawai yang memiliki sertifikat peningkatan kompetensi manajerial sebesar 28.15 % dari target sebesar 32.15 % dengan capaian sebesar 87.56 %.

Pada Tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah mengirim lagi sebanyak 2 orang untuk mengikuti Diklat PIM II dan PIM III yang terdiri dari: 1 orang pejabat eselon II dan 1 orang pejabat eselon III. Jumlah pejabat struktural di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 adalah sebanyak 699 orang sehingga diperoleh persentase pegawai yang memiliki sertifikat peningkatan kompetensi manajerial sebesar 37.33 % dari target sebesar 76 % dengan capaian sebesar 49.12 %.

Pada Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah mengirim lagi sebanyak 34 orang untuk mengikuti Diklat PIM II, PIM III dan PIM IV yang terdiri dari: 2 orang pejabat eselon II, 2 orang pejabat eselon III dan 30 orang Pejabat eselon IV. Jumlah pejabat struktural di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 adalah sebanyak 670 orang sehingga diperoleh persentase pegawai yang memiliki sertifikat peningkatan kompetensi manajerial sebesar 44.03 % dari target sebesar 79 % dengan capaian sebesar 55.73 %. Pada tahun 2020 ini Indikator Kinerja yang menggambarkan Persentase pejabat yang memiliki sertifikat peningkatan kompetensi manajerial tidak bisa dicapai karena adanya refocusing anggaran untuk menangani kasus covid-19

### 2.3.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Untuk mewujudkan meningkatnya pemanfaatan Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Daerah telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan pada indikator kinerja utama sebagai acuan penilaian dengan capaian kinerja dari sasaran ini seperti berikut :

**Tabel 2.86**  
**Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Penelitian Tahun 2020**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			
		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang memanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	89%	80%	90%	112,5%	Sangat Baik

Sumber : *Lakip Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, 2021*

Dari tahun 2016-2020 Hasil Kajian Kelitbangan yang telah Dimanfaatkan untuk Perumusan Kebijakan adalah sebanyak 9 dokumen dari jumlah hasil kelitbangan yang telah dihasilkan sebanyak 10 Dokumen dengan tingkat persentase sebesar 90%. Berikut dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang telah dihasilkan:

**Tabel 2.87**  
**Daftar Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020**

Tahun	Hasil Kajian dan Penelitian	Pemanfaatan untuk kebijakan
2016	Program Induksi Guru Pemula (PIGP) Kabupaten Padang Pariaman	Sudah dimanfaatkan
	Indikator makro Ekonomi Daerah Tahun 2016	Sudah dimanfaatkan
2017	Pra Feasibility Study Pengembangan Kawasan Pendidikan Tarok	Sudah dimanfaatkan
	Indikator makro Ekonomi Daerah Tahun 2017	Sudah dimanfaatkan
	Indeks Gini Rasio Tahun 2017	Sudah dimanfaatkan
2018	Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Pendidikan Tarok	Sudah dimanfaatkan
	Indikator Ekonomi Daerah Tahun 2018	Sudah dimanfaatkan
	Kajian Potensi dan Pemetaan Lahan Wilayah Pesisir Kabupaten Padang Pariaman	Sudah dimanfaatkan
2019	Indikator Ekonomi Daerah Tahun 2019	Sudah dimanfaatkan
2020	Road Map Sistem Informasi Daerah (SIDa)	Belum Dimanfaatkan

Sumber : *Lakip Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, 2021*



Berhasilnya pencapaian target indikator ini pada tahun 2020 ikut dipengaruhi oleh kajian kelitbangan yang dilaksanakan betul-betul sudah merupakan kajian yang dibutuhkan daerah dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait pengembangan pembangunan daerah. Untuk kedepannya diharapkan Lebih meningkatkan kajian-kajian yang dibutuhkan daerah dalam pengembangandan pembangunan daerah lebih lanjut.

### **2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

#### **2.3.6.1 Inspektorat Daerah**

Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten padang pariaman nomor 48 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat daerah kabupaten padang pariaman pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas intern penyelenggaraan pemerintah daerah, ayat (2) Inspektorat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris daerah serta ayat (3) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penanganan pengaduan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

### **2.3.7. Unsur Kewilayahan**

#### **2.3.7.1 Kecamatan**

Unsur Kewilayahan pada RPJMD Tahun 2021-2026 Mendukung pada Misi ke 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagai pelaksanaan strategi sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjalakan arah kebijakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun data jumlah Kecamatan telah tertuang pada bab ini pada halaman II.3 s.d II.5.

### **2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum**

#### **2.3.8.1 Kesatuan bangsa dan Politik**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, paragraf 2 pasal 28 ayat (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik.

Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.88 berikut:

**Tabel 2.88**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020**

NO	SasaranStrategi s	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Intepre tasi
1.	Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persentase jumlah pasrtisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	75%	52,06%	69,41 %	Kura ng Berh asil
2.	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	%	60%	60%	100%	Sang at Berh

Sumber : Lakip Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, 2021

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Angka pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita perbulan di Kabupaten Padang Pariaman mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun 2016-2020 seperti terlihat dari Tabel 2.89. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan pendapatan rumah tangga dalam periode tersebut.

**Tabel 2.89**  
**Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Sebulan**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Makanan	452,223.37	471,161.00	579,382.00	574,621.00	619,089.00
Bukan Makanan	325,122.10	433,490.00	463,562.00	496,809.00	465,216.00
Total Pengeluaran Perkapita Sebulan	777,345.47	904,651.00	1,042,944.00	1,071,430.00	1,084,305.00

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

#### 2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Nilai pengeluaran konsumsi non pangan perkapita di Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan selama tahun 2016-2020. Namun secara proporsi cukup mengalami fluktuasi dalam periode tersebut. Dari Tabel 2.90 terlihat pengeluaran konsumsi non pangan dari tahun 2016-2019 selalu berada dibawah tingkat pengeluaran konsumsi makanan. Namun pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi non pangan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi bahan pangan.

**Tabel 2.90**  
**Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan Sebulan**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Total Pengeluaran RT Non Pangan	325,122.10	433,490.00	463,562.00	496,809.00	619,089.00
Total Pengeluaran	777,345.47	904,651.00	1,042,944.00	1,071,430.00	1,084,305.00
Persentase	42%	48%	44%	46%	57%

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

#### 2.4.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. NTP mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Jika NTP lebih lesar dari 100 maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya, NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani, seperti terlihat pada Tabel 2.91.

**Tabel 2.91**  
**Nilai Tukar Petani (NTP)**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks yang diterima petani (it)	122,64	125,39	130,55	130,55	106,55
Indeks yang dibayar petani (lb)	122,48	126,47	131,56	136,00	105,92
Nilai Tukar Petani (NTP)	97,67	96,97	95,31	95,99	100,59

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2021

Data perkembangan NTP selama tahun 2016-2019 cukup fluktuatif namun semua nilainya berada di bawah 100 dan cenderung turun hingga menjadi 95,99 pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan dari NTP tersebut menjadi 100,59 dengan Indeks yang diterima petani sebesar 106,55 dan indeks yang dibayar petani sebesar 105,92. Sub sektor perikanan merupakan subsektor yang memiliki NTP tertinggi (107,88) disusul NTP sub sektor peternakan (103,86). NTP ini menggambarkan derajat kesejahteraan petani yang belum baik yang terlihat dari masih rendahnya daya beli petani dipicu oleh faktor produktivitas yang belum stabil atau cenderung menurun, serta permintaan yang masih rendah.

Hal ini menunjukkan secara umum, bahwa besar mata pencaharian penduduk masih berada sektor pertanian, namun belum merupakan pilihan

mata pencarian yang menguntungkan bagi masyarakat Sumatera Barat, sehingga perlu penajaman peran subsistem agribisnis hilir (pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian) yang mampu memberikan nilai tambah sangat signifikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

Pada Tabel 2.91, terlihat bahwa pada tahun 2020, indeks yang diterima petani lebih besar dari indeks yang dibayar petani hanya pada sub sektor perikanan dan peternakan, sementara untuk sub sektor lainnya lebih tinggi yang dibayarkan dari pada yang diterima.

**Tabel 2.92**  
**Nilai Tukar Petani Dan Sub Sektor Pendukungnya di Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2020**

NTP Sektor/Sub Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Tukar Petani (NTP)	97,67	96,97	95,31	95,99	100,59
NTP Tanaman Pangan	95,00	92,66	92,02	94,79	99,06
NTP Hortikultura	92,74	86,33	82,44	81,45	96,80
NTP Tanaman Perkebunan Rakyat	98,29	100,93	99,31	99,73	103,84
NTP Peternakan	103,71	104,82	103,59	103,86	102,32
NTP Perikanan	106,47	109,15	107,88	107,88	94,55

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2021

#### 2.4.1.4 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor, dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Produktifitas total daerah Kabupaten Padang Pariaman terlihat pada Tabel 2.93 berikut:

**Tabel 2.93**  
**Nilai Produktivitas Total Daerah Kabupaten Padang Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB (juta rupiah)	17,532,873.46	19,038,379.57	20,438,318.45	21,252,415.30	17,941,900.08
Jumlah angkatan kerja	-	181,864.00	186,482.00	181,344.00	199,985.00
Produktifitas Total	-	104.68	109.60	117.19	89.72

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2021

#### 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

##### 2.4.2.1 Luas Wilayah Terkena Banjir

Berkaitan dengan penanganan lokasi banjir dan genangan air, tahun 2016 di Kabupaten Padang Pariaman masih terdapat beberapa kecamatan yang belum teratasi masalah banjir diantaranya Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuk, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan Batang Gasan. Tingginya aliran air menyebabkan menurunnya air yang meresap ke dalam tanah, sehingga di musim kemarau mengalami

kekeringan dan di musim hujan menimbulkan banjir. Total Luas lahan terkena banjir bervariasi dengan frekuensi/lama genangan antara 6-18 hari pertahun. Topografi Kabupaten Padang Pariaman, serta perkembangannya secara horizontal dan vertikal sangat membutuhkan perencanaan dan penerapan teknologi drainase yang baik.

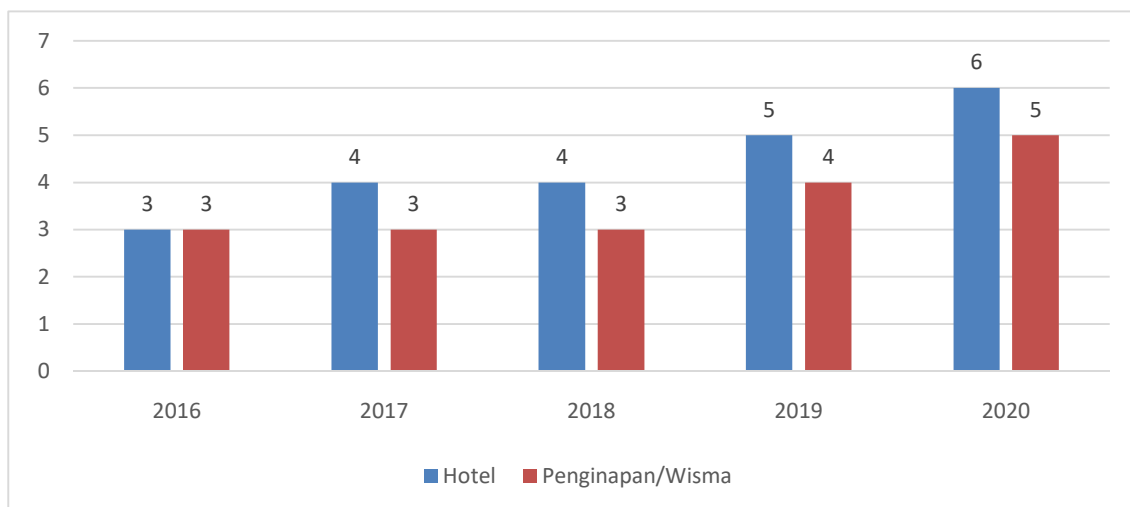
#### 2.4.2.2. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 158 restoran dan rumah makan yang tersebar di beberapa kawasan dengan beragam variasi masakan dan minuman. Keberagaman kuliner yang dimiliki Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu potensi terbesar untuk menarik wisatawan serta daya tarik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

#### 2.4.2.3 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Terdapat 5 (lima) hotel dan 4 (empat) penginapan/wisma di Kabupaten Padang Pariaman. Keberadaan penginapan tersebut mendorong datangnya berbagai kelas turis domestik maupun asing dapat menyesuaikan kebutuhan akomodasi mereka dengan dana yang mereka miliki. Jumlah hotel dan penginapan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.22.

**Gambar 2.22**  
**Jumlah Hotel dan Penginapan**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**



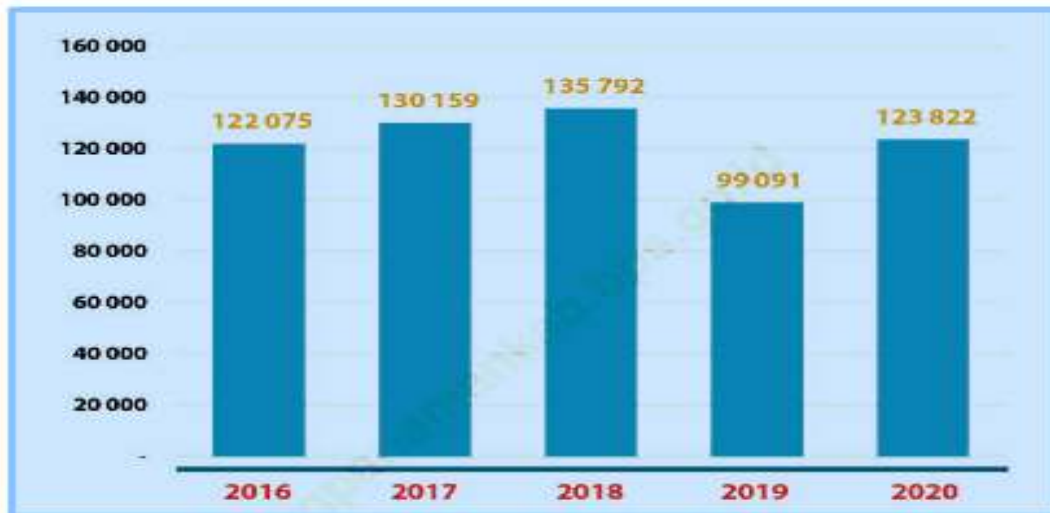
Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

#### 2.4.2.4 Rumah Tangga/Pelanggan yang Menggunakan Listrik

Berdasarkan data dari PLN Ranting Pariaman, Lubuk Alung dan Sicincin, jumlah pelanggan yang menggunakan listrik pada tahun 2020 sebanyak 123.822 pelanggan. Pengguna listrik di Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan setiap tahunnya selama tahun 2016-2018 dengan peningkatan sebesar 51,41%, namun mengalami penurunan

pada tahun 2019 sebesar 27,03%. Data perkembangan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2.23**  
**Jumlah Pelanggan Listrik**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**



Sumber/Source: PLN Ranting Pariaman, Lubuk Alung dan Sicincin/  
PLN of Ranting Pariaman, Lubuk Alung Dan Sicincin

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

#### 2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Untuk melihat lebih lengkapnya banyaknya kasus kriminalitas dan gangguan di Kabupaten Padang Pariaman periode 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.94.



**Tabel 2.94**  
**Banyaknya Kasus Kriminalitas dan Gangguan**  
**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Jenis Pelanggaran	Polres Padang Pariaman	Polsek Batang Anai	Polsek Lubuk Alung	Polsek Sicincin	Polsek Sungai Sarik	Polsek Pauh Kamba	Polsek Kawasan BIM	Polsek Sungai Limau	Polsek Sungai Geringging	Polsek Aur Malintang	Polsek V Koto Kampung Dalam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Pencurian Kekerasan	3	7	3	1	4	1	-	-	-	1	-
2.	Pencurian Pemberatan	17	47	11	10	4	7	-	6	3	-	2
3.	Pencurian Kendaraan Bermotor	11	30	10	9	4	5	-	3	-	-	1
4.	Pencurian Ternak	2	5	1	1	1	1	-	-	-	-	-
5.	Judi	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pencurian	9	13	12	10	5	17	-	7	6	-	6
7.	Penipuan	8	3	9	1	1	1	-	-	-	-	-
8.	Penggelapan	7	9	3	-	-	2	1	-	8	-	1
9.	Penganiayaan	14	18	10	15	4	10	-	6	-	11	3
10.	Pengrusakan	1	2	1	4	-	1	-	-	1	3	-
11.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pemalsuan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
13.	Pembakaran	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pembunuhan	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
15.	Pemerasan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Penadahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Pengancaman dengan Kekerasan	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
19.	Pengeroyokan	2	-	2	-	1	-	-	1	3	2	3
20.	Penghinaan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Penipuan dan Penggelapan	7	14	-	-	-	3	-	-	5	3	-
22.	Perampasan Hak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23.	Perbuatan Tidak Senang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
24.	Perlindungan Anak/Cabul	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Perzinahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	KDRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
28.	Melarikan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	ITE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Korupsi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Migas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2020</b>	<b>136</b>	<b>157</b>	<b>67</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>16</b>
	<b>2019</b>	<b>138</b>	<b>110</b>	<b>74</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>60</b>	<b>43</b>	<b>21</b>
	<b>2018</b>	<b>151</b>	<b>166</b>	<b>117</b>	<b>59</b>	<b>28</b>	<b>59</b>	<b>6</b>	...	...	...	...
	<b>2017</b>	<b>171</b>	<b>119</b>	<b>102</b>	<b>52</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>6</b>	...	...	...	...
	<b>2016</b>	<b>156</b>	<b>161</b>	<b>155</b>	<b>80</b>	<b>55</b>	<b>109</b>	<b>1</b>	...	...	...	...

Sumber : BPS, Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka, 2021

### 2.4.3.2 Lama Proses Perizinan

Proses perizinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengambil suatu kebijakan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman (DPMPTP).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor: 161/KEP/BPP/2018 Tentang Standar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, telah diatur standar waktu pelayanan perizinan yang dikelola oleh DPMPTP yang ditentukan, dapat dilihat pada Tabel 2.95.

**Tabel 2.95**  
**Standar Waktu Pelayanan Perizinan di Kabupaten Padang Pariaman**

No.	Jenis Perizinan / Non Perizinan	Hari Selesai	
		Berkas Lengkap	Survey dan Rekomendasi
1.	Izin Operasional Sekolah	5 Hari	30 Hari
2.	Izin Pendirian Kursus	5 Hari	30 Hari
3.	Izin Taman Bacaan Masyarakat	5 Hari	30 Hari
4.	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	5 Hari	30 Hari
5.	Izin Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Hari	30 Hari
6.	Izin Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Hari	30 Hari
7.	Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah	5 Hari	14 Hari
8.	Izin Kerja dan Izin Praktek Tenaga Kesehatan	3 Hari	14 Hari
9.	Izin Apotek / Apotek Rakyat	3 Hari	14 Hari
10.	Izin Toko Obat	3 Hari	14 Hari
11.	Izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga	3 Hari	14 Hari
12.	Izin Fisioterapi	3 Hari	14 Hari
13.	Izin Balai Pengobatan / Rumah Bersalin / Klinik	3 Hari	14 Hari
14.	Izin Lingkungan	-	14 Hari
15.	Izin Lokasi	-	14 Hari
16.	Izin Instalasi Genset	3 Hari	14 Hari
17.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	5 Hari	30 Hari
18.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3 Hari	14 Hari
19.	Izin Usaha Produksi Benih	7 Hari	4 Hari
20.	Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Pertokoan dalam 1 (Satu) Daerah	-	14 Hari
21.	Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu Wilayah Operasinya berada dalam Daerah Kabupaten	-	14 Hari
22.	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan Dilembaga Kearsipan Daerah	3 Hari	14 Hari
23.	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	3 Hari	14 Hari
24.	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	3 Hari	14 Hari
25.	Tanda Daftar Usaha Jasa Trnsportasi Wisata	3 Hari	14 Hari
26.	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	3 Hari	14 Hari
27.	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	3 Hari	14 Hari
28.	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	3 Hari	14 Hari
29.	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	3 Hari	14 Hari
30.	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan Perjalan Insentif, Konferensi dan Pameran	3 Hari	14 Hari
31.	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	3 Hari	14 Hari





No.	Jenis Perizinan / Non Perizinan	Hari Selesai	
		Berkas Lengkap	Survey dan Rekomendasi
32.	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	3 Hari	14 Hari
33.	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	3 Hari	14 Hari
34.	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	3 Hari	14 Hari
35.	Tanda Daftar Usaha Spa	3 Hari	14 Hari
36.	Izin Penyelenggaraan Pos	-	14 Hari
37.	Izin Pendirian Jasa Titipan untuk Kantor Agen	-	14 Hari
38.	Izin Warung Internet (Warnet)	-	14 Hari
39.	Izin Instalasi Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	3 Hari	14 Hari
40.	Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator	-	14 Hari
41.	Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi	-	14 Hari
42.	Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi	-	14 Hari
43.	Izin Galian Kabel Telekomunikasi (Dalam Satu Kabupaten)	3 Hari	14 Hari
44.	Izin Instalasi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi	-	14 Hari
45.	Izin Prinsip Penanaman Modal	3 Hari	7 Hari
46.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3 Hari	7 Hari
47.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3 Hari	7 Hari
48.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	14 Hari
49.	Izin Reklame	-	7 Hari
50.	Izin Gangguan *Ho) dan Non Ho (Situ)	3 Hari	14 Hari
51.	Izin Pangkalan Minyak Tanah/Gas Elpiji	5 Hari	14 Hari
52.	Izin Usaha Industri	3 Hari	10 Hari
53.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 Hari	-
54.	Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 Hari	-
55.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	-	10 Hari
56.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	-	14 Hari
57.	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	-	14 Hari
58.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)	-	14 Hari
59.	Izin Penggunaan Racun Api	3 Hari	14 Hari
60.	Izin Prinsip	-	14 Hari
61.	Izin Mendirikan Panti Asuhan	3 Hari	14 Hari
62.	Izin Operasional Panti Asuhan	3 Hari	14 Hari

Sumber : DPMPPT Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Hingga kini kinerja pelayanan, terutama terkait lama proses perizinan masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Hal ini terlihat dengan banyaknya jumlah keluhan yang menyebutkan bahwa pelayanan yang ada tidak tepat waktu. Tahun 2016, terdapat 19 keluhan mengenai ketidaktepatan waktu proses perizinan, namun demikian kinerja pelayanan perijinan terpadu satu pintu senantiasa diperbaiki secara berkelanjutan melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terutama yang terkait perijinan usaha.

#### 2.4.3.3 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman meliputi: (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C, (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Bawah Tanah; (9) PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan (10) BPHTB. Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp41.824.536.856,45,- Dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp48.301.645.277,00,- pajak daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar



Rp6.477.108.420,55,- atau 13,41%. Hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang membuat turunnya pendapatan dari beberapa sumber pajak dan retribusi. Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 2.96.

**Tabel 2.96**  
**Rincian Realisasi Pajak Daerah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Pendapatan Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Pendapatan Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Pendapatan Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Pendapatan Tahun 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	100.008.000	66.639.250,00	215.059.598,00	204.686.983,00	101.143.514
2	Pajak Restoran dan Rumah Makan	2.589.675.083,72	3.660.779.391,00	3.957.531.438,00	3.565.516.571	1.519.389.638
3	Pajak Hiburan	35.984.200	52.013.100	58.483.000,00	306.899.850	138.797.000
4	Pajak Reklame	384.589.100	451.674.142,00	507.995.750,00	813.594.680	984.380.375
5	Pajak Penerangan Jalan	11.241.405.270	14.455.742.142,00	16.756.001.963,00	17.745.000.000	16.710.615.735
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian C	907.785.800	3.629.968.485,17	4.065.069.713,00	2.874.340.172	3.784.863.927,95
7	Pajak Parkir	283.396.011	2.440.379.010,00	2.563.465.750,00	1.976.902.400	998.928.700
8	Pajak Air Bawah Tanah	2.723.590.604	338.867.018,00	399.462.486,00	373.380.163	391.000.058
9	PBB Pedesaan dan Perkotaan	5.687.663.620	7.815.114.244,00	8.520.984.649,00	8.983.275.604	8.829.891.991
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	2.968.143.410	3.942.134.750,00	4.368.199.550,00	11.458.048.854	8.365.525.917,5
<b>Jumlah</b>		<b>26.922.241.098,72</b>	<b>36.853.311.532,17</b>	<b>41.412.253.897,00</b>	<b>48.301.645.277,00</b>	<b>41.824.536.856,45</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Apabila dilihat dari sisi nilai maka kontribusi realisasi penerimaan Pajak Daerah yang tertinggi pada tahun 2020 adalah Penerimaan Penerangan Jalan sebesar Rp16.710.615.735,- atau 39,59% dari total realisasi Penerimaan Pajak Daerah.

Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman meliputi: (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (3) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (4) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; (6) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (laboratorium); (7) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (kendaraan bermotor, sewa hall, sewa rumah dinas); (8) Retribusi Terminal; (9) Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong; (10). Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; (11) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (12) Retribusi Izin Trayek.

Rincian realisasi retribusi daerah dapat disajikan dalam Tabel 2.97. Dari tabel dapat dilihat realisasi penerimaan retribusi daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp2.185.534.022,-. Dibandingkan dengan



penerimaan tahun 2019 sebesar Rp2.650.742.637,-, retribusi daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp465.208.615,- atau 17,55%. Realisasi penerimaan retribusi yang paling rendah yaitu retribusi izin trayek sebesar 0.03%. Sedangkan penerimaan retribusi yang paling tinggi adalah retribusi izin mendirikan bangunan yaitu sebesar Rp777.994.742,- atau 35,59%.

**Tabel 2.97**  
**Rincian Realisasi Retribusi Daerah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Pendapatan Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Pendapatan Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Pendapatan Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Pendapatan Tahun 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.514.166.868	13.559.625.608			
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	94.135.000	189.135.000	287.805.000	410.314.500	492.446.500
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	13.208.000	11.600.000	11.800.000	9.500.000	6.619.000
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	343.559.300	353.897.200	411.540.500	439.900.000	253.667.500
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	14.185.000	16.830.000	17.312.500	21.232.000	21.557.500
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	875.000	0			
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.800.000	0	19.500.000	47.000.000	347.250.000
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	227.077.680	216.765.216		28.046.340	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (laboratorium)			49.395.936		31.206.580
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (kendaraan bermotor)			134.970.000	158.432.000	107.239.200
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa hall)			16.800.000	0	24.830.000
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa rumah dinas)			4.182.500	0	0
9	Retribusi Terminal	65.775.000	23.750.000	24.000.000	72.796.000	32.048.000
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	68.975.000	65.340.000		63.750.000	37.250.000
11	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong			54.690.000		
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			0	35.670.000	52.750.000
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	497.693.530	925.644.333	1.827.995.221	1.360.551.797	777.994.742
14	Retribusi Izin Gangguan	715.950.886	467.055.437			
15	Retribusi Izin Trayek	7.255.000	5.905.000	4.845.000	3.550.000	675.000
	<b>Jumlah</b>	<b>11.581.656.264</b>	<b>15.835.547.794</b>	<b>2.864.836.657</b>	<b>2.650.742.637</b>	<b>2.185.534.022</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

## 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

### 2.4.4.1 Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2016-2020 cukup berfluktuasi.

#### 22.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2016. Jika tahun 2016 rasio ketergantungan sebesar 63,46%, maka tahun 2020 menurun menjadi 50,73%. Dengan kata lain, pada tahun 2020 setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tanggungan sebanyak 51 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.98 berikut ini:

**Tabel 2.98**  
**Rasio Ketergantungan di Kabupaten Padang Pariaman**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Usia < 15 tahun	128.179	128.68	128.324	128.047	110.831
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	29.491	30.637	31.463	32.450	34.109
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1)&(2)	156.670	159.205	159.787	150.497	144.940
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	246.860	249.407	251.216	252.785	285.686
5	Rasio ketergantungan (3)/(4) (%)	63,46	63,83	63,61	59,53	50,73

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman (diolah), 2021

Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, rasio ketergantungan di Kabupaten Padang Pariaman memiliki nilai lebih kecil. Kondisi ini membuka kesempatan bagi Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

#### 2.4.4.3 Indek Pembangunan Manusia ( IPM )

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman termasuk rendah di Provinsi Sumatra Barat. Pada saat ini IPM Kabupaten Padang Pariaman mencapai 70,61 dan berada di rangking 11 dari tingkat IPM di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak indikator sumber daya manusia yang belum terpenuhi. Oleh karena itu perlu kerja keras pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Untuk lebih lengkapnya informasi mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.99 dan 2.100.

**Tabel 2.99**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020**

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kep. Mentawai	58,27	59,25	60,28	61,26	61,09
2.	Pesisir Selatan	68,39	68,74	69,40	70,08	69,90
3.	Solok	67,67	67,86	68,60	69,08	69,08
4.	Sijunjung	66,01	66,60	66,97	67,66	67,74
5.	Tanah Datar	70,11	70,37	71,25	72,14	72,33
<b>6.</b>	<b>Padang Pariaman</b>	<b>68,44</b>	<b>68,90</b>	<b>69,71</b>	<b>70,59</b>	<b>70,61</b>
7.	Agam	70,36	71,10	71,70	72,37	72,46
8.	Lima Puluh Kota	68,37	68,69	69,17	69,67	69,47
9.	Pasaman	64,57	64,94	65,60	66,46	66,64
10.	Solok Selatan	67,47	67,81	68,45	68,94	69,04
11.	Dharmasraya	70,25	70,40	70,86	71,52	71,51
12.	Pasaman barat	66,03	66,83	67,43	68,21	68,49
13.	Padang	81,06	81,58	82,25	82,68	82,82
14.	Kota Solok	77,07	77,44	77,89	78,38	78,29
15.	Sawahlunto	70,67	71,13	71,72	72,39	72,64
16.	Padang Panjang	75,50	77,01	77,30	78,00	77,93
17.	Bukittinggi	79,11	79,80	80,11	80,71	80,58
18.	Payakumbuh	77,56	77,91	78,23	78,95	78,90
19.	Pariaman	75,44	75,71	76,26	76,70	76,90

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

**Tabel 2.100**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Peringkat**  
**Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota	IPM	Peringkat
1	Padang	82,82	1
2	Bukittinggi	80,58	2
3	Payakumbuh	78,90	3
4	Kota Solok	78,29	4
5	Kota Padang Panjang	77,93	5
6	Kota Pariaman	76,90	6
7	Sawahlunto	72,64	7
8	Agam	72,46	8
9	Tanah Datar	W <sup>n</sup> :2,33	9
10	Dharmasraya	71,51	10
<b>11</b>	<b>Padang Pariaman</b>	<b>70,61</b>	<b>11</b>
12	Pesisir Selatan	69,90	12
13	Lima Puluh Kota	69,47	13
14	Kab Solok	69,08	14
15	Solok Selatan	69,04	15
16	Pasaman Barat	68,49	16
17	Sijunjung	67,74	17
18	Pasaman	66,64	18
19	Kepulauan Mentawai	61,09	19

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat , 2021

#### 2.4.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari 94 target/sasaran global dan 17 goals. Dari 319 indikator TPB Indonesia 21

indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum, sehingga setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya. Indikator-indikator TPB dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi:

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat : 308
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi : 235
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten : 220
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota : 222

Beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah:

1. Wewenang;
2. Kekhususan indikator;
3. Kondisi geografis; dan
4. Ketentuan indikator RPJMD.

Selain itu, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah daerah khusus yang meliputi indikator, kondisi geografis, dan ketentuan indikator berdasarkan RPJMD.

Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
3. Indikator target TPB yang Belum Memiliki Data (NA)
4. Indikator target TPB yang Bukan Kewenangan Kabupaten (BK)

Indikator capaian target diperoleh berdasarkan capaian masing-masing indikator pilar TPB. Adapun masing-masing pencapaian pada tiap pilar dapat dijelaskan tabel di bawah ini:

**Tabel 2.101**  
**Capaian Indikator TPB**

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	24	13	8	2	1
TPB 2	Tanpa Kelaparan	11	7	1	3	0
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	17	13	4	0
TPB 4	Pendidikan berkualitas	13	7	5	1	0
TPB 5	Kesetaraan gender	14	8	2	4	0
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak	18	8	4	5	1
TPB 7	Menjamin akses energi	2	0	0	2	0
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	5	11	3	0
TPB 9	Infrastruktur, industri dan inovasi	13	7	5	0	1
TPB 10	Mengurangi kesenjangan	11	6	1	4	0
TPB 11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	13	3	4	1	5
TPB 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	2	2	1	0
TPB 13	Penanganan perubahan iklim	2	1	1	0	0
TPB 14	Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim.	BK	BK	BK	BK	BK



No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
TPB 15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	1	3	0	0
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	12	6	3	0
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	16	3	4	8	1
<b>Total</b>		<b>220</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>41</b>	<b>9</b>
<b>Persentase</b>		<b>100%</b>	<b>45%</b>	<b>32%</b>	<b>19%</b>	<b>4%</b>

Sumber : KLHS Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026

Capaian tersebut dapat dijelaskan antara lain:

- Indikator Target TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target (SS). Secara keseluruhan, indikator yang masuk pada kategori ini sebanyak 81 indikator atau bila dipersentasekan menjadi 45% dari 100 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Capaian tertinggi terdapat pada tujuan ketiga yaitu Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh sebanyak 11 indikator pencapaian, sedangkan pada tujuan lainnya yang mencapai target hanya berkisar pada 0% hingga 50% target saja. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target pada tujuan Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh telah dilaksanakan dengan baik.
- Indikator target TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target (SB)  
Secara keseluruhan yang termasuk pada kategori ini hanya 70 indikator dengan persentase capaian sebesar 32% Indikator terbanyak pada kategori ini berada pada tujuan Menjamin akses energi yang mencapai 0 indikator.
- Indikator target TPB yang belum memiliki data (NA)  
Indikator pada kategori ini tidak dapat mendukung penjelasan capaiannya. Namun secara keseluruhan, indikator yang tidak memiliki data berada pada tujuan Infrastruktur, industri dan inovasi dan Penanganan perubahan iklim, yaitu sebanyak 15 indikator.
- Indikator target TPB yang Bukan Kewenangan Kabupaten (BK)  
Indikator pada kategori ini setelah di analisa dan dilakukan verifikasi data merupakan TPB kewenangan dari provinsi atau pusat sehingga data capaiannya tidak dapat disediakan. Secara keseluruhan, indikator yang bukan kewenangan kabupaten berjumlah 88 indikator atau sebesar 308 dari total keseluruhan indikator. Secara umum, indikator yang bukan kewenangan kabupaten dan tujuan 1 yaitu Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim.

#### 2.4.6 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab visi misi kepala daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program



pembangunan daerah juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial.

Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

#### **a) Bidang Urusan Pendidikan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pasal 5 ayat 3 bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan meliputi:

#### **Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Kesetaraan.

Adapun penerima pelayanan dasar SPM pada pendidikan anak usia dini peserta didik yang berusia 5 sampai 6 tahun, pendidikan dasar adalah peserta didik yang berusia 7 sampai 15 tahun dan pendidikan kesetaraan peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

#### **Target Pencapaian SPM Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2018, ditetapkan target dan indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota sebagai berikut :



**Tabel 2.102**  
**Target SPM Pendidikan**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### Realisasi Penerapan SPM Daerah

Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu pendidikan anak di usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Tabel 2.103 memperlihatkan realisasi SPM pendidikan tahun 2020.

**Tabel 2.103**  
**Realisasi SPM Pendidikan Tahun 2020**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Target	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	10.336	15.062	68,62
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	72.257	77.139	93,67
3	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3.143	101.960	3.08

Sumber : LPPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan BAB IV yang tertuang dalam pasal 48 sampai dengan pasal 57 yang terdiri dari beberapa ayat. Pemenuhan SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:

- 1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini di bagi dengan menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun pada Kabupaten Padang Pariaman:



- a. Jumlah anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini tahun pelajaran 2019/2020 adalah 10.336 siswa.
  - b. Jumlah anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang sudah tamat di satuan pendidikan anak usia dini tahun pelajaran 2019/2020 atau yang sudah bersekolah di Sekolah Dasar adalah 3.143 siswa.  
Jadi jumlah anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini = 2.658 siswa  
Adapun persentase pendidikan anak usia dini pada tahun 2020 sebesar 68,58 persen, berarti masih ada 31,42 persen anak 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang tidak tamat pendidikan anak usia dini dan tidak dalam pendidikan anak usia dini.  
Terdapat penurunan tingkat persentase jumlah anak yang belajar di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di banding tahun sebelumnya sebesar 71,11. Hal ini dapat disebabkan karena adanya wabah virus covid 19 yang menyebabkan minat belajar peserta didik menurun.
- 2) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan pendidikan dasar dilakukan dengan cara menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan sekolah dasar di bagi dengan menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun pada Kabupaten Padang Pariaman:
- a. Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar tahun pelajaran 2020/2021 adalah SD: 45.913 dan MI: 902, jumlah SD+MI = 46.815 siswa, SMP: 12.441, MTs: 4.306 dan jumlah SMP+MTs=16.747 siswa, maka total pendidikan dasar 77.139 siswa.
  - b. Jadi jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan dasar adalah 72.257 siswa.  
Adapun persentase Pendidikan Dasar pada tahun 2020 adalah sebesar 93,67 persen, berarti hanya sekitar 6,33 persen atau 4.882 siswa yang belum tercapai target sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018. Tidak tercapainya target tersebut dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan yaitu banyak siswa yang belajar di luar kabupaten Padang Pariaman sementara itu tidak terdata di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga terdapat siswa yang disekolah tidak pernah masuk tetapi setelah satu tahun atau lebih minta aktif kembali dan minta surat pindah pula.
- 3) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang

belajar di pendidikan kesetaraan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada kabupaten Padang Pariaman.

- a. Berdasarkan data di Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dapopaud-dikmas) yang terdiri dari peserta didik Paket A,B dan C sebanyak 1.172 warga belajar, jadi total anak usia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) sebanyak 1.593 warga belajar dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebanyak 378 warga belajar.
- b. Adapun anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat belajar di PKBM dan SPNF tahun 2020 terdiri dari Paket A sejumlah 84 warga , Paket B sejumlah 509 dan Paket C berjumlah 579 warga belajar, jadi total siswa yang sudah tamat pendidikan kesetaraan sejumlah 1172 wrga belajar.  
Total anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan adalah  $1.172 + 1.593 + 378 = 3.143$  warga belajar.  
Persentase pendidikan kesetaraan yang dapat layanan dasar sebesar 3,08 persen dan masih ada 96,92 persen penduduk usia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun yang tidak terlayani pendidikan kesetaraan.

## **b) Urusan Bidang Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan meliputi:

### **Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

**Target Pencapaian SPM Daerah**

Capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.104**  
**Target SPM Kesehatan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu Nasional	Ket.
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100%	Setiap Tahun	
		2. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	100%	Setiap Tahun	
		3. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	Setiap Tahun	
		4. Persentase Usia Bawah Lima Tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	Setiap Tahun	
		5. Persentase Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	100%	Setiap Tahun	
		6. Persentase Usia 15-59 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	100%	Setiap Tahun	
		7. Persentase Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	100%	Setiap Tahun	
		8. Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	Setiap Tahun	
		9. Persentase Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	Setiap Tahun	
		10. Persentase dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	Setiap Tahun	
		11. Persentase terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pemeriksaan Tuberkulosis sesuai Standar	100%	Setiap Tahun	
		12. Persentase terduga HIV dan AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV-AIDS sesuai Standar	100%	Setiap Tahun	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

**Realisasi Penerapan SPM Daerah**

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 adalah sebagai tabel berikut:

**Tabel 2.105**  
**Realisasi dan Capaian SPM Kesehatan**

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan K4 difasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	8.702	6.983	80,2
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	8.307	6.828	82,2



No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	7.911	6.847	86,6
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	38.884	28.553	73,4
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	66.674	15.451	23,2
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	234.378	112.001	47,8
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	75.857	34.843	45,9
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	63.945	25.509	39,9
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	4.939	3.520	71,3
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	877	867	98,9
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	15.610	5.396	34,6
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	15.819	8.886	56,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Adapun capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2020 dari yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, diuraikan sebagai berikut:

- a. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.  
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan pada tahun 2020 sebesar 80,2 (6.983 Ibu hamil K4 dari 8.702 ibu hamil) sedangkan target pada tahun 2020 adalah 100% belum mencapai target. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 adalah 81,91%, maka terjadi penurunan dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia tidak memadai karena terjadinya pergeseran dana belanja akibat pandemik Covid-19, namun dikatakan pencapaian indikator tersebut tidak maksimal dan perlu ditingkatkan.
- b. Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.  
Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar, didapat dari perhitungan persentase jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan dibagi dengan semua ibu bersalin di suatu wilayah pada kurun waktu satu tahun. Standar pada tahun 2020 sebesar 82,2% (6.828 ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar dari 8.307 ibu bersalin).
- c. Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.  
Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, dihitung dari jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dibagi dengan jumlah seluruh bayi yang lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 86,6 % (6.847 bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dari 7.911 bayi yang lahir).
- d. Persentase usia dibawah lima tahun (balita) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.  
Persentase usia dibawah lima tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dihitung dari jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Persentase usia dibawah lima tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 73,4% (28.553 Balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dari 38.884 Balita).
- e. Persentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Persentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, diperoleh dari perhitungan persentase jumlah siswa pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Persentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 22,8% (15.451

siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skinning kesehatan sesuai standar dari 66.674 semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang ada).

- f. Persentase usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Persentase usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, didapat dari perhitungan jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam waktu satu tahun yang sama. Persentase usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 47,8% (112.001 pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dari 234.378 Warga negara usia 15-59 tahun yang ada).

- g. Persentase usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Persentase usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, didapat dari jumlah pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 53,0% (34.843 penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 75.857 jumlah estimasi penderita hipertensi).

- h. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, didapatkan dari jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 39,9% (25.509 penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 63.945 jumlah estimasi penderita hipertensi).

- i. Cakupan persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, didapatkan dari jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 73,1% (3.520 penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan

- elayanan kesehatan sesuai standar dari 4.939 jumlah penyandang DM).
- j. Persentase dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar didapatkan dari jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Persentase dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 98,9% (867 ODGJ berat psikotik yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 877 ODGJ berat psikotik yang ada).
- k. Persentase penderita Tuberkulosis mendapatkan pemeriksaan Tuberkulosis sesuai standar.  
Persentase penderita Tuberkulosis mendapatkan pemeriksaan Tuberkulosis sesuai standar, didapatkan dari jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama. Persentase penderita Tuberkulosis mendapatkan pemeriksaan Tuberkulosis sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 34,5% (5.396 Orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dari 15.610 orang dengan TB yang ada).
- l. Persentase terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan HIV-AIDS sesuai standar  
Persentase terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan HIV-AIDS sesuai standar, didapat dari jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama. Persentase standar pada tahun 2020 sebesar 56,2% (8.886 peserta orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar dari 15.819 orang beresiko terinfeksi HIV yang ada).

### **c) Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

Berdasarkan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal, jenis pelayanan dasar PM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum meliputi:

#### **Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar



Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah:

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh di seluruh kabupaten/kota dengan formula sebagai berikut:

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\text{Rumah Tangga Terlayani}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Pembilang : jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten/kota tersebut.

b. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Indikator Pencapaian Sub Bidang Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

### Target Pencapaian SPM Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2020, mengacu pada target RPJMD dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 - 2021 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.106**  
**Target Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

### Realisasi Penerapan SPM Daerah

Target SPM Bidang Pekerjaan Umum yang dapat direalisasikan pada tahun 2020 dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 2.107**  
**Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.	97.754 RT	84.717 RT	86,66
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai.	97.754 RT	97.544 RT	99,79

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

- 1) Pada tahun 2020 ditargetkan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Padang pariaman adalah 97.754 rumah tangga, sedangkan realisasinya adalah 84.717 rumah tangga dengan persentase capaiannya 86,66%.
- 2) Sedangkan untuk target jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic pada tahun 2020 adalah 97.754 RT sedangkan realisasinya adalah 97.544 rumah tangga dengan persentase capaian 99,79%.

#### **d) Bidang Urusan Perumahan Rakyat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat meliputi:

##### **Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Renana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan perhitungan capaian:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Unit Korban Bencana yang ditangani pada tahun N}}{\text{Jumlah Total Rencana Unit Rumah Korban Bencana yang akan ditangani pada tahun N}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Pembilang  
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- Penyebut



Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program.

Pelayanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Adapun cara perhitungan Capaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian Hak Atas penguasaan tanah dan atau bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi criteria penerima layanan rencana unit rumah korban bencana}} \times 100\%$$

Keterangan

1. Pembilang

Jumlah total penerima pelayanan:

- Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
- Subsidi Uang Sewa (Khusus Kabupaten/Kota)
- Penyediaan Rumah Layak Huni

2. Penyebut

Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi criteria penerima pelayanan.

3. Penerapan SPM

Untuk melaksanakan penerapan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana terdiri dari tahapan sebagai berikut:

### Target Pencapaian SPM Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2020 sebagaimana berikut:

**Tabel 2.108**  
**Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian (%)
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	0

Sumber : Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2021

## Realisasi Penerapan SPM Daerah

Realisasi dan capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.109**  
**Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	0	0	0

Sumber : Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### e) Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

#### Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang terutang dalam standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

#### Target Pencapaian SPM Daerah

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran dapat dilihat dalam tabel indikator serta nilai SPM sebagai berikut:

**Tabel 2.110**  
**Target Indikator SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Realisasi	Hasil (%)
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada	22 Kasus	11	50
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamat dan evakuasi korban kebakaran	95 Jiwa	92	96,84

Sumber : Dinas Satpol PP Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### Realisasi Penerapan SPM Daerah

Realisasi terhadap penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.111**  
**Realisasi Penerapan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Jenis Layanan	Indikator	Sub Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada	Pelayanan Pengobatan	0	0	100%
			Pelayanan Kerugian Materi	0	0	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Layanan Respon Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 menit	15	20	75%
			Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	84	84	100%
			Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan mausia operasi darurat non kebakaran	12	12	100%
			Layanan Pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran	0	0	100%
			Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran	36	36	100%

Sumber : Dinas Satpol PP Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari tabel diatas dapat diterangkan bahwa berdasarkan capaian target kinerja diatas didapatkan hasil sebagai berikut:

### 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum

Berdasarkan capaian target kinerja diatas didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Indikator sasaran Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkadadengan tingkatan capaian 50% dengan interpretasi kurang berhasil.
- b. Program yang mendukung peran tersebut adalah :
  - 1) Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Pencegahan Tindak Kejahatan
    - ✓ Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencegah tindak kejahatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban melalui operasi lapangan di seluruh wilayah Kab. Padang Pariaman
    - ✓ Target pada tahun 2020 untuk penyelesaian kasus dalam kegiatan ini adalah 75 Kasus.Sedangkan realisasinya adalah 16 Kasus atau dengan kata lain tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah 21,33%.
  - 2) Faktor Pendukung kinerja ini adalah:
    - a) Kerjasama Pengembangan kemampuan Aparat Satpol PP dengan TNI/POLRI/KEJAKSAAN
      - ✓ Kegiatan ini dilakukan untuk pengembangan kemampuan Aparat Satpol PP dalam penanganan Kasus di lapangan dengan bekerja sama dengan pihak TNI/POLRI/KEJAKSAAN.
      - ✓ Target pada tahun 2019 untuk penyelesaian kasus dalam kegiatan ini adalah 75 Kasus. Sedangkan realisasinya adalah 12 Kasus atau dengan kata lain tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah 12%.
    - b) Tim Pengamanan Perda
      - ✓ Kegiatan ini meliputi pengawasan, pengendalian dan evalusaisi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kab. Padang Pariaman.
      - ✓ Indikator kegiatan ini adalah persentase penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah Pada Tahun 2020 di targetkan sebanyak 22 pelanggaran di tindak lanjuti penegak keamanan terhadap Peraturan Daerah, Sedangkan realisasinya adalah penegakan keamanan terhadap Peraturan Daerah yang ditindak lanjuti 11 pengaduan atau tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah 50 %.
  - 3) Permasalahan yang di hadapi dalam mewujudkan sasaran Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan adalah banyak pihak yang terkait dalam kegiatan.

- 4) Untuk mengatasi permasalahan di atas maka diperlukan solusi yakni dengan meningkatkan kerjasama dan penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

## 2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Berdasarkan capaian target kinerja diatas didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Indikator sasaran Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakarandengan tingkatan capaian 96,84% dengan interpretasi sangat berhasil.
- 2) Program yang mendukung peran tersebut adalah:
  - a. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
    - ✓ Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencegah bahaya kebakaran yang mengancam keselamatan warga Negara melalui Penanggulangan Bahaya Kebakaran di seluruh wilayah Kab. Padang Pariaman.
    - ✓ Target pada tahun 2020 untuk penyelesaian bahaya kebakaran dalam kegiatan ini adalah 95 kejadian. Sedangkan realisasinya adalah 92Kejadian dalam WMK, dengan kata lain tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah 96,84%.
  - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
    - ✓ Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pencegahan bahaya kebakaran yang mengancam keselamatan warga Negara melalui Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 5 Unit Mobil Pemadam kebakaran yang layak di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

### f) Bidang Urusan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah meliputi:

#### Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana menurut Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
  - Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat:
    - Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)
    - Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana

- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana setidaknya memuat:
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
  - Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)
  - Pelatihan pencegahan dan mitigasi
  - Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
  - Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
  - Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling sedikit memuat:
- Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
  - Respon cepat darurat bencana
  - Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
  - Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
  - Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

### Target Pencapaian SPM Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.112**  
**Target SPM Bencana Daerah**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
	a. Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100%	Setiap Tahun
	c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100%	Setiap Tahun
	b. Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Persentase (%) penyelesaian dokumensampai dinyatakan sah/legal	100%	Setiap Tahun
	c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Persentase (%) jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	100%	Setiap Tahun
	d. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang ikut pelatihan	100%	Setiap Tahun
	e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdal ops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	Setiap Tahun





No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
	f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	a. Respon cepat kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	Setiap Tahun
	b. Respon Cepat Darurat Bencana	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	Setiap Tahun
	c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	Setiap Tahun
	d. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	Setiap Tahun

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

### Realisasi Penerapan SPM Daerah

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.113**  
**Realisasi Penerapan SPM Bencana Daerah tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
	a. Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana			
	- Tsunami	59.114 Org di daerah rawan Tsunami	57.340 Org di daerah rawan Tsunami	97
	- Banjir	90.229 Org di daerah rawan Banjir	87.522 Org di daerah rawan Banjir	97
	- Longsor	40.942 Org di daerah rawan Longsor	39.714 Org di daerah rawan Longsor	97
	- Gelombang Ekstrim	33.464 Org di daerah rawan Gelombang Ekstrim	32.461 Org di daerah rawan Gelombang Ekstrim	97
	- Kekeringan	18.507 Org di daerah rawan Kekeringan	17.952 Org di daerah rawan Kekeringan	97
	- Cuaca Ekstrim	384.353 Org di daerah rawan Cuaca Ekstrim	372.822 Org di daerah rawan Cuaca Ekstrim	97
	- Epidemii	431.224 Org di daerah rawan Epidemii	418.287 Org di daerah rawan Epidemii	97
	- Gempa Bumi	121.810 Org di daerah rawan Gempa Bumi	118.156 Org di daerah rawan Gempa Bumi	97
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			



No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	b. Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	200 org (Pelatihan di PLN, Poltekpel)	200 Org	100
	d. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50 org (Pelatihan di Nagari III Koto Aur Malintang)	50 org	100
	e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	431.224 Org	418.288 Org	97
	f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	431.224 Org	418.288Org	97
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	a. Respon cepat kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	1 Jenis Pandemi (Corona)	1 Jenis Pandemi (Corona)	100
	b. Respon Cepat Darurat Bencana	320 Kejadian	320 Kejadian	100
	c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	36 Anggota TRC	36 Anggota TRC	100
	d. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1628 Korban	1628 Korban	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

### g) Bidang Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial meliputi:

#### Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota adapun jenis SPM Bidang Sosial sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti
- e. Pelindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten

#### Target Pencapaian SPM Daerah

Target penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel 2.114 dibawah ini:

**Tabel 2.114**  
**Target Penerapan SPM Sosial**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar luar panti	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar luar panti	100%	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti	100%	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti	100%	Setiap Tahun
5	Pelindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	100%	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

### Realisasi Penerapan SPM Daerah

Realisasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.115**  
**Realisasi Penerapan SPM Sosial**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar luar panti	Pesentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	30 org	13 org	43,33%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar luar panti	Pesentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	95 org	95 org	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti	Pesentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	50 org	50 org	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti	Pesentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial luar panti	0	0	0
5	Pelindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	Pesentase korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	282	282	100%

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Perhitungan Capaian SPM Bidang Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti tahun 2020.

Perhitungan penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.116.

**Tabel 2.116**  
**Perhitungan Penyandang Disabilitas yang**  
**Memperoleh Rehabilitasi Sosial Luar Panti**

Uraian	Jumlah yang harus dibantu	Target yang memperoleh rehabilitasi	Capaian/ Realisasi	Jenis Bantuan/ Rehabilitasi	Jumlah	Sumber	Keterangan
Penyandang disabilitas terlantar luar panti	43	30	43	1. ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas)			Tidak ada penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020
				2. Bansos	25.000.000,-	DAU/ APBD	
<b>Jumlah</b>					<b>25.000.000,-</b>		

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

b. Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti tahun 2020.

Perhitungan anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.117**  
**Perhitungan Anak Terlantar yang**  
**Memperoleh Rehabilitasi Sosial Luar Panti**

Uraian	Jumlah yang harus dibantu	Target yang memperoleh rehabilitasi	Capaian/ Realisasi	Jenis Bantuan/ Rehabilitasi	Jumlah	Sumber
Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	52	30	52	Pelatihan keterampilan di PSBR Harapan Padang Panjang (perempuan)	26.500.000,-	APBD
<b>Jumlah</b>					<b>26.500.000,-</b>	

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

c. Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti tahun 2020.

Perhitungan lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.118**  
**Perhitungan lanjut usia terlantar yang**  
**memperoleh rehabilitasi sosial luar panti**

Uraian	Jumlah yang harus dibantu	Target yang memperoleh rehabilitasi	Capaian/ Realisasi	Jenis Bantuan/ Rehabilitasi	Jumlah	Sumber
lanjut usia terlantar luar panti	34	20	34	1. Bansos	51.500.000,-	DAU/ APBD
<b>Jumlah</b>					<b>51.500.000,-</b>	

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

- d. Pesentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial luar panti tahun 2020.  
Perhitungan gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial luar panti tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.119**  
**Perhitungan gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial luar panti**

Uraian	Jumlah yang harus dibantu	Target yang memperoleh rehabilitasi	Capaian/ Realisasi	Jenis Bantuan/ Rehabilitasi	Jumlah	Sumber
Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial luar panti	0	0	0	Pembinaan	0	0
<b>Jumlah</b>					<b>0</b>	

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

- e. Persentase korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020.  
Perhitungan korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.120**  
**Perhitungan korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**

Uraian	Jumlah yang harus dibantu	Target yang memperoleh rehabilitasi	Capaian/ Realisasi	Jenis Bantuan/ Rehabilitasi	Jumlah	Sumber
Korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	56KK	96KK	56KK	Kebutuhan Pokok, peralatan dapur, family kid, foodware dll	93.116.000	DAU/ APBD
<b>Jumlah</b>					<b>93.116.000,-</b>	

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

#### 2.4.7 Capaian Indikator Pembangunan

Menurut pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



**TABEL 2.121**  
**HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**  
**TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
<b>I.</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>							
<b>1.1</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>							
1.1.1	PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Berlaku (Juta Rupiah)	17.532.873,46	19.038.379,57	20.438.318,45	21.252.415,30	17.941.900,08		
1.1.2	PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan (Juta Rupiah)	11.697.039,96	12.350.186,95	13.021.887,79	13.334.921,66	11.939.475,18		
1.1.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman (%)	5,52	5,58	5,46	2,40	(10,46)		
1.1.4	Laju Inflasi Kab. Padang Pariaman	5,02	2,11	2,55	1,72	2,12		
1.1.5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah)	42.908,37	46.321,75	49.463,57	49.364,77	42.781,67		
1.1.6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rupiah)	28.626,28	30.048,90	31.514,98	30.960,20			
1.1.7	Indek Gini Ratio	0,26	0,28	0,3	0,29	0,257		
1.1.8	Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman	374.636	385.736	402.960	411.182	455.463		
1.1.9	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	36,34	34,7	33,2	29,48	28,98		
1.1.10	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Pariaman(%)	8,91	8,46	8,04	7,1	6,99		
1.1.11	Angka Kriminalitas dan Gangguan Tertangani (Kasus)	930	693	802	743	592		
1.1.12	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Dan Gangguan (%)	61	46	81	65	76		
<b>1.2</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>							
1.2.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,44	68,90	69,71	70,59	70,86		
1.2.2	Angka Melek Huruf	93,50	98,31	98,00	98,30	99,48		
1.2.3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,40	6,87	7,21	7,86	7,87		
1.2.4	Angka Rata-Rata Harapan Lama Sekolah	13,55	13,56	13,57	13,62	13,67		
1.2.5	Angka Harapan Hidup	67,80	67,96	68,23	69,87	68,68		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.2.6	Daya Beli Masyarakat	10.455	10.579	10.919	11.158			
<b>1.3</b>	<b>Fokus Seni Budaya Dan Olah Raga</b>							
1.3.1	Jumlah dan Jenis Objek Wisata							
	a. Wisata Alam	29	30	30	33	33		
	b. Wisata Budaya	3	3	3	3	3		
	c. Wisata Sejarah	33	38	38	38	38		
	d. Wisata Pantai	8	10	10	10	10		
	e. Wisata Minat Khusus	9	9	9	9	9		
1.3.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	4.123.231	4.205.691	4.349.477	396.790	208.872		
	a. Domestik	4.118.724	4.201.094	4.345.107	395.904	208.808		
	b. Mancanegara	4.507	4.597	4.370	886	64		
<b>II</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>							
	<b>Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Lima Unit Pelayanan</b>							
	1. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	82,02 (B)	83,01 (B)	86,27 (B)	90,42 (A)		
	2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	-	72,90 (C)	77,24 (B)	80,27 (B)	88,52 (A)		
	3. Rumah Sakit Umum Daerah	-	75,17 (C)	76,97 (B)	82,41 (B)	86,50 (B)		
	4. Perusahaan Daerah Air Minum	-	70,61 (C)	76,69 (B)	74,81 (C)	78,15 (B)		
	5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	68,39 (C)	70,22 (C)	78,90 (B)	77,24 (B)		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	76,60 (C)	79,15 (B)		
<b>2.1</b>	<b>Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>							
<b>2.1.1</b>	<b>Urusan Pendidikan</b>							
	<b>Pendidikan Dasar:</b>							
	a. Angka Partisipasi Sekolah	99,23	99,87	94,40	98,73	99,15		
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	63,47	210,90	131,00	170,00			
	c. Rasio Guru/Murid	13,19	13,28	12,35	15,67	25,00		
	<b>Fasilitas Pendidikan:</b>							



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	a. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik	98.25	97,00	90,47	93,00	99,00		
	b. Sekolah Pendidikan SMP/MTS Kondisi Ruang Kelas Baik	88.00	86,00	82,61	96,00	95,00		
	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)</b>							
	a. Jumlah Siswa Pada Jenjang TK/RA	8.773.00	8.240	9.665	8.448	4.643		
	b. Angka Melek Huruf	93,50	98,31	98,00	98,30	99,48		
	c. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,50	8,40	7,50	7,86	<b>7,87</b>		
	<b>Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar</b>							
	7-12 tahun	99,44	99,87	99,49	99,83	99,84		
	13-15 tahun	96,95	98,30	98,52	97,63	97,98		
	Pendidikan Menengah							
	16-18 tahun	82.81	85.81	85.27	84.74	85,83		
	<b>Angka Partisipasi Murni</b>							
	Angka Partisipasi Murni (PAUD)	87,83	87,71	101,42	67,20	-		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98.00	87.71	101.42	99,24	99,36		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	71.00	56.51	87.39	76,14	76,77		
	<b>Angka Partisipasi Kasar</b>							
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	103,39	101,29	116,45	109,60	109,76		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	90.00	74.10	115.44	90,20	92,08		
	<b>Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (Usia7-15)</b>							
	Jumlah Sekolah	468	468	469	470	471		
	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	79.048	79.318	64,099	79,542	80.541		
	Rasio Ketersediaan Sekolah	1 : 169	1 : 170	1 : 137	1 : 169	1 : 171		
	<b>Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar</b>							
	Jumlah Guru	5.594	8.036	5,979	4,662	4.034		
	Jumlah Murid	71.138	104.479	73,870	73,076	49.238		
	Rasio Ketersediaan Guru dan Murid	1 : 13	1 : 13	1 : 12	1 : 16	1 : 12		





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	<b>Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</b>	89,23	94,00	91,88	93,21			
	<b>Angka Kelulusan:</b>							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,95	100,00	99,61	100,00	100,00		
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,86	99,89	98,10	98,20	100,00		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	70,85	99,50	98,40	93,20	99,00		
	<b>Angka Putus Sekolah:</b>							
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,03	0,12	0,10	0	0,25		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,08	0,16	0,76	0,80	0,10		
<b>2.1.2</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>							
	Rasio Posyandu Per Satuan Balita x 1000	22,41	22,88	19,86	19,12	1,99		
	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk x 1000	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06		
	Rasio Pustu Per Satuan Penduduk x 1000	0,18	0,16	0,19	0,19	0,20		
	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Jumlah Seluruh Rumah Tangga	60	62,49	66,5	71,86	71,95		
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	63,70	66,61	63,15	61,66	99,79		
	Rasio Polindes/Poskesri Per Satuan Penduduk x 1000	0,18	0,14	0,20	0,21	0,22		
	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk x 1000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002		
	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk x 1000	0,107	0,080	0,117	0,122	0,079		
	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk x 1000	0,18	1,10	1,21	1,23	1,61		
	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (%)	82,00	100,83	99,20	102,72	88,5		
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	91,00	86	89,67	96	69,0		
	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100,00	87,05	82,8	82,6	27,5		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100		
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	86,10	74,7	78	85,9	21,3		
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	132	37		
	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Jamkesmas Dan Jemkesda	82,00	82,67	133,87	73,8	74,99		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	89,06	99,27	99,3	95,00	95,00		
	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	91,00	95,02	92,71	98,9	91,3		
	Cakupan Puskesmas (%)	142,36	143,36	143,36	143,53	143,53		
	Cakupan Pembantu Puskesmas (%)	38,58	39,08	39,08	39,08	39,08		
	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (%)	94,78	100,83	99,16	102,72	88,5		
	Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat untuk Tiap-Tiap 1.000 Penderita Keluar dari RS (Net	0,,03	3,50	3,1	1,26	0,15		
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
	Death Rate=NDR= Angka kematian neto) 2.5%							
	Waktu Tunggu Pasien Di Rawat Jalan ≤ 60 Menit	30	20	50	15	15		
	Angka Kematian Umum untuk Setiap 1.000 Penderita Keluar RS (Gross Death Rate=GDR 4.5%)	0,05	22,9	6	2,95	0,3		
	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana RS (100%)	70	70	70	80	85		
	Ketepatan Waktu Pemberian Makanan Kepada Pasien (≥90%)	90	90	90	90	95		
	Persentase Limbah Cair & Padat RS yang Memenuhi Baku Mutu (BOD <30 mg/l,COD <80 mg/l,TSS < 30 mg/l dan PH 6 -9) Mencapai (100%)	100	100	100	100	100		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Angka Pemanfaatan Tempat Tidur RS (Bed occupancy Rate=BOR) (60% – 85%)	36,72	29,24	55	62,69	49,44		
	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	22,41	22,88	24,36	19,12	1,99		
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	993,11	998,23	993,00	999,961	993,81		
	Angka Usia Harapan Hidup	69,55	67,98	69,76	69,87	68,79		
	Angka Kematian Bayi	7.252	7.938	7.699	7.735	6.869		
	a.Lahir Hidup	7.233	7.924	7.680	7.726	6.847		
	b.Lahir Mati	19	14	19	9	22		
	Persentase Gizi Buruk Dan Gizi Kurang	11,00	10,01	9,8	9,34	11,8		
	Persentase Cakupan Pelayanan Gizi Buruk	100	100	100	100	100		
<b>2.1.3</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	45,36	46,71	62,28	63,68	67,00		
	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 ( Km)	1.855,50	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.666,00		
	Persentase Jalan Mantap (%)	57,75	59,47	62,28	63,68	64,28		
	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam )	893,40	968,02	1.053,75	1.274,06	701,70		
	Rasio Jaringan Irigasi (%)	40,13	43,00	47,12	55,26	85,37		
	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik(%)	39,35	42,45	62,84	65,98	75,00		
	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (M)	52,00	55,00	55,10	55,10	2.417,28		
	Persentase Gedung Kantor Yang Terbangun Dikawasan Ibu Kota Kabupaten	0,38	0,46	0,56	0,57	0,57		
	Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	895,00	905,00	895,00	905,00	993,99		
	Jumlah Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	43,00	125,00	145,00	128,00	55,00		
<b>2.1.4</b>	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman</b>							
	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	93,01	95,60	99,07	99,09	99,11		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Lingkungan Pemukiman Kumuh (Ha)	3.996,15	3.996,15	3.996,15	886,77	886,55		
	Persentase Luas Pemukiman yang Tertata (%)	20	22	24	26	27		
	Rasio Rumah Layak Huni (%)	87,70	60,10	62,30	65,50	63,10		
	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	90	62,49	66,50	71,86	71,95		
	Terbangunnya Jaringan Air Bersih (%)	40,13	43,00	47,12	55,26	68,70		
	Rumah Tangga Bersanitasi Layak	59	60,7	62,67	63,26	63,78		
<b>2.1.5</b>	<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>							
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	1	1	1		
	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	11	13	11	11	8		
	Jumlah LSM Yang Dibina Oleh Kesbangpol	105	115	108	113	108		
	Angka Kriminalitas (Kasus)	570	528	586	572	592		
	Jumlah Demo (Kasus)	1	1	1	0	0		
<b>2.1.6</b>	<b>Urusan Sosial</b>							
	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	13	7	7	7	7		
	PMKS Yg Memperoleh Bantuan Sosial	85,01	1,360	42,351	37,089	29,05		
	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	85,01	1,360	42,351	37,089	29,05		
	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%)	91,09	91,54	91,96	92,90	92,46		
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	36,34	34,7	33,20	29,48	23,67		
	Tingkat Kemiskinan (%)	8,91	8,46	8,04	7,10	5,79		
<b>2.2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>							
<b>2.2.1</b>	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>							
	Angka Partisipasi Angkatan kerja	70,91	64,51	67,58	48,90	52,25		
	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja	121,74	69,57	40	6	8		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Per Tahun							
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1,5	1,6	2,56	2,65	1,85		
	Pencari Kerja yang Ditempatkan	48,02	60,02	65	4,4	5,10		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,56	7,25	7,15	5,97	5,97		
	Keselamatan dan Perlindungan	58,26	58,26	50	58,25	57,7		
	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0		
	Jumlah Pengangguran/Mencari Pekerjaan	17,59	16,00	15,05	13,75	12,05		
<b>2.2.2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	8,50	8,50	6,62	14,28	15,00		
	Rasio KDRT (%)	0,22	0	0	0	0		
	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	20	28	18	26	23		
<b>2.2.3</b>	<b>Urusan Pangan</b>							
	Nilai PDRB Sektor Pertanian	2.499.408,68	2.601.857,26	2.625.510,06*	2.706.597,58*	-		
	Persentase Nilai Tukar Petani	96,67	96,97	95,31	95,99	-		
	Jumlah Produksi beras (000/Ton)	155.904,59	174.550,00	152.562,14	159.334,11	-		
	Regulasi Ketahanan Pangan	1	1	1 (Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor: 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab. Padang Pariaman)	Tidak ada	-		
	Ketersediaan Pangan Utama kg/1000 pddk	702.490,38	695.430,89	656.413,95	709.848,01	-		
	Produktivitas Padi atau Bahan	5,18	5,26	4,51	4,75	4,77		
	Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (ton/ha)							



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Distribusi Sektor Pertanian Tan. Pangan Terhadap PDRB (%)	19,90	19,33	18,65	19,19	22,66		
	Urusan Lingkungan Hidup							
	Persentase Penanganan Sampah	40,55	43,00	44,95	60,85	55,9		
	Pencemaran Status Mutu Air Yang Ditangani	DLHPKPP tidak menghitung pencemaran status mutu air, karena bukan merupakan indikator dalam PP no 6 Tahun 2008 maupun permendagri no 86 tahun 2017						
	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL	DLHPKPP tidak menghitung cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal atau UKL-UPL, karena bukan merupakan indikator yang terdapat pada PP no 6 tahun 2008 maupun Permendagri 86 tahun 2017						
	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	78,54	78,91	78,8	79,37	75,77		
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Terpelihara	48	48	48	48	48		
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	59	47,6	48,7	49,8	55,42		
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	86	97,83	97,83	94,42	93,32		
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan							
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	35	37	46	48,78	48		
<b>2.2.4</b>	<b>Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil</b>							
	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	79	80,00	100,00	98	99,28		
	Persentas Kepemilikan Akte Kelahiran	65	71,00	85,00	87	89,89		
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100	78,00	94,00	100	100		
	Persentase Ketersediaan Elemen Data Per NIK Pada Database Kependudukan	83	80,00	78,00	80,6	80,00		
	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	B	B	B	A	A		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
<b>2.2.5</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</b>							
	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	60	70	90	100	103		
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dan Swadaya Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	35	35	35	33	32		
	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
	Persentase Peningkatan Kemampuan Nagari Dan Pengurus Nagari	20	20	20	19	20		
	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) yang Terbentuk Dan Berfungsi Dengan Baik	9	20	61	18	20		
	Persentase PKK Aktif	42,31	51,28	70,00	68,60	100,00		
	Persentase Posyandu aktif	70,70	70,70	70,70	68,50	70,70		
	Posyandu Purnama dan Mandiri	38,89	42,48	70,72	82,35	85,00		
<b>2.2.6</b>	<b>Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera</b>							
	Rata-rata Jumlah Anak/Keluarga	2,00	2,59	2,48	3,13	3,13		
	Rasio Akseptor KB (%)	64,00	64,38	66,10	32,40	32,40		
	Cakupan Peserta Kb Aktif (%)	64,00	64,38	66,10	65,31	65,56		
	Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I (%)	32,00	27,52	25,42	23,46	-		
<b>2.2.7</b>	<b>Urusan Perhubungan</b>							
	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	4.932.364,45	5.178.951,02	5.204.846,38	5.803.000,00	5.995.318,60		
	Rasio Ijin Trayek	27	38	38	48	50		
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	5.266	5.433	6.309	5.510	5.600		
	Jumlah Terminal Bis	2	2	3	2	3		
	Jumlah Pelabuhan Laut	2	2	2	2	2		
	Jumlah Bandar Udara (Bandara)	1	1	1	1	1		
	Jumlah Angkutan Darat / Jumlah Penumpang Angkutan Darat x 100%	15,00	16,00	16,00	16,70	17,00		
	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	2.634	2.700	2.132	2.800	2.800		
	Lama pengujian Kelayakan	1	1	1	1	1		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Angkutan Umum (KIR) dan berlaku selama 6 bulan							
	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	53,500	53,500	53.500	53.500	53.500		
	Pemasangan Rambu-rambu	325	445	558	900	975		
<b>2.2.8</b>	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>							
	Jumlah Jaringan Komunikasi	112	112	112	112	112		
	Rasio Wartel Terhadap Penduduk 10000	1	1	1	1	1		
	Rasio Warnet Terhadap Penduduk 10000	6	7	7	7	10		
	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	0.03	0.03	0.03	0.03	-		
	Web Site Milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1		
	Persentase Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Yang Mengimplementasikan IT Dengan Baik	10	50	75	85	90		
	Jumlah Penyiaran Radio Lokal	3	3	3	3	3		
<b>2.2.9</b>	<b>Urusan Persandian</b>							
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
<b>2.2.10</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</b>							
	Persentase Koperasi Aktif	75,75	60,65	75	40	40		
	Jumlah UMKM	11.579	11.656	13.061	12.936	38.050		
	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan Unit Usaha Simpan Pinjam yang Otonom	51	51	31	31	50		
	Jumlah BPR/LKM	18	18	18	21	22		
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	97,92	97,93	97,42	98,01	98,01		
<b>2.2.11</b>	<b>Urusan Penanaman Modal</b>							
	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	45	45	52	73	116		
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	145	183	192,2	53,2	462,3		
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (%)	100	100	70,87	75,28	100		





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
<b>2.2.12</b>	<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>							
	Jumlah Organisasi Pemuda	10	52	52	52	10		
	Jumlah Organisasi Olahraga	40	41	35	35	36		
	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	9	18	22	20	2		
	Jumlah Kegiatan Olahraga	5	10	36	36	36		
	Gelanggang / Balai Remaja (Selain Milik Swasta)	104	108	110	112	112		
	Lapangan olahraga	265	270	279	279	246		
<b>2.2.13</b>	<b>Urusan Statistik</b>							
	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	1	1	1	1	1		
	Buku "PDRB Kabupaten"	1	1	1	1	1		
<b>2.2.14</b>	<b>Rasio Kebudayaan</b>							
	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kali)	4	0	4	57	5		
	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Lokasi)	2	3	3	19	4		
	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	37	25	24	25	45		
	Rasio Grup Kesenian/10.000 Penduduk	0,68	0,50	1,20	1,35	1,05		
<b>2.2.15</b>	<b>Perpustakaan</b>							
	Jumlah Perpustakaan	1 Pustaka daerah, 60 pustaka nagari, 5 Perpustakaan TBM, 9 Perpustakaan Pesantrean, 6 Perpustakaan mesjid, 10 Perpustakaan Sekolah	1 Pustaka daerah, 103 pustaka nagari, 5 Perpustakaan TBM, 7 Perpustakaan Pesantrean, 16 Perpustakaan mesjid, 20 Perpustakaan Sekolah	65 (1 perpustakaan daerah; 54 perpustakaan Nagari; 10 TBM)	85 (1 perpustakaan daerah; 64 perpustakaan nagari; 10 TBM, 10 perpustakaan sekolah)	85 (1 Perpustakaan Daerah; 74 Perpustakaan Nagari; 10 TBM)		
	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (%)	1,7	1,7	3,00	4,00	5,00		
	Persentase Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah (%)	13,33	15,60	24,17	42,86	0,53		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
<b>2.2.16</b>	<b>KEARSIPAN</b>							
	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	2,72	2,72	4,76	6,80	8,84		
	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	7	8	20	30	40		
<b>2.3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>							
<b>2.3.1</b>	<b>Urusan Perikanan</b>							
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	26.604,60	25.472,20	23.080,10	22.298,90	26.339,05		
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	54.677,49	57.239,70	58.211,18	54.079,33	62.911,63		
	Jumlah Produksi Ikan Olahhan (Ton)	2,76	206,78	213,87	220,29	204,98		
	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg / Kapita / Tahun)	32,00	32,78	36,06	40,60	35,00		
<b>2.3.2</b>	<b>PARIWISATA</b>							
	Jumlah Kunjungan Wisata (Orang)	48.000	156.445	183.600	396.790	208.872		
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	6.180.717,00	7.012.354,04	7.012.354,04				
<b>2.3.3</b>	<b>PERTANIAN</b>							
	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Ton/Ha)	5,23	5,26	4,51	4,75	5,15		
	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (%)	10,06**	9,74**	11,07	11,07	11,07		
	Distribusi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Terhadap PDRB (%)	19,90	19,33	18,65	19,18	7,53		
	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (%)	3,23**	3,20**			3,54		
	Regulasi Ketahanan Pangan	2	2	1 (Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan	0	2		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
				Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman				
	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/1000 Pddk)	702.490,38	695.430,89	656.413,95	709.848,01	708.310,82		
	Tumbuhnya Kelembagaan Ekonomi Petani (%)	30	-	-	N/A 70,00	70,00		
	Jumlah Produksi Beras (Kg)	155.904,59	174.550,00	152.562,14	159.334,11	150.134,40		
	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Ratio)	-	-	-	N/A	48,19		
	Nilai Tukar Petani (%)	96,45	96,97	95,16	95,99	97,50		
	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Rp. Jutaan)	2.499.408,7	2.624.586,7	3.812.952,29	4.082.657,32	2.736.277,17		
	<b>Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan</b>							
	Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	185.619,2	190.297,6	199.738,38	199.654,40	204.332,80		
	Jumlah Produksi Daging (Ton)	2.814,69	2.814,69	2.978,29	2.339,14	3.151,69		
	Jumlah Hewan yang Sehat	-	7.253.324	7.449.360	7.645.395	7.841.431		
	Jumlah Hewan yang Dikelola	24,00	25,00	31,00	29	35,00		
<b>2.3.4</b>	<b>Energi Dan Sumber Daya Mineral</b>							
	Jumlah Pelanggan Listrik	122.075	130.159	136.078	99.091	123.822		
	Jumlah Daya Listrik	138.919	148.120	159.011	123.575	151.073		
<b>2.3.5</b>	<b>Perdagangan</b>							
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	8,57	8,48	8,45	8,47	8,55		
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	61,00	67,05	60	60	67,25		
	Rata-rata ratio koefisien variasi harga komoditi tertentu	5,89	5,71	5,54	5,54	5,55		
<b>2.3.6</b>	<b>Perindustrian</b>							
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	10,75	10,20	9,63	9,34	12,02		
	Pertumbuhan Industri	3,00	2,8	3,76	1,15	1,92		
<b>2.4</b>	<b>Fungsi Penunjang</b>							
<b>2.4.1</b>	<b>Urusan Perencanaan Pembangunan</b>							
	Tersedianya dokumen perencanaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA							
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	97,91	98,60	100	100	93,00		
	Persentase Peningkatan kualitas musrenbang	75	80	85	93	93,00		
	Kesesuaian program kerja RKPD dengan RPJMD	90	92	95	93	93,00		
	Peningkatan Kualitas SDM perencanaan	77	79	80	80,00	85,00		
<b>2.4.2</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>							
	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,96	1,96	1	1,07	2,05		
	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	9,67	9,67	9,67	3,39	14,82		
	Jumlah Pos Siskamling	732	732	732	732	737		
	Penegakan PERDA (%) (Penyelesaian Pelanggaran Perda)	66,67	80	55	94,12	88		
	Cakupan patroli petugas Satpol PP	0,71	0,71	0,71	0,71	1,45		
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	16	95	11	106	77,27		
	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kab.	1,11	1,11	1,11	2,72	0,15		
	Sistim Informasi Manajemen Pemda	5	5	5	5	5		
	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
<b>III</b>	<b>Aspek Daya Saing Daerah</b>							
<b>3.1</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi</b>							



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	<b>Daerah</b>							
<b>3.1.1</b>	<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>							
<b>3.1.1.1</b>	<b>Konsumsi Rumah Tangga Perkapita</b>							
	Makanan	452,223.37	471,161.00	579,382.00	574,621.00	619,089.00		
	Bukan Makanan	325,122.10	433,490.00	463,562.00	496,809.00	465,216.00		
	<b>Total Pengeluaran Perkapita Sebulan</b>	<b>777,345.47</b>	<b>904,651.00</b>	<b>1,042,944.00</b>	<b>1,071,430.00</b>	<b>1,084,305.00</b>		
	<b>Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita</b>							
	Total Pengeluaran RT Non Pangan	325,122.10	433,490.00	463,562.00	496,809.00	619,089.00		
	<b>Total Pengeluaran</b>	<b>777,345.47</b>	<b>904,651.00</b>	<b>1,042,944.00</b>	<b>1,071,430.00</b>	<b>1,084,305.00</b>		
	<b>Persentase Pengeluaran RT Non Pangan</b>	<b>42%</b>	<b>48%</b>	<b>44%</b>	<b>46%</b>	<b>57%</b>		
<b>3.1.1.2</b>	<b>Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga</b>							
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	47,95	47,57	47,78	47,12	47,04*		
	b. Pakaian dan alas kaki	3,78	3,79	3,79	3,87	3,88*		
	c. Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan Rumah Tangga	10,21	10,22	10,09	9,93	9,87*		
	d. Kesehatan& Pendidikan	7,90	7,98	7,98	7,93	7,97*		
	e. Transportasi, Konsumsi, Rekreasi, dan Budaya	19,98	20,38	20,36	20,56	20,75*		
	f. Hotel & Restoran	3,87	3,92	3,95	4,03	4,07*		
	g. Lainnya	6,32	6,15	6,05	6,56	6,43*		
	<b>Total Konsumsi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>		
<b>3.1.1.3</b>	<b>Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga</b>							
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,38	0,52	3,31	4,27	4,24*		
	b. Pakaian dan alas kaki	2,39	0,23	2,80	6,05	6,26*		
	c. Perumahan, perkakas,	2,28	1,85	1,99	2,66	2,52*		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	perlengkapan dan penyelenggaraan Rumah Tangga							
	d. Kesehatan & Pendidikan	6,48	2,06	2,95	2,89	3,46*		
	e. Transportasi, Konsumsi, Rekreasi, dan Budaya	1,76	1,80	1,46	7,18	7,03*		
	f. Hotel & Restoran	4,49	1,34	2,94	5,55	4.775*		
	g. Lainnya	2,68	0,07	3,51	16,05	16.47*		
	<b>Total Konsumsi</b>	<b>3,15</b>	<b>1,03</b>	<b>2,74</b>	<b>5,44</b>	<b>5,24</b>		
<b>3.1.2</b>	<b>Nilai Tukar Petani (NTP)</b>							
	Indeks yang diterima petani (it)	122,64	125,39	130,55	130,55	106,55		
	Indeks yang dibayar petani (lb)	122,48	126,47	131,56	136,00	105,92		
	NTP	97,67	96,97	95,31	95,99	100,59		
	<b>Nilai Tukar Petani Dan Sub Sektor Pendukungnya di Sumatera Barat</b>							
	Nilai Tukar Petani (NTP)	97,67	96,97	95,31	95,99	100,59		
	NTP Tanaman Pangan	95,00	92,66	92,02	94,79	99,06		
	NTP Hortikultura	92,74	86,33	82,44	81,45	96,80		
	NTP Tanaman Perkebunan Rakyat	98,29	100,93	99,31	99,73	100,84		
	NTP Peternakan	103,71	104,82	103,59	103,86	102,32		
	NTP Perikanan	106,47	109,15	107,88	107,88	94,55		
<b>3.1.3</b>	<b>Produktivitas Total Daerah</b>							
	PDRB ADHB (juta rupiah)	17,532,873.46	19,038,379.57	20,438,318.45	21,252,415.30	17,941,900.08		
	Jumlah angkatan kerja	-	181,864.00	186,482.00	181,344.00	199,985.00		
	Produktifitas Total	-	104.68	109.60	117.19	89.72		
<b>3.2</b>	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>							
3.2.1	Luas Wilayah Terkena Banjir							
3.2.2	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran				158			
3.2.3	Jumlah Hotel dan Penginapan							
	a. Hotel	3	4	4	5	6		
	b. Penginapan/Wisma	3	3	3	4	5		
3.2.4	Rumah Tangga/Pelanggan Listrik	122.075	130,159	135.792	99.091	123.822		
<b>3.3</b>	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>							



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.3.1	Angka Kriminalitas	717	528	586	627	596		
3.3.2	Realisasi Pajak Daerah							
	a. Pajak Hotel	100.008.000	66.639.250	215.059.598	204.686.983	143.514.000		
	b. Pajak Restoran dan Rumah Makan	2.589.675.083,7 2	3.660.779.391	3.957.531.438	3.565.516.571	219.389.638		
	c. Pajak Hiburan	35.984.200	52.013.100	58.483.000	306.899.850	18.797.000		
	d. Pajak Reklame	384.589.100	451.674.142	507.995.750	813.594.680	84.380.375		
	e. Pajak Penerangan Jalan	11.241.405.270	14.455.742.142	16.756.001.962	17.745.000	210.615.735		
	f. Pajak pengambilan bahan galian C	907.785.800	3629.968.485,17	4.065.069.713	2.874.340.172	484.863.927,95		
	g. Pajak Parkir	283.396.011	22.440.379.010	2.563.466.750	1.976.902.400	(101.071.300)		
	h. Pajak Air Bawah Tanah	2.723.590.604	338.867.018	399.462.486	373.380.163	11.000.058		
	i. PBB Pedesaan dan Perkotaan	5.687.663.620	7.815.114.244	8.520.984.649	8.983.275.604	(170.108.009)		
	j. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.968.147.410	3.942.134.750	4.368.199.550	11.458.048.854	165.525.917,50		
	Jumlah	26.922.241.098, 72	36.853.311.532,1 7	41.412.253.897	48.301.645.277	924.536.856,45		
<b>3.3.3</b>	<b>Rincian Realisasi Retribusi Daerah</b>							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.514.166.868	13.559.625.608					
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	94.135.000	189.135.000	287.805.000	410.314.500	92.446.500		
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	13.208.000	11.600.000	11.800.000	9.500.00	(68.381.000)		
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	343.559.300	353.897.200	411.540.500	439.900.000	(93.332.500)		
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	14.185.000	16.830.000	17.312.500	21.232.000	(28.442.500)		
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	875.000	0					
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.800.000	0	19.500.000	47.000.000	97.250.000		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	227.077.680	216.765.216			(277.624.220)		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (laboratorium)			49.395.936	28.046.340	21.206.580		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (kendaraan bermotor)			134.970.000	158.432.000	(292.760.800)		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa hall)			16.800.000	0	(277.624.220)		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa rumah dinas)			4.182.500	0	0		
	Retribusi Terminal	65.775.000	23.750.000	24.000.000	72.796.000	(22.952.000)		
	Retribusi Rumah Potong Hewan	68.975.000	65.340.000			12.250.000		
	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong			54.690.000	63.750.000	12.250.000		
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			0	35.670.000	(22.250.000)		
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	497.693.530	925.644.333	1.827.995.221	1.360.551.797	(222.005.258)		
	Retribusi Izin Gangguan	715.950.886	467.055.437					
	Retribusi Izin Trayek	7.255.000	5.905.000	4.845.000	3.550.000	(4.325.000)		
	<b>Jumlah</b>	<b>11.581.656.264</b>	<b>15.835.547.794</b>	<b>2.864.836.657</b>	<b>2.641.252.137</b>	<b>1.007.294.418</b>		
<b>3.4</b>	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>							
<b>3.4.1</b>	<b>Rasio Ketergantungan</b>							
	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	128,179	128,68	128,324	128,047	110,831		
	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	29,491	30,637	31,463	32,450	34,109		
	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1)&(2)	156,670	159,205	159,787	150,497	144,940		
	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	246,860	249,407	251,216	252,785	285,686		
	Rasio ketergantungan (3)/(4) (%)	63,46	63,83	63,61	59,53	50,73		
	Indek Pembangunan Manusia ( IPM )	68,44	68,90	69,71	70,59	70,61		

Catatan :

\* angka estimasi (dengan menggunakan proyeksi)





## **BAB III**

# **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

---

## BAB III

### GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk memahami kemampuan keuangan, perlu dicermati kondisi kinerja, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa datang.

#### **3.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2016-2020**

##### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Kinerja pelaksanaan APBD berhubungan dengan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Sumber penerimaan Pemerintah Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan merupakan semua penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan merupakan semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilakukan terhadap capaian kinerja pengelolaan keuangan tahun 2016-2020.

Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1.



**Tabel 3.1 (Tabel T-C.2)**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 (%)**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,353,306,741,300.52</b>	<b>1,388,638,247,011.52</b>	<b>1,309,985,762,673.02</b>	<b>1,510,528,680,350.01</b>	<b>1,305,720,742,442.99</b>	<b>2,38</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>72,859,394,000.52</b>	<b>141,310,805,691.52</b>	<b>84,502,722,191.02</b>	<b>101,607,521,617.01</b>	<b>105,893,926,039.99</b>	<b>15,59</b>
Pendapatan Pajak Daerah	26,922,241,098.72	36,853,311,532.17	41,412,253,897.00	48,301,645,277.00	41,824,536,856.45	13,87
Pendapatan Retribusi Daerah	11,581,656,264.00	15,835,547,794.00	2,864,836,657.00	2,650,742,637.00	2,185,534,022.00	(10,71)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,037,912,930.00	6,014,169,910.00	5,791,014,751.00	6,368,010,478.00	6,860,844,053.00	11,09
Lain-lain PAD yang sah	28,317,583,707.80	82,607,776,455.35	34,434,616,886.02	44,287,123,225.01	55,023,011,108.54	33,06
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,182,861,952,300.00</b>	<b>1,164,968,897,005.00</b>	<b>1,159,369,226,314.00</b>	<b>1,219,463,797,990.00</b>	<b>1,037,562,389,473.00</b>	<b>(1,26)</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,128,367,944,854.00</b>	<b>1,059,564,099,184.00</b>	<b>1,087,008,037,363.00</b>	<b>1,139,643,299,241.00</b>	<b>973,687,956,910.00</b>	<b>3,41</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	11,633,798,131.00	11,408,644,852.00	9,039,931,584.00	7,535,744,789.00	6,811,923,273.00	(11,15)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	809,097,755.00	1,091,830,530.00	1,455,781,978.00	1,733,644,396.00	1,948,433,896.00	19,95
Dana Alokasi Umum	783,592,205,000.00	769,827,010,000.00	769,827,010,000.00	792,616,064,000.00	716,079,920,000.00	(0,05)
Dana Alokasi Khusus	332,332,843,968.00	277,236,613,802.00	306,685,313,801.00	337,757,846,056.00	248,847,679,741.00	26,99
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>6,438,518,500.00</b>	<b>51,028,495,000.00</b>	<b>16,500,000,000.00</b>	<b>22,884,576,000.00</b>	<b>14,163,265,000.00</b>	<b>105,76</b>
Dana Penyesuaian	6,438,518,500.00	51,028,495,000.00	16,500,000,000.00	22,884,576,000.00	14,163,265,000.00	105,76
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>48,055,488,946.00</b>	<b>54,376,302,821.00</b>	<b>54,161,188,951.00</b>	<b>56,935,922,749.00</b>	<b>49,711,167,563.00</b>	<b>(3,03)</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6,438,518,500.00	49,176,302,821.00	49,161,188,951.00	56,935,922,749.00	49,711,167,563.00	(3,03)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi	3,055,000,000.00	5,200,000,000.00	5,000,000,000.00	56,935,922,749.00	49,711,167,563.00	4,16
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten			1,700,000,000.00	-	-	
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>97,585,395,000.00</b>	<b>82,358,544,315.00</b>	<b>66,113,814,168.00</b>	<b>189,457,360,743.00</b>	<b>162,264,426,930.00</b>	<b>48,32</b>
Pendapatan Hibah	54,800,085,000.00	28,334,972,315.00	65,888,199,168.00	94,408,997,743.00	66,516,973,159.00	24,50
Pendapatan Lainnya	515,765,000.00	357,850,000.00	225,615,000.00	9,965,000.00	20,970,000.00	(6,62)
Dana Bantuan Pemerintah/Dana Alokasi Desa-LRA	42.269.545.000,00	53.665.722.000,00	-	95.038.398.000,00	95.726.483.771,00	30,45
<b>BELANJA</b>	<b>1,336,323,358,548.30</b>	<b>1,414,773,624,147.00</b>	<b>1,326,772,029,390.33</b>	<b>1,444,556,894,034.70</b>	<b>1,343,677,078,853.00</b>	<b>3,25</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>908,847,261,549.40</b>	<b>908,647,527,424.00</b>	<b>978,222,824,803.33</b>	<b>998,419,744,705.70</b>	<b>964,954,189,152.00</b>	<b>1,34</b>



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun
Belanja Pegawai	722,452,009,632.00	640,147,073,504.00	654,692,618,446.00	700,226,724,837.70	650,205,096,055.00	(1,00)
Belanja Barang	175,429,502,917.40	218,719,523,521.00	248,343,937,312.33	254,595,810,802.00	244,771,881,195.00	6,26
Hibah	10,151,284,000.00	47,815,930,399.00	69,831,269,045.00	40,762,209,066.00	66,652,211,902.00	75,45
Bantuan Sosial	814,465,000.00	1,965,000,000.00	5,355,000,000.00	2,835,000,000.00	3,325,000,000.00	62,42
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>306,496,631,370.90</b>	<b>367,120,206,951.00</b>	<b>262,953,914,380.00</b>	<b>263,182,047,537.00</b>	<b>182,335,821,634.00</b>	<b>1,34</b>
Belanja Tanah	1,730,086,600.00	5,514,046,500.00	13,217,776,750.00	9,779,428,000.00	2,071,300,000.00	50,72
Belanja Peralatan dan Mesin	38,956,480,395.90	27,910,611,691.00	26,155,566,329.00	47,258,241,491.00	47,180,087,288.00	9,17
Belanja Gedung dan Bangunan	62,370,889,255.00	90,084,635,815.00	52,345,105,097.00	104,984,605,673.00	56,494,532,194.00	11,38
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	203,030,818,370.00	234,818,483,976.00	162,877,109,495.00	87,350,239,219.00	69,774,575,610.00	(16,29)
Belanja Aset Tetap Lainnya	408,356,750.00	8,792,428,969.00	8,358,356,709.00	13,809,533,154.00	6,815,326,542.00	412,55
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>-</b>	<b>366,541,750.00</b>	<b>1,019,153,886.00</b>	<b>1,146,013,500.00</b>	<b>22,132,345,315.00</b>	<b>404,35</b>
Belanja Tak Terduga	-	366,541,750.00	1,019,153,886.00	1,146,013,500.00	22,132,345,315.00	404,35
<b>BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>	<b>120,979,465,628.00</b>	<b>138,639,348,022.00</b>	<b>84,576,136,321.00</b>	<b>181,809,088,292.00</b>	<b>174,254,722,752.00</b>	<b>17,28</b>
Bagi Hasil Pajak Daerah	1,575,382,446.00	2,916,636,754.00	3,816,304,902.00	5,297,769,962.00	4,089,131,218.00	25,03
Bagi Hasil Retribusi Daerah	875,899,188.00	1,483,224,356.00	441,117,805.00	421,214,085.00	225,915,763.00	(10,36)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	117,709,273,482.00	133,420,576,400.00	79,499,803,102.00	175,248,350,195.00	169,065,940,771.00	47,18
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	818,910,512.00	818,910,512.00	818,910,512.00	841,754,050.00	873,735,000.00	1,32
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>16,983,382,752.22</b>	<b>-26,135,377,135.48</b>	<b>-16,786,266,717.31</b>	<b>65,971,786,315.31</b>	<b>-37,956,336,410.01</b>	<b>(196,89)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>48,994,708,020.42</b>	<b>53,043,090,772.64</b>	<b>18,663,951,991.16</b>	<b>(8,956,191,055.15)</b>	<b>55,150,646,571.16</b>	<b>(191,55)</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>108,367,009,939.42</b>	<b>65,988,090,772.64</b>	<b>27,801,951,991.16</b>	<b>6,419,020,461.85</b>	<b>59,763,140,359.16</b>	<b>136,83</b>
Penggunaan SiLPA	108,357,207,439.42	65,978,090,772.64	26,834,516,374.16	1,877,685,273.85	56,662,140,359.16	550,65
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	9,802,500.00	10,000,000.00	-	4,509,269,688.00	3,101,000,000.00	
Penerimaan Kembali Investasi Permanen	-	-	967,435,617.00	32,065,500.00	-	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>59,372,301,919.00</b>	<b>12,945,000,000.00</b>	<b>9,138,000,000.00</b>	<b>15,375,211,517.00</b>	<b>4,612,493,788.00</b>	<b>127,77</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	59,372,301,919.00	12,945,000,000.00	9,138,000,000.00	10,660,000,000.00	750,000,000.00	112,85
Pembayaran Pengembalian Dana	-	-	-	4,715,211,517.00	3,862,493,788.00	
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>48,994,708,020.42</b>	<b>53,043,090,772.64</b>	<b>18,663,951,991.16</b>	<b>-8,956,191,055.15</b>	<b>55,150,646,571.16</b>	
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>65,978,090,772.64</b>	<b>26,907,713,637.16</b>	<b>1,877,685,273.85</b>	<b>57,015,595,260.16</b>	<b>17,194,310,161.15</b>	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021



**Tabel 3.2**  
**Rata-Rata Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 (%)**

URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		Pertumbuhan Rata-Rata
	REALISASI	PROPORSI	REALISASI	PROPORSI	REALISASI	PROPORSI	REALISASI	PROPORSI	REALISASI	PROPORSI	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,353,306,741,300.52</b>	<b>100.00</b>	<b>1,388,638,247,011.52</b>	<b>100.00</b>	<b>1,309,985,762,673.02</b>	<b>100.00</b>	<b>1,510,528,680,350.01</b>	<b>100.00</b>	<b>1,305,720,742,442.99</b>	<b>100.00</b>	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>72,859,394,000.52</b>	<b>5.38</b>	<b>141,310,805,691.52</b>	<b>10.18</b>	<b>84,502,722,191.02</b>	<b>6.45</b>	<b>101,607,521,617.01</b>	<b>6.73</b>	<b>105,893,926,039.99</b>	<b>8.11</b>	<b>7,37</b>
Pendapatan Pajak Daerah	26,922,241,098.72	1.99	36,853,311,532.17	2.65	41,412,253,897.00	3.16	48,301,645,277.00	3.20	41,824,536,856.45	3.20	2,84
Pendapatan Retribusi Daerah	11,581,656,264.00	0.86	15,835,547,794.00	1.14	2,864,836,657.00	0.22	2,650,742,637.00	0.18	2,185,534,022.00	0.17	0,51
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,037,912,930.00	0.45	6,014,169,910.00	0.43	5,791,014,751.00	0.44	6,368,010,478.00	0.42	6,860,844,053.00	0.53	0,45
Lain-lain PAD yang sah	28,317,583,707.80	2.09	82,607,776,455.35	5.95	34,434,616,886.02	2.63	44,287,123,225.01	2.93	55,023,011,108.54	4.21	3,56
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,182,861,952,300.00</b>	<b>87.41</b>	<b>1,164,968,897,005.0</b>	<b>83.89</b>	<b>1,159,369,226,314.00</b>	<b>88.50</b>	<b>1,219,463,797,990.00</b>	<b>80.73</b>	<b>1,037,562,389,473.00</b>	<b>79.46</b>	<b>84,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,128,367,944,854.00</b>	<b>83.38</b>	<b>1,059,564,099,184.00</b>	<b>76.30</b>	<b>1,087,008,037,363.00</b>	<b>82.98</b>	<b>1,139,643,299,241.00</b>	<b>75.45</b>	<b>973,687,956,910.00</b>	<b>74.57</b>	<b>78,54</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	11,633,798,131.00	0.86	11,408,644,852.00	0.82	9,039,931,584.00	0.69	7,535,744,789.00	0.50	6,811,923,273.00	0.52	0,68
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	809,097,755.00	0.06	1,091,830,530.00	0.08	1,455,781,978.00	0.11	1,733,644,396.00	0.11	1,948,433,896.00	0.15	0,10
Dana Alokasi Umum	783,592,205,000.00	57.90	769,827,010,000.00	55.44	769,827,010,000.00	58.77	792,616,064,000.00	52.47	716,079,920,000.00	54.84	55,88
Dana Alokasi Khusus	332,332,843,968.00	24.56	277,236,613,802.00	19.96	306,685,313,801.00	23.41	337,757,846,056.00	22.36	248,847,679,741.00	19.06	21,87
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>6,438,518,500.00</b>	<b>0.48</b>	<b>51,028,495,000.00</b>	<b>3.67</b>	<b>16,500,000,000.00</b>	<b>1.26</b>	<b>22,884,576,000.00</b>	<b>1.52</b>	<b>14,163,265,000.00</b>	<b>1.08</b>	<b>1,60</b>
Dana Penyesuaian	6,438,518,500.00	0.48	51,028,495,000.00	3.67	16,500,000,000.00	1.26	22,884,576,000.00	1.52	14,163,265,000.00	1.08	1,60
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>54,494,007,446.00</b>	<b>4.03</b>	<b>108,752,605,642.00</b>	<b>7.83</b>	<b>110,022,377,902.00</b>	<b>8.40</b>	<b>113,871,845,498.00</b>	<b>7.54</b>	<b>99,422,335,126.00</b>	<b>7.61</b>	<b>7,08</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6,438,518,500.00	0.48	54,376,302,821.00	3.92	55,861,188,951.00	4.26	56,935,922,749.00	3.77	49,711,167,563.00	3.81	3,25
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	45,000,488,946.00	3.33	49,176,302,821.00	3.54	49,161,188,951.00	3.75	56,935,922,749.00	3.77	49,711,167,563.00	3.81	3,64
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	3,055,000,000.00	0.23	5,200,000,000.00	0.37	5,000,000,000.00	0.38	-	-	-	-	
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>97,585,395,000.00</b>	<b>7.21</b>	<b>82,358,544,315.00</b>	<b>5.93</b>	<b>66,113,814,168.00</b>	<b>5.05</b>	<b>189,457,360,743.00</b>	<b>12.54</b>	<b>162,264,426,930.00</b>	<b>12.43</b>	<b>8,63</b>
Pendapatan Hibah	54,800,085,000.00	4.05	28,334,972,315.00	2.04	65,888,199,168.00	5.03	94,408,997,743.00	6.25	66,516,973,159.00	5.09	4,49
Pendapatan Lainnya	515,765,000.00	0.04	357,850,000.00	0.03	225,615,000.00	0.02	9,965,000.00	0.00	20,970,000.00	0.00	0,02
Dana Bantuan Pemerintah/Dana Alokasi Desa-LRA	42,269,545,000.00	3.12	53,665,722,000.00	3.86	-	-	95,038,398,000.00	6.29	95,726,483,771.00	7.33	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Sesuai dengan aturan yang berlaku, komponen pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Oleh sebab itu, analisis kinerja pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 5 tahun terakhir didasarkan kepada klasifikasi tersebut. Realisasi target pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/Berkurang
2016	1.351.128.053.695,00	1.353.306.741.300,52	100,16	2,178,687,605.52
2017	1.436.957.422.162,00	1.388.638.247.011,52	96,64	(48,319,175,150.48)
2018	1.466.361.930.430,30	1.309.985.762.673,02	89,34	(156,376,167,757.28)
2019	1.520.643.679.559,00	1.510.528.680.350,01	99,33	(10,114,999,208.99)
2020	1.348.174.651.961,00	1.305.720.742.442,99	96,85	(42,453,909,518.01)
Rata-Rata	1.424.653.147.561,46	1.373.636.034.7565,61	96,42	(51,017,112,805.85)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 3.3 dapat kita lihat target pendapatan pada tahun 2020 sangat jauh berkurang dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pada bulan Maret Tahun 2020 terjadi pandemi *Corona Viruz Disease 19 (COVID-19)*, dimana melalui PMK. No 35 Tahun 2020 pemerintah pusat memotong langsung Dana Alokasi Umum dan mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan Refocusing Anggaran pada setiap Belanja Organisasi Perangkat Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan, belanja tersebut direalokasi pada Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanganan *COVID-19*. Pencapaian Perda APBD Tahun 2020 belum terlaksana secara maksimal, dimana hal ini salah satunya juga akibat dari pandemi *COVID-19* yang melanda seluruh dunia. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam Perda, sedangkan efisiensi pengeluaran dapat dicapai dengan penghematan belanja dan pembiayaan.

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah berjalan memasuki paruh tahun dengan berbagai dinamika yang menyertainya mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut sisi pendapatan, belanja maupun pada sisi pembiayaan daerah. Dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator *influen*-nya. Sejalan dengan rencana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, dimana telah memberikan gambaran arah kebijakan umum terkait kondisi dan kebijakan anggaran.

Penyesuaian-penyesuaian dimaksud dikarenakan beberapa hal antara lain. Pertama penyesuaian target pendapatan, baik peningkatan maupun kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2020 pengurangan target pendapatan pada pos pos tertentu sebagai penyesuaian riil dari peningkatan kinerja ataupun penyesuaian dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, serta hambatan dan kendala yang terjadi, berdasarkan evaluasi hasil pencapaian target pada triwulan pertama dan kedua. Kedua, perkembangan kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama semester pertama yang dalam implementasinya ternyata perlu untuk dilakukan peninjauan ulang program. Ketiga, adanya berbagai kebutuhan yang bersifat cukup mendesak dan penting untuk dilakukan pengalokasiannya dalam Perubahan Anggaran.

Pandemi COVID-19 yang terjadi tahun 2020 mengakibatkan penurunan Pendapatan Daerah sebesar Rp204.807.937.907,02 dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu dari Rp101.607.521.617,01 tahun 2019 menjadi Rp105.893.926.039,99 tahun 2020. Pendapatan Transfer juga mengalami penurunan dari Rp1.219.463.797.990,00 tahun 2019 menjadi Rp1.037.562.389.473,00 tahun 2020. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan dari Rp189.457.360.743,00 tahun 2019 menjadi Rp162.264.426.930,00 tahun 2020.

Analisis data tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengalami pertumbuhan rata-rata yang rendah, hanya sebesar 2,38% per tahun, yaitu mengalami penurunan dari Rp1.353.306.741.300,52 tahun 2016 menjadi Rp1.305.720.742.442,99 tahun 2020. Jika digunakan data tahun 2016-2020, pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dua sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah naik dari Rp97.585.395.000,00 tahun 2016 menjadi Rp162.264.426.930,00 tahun 2020, atau tumbuh 48,32% per tahun. Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan sebesar 15,59% dari Rp72.859.394.000,52 tahun 2016 menjadi Rp105.893.926.039,99 tahun 2020. Sebaliknya, Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar 1,26 dari Rp1.182.861.952.300,00 tahun 2016 menjadi Rp1.037.562.389.473,00 tahun 2020.

**Tabel 3.4**  
**Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	5,38	10,18	6,45	6,73	8,11
Pendapatan Transfer	87,41	83,89	88,50	80,73	79,46
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	7,21	5,93	5,05	12,54	12,43
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Pada Tabel 3.4 dapat dilihat persentase proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah, dimana proporsi realisasi dari pendapatan asli daerah naik dari 5,38 % dari total pendapatan APBD pada tahun 2016 menjadi 8,11% dari pendapatan APBD pada tahun 2020. Kontribusi pendapatan transfer mengalami penurunan dari 87,41 % dari total pendapatan APBD tahun 2016 menjadi 79,46% dari total pendapatan APBD pada tahun 2020. Sebaliknya proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah berfluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2016 dari 7,21% dari realisasi total pendapatan APBD menjadi 12,43 % dari total pendapatan APBD pada tahun 2020.

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Pendapatan Asli Daerah

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari total Pendapatan keseluruhan selama periode tahun 2016-2020, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,37% per tahun. Komponen PAD terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/Berkurang
2016	85.293.038.167,00	72.859.394.000,52	85.42	(12.433.644.166,48)
2017	158.138.873.497,00	141.310.805.691,52	89.36	(16.828.067.805,48)
2018	108.003.148.549,30	84.502.722.191,02	78.24	(23.500.426.358,28)
2019	100.249.901.104,00	101.607.521.617,01	101.35	1.357.620.513,01
2020	112.189.712.837,00	106.004.115.199,99	94,49	(6.185.597.637,01)
Rata-Rata	112.774.934.830,86	101.256.911.740,01	89,79	(11.518.023.090,85)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Selanjutnya, untuk melihat realisasi dan proporsi dari rincian dari komponen Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6**  
**Realisasi dan Proporsi Pendapatan Asli Daerah**  
**Terhadap Total Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah		Pendapatan Retribusi Daerah		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Lain-lain PAD yang sah		Proporsi /tahun
	Realisasi	Proporsi	Realisasi	Proporsi	Realisasi	Proporsi	Realisasi	Proporsi	
2016	26,922,241,098.72	1.99	11,581,656,264.00	0.86	6,037,912,930.00	0.45	28,317,583,707.80	2.09	5,38
2017	36,853,311,532.17	2.65	15,835,547,794.00	1.14	6,014,169,910.00	0.43	82,607,776,455.35	5.95	10,18
2018	41,412,253,897.00	3.16	2,864,836,657.00	0.22	5,791,014,751.00	0.44	34,434,616,886.02	2.63	6,45
2019	48,301,645,277.00	3.20	2,650,742,637.00	0.18	6,368,010,478.00	0.42	44,287,123,225.01	2.93	6,73
2020	41,824,536,856.45	3.20	2,185,534,022.00	0.17	6,860,844,053.00	0.53	55,023,011,108.54	4.21	8,11

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa proporsi per tahun dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap Total



Pendapatan relatif berfluktuasi, secara rata-rata per tahunnya, proporsi dari pendapatan Asli Daerah ini adalah sebesar 7,37%.

#### a. Pendapatan Pajak Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berasal dari Pajak Daerah. Jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Gol.C), PBB Pedesaan&Perkotaan dan Pajak BPHTB. Perkembangan Pajak Daerah dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan berfluktuatif. Proporsi rata-rata dari total pendapatan daerah selama periode 2016-2020.

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Tahun	Target	Realisasi	%	Bertambah/Berkurang
2016	27,935,000,000.00	26,922,241,098.72	96.37%	(1,012,758,901.28)
2017	37,870,000,000.00	36,853,311,532.17	97.32%	(1,016,688,467.83)
2018	41,575,000,000.00	41,412,253,897.00	99.61%	(162,746,103.00)
2019	46,900,000,000.00	48,301,645,277.00	102.99%	1,401,645,277.00
2020	40,900,000,000.00	41,824,536,856.45	102.26%	924,536,856.45
Rata-Rata	39,036,000,000.00	39,062,797,732.27	100.07%	26,797,732.27

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

#### b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah cenderung mengalami penurunan, terlihat pada Tabel 3.8 dimana tahun 2016 berjumlah Rp11.581.656.264,00 dengan pertumbuhan sebesar 16,67% dan meningkat menjadi Rp15.835.547.794,00 dengan pertumbuhan sebesar 36,73% tahun 2017, tetapi tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020. Puncaknya tahun 2018 jumlah Pendapatan Retribusi turun sebesar 81,91% dari tahun sebelumnya, menjadi Rp2.864.836.657,00, diikuti dengan penurunan tahun 2019 sebesar 7,47% dengan jumlah Rp2.650.742.637,00 dan tahun 2020 sebesar 17,55% dengan jumlah Rp2.185.534.022,00. Adapun penyebab turunnya pendapatan retribusi tahun 2020 karena rendahnya penerimaan retribusi daerah diantaranya pemakaian kekayaan daerah kendaraan bermotor pada dinas PUPR, disamping juga adanya kebijakan dan upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengatasi dampak pandemi COVID.

**Tabel 3.8**  
**Target dan Realisasi Retribusi Daerah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Tahun	Target	Realisasi	%	Bertambah/Berkurang
2016	13,256,450,000.00	11,581,656,264.00	87.37%	(1,674,793,736.00)
2017	17,831,450,000.00	15,835,547,794.00	88.81%	(1,995,902,206.00)
2018	4,715,010,000.00	2,864,836,657.00	60.76%	(1,850,173,343.00)
2019	3,645,000,000.00	2,650,742,637.00	72.72%	(994,257,363.00)
2020	2,725,900,000.00	2,185,534,022.00	80.18%	(540,365,978.00)
Rata-Rata	8,434,762,000.00	7,023,663,474.80	83.27%	(1,411,098,525.20)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini mengalami peningkatan dari Rp6.037.912.930,00 tahun 2016 menjadi Rp6.860.844.053,00 tahun 2020, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,09%. Penerimaan dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berasal dari: (a) setoran deviden Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari), (b) setoran deviden BPR-PKPP.

**Tabel 3.9**  
**Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Tahun	Target	Realisasi	%	Bertambah/Berkurang
2016	6,037,912,930.00	6,037,912,930.00	100.00%	-
2017	6,761,858,530.00	6,014,169,910.00	88.94%	(747,688,620.00)
2018	5,791,014,751.00	5,791,014,751.00	100.00%	-
2019	6,500,000,000.00	6,368,010,478.00	97.97%	(131,989,522.00)
2020	6,150,000,000.00	6,860,844,053.00	111.56%	710,844,053.00
Rata-Rata	6,248,157,242.20	6,214,390,424.40	99.46%	(33,766,817.80)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ini mengalami peningkatan dari Rp28.317.583.707,80 tahun 2016 menjadi Rp55.023.011.108,54 tahun 2020, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 33,06%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berasal dari: (a) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, (b)

penerimaan jasa giro, (c) tuntutan ganti kerugian daerah, (d) hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, (e) pendapatan BLUD, (f) Lain-Lain PAD yang sah lainnya.

**Tabel 3.10**  
**Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Tahun	Target	Realisasi	%	Bertambah/Berkurang
2016	38,063,675,237.00	28,317,583,707.80	74.40%	(9,746,091,529.20)
2017	95,675,564,967.00	82,607,776,455.35	86.34%	(13,067,788,511.65)
2018	55,922,123,798.30	34,434,616,886.02	61.58%	(21,487,506,912.28)
2019	43,204,901,104.00	44,287,123,225.01	102.50%	1,082,222,121.01
2020	62,413,812,837.00	55,023,011,108.54	88.16%	(7,390,801,728.46)
Rata-Rata	59,056,015,588.66	48,934,022,276.54	82.86%	(10,121,993,312.12)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Padang Pariaman belum optimal dengan dibuktikan masih banyak penerimaan di bawah target yang ditetapkan terutama retribusi daerah, kondisi ini disebabkan oleh :

- Penetapan target yang tidak berdasarkan data kenyataan di lapangan karena belum melalui survei terhadap potensi.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
- Perangkat hukum dan *law enforcement* yang mendukung pelaksanaan pemungutan pendapatan yang belum baik dan belum sesuai dengan kondisi lapangan.
- Belum lengkapnya data tentang pajak dan retribusi daerah.
- Relatif rendah dan kurang berkembangnya basis, struktur serta jenis pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Provinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.
- Perannya yang relatif kecil dalam total penerimaan daerah, sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat.
- Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar.
- Kurangnya koordinasi internal dan dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah, hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal.

Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial (kurang koordinasi), sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

## **2. Pendapatan Transfer**

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berbeda dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Transfer ke daerah dalam 2 kategori, yaitu Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi:

**a. Transfer Pemerintah Pusat**

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan.
2. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
4. DAK dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
5. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
6. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan transfer pemerintah pusat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang berkaitan dengan Dana Perimbangan. . Dari 4 komponen yang tergabung dalam Dana Perimbangan tersebut, hanya pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang mengalami pertumbuhan surplus, namun besaran tidak signifikan. Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan dengan pertumbuhan per tahunnya masing-masing sebesar Rp(1.205.468.714,5), Rp(16.878.071.250), Rp(20.871.291.056,75).

Adanya kebijakan pengurangan alokasi DAU, DAK, dan DBH untuk mengatasi Pandemi Covid-19 dari Pemerintah Pusat, sangat memberikan dampak besar terhadap pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman karena notabene Kabupaten Padang Pariaman, adalah salah satu Kabupaten yang mengandalkan transfer dari dana pusat.



Pertumbuhan rata-rata per tahun DAU menurun sebesar 0,05%, yaitu dari Rp783.592.205.000,00 tahun 2016 menjadi Rp716.079.920.000,00 tahun 2020. Dibandingkan realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2019 sebesar Rp792.616.064.000,00, penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp76.536.144.000,00 atau 9,66%. Adapun dasar penganggaran Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 serta PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

**Tabel 3.11**  
**Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/Berkurang
2016	741.028.048.328,00	783.592.205.000,00	105,74	42.564.156.672,00
2017	769.827.000.000,00	769.827.010.000,00	100,00	-
2018	769.827.010.000,00	769.827.010.000,00	100,00	-
2019	790.451.964.000,00	792.616.064.000,00	100,27	2.164.100.000,00
2020	722.635.928.000,00	716.079.920.000,00	99,09	(6.556.008.000,00)
Rata-Rata	758.753.990.065,60	766.388.441.800,00	101,01	7.634.451.734,40

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

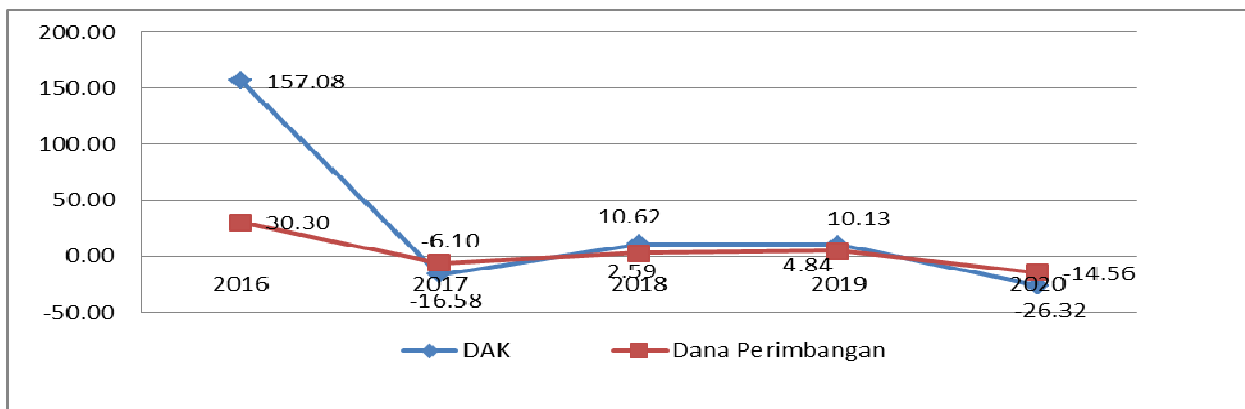
Pendapatan Dana Alokasi Khusus cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 berjumlah Rp332.332.843.968,00 menjadi Rp248.847.679.741,00 tahun 2020, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun DAK adalah 26,99%. Adapun dasar penganggaran Dana Alokasi Khusus Peraturan Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 serta PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

**Tabel 3.12**  
**Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/Berkurang
2016	360.418.858.200,00	332.332.843.968,00	92,21	(28.086.014.232)
2017	308.108.825.000,00	277.236.613.802,00	89,98	(30.872.211.198)
2018	325.745.977.000,00	306.685.313.801,00	94,15	(19.060.663.199)
2019	371.922.402.000,00	337.757.846.056,00	90,81	(34.164.555.944)
2020	265.906.891.000,00	248.847.679.741,00	93,58	(17.059.211.259)
Rata-Rata	299.092.918.440,00	276.656.549.525,40	92,50	(22.436.368.914,60)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

**Gambar 3.1**  
**Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Khusus**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 (%)**



Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

#### **b. Transfer pemerintah Pusat Lainnya**

Transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian. Dari tahun 2016-2020 dan penyesuaian ini mengalami fluktuatif. Rata-rata pertumbuhan realisasi per tahun dana ini adalah sebesar Rp1.931.186.625,00.

#### **c. Transfer Pemerintah Provinsi**

Transfer Pemerintah Provinsi ini terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

- 1) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bantuan Keuangan dari merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

Rata-rata realisasi pendapatan ini dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan sebesar Rp11.232.081.920.

### **3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Pendapatan Lainnya, dan c) Dana Bantuan Pemerintah/Dana Alokasi Desa-LRA .

#### **3.1.1.2 Belanja Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 55, Belanja Daerah diklasifikasikan atas 4 kelompok, yaitu:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Rata-rata realisasi belanja Padang Pariaman selama periode 2016-2020 adalah sebesar Rp1.373.220.596.994,67. Untuk lebih lengkapnya terait dengan realisasi belanja dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.13**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2016	1,399,041,293,715.00	1,336,323,358,548.30	95.52%
2017	1,489,990,512,934.64	1,414,773,624,147.00	94.95%
2018	1,482,769,644,067.46	1,326,772,029,390.33	89.48%
2019	1,505,064,407,195.85	1,444,556,894,034.70	95.98%
2020	1,396,263,067,205.16	1,343,677,078,853.00	96.23%
<b>Rata-Rata</b>	<b>1,454,625,785,023.62</b>	<b>1,373,220,596,994.67</b>	<b>94.40%</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Proporsi terbesar dari Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk belanja operasi dengan rata-rata tahun 2016-2020 sebesar 69,38%. Proporsi Belanja Operasi tersebut didominasi oleh Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa, masing-masing sebesar 49,10% dan 16,63% dan untuk belanja hibah sebesar 19,34% dan sisanya sebesar 0,21 merupakan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Proporsi kedua terbesar dari Belanja Daerah adalah Belanja Modal, dengan proporsi rata-rata dalam tahun 2016-2020 sebesar 20,10%. Rendahnya Belanja Modal ini adalah karena terbatasnya sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan Belanja Operasi. Proporsi ketiga terbesar adalah Belanja Transfer/Bagi Hasil Ke Desa, yaitu sebesar 10,16%. dan untuk proporsi yang terkecil adalah belanja Tak Terduga sebesar 0,37%.



Perkembangan proporsi Belanja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.14**  
**Proporsi Belanja Daerah**  
**Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 2016-2020 (%)**

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer/Bagi Hasil Ke Desa
2016	68.01	22.94	-	9.05
2017	64.23	25.95	0.03	9.80
2018	73.73	19.82	0.08	6.37
2019	69.12	18.22	0.08	12.59
2020	71.81	13.57	1.65	12.97

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Rata-rata pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar Rp(12.150.967.395.066). Hal ini disebabkan karena adanya asumsi SiLPA yang tidak tercapai. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan terutama digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM, Bank Nagari dan Bank BPR. Pengeluaran Pembiayaan ini juga mengalami penurunan dengan rata-rata per tahun sebesar Rp(13.689.952.032,75).

Untuk lebih jelasnya realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### 1) Penerimaan Pembiayaan

Untuk penerimaan pembiayaan, dari target yang ditetapkan, setelah dilakukan penyesuaian pada saat Penyusunan Perubahan APBD setiap tahunnya, secara umum dapat direalisasikan dengan rata-rata 103,86% walaupun selisih realisasi ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

**Tabel 3.15**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/Berkurang
2016	108.357.207.439,00	108.367.009.939,42	100,01	9,802,500.42
2017	65.978.090.772,64	65.988.090.772,64	100,02	10,000,000.00
2018	26.907.713.637,16	27.801.951.991,16	103,32	894,238,354.00
2019	1.920.727.636,85	6.419.020.461,85	334,20	4,498,292,825.00
2020	55.533.362.784,16	60.116.595.260,16	108,25	4.583.232.476,00
Rata-Rata	51.739.420.453,96	53.738.533.685,05	103,86	1.999.113.231,08

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021



## 2) Pengeluaran Pembiayaan

Selanjutnya, untuk Pengeluaran pembiayaan dari target yang ditetapkan, setelah dilakukan penyesuaian pada saat Penyusunan Perubahan APBD setiap tahunnya, dapat direalisasikan rata-rata 87,01% dari target yang ditetapkan.

**Tabel 3.16**  
**Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/Berkurang
2016	60.443.967.419,00	59.372.301.919,00	98,23	(1.071.665.500,00)
2017	12.945.000.000,00	12.945.000.000,00	100,00	0
2018	10.500.000.000,00	9.138.000.000,00	87,03	(1.362.000.000,00)
2019	17.500.000.000,00	15.375.211.517,00	87,86	(2.124.788.483,00)
2020	7.444.947.540,00	4.612.493.788,00	61,95	(2.832.453.752,00)
Rata-Rata	21.766.782.991,80	20.288.601.444,80	87,01	(1.478.181.547,00)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021



**Tabel 3.17 (Tabel T-C.3)**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah (dalam Rupiah)**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
<b>ASET</b>	<b>1.298.842.171.022,83</b>	<b>1.293.847.951.538,90</b>	<b>1.230.967.601.085,29</b>	<b>1.365.011.320.042,26</b>	<b>1.341.938.962.289,66</b>	<b>2,19</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>91.237.346.329,56</b>	<b>59.631.904.768,83</b>	<b>38.847.968.505,91</b>	<b>86.488.856.143,58</b>	<b>54.846.353.836,47</b>	<b>(2,07)</b>
Kas	66.357.110.000,64	26.907.713.637,16	1.878.705.580,85	57.196.545.152,16	17.402.028.169,15	<b>536,48</b>
Piutang	17.558.543.456,27	226.519.389,00	20.383.958.980,17	18.420.968.412,52	23.305.953.803,34	<b>25,90</b>
Persediaan	7.321.692.872,65	11.949.137.269,67	16.585.303.944,89	10.871.342.578,90	14.138.371.863,98	<b>27,81</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>95.481.378.000,00</b>	<b>108.426.378.000,00</b>	<b>77.725.411.199,44</b>	<b>89.430.395.624,46</b>	<b>90.559.354.063,00</b>	<b>36,05</b>
INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN						
Investasi Non Permanen Lainnya	4.277.533.232,00	4.267.533.232,00	4.267.533.232,00	4.236.965.232,00	4.236.965.232,00	<b>(0,24)</b>
Penyisihan Piutang Investasi Non Permanen	(4.277.533.232,00)	(4.267.533.232,00)	(4.267.533.232,00)	(4.236.965.232,00)	(4.236.965.232,00)	<b>(0,24)</b>
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	95.481.378.000,00	108.426.378.000,00	77.725.411.199,44	89.430.395.624,46	90.559.354.063,00	<b>36,05</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>997.043.095.769,26</b>	<b>1.087.321.554.334,24</b>	<b>1.112.732.507.192,94</b>	<b>1.180.071.422.244,22</b>	<b>1.188.372.725.383,19</b>	<b>3,34</b>
Tanah	188.206.514.399,00	185.992.295.999,00	199.210.072.749,00	208.900.265.749,00	211.481.566.749,00	<b>2,09</b>
Peralatan dan Mesin	258.779.885.090,40	285.706.264.625,40	312.686.545.609,40	355.213.958.956,40	398.459.658.409,48	<b>11,35</b>
Gedung dan Bangunan	680.442.821.693,45	723.740.934.297,95	812.633.878.264,94	860.913.860.585,23	942.132.644.901,23	<b>6,21</b>
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.810.445.986.265,83	2.031.004.477.645,83	2.214.206.500.929,83	2.283.302.510.070,54	2.401.092.229.992,24	<b>8,36</b>
Aset Tetap Lainnya	35.394.642.400,34	43.984.914.469,34	52.405.621.178,34	71.898.513.039,34	78.165.150.594,35	<b>15,98</b>
Konstruksi Dalam Pengerjaan	58.236.051.889,81	115.582.559.739,89	71.460.249.199,00	138.082.501.366,00	98.146.544.124,00	<b>46,34</b>
Akumulasi Penyusutan	(2.034.462.805.969,57)	(2.298.689.892.443,17)	(2.549.870.360.737,57)	(2.738.240.187.522,29)	(2.941.105.069.387,11)	<b>10,44</b>
<b>DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>115.080.350.924,01</b>	<b>38.468.114.435,83</b>	<b>1.661.714.207,00</b>	<b>9.020.646.030,00</b>	<b>8.160.529.007,00</b>	<b>87,79</b>
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran						
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	141.596.387,00	156.559.080,00	141.596.387,00			<b>(19,80)</b>
Kemitraan Dengan Pihak Kedua						
Aset Tidak Berwujud	3.390.671.900,00	3.224.868.600,00	3.244.668.600,00	3.958.747.600,00	4.433.552.600,00	<b>107,82</b>
Tagihan Jangka Panjang				141.596.387,00	141.596.387,00	<b>(20,00)</b>
Kemitraan dengan Pihak Ketiga						



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
Aset Lain-lain	113.336.808.017,01	37.307.306.555,83	22.558.846.855,50	34.592.639.675,50	34.327.006.677,50	22,83
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.788.725.380,00)	(2.220.619.800,00)	(2.576.946.300,00)	(2.919.976.400,00)	(3.443.580.900,00)	14,29
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	(21.706.451.335,50)	(26.752.361.232,50)	(27.298.045.757,50)	5,06
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>4.916.941.680,40</b>	<b>7.462.455.392,97</b>	<b>43.248.474.572,47</b>	<b>34.846.686.993,07</b>	<b>11.143.047.577,67</b>	<b>85,70</b>
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	<b>4.916.941.680,40</b>	<b>7.462.455.392,97</b>	<b>43.248.474.572,47</b>	<b>34.846.686.993,07</b>	<b>11.101.223.170,67</b>	<b>85,68</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	35.174.174,00	45.037.085,00	42.844.714,00	222.774.299,00	207.718.008,00	67,74
Utang Muka Dari Kas Daerah						
Pendapatan Diterima Dimuka	34.307.543,00	591.454.378,67	32.074.549,67	15.874.209,67	80.074.209,67	383,99
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.427.272.418,40	3.963.539.920,70	13.673.026.265,80	23.471.344.661,40	2.064.639.228,00	58,64
Utang Belanja	2.420.187.545,00	2.862.424.008,60	28.533.093.426,00			
Utang beban				10.375.200.035	8.748.791.724,60	163,02
Utang Pembiayaan BLUD		0,00	967.435.617,00	761.493.788,00	0,00	923,14
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				<b>0,00</b>	<b>41.824.407,00</b>	<b>(24,26)</b>
Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan						
Utang Dalam Negeri – Obligasi						
Premium (Diskonto) Obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
<b>EKUITAS</b>	<b>1.293.925.229.342,43</b>	<b>1.286.385.496.145,93</b>	<b>1.187.719.126.512,82</b>	<b>1.330.164.633.049,19</b>	<b>1.330.795.914.711,99</b>	<b>2,18</b>
Ekuitas	1.293.925.229.342,43	1.286.385.496.145,93	1.187.719.126.512,82	1.330.164.633.049,19	1.330.795.914.711,99	2,18
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.298.842.171.022,83</b>	<b>1.293.847.951.538,90</b>	<b>1.230.967.601.085,29</b>	<b>1.365.011.320.042,26</b>	<b>1.341.938.962.289,66</b>	<b>2,19</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Tahun 2020, Kabupaten Padang Pariaman memiliki aset senilai Rp1.341.938.962.289,66 dengan rata-rata pertumbuhan 2,19% per tahun. Jumlah aset terbesar berupa aset tetap, yang pada tahun 2020 mencapai Rp1.188.372.725.383,19,- dengan rata-rata pertumbuhan 3,34% pertahun.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 85,70% per tahun.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 mencapai Rp1.330.795.914.711,99 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,18% selama periode 2016-2020.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), ratio total hutang terhadap total aset, rasio hutang terhadap modal.

Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio ini menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Sedangkan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio total hutang terhadap ekuitas dana, sama-sama menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya seandainya seluruh aset atau aset bersih digunakan.

Rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya terdiri dari :

- a. Rasio Lancar (*current ratio*) yang menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Dari Tabel 3.37 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 setiap Rp 100,- hutang lancar dijamin Rp18,56,- aktiva lancar dan tahun 2020 setiap Rp100,- dijamin oleh Rp4,92,- aktiva lancar.
- b. Rasio Quick memperlihatkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih liquid, dimana nilai yang baik berada pada batas 100%. Dengan melihat Tabel. 3.40 quick ratio tahun 2016 sebesar Rp17,07 artinya setiap Rp100,- hutang lancar dijamin dengan 17,07 aktiva dan pada tahun 2020 dijamin oleh Rp3,65 aktiva.

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, yang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi pemberi pinjaman. Rasio yang digunakan yaitu :

- a. Rasio total hutang terhadap total aset yang menunjukkan seberapa pengaruhnya hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva tahun 2016 sebesar 0,0038% dan pada tahun 2020 sebesar 0,0083%. Rasio hutang terhadap total aset selama periode 2016-2020 sangat rendah dan paling tinggi hanya 0,0255. Berdasarkan hasil ini, maka pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.
- b. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur. Rasio hutang terhadap modal juga rendah. Dengan demikian Pemerintah Padang Pariaman tidak perlu tergantung modal dari pihak luar. Pada Tahun 2016 sebesar 0,05% dan pada tahun 2020 sebesar 0,12%.

**Tabel 3.18**  
**Analisis Rasio Keuangan**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Rasio Likuiditas</b>					
1	Rasio Lancar ( <i>Current Ratio</i> )	18.56	7.99	0.90	2.48	4.92
2	Rasio quick ( <i>Quick Ratio</i> )	17.07	6.39	0.51	2.17	3.65
	<b>Solvabilitas</b>					
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0.0038	0.0058	0.0351	0.0255	0.0083
4	Rasio hutang terhadap modal	0.05	0.07	0.56	0.39	0.12

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

### 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (2016-2020)

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Namun dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2016-2020 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD.

#### A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2016-2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Selama Periode Tahun anggaran 2016-2020, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara on-line dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
3. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

#### B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2020 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
3. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan KUKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
4. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
5. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
6. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah;
7. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:



- a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan banyak;
- c) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- e) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

### C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, dan (b) pengeluaran pembiayaan.

#### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama periode tahun 2016-2020, dimana pada tahun 2016 realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp832.828.351.746. Peningkatan belanja aparatur ini tentu juga untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam menjalankan pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah kebijakan penggunaan anggaran Pemerintah Padang Pariaman semakin baik atau tidak, maka perlu diketahui proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja daerah. Tabel 3.19 (Tabel T-C.4) memperlihatkan bahwa proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami peningkatan dari 96,54% pada tahun 2016 menjadi 98,05% pada tahun 2020. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran dapat disimpulkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Padang Pariaman kurang baik karena belanja untuk keperluan publik naik relatif kecil.

**Tabel 3.19 (Tabel T-C.4)**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Total belanja utk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (belanja+pembiayaan pengeluaran)(Rp)	Prosentase (a)/(b)x100%
1	2016	760.320.374.368,00	1.395.695.660.467	54
2	2017	678.881.290.419,00	1.427.718.624.147	48
3	2018	688.578.920.996,00	1.335.910.029.390	52
4	2019	812.917.768.856,70	1.459.932.105.552	56
5	2020	664.583.175.866,52	1.403.708.014.745,16	47

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021 (Data Diolah)

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sebaliknya pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investas) pemerintah daerah; pembayaran pokok hutang; dan pemberian pinjaman daerah. Sementara penerimaan pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defisit yang terjadi, sedangkan jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dana pada masa datang.

Berdasarkan Tabel 3.20 (T-C.5) ini selama kurun waktu 2016-2020, APBD Kabupaten Padang Pariaman mengalami surplus dan defisit dimana pada tahun 2016 mengalami defisit sebesar Rp42,388,919,166.78 artinya realisasi belanja daerah melebihi realisasi pendapatan daerah, tahun 2016 s/d tahun 2020 mengalami defisit yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah masing-masing sebesar Rp(42,388,919,166.78) pada tahun 2020 sebesar Rp(42.568.830.198,01).



**Tabel 3.20 (Tabel T-C.5)**  
**Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.353.306.741.300,52	1.388.638.247.011,52	1.309.985.762.673,02	1.510.528.680.350,01	1.305.720.742.442,99
	<b>Dikurangi realisasi:</b>					
2	Belanja Daerah	1.336.323.358.548,30	1.414.773.624.147,00	1.326.772.029.390,33	1.444.556.894.034,70	1.343.677.078.853,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	59.372.301.919,00	12.945.000.000,00	9.138.000.000,00	15,375,211,517.00	4.612.493.788,00
	<b>Defisit riil</b>	<b>(42.388.919.166,78)</b>	<b>(39.080.377.135,48)</b>	<b>(25.924.266.717,31)</b>	<b>50.596.574.798,31</b>	<b>(42.568.830.198,01)</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021 (Data Diolah)

**Tabel 3.21 (Tabel T-C.6)**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	108.357.207.439,42	65.978.090.772,64	26.907.713.637,16	1.877.685.273,85	57.015.595.260,16
2	Koreksi SiLPA			(73.197.263,00)		(34.232.309,00)
3	Lain-Lain					(319.222.592,00)
4	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a. Penerimaan Pinjaman BLUD	0.00	0.00	967.435.617,00	0.00	0,00
	b. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Sektor Perbankan	0.00	0.00	0.00	4.509.269.688,00	3.101.000.000,00
7	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00		0.00
	a. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	9.802.500,00	10.000.000,00	0.00	32.065.500,00	0.00
8	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Komposisi Penutup Defisit Riil</b>	<b>108.367.009.939,42</b>	<b>65.988.090.772,64</b>	<b>27.801.951.991,16</b>	<b>6.419.020.461,85</b>	<b>59.763.140.359,16</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021 (Data Diolah)



**Tabel 3.22 (Tabel T-C.7)**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SiLPA	65,978,090,772.64		26,907,713,637.16		1,877,685,273.85		57,015,595,260.16		56.662.140.359,16	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,645,277.00	2.46	0.00	0.00
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	13,548,770,326.00	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,222,121.01	1.90	0.00	0.00
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	2,427,272,418.40	3.68	3,963,539,920.70	14.73	13,673,026,265.80	728.19	23,471,344,661.40	41.17	0.00	0.00
7	Kegiatan lanjutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021 (Data Diolah)



**Tabel 3.23**  
**Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,353,306,741,300.52	1,388,638,247,011.52	1,309,985,762,673.02	1,510,528,680,350.01	1.305.720.742.442,99
	<b>Dikurangi realisasi:</b>					
2	Belanja Daerah	1,336,323,358,548.30	1,414,773,624,147.00	1,326,772,029,390.33	1,444,556,894,034.70	1.343.677.078.853,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	59,372,301,919.00	12,945,000,000.00	9,138,000,000.00	15,375,211,517.00	4.612.493.788,00
<b>A</b>	<b>Surplus (Defisit) riil</b>	<b>(42,388,919,166.78)</b>	<b>(39,080,377,135.48)</b>	<b>(25,924,266,717.31)</b>	<b>50,596,574,798.31</b>	<b>(42.568.830.198,01)</b>
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	108,357,207,439.42	65,978,090,772.64	26.907.713.637,16	1,877,685,273.85	57.015.595.260,16
5	Koreksi SiLPA			(73.197.263,00)		(34.232.309,00)
6						(319.222.592,00)
7	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Penerimaan Pinjaman Daerah					0.00
	a. Penerimaan Pinjaman BLUD	0.00	0.00	967,435,617.00	0.00	0.00
	b. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Sektor Perbankan	0.00	0.00	0.00	4,509,269,688.00	3.101.000.000,00
10	Penerimaan Kembali Pengembalian Dana Bergulir Daerah					
	a. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	9,802,500.00	10,000,000.00	0.00	32,065,500.00	0.00
11	Penerimaan Piutang Daerah					
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>108,367,009,939.42</b>	<b>65,988,090,772.64</b>	<b>27,801,951,991.16</b>	<b>6,419,020,461.85</b>	<b>59.763.140.359,16</b>
<b>A+B</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>65,978,090,772.64</b>	<b>26,907,713,637.16</b>	<b>1,877,685,273.85</b>	<b>57,015,595,260.16</b>	<b>17.194.310.161,15</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021 (Data Diolah)

Penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit dengan diberlakukan anggaran berbasis kinerja. Tabel 3.23 memperlihatkan bahwa pengeluaran pembiayaan daerah ada yang mengalami surplus dan defisit selama periode 2016-2020. Namun defisit anggaran yang terjadi dalam beberapa tahun dapat ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Dari perjalanan lima tahun terakhir Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya menunjukkan penurunan, hal ini menandakan terdapat peningkatan serapan dan realisasi anggaran dari pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya yaitu Rp65.978.090.772,64 pada tahun 2016 dan Rp17.194.3190.161,15 pada tahun 2020.

SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SILPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi over target dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SILPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah.

SILPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SILPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SILPA Kabupaten Padang Pariaman dapat diperkecil.

### **3.3. Kerangka Pendanaan**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja atau pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

#### **3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**

Pengeluaran wajib dan mengikat merupakan belanja yang harus dibayarkan dan tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak boleh menjadi hutang untuk tahun berikutnya. Artinya belanja yang menjadi prioritas utama dalam sebuah anggaran atau APBD seperti gaji dan tunjangan, belanja Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran periodic wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak dikeluarkan karena kewajiban pemerintah, baik karena peraturan maupun karena ada



perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran periodic wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan**

Terkait dengan proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah periode 2021-2026 dirumuskan beberapa kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut :

#### **1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah yaitu melalui pengembangan sumber pendapatan daerah yang potensial maka peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan potensi dan penyuluhan kepada masyarakat, disertai dengan tertib administrasi pungutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi Daerah diupayakan optimal dari segi hasil (*yield*) berdasarkan asas keadilan (*equity*), memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (*suitability as local revenue source*). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya Pajak (*tax effort*) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (*efficiency*) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak;
- b) Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Dalam usaha mencapai efisiensi ini, tiga faktor yang mengancam yang patut diperhatikan adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak.

- Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan;
- c) Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB perkapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang-undangan;
  - d) Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah (*Local Government Revenue Improvement Action Plan*) adalah program terencana dan terpadu untuk: a). mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada; dan b). mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber-sumber penerimaan daerah.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa rencana peningkatan penerimaan daerah ini merupakan program yang bersifat *self corrected*. Hal ini berarti bahwa selain untuk mencapai sasaran penerimaan daerah sesuai potensi yang ada (realistis), program terpadu ini juga ditujukan untuk mengantisipasi berbagai perubahan. Hal tersebut terutama berkaitan langsung dengan penerimaan yang rencana pembelanjanya telah ditetapkan secara baku dalam cakupan anggaran satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dituntut untuk bisa membiayai kebutuhan infrastruktur dan kebutuhan warga Padang Pariaman dengan menggali potensi pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang menuntut ketergantungan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat semakin berkurang.

Dana Transfer terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN. Dana transfer tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-lain pendapatan daerah terdiri dari dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang





merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi.

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungannya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Namun untuk proyeksi tersebut tetap memperhatikan dampak yang akan masih dirasakan akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat.

Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

**Tabel 3.24 (Tabel T-C.8)  
Proyeksi Pendapatan Daerah  
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.423.856.132.812</b>	<b>1.430.897.327.820</b>	<b>1.443.662.626.586</b>	<b>1.459.602.453.492</b>	<b>1.475.212.521.037</b>	<b>1.488.893.139.257</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>131.417.232.000</b>	<b>126.267.232.000</b>	<b>127.267.232.000</b>	<b>130.776.298.960</b>	<b>133.831.298.960</b>	<b>134.831.298.960</b>
Pajak Daerah	55.150.000.000	50.000.000.000	51.000.000.000	52.530.000.000	55.000.000.000	56.000.000.000
Retribusi Daerah	5.515.000.000	5.515.000.000	5.515.000.000	5.515.000.000	5.600.000.000	5.600.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.450.000.000	6.450.000.000	6.450.000.000	6.500.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	64.302.232.000	64.302.232.000	64.302.232.000	66.231.298.960	66.231.298.960	66.231.298.960
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.219.119.500.812</b>	<b>1.231.310.695.820</b>	<b>1.243.075.994.586</b>	<b>1.255.506.754.532</b>	<b>1.268.061.822.077</b>	<b>1.280.742.440.297</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.164.881.066.000	1.176.529.876.660	1.188.295.175.426	1.200.178.127.180	1.212.179.908.452	1.224.301.707.536
Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.238.434.812	54.780.819.160	54.780.819.160	55.328.627.352	55.881.913.625	56.440.732.761
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>73.319.400.000</b>	<b>73.319.400.000</b>	<b>73.319.400.000</b>	<b>73.319.400.000</b>	<b>73.319.400.000</b>	<b>73.319.400.000</b>
Pendapatan Hibah	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	58.319.400.000	58.319.400.000	58.319.400.000	58.319.400.000	58.319.400.000	58.319.400.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.423.856.132.812</b>	<b>1.430.897.327.820</b>	<b>1.443.662.626.586</b>	<b>1.459.602.453.492</b>	<b>1.475.212.521.037</b>	<b>1.488.893.139.257</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Berdasarkan Tabel 3.24 (Tabel T-C.8) diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan target PAD, ini disebabkan karena pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terlalu tinggi dalam penetapan target untuk PAD tersebut sehingga akan berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu terdapat tren naik dimulai pada tahun 2023 sampai 2026 untuk target PAD ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya:



- a. Terdapat perubahan tarif Objek Pajak dan Retribusi
- b. Terdapat Objek Pajak baru
- c. Terdapat Objek Retribusi baru
- d. Peningkatan pendapatan Deviden dari Penyertaan Modal yang diberikan kepada Bank Daerah
- e. Peningkatan Lain-lain PAD yang sah seperti Penjualan Kendaraan, sewa dan lain-lain

Selain itu untuk pendapatan transfer itu ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga untuk target dari pendapatan tersebut menunggu penetapan melalui Peraturan Presiden yang berkaitan dengan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

## 2. Kebijakan Belanja Daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2021-2026 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Pendekatan ini guna menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2021-2026 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Belanja daerah diprioritaskan bagi program/kegiatan pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi menjadi :

1. Belanja Operasi, merupakan merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
  - a. Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
  - b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
  - c. Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
  - d. Belanja subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

- e. Belanja hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Belanja bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Selain itu belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Modal, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya.
  3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2021-2026 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

- a) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah setiap tahun, tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya, dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS), sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



- b) Mengalokasi anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif.
- c) Mengalokasikan anggaran untuk Pemerintahan Nagari (Desa) sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total APBD seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah khususnya di daerah tertinggal, dan pusat-pusat pertumbuhan.
- e) Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintah nagari yang bersumber dari pendapatan pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f) Meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM, dengan prioritas menekan angka kemiskinan.
- g) Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- h) Mengoptimalkan tata guna, tata kelola, dan tata produksi pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- i) Memantapkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana dasar, khususnya di daerah pedesaan dan perbatasan.
- j) Memantapkan diversifikasi energi melalui peningkatan konservasi energi sebagai pilar manajemen energi regional dan pemanfaatan energi
- k) Mendorong terselenggaranya pembangunan desa terpadu dan holistik melalui program nasional antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat pedesaan.
- l) Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodasi konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.
- m) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost* dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
  - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet dan *service* kendaraan dinas);
  - 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian evaluasi dan perencanaan;
  - 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen pemerintah.
- n) Mengalokasikan belanja Operasi dan Belanja Modal secara selektif,



akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

- o) Untuk belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada Tahun 2021.
- p) Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

Proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan belanja langsung daerah. Proyeksi belanja tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.25 (Tabel T-C.8)  
Proyeksi Belanja Daerah  
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
<b>Belanja</b>	<b>1.490.325.279.308</b>	1.425.897.327.820	1.440.955.301.093	1.456.840.981.489	1.473.212.521.037	1.483.893.139.257
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.108.995.151.958</b>	<b>1.062.541.122.903</b>	<b>1.073.166.534.130</b>	<b>1.094.629.864.813</b>	<b>1.107.379.293.194</b>	<b>1.118.453.086.123</b>
Belanja Pegawai	754.398.057.616	754.398.057.616	761.942.038.192	777.180.878.956	784.952.687.745	792.802.214.622
Belanja Barang dan Jasa	286.820.823.657	239.689.031.896	242.085.922.214	246.927.640.658	251.200.046.798	253.712.047.265
Belanja Hibah	67.412.810.000	68.086.938.100	68.767.807.481	70.143.163.631	70.844.595.267	71.553.041.219
Belanja Bantuan Sosial	363.460.685	367.095.291	370.766.243	378.181.568	381.963.384	385.783.017
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>189.560.566.550</b>	<b>169.668.948.509</b>	<b>173.140.238.905</b>	<b>163.669.618.057</b>	<b>165.306.314.238</b>	<b>162.907.870.393</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.564.854.210	38.040.502.752	40.195.508.692	40.999.418.866	41.409.413.054	41.823.507.185
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.649.191.850	50.245.683.768	50.748.140.605	51.763.103.417	52.280.734.451	48.752.034.811
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.995.276.490	81.028.005.549	81.838.285.604	70.541.625.690	71.247.041.947	71.959.512.365
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	351.244.000	354.756.440	358.304.004	365.470.084	369.124.785	372.816.032
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.100.000.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>11.220.000.000</b>	<b>11.332.200.000</b>	<b>11.445.522.000</b>
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.100.000.000	11.000.000.000	11.220.000.000	11.332.200.000	11.445.522.000
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>181.769.560.800</b>	<b>183.587.256.408</b>	<b>183.648.528.058</b>	<b>187.321.498.619</b>	<b>189.194.713.605</b>	<b>191.086.660.741</b>
Belanja Bagi Hasil	6.066.500.000	6.127.165.000	6.188.436.650	6.312.205.383	6.375.327.437	6.439.080.711
Belanja Bantuan Keuangan	175.703.060.800	177.460.091.408	177.460.091.408	181.009.293.236	182.819.386.169	184.647.580.030
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.490.325.279.308</b>	<b>1.425.897.327.820</b>	<b>1.440.955.301.093</b>	<b>1.456.840.981.489</b>	<b>1.473.212.521.037</b>	<b>1.483.893.139.257</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Dari Tabel 3.25 (Tabel T-C.8) di atas terdapat tren naik setiap tahun untuk belanja daerah dari tahun 2022, ini karena belanja daerah pada dasarnya mengacu kepada pendapatan daerah, sehingga dalam menetapkan target belanja harus mempedomani target pendapatan. Selain itu target belanja daerah tersebut harus memprioritaskan pemenuhan beberapa kebutuhan mulai dari Standar Pelayanan Minimal, Alokasi untuk fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, infrastruktur serta pemenuhan belanja wajib. Hal tersebut juga dengan tetap memperhatikan kondisi perkembangan COVID-19 yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir.

Alokasi belanja tersebut harus dipenuhi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengalokasian belanja seperti persentase belanja modal dan belanja barang dan jasa yang telah ditentukan. Sedangkan untuk belanja yang bersifat Hibah dan Bantuan Sosial harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Untuk proses pencairan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

#### **A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain:

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran sebelumnya.
- b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- d) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

#### **B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan

daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- b) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
- c) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDG) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan di wilayah perdesaan sebanyak 60%, pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM.
- e) Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- f) Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM.



- g) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan.
- h) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis kemudian dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Berikut tersaji proyeksi pembiayaan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.26.

**Tabel 3.26 (Tabel T.C-8)  
Proyeksi Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>66.469.146.496</b>	<b>(5.000.000.000)</b>	<b>(2.707.325.493)</b>	<b>(2.761.472.003)</b>	<b>(2.000.000.000)</b>	<b>(5.000.000.000)</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>						
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	86.469.146.496	10.000.000.000	17.292.674.507	17.238.527.997	18.000.000.000	20.000.000.000
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>						
Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	15.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	25.000.000.000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Untuk Pembiayaan Daerah dibagi menjadi :

1. Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersumber dari:
  - a. SiLP A
  - b. Pencairan Dana Cadangan
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
  - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah
  - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
  - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
  - b. Penyertaan Modal Daerah
  - c. Pembentukan Dana Cadangan
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah



- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### 3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam periode tahun 2021-2026 serta perkiraan kondisi perekonomian yang dihadapi pada masa datang.

**Tabel 3.27**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pendapatan	1.423.856.132.812	1.430.897.327.820	1.443.662.626.586	1.459.602.453.492	1.475.212.521.037	1.488.893.139.257
2.	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3.	Sisa lebih riil Perhitungan Anggaran	86.469.146.496	10.000.000.000	17.292.674.507	17.238.527.997	18.000.000.000	20.000.000.000
	Total Penerimaan	1.510.325.279.308	1.440.897.327.820	1.460.955.301.093	1.476.840.981.489	1.493.212.521.037	1.508.893.139.257
	Dikurangi :						
4.	Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial), Belanja Tak Terduga) Dan Transfer)	1.013.943.889.101	948.452.409.315	1.025.729.139.974	1.046.243.722.774	1.056.706.160.002	1.067.273.221.599
5.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	15.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	25.000.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	476.381.390.207	477.444.918.505	415.226.161.119	410.597.258.715	416.506.361.035	416.619.917.658

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021 (Data Diolah)

Berdasarkan kapasitas kemampuan keuangan daerah maka disusun rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah kedalam dua prioritas berikutnya, yaitu :

Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar

Prioritas II : membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah

Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya



# **BAB IV**

## **PERMASALAHAN DAN**

### **ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**



## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **4.1 Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai dengan harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.

##### **4.1.1 Permasalahan Pembangunan Secara Makro**

Kabupaten Padang Pariaman menghadapi permasalahan pembangunan secara makro antara lain sebagai berikut:

##### **1. Menurunnya Tingkat Pertumbuhan Ekonomi**

Tingkat pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara tahun 2016 sampai 2020, memperlihatkan kecenderungan yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 5,52 dan 5,58 persen menurun pada tahun 2018 dan 2019, berturut-turut menjadi 5,44 dan 2,40 persen, serta akibat pandemi covid-19 berkontraksi -10,47 persen pada tahun 2020. Kontraksi ekonomi terjadi pada seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang melanda Sumatera Barat sejak Maret 2020.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman cenderung menurun demikian juga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara tahun 2016 sampai 2020, memperlihatkan kecenderungan yang semakin melambat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 5,27 dan 5,30 persen menurun pada tahun 2018 dan 2019, berturut-turut menjadi 5,14 dan 5,01 persen, serta akibat pandemi berkontraksi -1,60 persen pada tahun 2020.

##### **2. PDRB per Kapita yang Rendah**

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Padang Pariaman selama empat tahun terakhir cenderung meningkat, yaitu dari Rp. 42,91 juta pada 2016 menjadi Rp. 51,14 juta pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 yakni Rp. 41,66 juta. Angka ini masih berada dibawah Sumatera Barat sebesar Rp. 43,75 juta pada tahun 2020. Kondisi ini menggambarkan masih rendahnya rata-rata pendapatan penduduk Padang Pariaman sebagai salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dibandingkan rata-rata provinsi.



### **3. Belum Optimalnya Penurunan Penduduk Miskin**

Tingkat kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman menurun dari 8,91 persen pada tahun 2016 menjadi 6,95 persen pada tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020, namun masih berada di atas angka Provinsi Sumatera Barat yaitu 6,28 persen pada tahun 2020.

Jumlah penduduk yang tergolong miskin di Kabupaten Padang Pariaman yaitu mencapai 28,98 ribu, dengan tingkat kedalaman kemiskinan (P1) yaitu 0,67 dan tingkat keparahan kemiskinan (P2) yaitu 0,11.

### **4. Tantangan dalam Pembangunan Manusia**

Angka IPM Kabupaten Padang Pariaman walaupun tergolong sedang namun masih rendah dibanding IPM Sumatera Barat dan berada pada peringkat 11 dari kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Padang Pariaman sebesar 70,61 berada dibawah angka IPM Sumatera Barat yaitu 72,38. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 hanya tumbuh sebesar 0,75 persen dan IPM Sumatera Barat tumbuh sebesar 0,68 persen.

Permasalahannya akan terlihat bila komponen IPM dibandingkan dengan angka Sumatera Barat. Usia Harapan Hidup penduduk yang mencerminkan pembangunan manusia dalam bidang kesehatan, menunjukkan usia harapan hidup penduduk Padang Pariaman pada tahun 2020 dengan angka 68,79 tahun lebih rendah dibandingkan angka Sumatera Barat yaitu 69,47 tahun. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan.

Indikator harapan lama sekolah sebesar 13,67 tahun dan indikator rata-rata lama sekolah yaitu sebesar 7,87 tahun yang menunjukkan bahwa masih belum memenuhi wajib belajar 9 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa ini dapat disebabkan oleh ketimpangan dalam akses dan kualitas dalam pelayanan pendidikan. Kemungkinan lainnya dapat disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Padang Pariaman sehingga penduduk dewasa setelah menamatkan pendidikan menengah melakukan migrasi ke kabupaten/kota dan provinsi lainnya. Ditambah dengan tradisi merantau sebagian besar penduduk Sumatera Barat.

Pembangunan manusia terutama dalam kesehatan dan pendidikan serta penyediaan kesempatan kerja masih merupakan permasalahan pembangunan penting yang dihadapi Kabupaten Padang Pariaman. Akses kepada layanan kesehatan dasar, pendidikan dan peningkatan kualitasnya serta dorongan bagi penciptaan lapangan kerja dan penumbuhan kewirausahaan merupakan agenda penting pemerintah dalam lima tahun ke depan.



## **5. Rendahnya Keterkaitan Antara Sektor Pertanian Dengan Sektor Industri**

Transformasi struktur perekonomian dari agraris ke industri seharusnya ditandai penurunan kontribusi pertanian yang diikuti dengan meningkatnya sektor industri pengolahan. Sektor pertanian yang meliputi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan perikanan merupakan sektor terbesar dalam kontribusinya membentuk struktur perekonomian Kabupaten Padang Pariaman hingga mencapai 22,66 persen pada tahun 2020. Bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 19,90 persen, maka proses transformasi dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa tergolong relatif lambat.

Pada saat bersamaan, terjadi penurunan kontribusi sektor industri pengolahan dalam 4 tahun terakhir. Dari kontribusi awal pada tahun 2016 sebesar 10,74 persen menjadi 9,35 persen pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 mencapai 11,19 persen. Kondisi ini menunjukkan tantangan pembangunan sektoral berupa rendahnya keterkaitan antara sektor Pertanian dengan sektor industri.

## **6. Melambatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum**

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang dapat digunakan sebagai proksi dari perkembangan pariwisata dapat berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Kabupaten Padang Pariaman bersamaan dengan Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi. Pertumbuhannya sebelum krisis pandemi covid-19 tercatat konsisten melebihi 10 persen. Namun permasalahannya, pertumbuhan sektoral lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum ini memiliki kecenderungan yang melambat. Pertumbuhannya terus menurun dari 6,95 persen pada tahun 2016 menjadi 10,60 persen pada tahun 2019. Bahkan pada tahun 2020, sektor ini terkena dampak yang besar sehingga pertumbuhannya minus 9,12 persen, terbesar kedua setelah sektor transportasi dan pergudangan.

Pengelolaan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum masih lemah integrasi bisnisnya dengan sektor-sektor lain seperti pertanian maupun transportasi. Pertumbuhan sektoral yang tinggi belum diikuti oleh kontribusi yang berarti bagi pendapatan daerah. Sumbangan sektor ini pada tahun 2020 masih berkisar pada angka 1,05 persen terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman.

### **4.1.2 Permasalahan Pembangunan menurut Urusan Pemerintahan**

Banyak masalah pembangunan yang ditemui dalam pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman, dan akan diidentifikasi di bagian ini berdasarkan kriteria: (a) masalah memiliki cakupan yang luas dan berdampak negatif terhadap kualitas kehidupan masyarakat; (b) masalah cenderung meningkat dan menghambat proses dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan; serta (c) merupakan pendorong pembangunan Kabupaten Padang Pariaman secara ekonomi, sosial dan lingkungan.



Untuk itu, permasalahan akan diidentifikasi berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

1. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. Urusan pemerintah wajib tetapi tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan pilihan; dan
4. Urusan penunjang.

#### **4.1.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Pelayanan Dasar**

##### **1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi kesadaran spiritualisme dan kebangsaan. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain:

- a. Kurangnya kecermatan pemangku kepentingan pendidikan terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan sarana prasarana infrastruktur pendidikan.
- b. Masih adanya tenaga pendidik yang tidak memenuhi kualifikasi tenaga pendidik.
- c. Terjadinya kelebihan fasilitas pendidikan tingkat SD sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan dana pembangunan.
- d. Masih banyak penduduk usia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tingkat SLTP.
- e. Masih adanya kesenjangan pendidikan antar kelompok masyarakat.
- f. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang direpresentasikan oleh daya saing sektor pendidikan, output pendidikan yang memiliki jiwa wirausaha dan etos kerja yang tinggi, produktif, kreatif dan inovatif.
- g. Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD yang masih rendah.

##### **2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya layanan Kesehatan.
- b. Kualitas dan kuantitas SDM kesehatan yang relatif masih terbatas.
- c. Masih rendahnya Pemenuhan Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman bagi masyarakat.
- d. Tidak seluruh masyarakat yang paham akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- e. Masih ditemukannya kasus stunting di Kabupaten Padang Pariaman.
- f. Belum optimalnya kontijensi plan COVID-19 dan rendahnya kepatuhan masyarakat.



### **3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan pembangunan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan informasi Rencana Tata Ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten.
- c. Belum fokusnya pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- d. Belum optimalnya penyediaan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota.
- e. Belum adanya pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi.
- f. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan.
- g. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dan teknologi penyediaan air minum.
- h. Kualitas kelembagaan KPSPAM dan kapasitas SDM penyediaan air minum yang masih rendah.
- i. Belum adanya penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S).

### **4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan dan Kawasan Permukiman**

Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- a. Masihnya adanya area permukiman kumuh.
- b. Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU.
- c. Belum optimalnya program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

### **5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah di Kabupaten Padang Pariaman, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas kehidupan demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta penanggulangan bencana. Namun demikian, masih ada tantangan dan permasalahan yang perlu perhatian antara lain sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pembinaan mental masyarakat.
- b. Masih rendahnya pembekalan bagi aparaturnya dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (NAPZA).
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebencanaan.



- d. Belum seluruh nagari yang peka terhadap pengurangan resiko bencana.
- e. Kualitas infrastruktur kebencanaan yang masih belum optimal.

## **6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek didalamnya lansia dan penyandang disabilitas. Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Padang Pariaman senantiasa dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

- a. Belum optimalnya peneraparan regulasi pengentasan kemiskinan.
- b. SDM penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan yang masih terbatas.
- c. Belum optimalnya penanganan kenakalan remaja dan LGBT.

### **4.1.2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah Bukan Pelayanan Dasar**

#### **1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Permasalahan pada urusan tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman, diantaranya adalah:

- a. Terbatasnya kesempatan kerja.
- b. Belum optimalnya program pengembangan kewirausahaan (entrepreneur) pemuda milenial.
- c. Belum optimalnya pembibitan atlet muda secara berjenjang dan terintegrasi.

#### **2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a. Belum optimalnya penerapan isu pengarusutamaan gender.
- b. Belum optimalnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak.

#### **3. Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Dalam mewujudkannya masih terdapat





permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya diversifikasi dan intensifikasi pangan.

#### **4. Urusan Pertanahan**

Pembangunan membutuhkan adanya kepastian akan lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian berkelanjutan, infrastruktur strategis dan lahan untuk investasi. Terkait hal tersebut permasalahan pertanahan yang muncul adalah masih banyaknya kepemilikan lahan Pemda yang belum bersertifikat.

#### **5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Permasalahan pada urusan lingkungan hidup di Kabupaten Padang Pariaman, diantaranya adalah:

- a. Belum adanya regulasi tentang RTH bagi pemukiman.
- b. Belum adanya pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi.
- c. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Belum optimalnya tidak lanjut dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Padang Pariaman adalah belum maksimalnya pemanfaatan database kependudukan untuk pengambilan kebijakan.

#### **7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa/nagari yang menempatkannya sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa/nagari mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Proses tersebut tidaklah mudah, karena belum adanya database terintegrasi tentang potensi desa/nagari.

#### **8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a. Minimnya sosialisasi penyelenggaran KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja.



- b. Terbatasnya advokasi dan menggerakkan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga.

#### **9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Padang Pariaman. Namun demikian masih terdapat permasalahan di sektor perhubungan yaitu belum meratanya sarana dan prasarana pendukung transportasi umum.

#### **10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

Pemanfaatan aplikasi informatika dan website harus terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah. Upaya tersebut masih menemui beberapa permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terintegrasi kedalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.
- c. Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet.
- d. Belum optimalnya pelayanan, publikasi dan penyebarluasan informasi publik berbasis elektronik

#### **11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendominasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

- a. Belum optimalnya pembinaan pedagang kecil dan menengah agar lebih berkembang dan berdaya saing.
- b. Kurangnya pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM.

#### **12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu:

- a. Minimnya promosi investasi di sektor primer dan jasa berbasis IT.
- b. Belum optimalnya integrasi investasi dengan pola ruang.

#### **13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun dan menjadi tulang punggung pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten



Padang Pariaman, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi kepemudaan.
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan.
- c. Masih rendahnya keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepemudaan.
- d. Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi kepemudaan.

#### **14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Penyediaan data dan informasi yang *reliable, up to date*, dan relevan harus terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara terintegrasi. Belum optimalnya pemanfaatan data daerah menjadi permasalahan urusan pemerintahan bidang statistik.

#### **15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat berkembang. Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem, beberapa permasalahan pada urusan persandian adalah:

- a. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah.
- b. Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah.
- c. Belum meratanya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelola keamanan informasi.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi.

#### **16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Nilai-nilai budaya Kabupaten Padang Pariaman merupakan keunikan yang harus terus dijaga dan dipertahankan agar dapat semakin memperkuat daya tahan dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan era industri 4.0. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan pada saat ini adalah berkurangnya pemahaman sejarah, seni tradisional dan warisan budaya masyarakat.

#### **17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, permasalahan yang masih dihadapi adalah dalam peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan.



## **18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Padang Pariaman permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan kearsipan adalah masih banyaknya perangkat daerah yang tidak mengetahui peranan dari arsip atau dokumen.

### **4.1.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pilihan**

#### **1. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi *off-farm* upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan.
- b. Hilirisasi produk komoditi unggulan yang sangat terbatas.

#### **2. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan**

Pembangunan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan, dan peningkatan pendapatan pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan lainnya melalui peningkatan teknologi dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan serta meningkatkan usaha penanganan dan pengolahan ikan sehingga mutu terjamin dan nilai tambah produk perikanan meningkat, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi urusan perikanan yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan dan penyuluhan oleh Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap.
- b. Belum optimalnya perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana produksi pengolahan ikan serta perluasan pemasaran produk hasil perikanan.

#### **3. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Tantangan dan permasalahan-permasalahan dalam urusan pariwisata yang teridentifikasi selama ini adalah:

- a. Belum optimalnya pelestarian kawasan wisata.
- b. Masih rendahnya peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.



- c. Belum optimalnya alokasi dana nagari untuk peningkatan sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif.
- d. Kurangnya pembinaan Pokdarwis dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif.

#### **4. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral masih menjadi tantangan dan menghadapi permasalahan yang memerlukan perhatian, yaitu masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses tenaga listrik secara layak.

#### **5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian dan industri), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, minimnya sarana dan prasarana di pusat perdagangan menjadi hal yang masih perlu mendapat perhatian.

#### **6. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian yaitu masih terbatasnya pusat-pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

#### **4.1.2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

##### **1. Sekretariat Daerah**

Permasalahan pada Sekretariat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman, diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya peningkatan pemanfaatan mushalla/surau dan mesjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial.



- b. Belum optimalnya peran kelembagaan adat pada tingkat nagari memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam membangun keutuhan nilai-nilai budaya lokal.
- c. Disharmoni antara kelembagaan pemerintahan nagari dengan kelembagaan adat nagari.
- d. Belum optimalnya pengembangan kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat.
- e. Belum optimalnya penataan Produk Hukum.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa.
- g. Masih adanya ego sektoral dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di perangkat daerah.
- h. Masih terbatasnya perangkat daerah yang penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan ketentuan yang semestinya.
- i. Kuantitas dan kualitas SDM inovasi pelayanan publik.
- j. Belum optimalnya pemanfaatan SOP di sektor pelayanan publik.

## **2. Sekretariat DPRD**

Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga legislatif menjadi permasalahan pada Sekretariat DPRD di Kabupaten Padang Pariaman.

### **4.1.2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Penunjang Urusan pemerintahan**

#### **1. Perencanaan**

Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman selaku OPD yang mengkoordinir urusan perencanaan namun pada setiap tahapan evaluasi perencanaan pembangunan daerah masih adanya tantangan dan permasalahan dalam kurun waktu lima tahun belakangan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, diantaranya:

- a. Belum optimalnya pengintegrasian, perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT.
- b. Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah yang belum optimal.

#### **2. Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menjawab beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah berbasis IT yang terintegrasi.
- b. Belum adanya perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset yang terorganisir.
- c. Belum optimalnya penggalan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah



### **3. Kepegawaian**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan SDM ASN Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang handal, memiliki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum adanya sistem terpadu terkait dengan manajemen kepegawaian.
- b. Masih banyaknya Aparatur yang tidak profesional.
- c. Pemanfaatan dan pengetahuan IT oleh aparatur yang masih sangat terbatas.

### **4. Pendidikan dan Pelatihan**

Pengelolaan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Padang Pariaman harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang professional dan handal, namun masih terkendala oleh belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur dan penempatan sumber daya aparatur sesuai analisis jabatan.

### **5. Penelitian dan Pengembangan**

Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dihadapkan pada permasalahan minimnya dukungan sarana dan prasarana serta SDM dalam penelitian.

#### **4.1.2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan**

##### **1. Inspektorat Daerah**

Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Kualitas dan kuantitas APIP yang belum optimal.
- b. Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

##### **4.2 Isu Strategis**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis juga merupakan kondisi yang berpotensi menjadi peluang daerah di masa datang.



#### 4.2.1 Isu Kebijakan Nasional

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. Visi Presiden 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

**Gambar 4.1**  
**Misi Presiden 2020-2024**



Sumber : RPJMN 2020-2024

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan SDM  
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi  
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.





RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.  
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
    - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
    - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
    - c. Penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah;
    - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
    - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
  3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.



4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan menyalurkan dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuat infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui :

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- c. Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.



Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024. Sasaran makro pembangunan nasional yang diproyeksi di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Target Kinerja Nasional Tahun 2024 dalam RPJMN 2020-2024**

No	Indikator Pembangunan	Target 2024 (RPJMN) 2020-2024)
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,2 – 6,5 %
2	Tingkat Kemiskinan	6,0 – 7,0 %
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,6 – 4,3 %
4	Rasio Gini	0,360 – 0,374
5	Indeks Pembangunan Manusia	75,54
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,3 %

Sumber : RPJMN 2020-2024

Disain perencanaan jangka menengah tersebut kini harus mengalami berbagai pergeseran ketika tahun 2020, tahun awal periode RPJMN, difokuskan pada penanganan *Covid-19*. APBN 2020 difokuskan untuk mitigasi *Covid-19* agar dampak ekonomi dan sosial akibat virus ini dapat diminimalkan sampai keadaan bisa segera pulih. Penanganan *pandemi covid-19* mengubah rencana dan strategi pembangunan berbagai sektor yang telah dipersiapkan Pemerintah Indonesia, salah satunya target pembangunan yang berubah seiring dengan perubahan proses kerja.

#### **4.2.2 Isu Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pariaman dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman sehingga dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat. Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 memiliki visi pembangunan **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Sedangkan Misi pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.



6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Adapun Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia
2. Pembangunan Kebudayaan
3. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
4. Berkembangnya Perdagangan Komersial dan Tumbuhnya Wirausahawan Muda
5. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Infrastruktur yang handal dan Berkualitas
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

#### **4.2.3 Telaah RPJMD Kabupaten Tetangga**

Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan pembangunan tidak dapat berdiri sendiri dan perlu memperhatikan keselarasan pembangunan dengan Kabupaten Agam, Kota Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Pariaman yang bertetangga langsung dengan wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Guna menjamin keselarasan tersebut perlu memperhatikan visi dan misi kelima kabupaten tetangga tersebut:

##### **1. RPJMD Kabupaten Agam**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 dengan Visi “Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani”, dan Misi: 1) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani, 2) Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata, 3) Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana, 4) Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter, 5) Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK.

##### **2. RPJMD Kota Padang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024, dengan Visi “Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata Unggul serta Berdaya Saing”, dengan Misi 1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing, 2) Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan



lokal, 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif, 4) Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif, 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan, 6) Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana, 7) Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.

### 3. RPJMD Kabupaten Solok

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dengan Visi “Membangkit Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik, di Sumatera Barat” dan Misi: 1) Pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat, 2) Peningkatan infrastruktur yang berkeadilan, 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, UMKM, perdagangan dan pariwisata, 4) Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta transparansi keuangan, 5) Pembangunan sumber daya manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan, 6) Meningkatkan tatanan hidup masyarakat berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

### 4. RPJMD Kabupaten Tanah Datar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026, dengan Visi “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, dengan Misi: 1) Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya, 2) Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM, 3) Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, 4) Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam, 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan akuntabel, efektif dan efisien, 6) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

### 5. RPJMD Kota Pariaman

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023, dengan Visi “Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya”, dengan Misi 1) Mewujudkan wisata kota pesisir yang maju, religius, tertib dan berbudaya terbaik di sumatra, 2) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya, 3) Mewujudkan pemerintahan yang prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis smart city, 4) Mewujudkan kota pesisir modern, dinamis dan berwawasan



lingkungan hidup serta mitigasi bencana dan 5) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif yang berbasis lokal.

#### **4.2.4 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

##### **1. Telaah RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025**

RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, karena RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Padang Pariaman. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah disusun. Visi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005-2025 adalah **“Padang Pariaman 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas”**.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Padang Pariaman sebagai Padang Pariaman 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas maka misi Kabupaten Padang Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sistem Agribisnis dan Agroindustri yang Tangguh berbasis Nagari, didukung oleh Teknologi dan Informasi Mutakhir.
2. Mewujudkan Sistem Perdagangan yang Kuat dan berorientasi Ekspor.
3. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, dan Berdaya Saing Tinggi.
4. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan *“adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”*.
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.
6. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan sesuai dengan Kaidah-Kaidah Kelestarian Lingkungan.

RPJPD 2005-2025 pada tahun RPJMD ke 4 (2021-2026) diarahkan dengan tetap berpegang pada capaian kinerja pada RPJMD ke 3. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke 3, maka pada RPJMD ke 4 ini Kabupaten Padang Pariaman harus sudah dapat mewujudkan Visi jangka panjang daerah, yaitu **“Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas”**. Upaya-upaya untuk mewujudkan hal tersebut diarahkan kepada peningkatan produktifitas, dan efisiensi usaha disemua sektor ekonomi. Struktur perekonomian daerah sudah mencapai tahap industrialisasi dengan tekanan pada agroindustri (kakao). Sektor lain, seperti perdagangan, UKM sudah berkembang dengan pesat,



termasuk kegiatan perikanan, peternakan, dan pertanian, industri kecil maupun besar dan lainnya.

Guna mewujudkan agribisnis dan perdagangan, maka andil serta para pelaku lokal diberi kesempatan seluas-luasnya, sehingga mampu berkembang sejajar dengan pengusaha dari luar daerah. Terobosan, dengan menjalin hubungan yang lebih intensif dengan dunia luar, dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki, termasuk menjadikan dunia luar menjadi pasar yang sangat strategis. Dengan demikian penyerapan tenaga kerja akan dapat dilakukan seluas-luasnya, sehingga masyarakat golongan miskin pada phase ini sudah pada angka terendah.

Pada phase ini tingkat pendidikan masyarakat sudah baik secara merata antar kecamatan, karena sarana dan prasarana pendidikan sudah tersedia dengan lengkap, demikian juga tingkat kesehatan sudah berada pada tingkat sangat baik.

## **2. Telaah RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan matra spasial dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam RTRW kabupaten direncanakan dan diarahkan berbagai sektor pembangunan yang memiliki aspek spasial untuk menjamin terwujudnya pembangunan wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penyusunan RTRW diamanatkan oleh Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam rangka penyusunan RTRW tersebut dibutuhkan proses dan prosedur penyusunan yang baik agar dihasilkan dokumen rencana tata ruang yang secara substansial telah menyelesaikan isu pembangunan daerah, efektif sebagai instrumen pengarah dan pengendalian pembangunan dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk pengendalian pembangunan daerah. Dalam proses penyusunannya, RTRW Kabupaten merupakan hasil kajian teknis dari unsur-unsur wilayah dan juga hasil kesepakatan berbagai stakeholders sebagai pedoman pembangunan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.

Fungsi RTRW kabupaten adalah sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.



Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030 dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dimana dalam jangka waktu 5 tahun bisa direvisi untuk mengakomodasi dan menyesuaikan dengan perkembangan daerah yang terjadi selama kurun waktu ini.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi sumberdaya alam yang beragam dalam sektor pertanian padi sawah, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata serta pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan. Posisi Kabupaten Padang Pariaman yang berada pada wilayah tengah Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan Kota Padang sebagai ibukota Provinsi menjadi keuntungan lokasi kabupaten untuk mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata serta pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan.

Perkembangan investasi dan program pembangunan pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan perkembangan yang pesat. Dengan perkembangan daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dinamis tersebut diatas maka dibutuhkan arahan RTRW Kabupaten yang dapat mengkoordinasikan dan menjadi panduan dalam perencanaan dalam jangka panjang. RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030 terlihat belum seluruhnya mengakomodasi perkembangan pembangunan yang terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi RTRW Kabupaten untuk menampung dinamika pembangunan daerah.

Selain itu di sisi lain berdasarkan hasil Peninjauan Kembali (PK) RTRW terlihat berbagai kekurangan dari RTRW yang ada. Beberapa kekurangan tersebut bersifat mendasar untuk diperbaiki. Dalam rencana pola ruang belum terlihat jelas pembagian peruntukan lahan untuk padi sawah dan perkebunan. Hal ini karena dalam RTRW belum terlihat adanya analisis kesesuaian lahan. Alokasi kawasan industri juga belum terlihat. Demikian juga dalam rencana struktur ruang, rencana jaringan jalan, rencana sanitasi, rencana penyediaan air bersih dan identifikasi kawasan kumuh belum memadai sebagai acuan penyusunan program pembangunan.

#### A. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman

Penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada jangka panjang (20 tahun ke depan). Hal ini menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam alokasi ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Secara umum tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah:

- a. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten.
- c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.





Beranjak dari pemikiran di atas, maka ditetapkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040 yaitu : **“RTRW Kabupaten bertujuan untuk melakukan penataan ruang Kabupaten yang berimbang berbasis sektor pariwisata dan pertanian dengan memperhatikan mitigasi bencana.”**

#### B. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten.
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten.
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten.
5. Pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten.
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten.
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Sementara itu strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang berfungsi sebagai:

1. Dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten.
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten.
3. Dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Rumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai bagian dari PKN PALAPA.
2. Pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan.
3. Pengembangan agropolitan berbasis potensi dan keunggulan komoditas lokal yang ramah lingkungan.
4. Pengembangan kegiatan pariwisata berbasis budaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah.
5. Pengembangan pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya yang berkelanjutan.



6. Peningkatan fungsi pemanfaatan kawasan peruntukan lindung yang berkelanjutan.
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

### C. Strategi Penataan Ruang

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten.
- b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman meliputi:

1. Strategi perwujudan kebijakan pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan nasional sebagai bagian dari kawasan perkotaan Padang-Lubuk Alung-Pariaman, meliputi:
  - a. Meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan sistem transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah.
  - b. Mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang.
2. Strategi perwujudan kebijakan pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan meliputi:
  - a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
  - b. Membangun fasilitas umum dan jaringan utilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - c. Mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana.
3. Strategi perwujudan kebijakan pengembangan pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya yang berkelanjutan, meliputi:
  - a. Mengembangkan kawasan agropolitan dan sarana prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas sebagai lumbung padi Sumatera Barat.
  - b. Mengembangkan ekonomi perikanan.
  - c. Mengembangkan kegiatan pariwisata dan sarana prasarana penunjang pariwisata untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah yang bercirikan kearifan lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
  - d. Mengembangkan kegiatan industri dan sarana prasarana penunjang industri untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah.
  - e. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan dengan pembangunan sarana dan prasarana.



- f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan dan sumber daya alam yang terbarukan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
4. Strategi perwujudan kebijakan peningkatan fungsi pemanfaatan kawasan peruntukan lindung yang berkelanjutan, meliputi:
  - a. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.
  - b. Mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung.
  - c. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.
5. Strategi perwujudan kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
  - a. Menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan.
  - b. Mengembangkan kegiatan secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan keamanan.
  - c. Mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun disekitarnya.

### **3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis didapatkan tiga kelompok isu strategis, yaitu:

- 1) Isu strategis hasil konsultasi publik, yang meliputi:
  - a. Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah;
  - b. Penurunan kualitas dan debit air sungai;
  - c. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Lingkungan Hidup;
  - d. Banyaknya kegiatan usaha tanpa izin usaha dan izin lingkungan karena rendahnya pengelolaan tata ruang;
  - e. Lemahnya koordinasi antar lembaga.
- 2) Isu strategis berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang meliputi:
  - a. Sebagian besar daya tampung tergolong tinggi dan sangat tinggi untuk jasa pengaturan kecuali untuk penguraian dan pengolahan limbah;
  - b. Sedangkan untuk daya dukung dan jasa tempat tinggal hanya sebagian kecil yang tergolong tinggi
- 3) Isu strategis berdasarkan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk urusan Standar Pelayanan Minimal, antara lain terkait dengan:
  - a. Belum tercapainya APK PAUD, SD/ sederajat, SMP/ Sederajat;
  - b. Belum tercapainya target pembangunan infrastruktur air limbah dengan system terpusat;
  - c. Belum tercapainya akses sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan.



#### **4. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman**

Berdasarkan hasil telaahan terhadap RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025, RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040, RPJMD Kabupaten tetangga, serta identifikasi permasalahan pembangunan daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis Kabupaten Padang Pariaman dalam pembangunan daerah lima tahun mendatang (2021-2026), untuk menjadikan Padang Pariaman Berjaya, adalah:

##### **1. Pembangunan Kebudayaan**

Tata kehidupan masyarakat Minangkabau telah terpola dengan sebuah filosofi sosial yaitu *adaik basandi syara'-syara' basandi kitabullah*. Khazanah budaya Minangkabau, agama dan budaya merupakan dua dimensi nilai inti yang saling bertautan satu sama lain. Kedua dimensi nilai inilah yang membentuk karakter masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan nilai utama yang diharapkan mampu melahirkan harmonisasi antara kehidupan yang agamais dan kehidupan yang berbadab dan berbudaya. Dalam konteks dan dimensi budaya, keterbukaan wilayah berakibat masuknya pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu eksistensi dan peran kelembagaan adat pada tingkat nagari masih lemah dan bahkan semakin memudar, hal ini dapat kita lihat dari masih kurangnya peran mamak terhadap kemenakan, berkurangnya musyawarah dan mufakat adat dan kaum dalam pengambilan kebijakan, serta masih seringnya terjadi tingkah laku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan falasah ABS SBK tersebut. Rendahnya pengamalan dan aplikasi nilai-nilai ajaran agama dan akhlaq masyarakat, apalagi dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perubahan pola dan tingkah laku masyarakat sehingga tidak sejalan lagi dengan ajaran dan kaedah agama serta norma-norma adat istiadat Minangkabau. Pembangunan jati diri masyarakat melalui pendidikan agama dan wawasan kebangsaan guna mengatasi dampak negatif dan infiltrasi budaya global dan krisis global.

Isu penting lainnya terkait kerukunan, ketentraman dan ketertiban selama lima tahun kedepan diperhadapkan pada sejumlah tantangan berupa peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Selain itu juga tantangan ke depan yang dihadapi adalah kecenderungan munculnya bentuk kerawanan/kejahatan baru yang dipicu oleh terbukanya wilayah dalam rangka pembangunan ekonomi yang memudahkan mobilitas barang dan manusia seperti penggunaan obat-obatan psikotropika. Dengan demikian, diperlukan langkah antisipatif dan koordinatif pada bidang ketentraman dan ketertiban untuk mencegah dan menekan akses pembangunan ekonomi terhadap munculnya tindak kriminal.

Isu lainnya terkait pembangunan kebudayaan adalah kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan isu dalam pembangunan kualitas



perempuan, dimana masih terjadi kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak.

## **2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Publik Secara Berkelanjutan**

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana publik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah terkait infrastruktur transportasi darat, infrastruktur sumber daya air (infrastruktur irigasi, sumber air baku dan infrastruktur pengendalian banjir), memenuhi fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan dan kemandirian wilayah. Selain itu juga dihadapkan pada penyediaan air bersih, irigasi, listrik dan telekomunikasi guna mendukung lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat.

Isu penting lainnya yang perlu memperoleh perhatian, yaitu : (i) konektifitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi, (ii) meningkatnya produksi persampahan membutuhkan respon terhadap peningkatan cakupan pelayanan sampah dengan pembangunan TPA, dan pengolahan sampah berbasis teknologi. Pengelolaan sampah menjadi perhatian kabupaten, karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang.

## **3. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata**

Pembangunan sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dihadapkan dengan sejumlah isu-isu strategis. Pertama, gejolak harga komoditas pertanian sangat menentukan terhadap kesejahteraan petani yang tercermin dari nilai tukar petani. Nilai tukar petani pada tahun 2020 sedikit diatas 100, tepatnya 100,59. Namun antara 2016-2019 berada dibawah 100, yaitu dari 97,67 pada tahun 2016 hingga 95,99 pada tahun 2019. Nilai tukar petani yang rendah (< 100) terjadi pada subsektor hortikultura dan tanaman pangan, nilai tukar petani yang tinggi (>100) terjadi pada peternakan dan perikanan, perkebunan rakyat berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Begitupula dengan tingginya tingkat kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan dan lebih banyaknya rumahtangga pertanian yang miskin menimbulkan kompleksitas permasalahan yang menyertainya, sehingga isu-isu ini dapat direspon dalam kebijakan pembangunan secara umum, khususnya pada sektor pertanian.

Pembangunan sektor pertanian Kabupaten Padang Pariaman berhadapan dengan alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, baik untuk perumahan maupun komersial. Fragmentasi atau ukuran lahan yang semakin menyempit karena semakin panjang waris tanah akan



mempengaruhi skala keekonomian usaha tani. Untuk itu, strategi pembangunan pertanian dapat diarahkan dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan melakukan diversifikasi kegiatan pertanian atau non-pertanian bagi petani berlahan sempit guna mengoptimalkan curahan waktunya. Peningkatan produktivitas melalui transformasi pertanian dari tanaman pangan ke campuran bahkan pertanian komersial terspesialisasi membutuhkan kebijakan yang bertahap dan terukur yang membutuhkan komitmen kuat dalam mengenalkan bibit unggul, pengolahan lahan secara produktif, dan penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian.

Peningkatan produktivitas maupun produksi tidak serta merta diiringi dengan peningkatan pendapatan petani. Berlimpahnya produksi justru menyebabkan jatuhnya harga beberapa komoditi pertanian. Kenaikan harga barang konsumsi rumahtangga yang lebih tinggi dibanding harga hasil pertanian yang diterima petani juga menyumbang bagi rendahnya nilai tukar petani. Untuk meningkatkan secara signifikan harga yang diterima petani, peningkatan kualitas hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan agroindustri skala kecil pada sentra hasil-hasil pertanian membutuhkan perhatian yang memadai.

Sentra-sentra produksi pertanian belum dikelola dengan optimal dan secara jumlah masih belum mencukupi. Sentra-sentra produksi pertanian sangat bermanfaat sebagai *collective action* (tindakan bersama) untuk meningkatkan daya tawar petani dalam daya dukung transportasi, maupun keuntungan dalam biaya transportasi dan pemenuhan kebutuhan pasar. Sektor pertanian berhadapan ketidakpastian berkaitan dengan lingkungan hidup, berupa bencana alam, perubahan iklim, maupun serangan hama. Mitigasi bencana alam dan pengembangan lahan pertanian semakin membutuhkan pertimbangan terhadap kerawanan bencana alam, termasuk banjir maupun longsor. Begitupula dengan tingginya tingkat kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan dan lebih banyaknya rumahtangga pertanian yang miskin menimbulkan kompleksitas permasalahan yang menyertainya, sehingga isu-isu ini dapat direspon dalam kebijakan pembangunan secara umum, khususnya pada sektor pertanian.

Sejumlah isu-isu penting terkait dengan produk pertanian yang juga perlu memperoleh perhatian, yaitu: (a) meningkatnya tuntutan kepada produk pertanian berkualitas, berstandar dan bersertifikasi, termasuk produk pertanian yang sehat dari pertanian organik, (b) mulai tumbuhnya pola konsumsi sehat yang meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian berupa buah-buahan, sayuran, tanaman obat. Diikuti pula perubahan gaya hidup yang meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian seperti kopi, teh, dan susu segar, (c) tumbuhnya angkatan kerja pedesaan yang harus disikapi dengan penciptaan agroindustri pedesaan, regenerasi petani menjadi petani



muda atau milenial, dan pengembangan kewirausahaan pertanian di daerah pedesaan.

Sektor perikanan dihadapkan pada terbatas sarana dan prasarana perikanan tangkap. Pengolahan hasil perikanan yang telah berkembang masih perlu ditingkatkan menjadi berbagai komoditas untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sejumlah isu lingkungan juga dihadapi oleh sektor perikanan budidaya, pengembangan cepat budidaya udang vaname sepanjang pesisir, maupun kesehatan hewan dan ternak dari penyakit mewabah.

Perkembangan sektor perdagangan dan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman berhadapan dengan trend tumbuh cepatnya perdagangan elektronik yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan. Keberadaan perdagangan elektronik melalui berbagai aplikasi belanja daring dengan berbagai strategi promosi dan pemasarannya dapat mengancam daya saing sektor perdagangan dan UMKM Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat bersamaan juga dapat menjadi peluang bila dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk lokal. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi oleh pelaku usaha perdagangan termasuk UMKM dalam memasarkan produknya merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan daya saing. Terlebih bila mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan mengembangkan aplikasi belanja daring lokal.

Akses permodalan dalam meningkatkan skala ekonomi usaha perdagangan dan UMKM masih menjadi prasyarat perlu. Namun akses permodalan saja tidak mencukupi bila belum didukung oleh peningkatan kemampuan manajerial melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan usaha.

Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya semangat wirausaha di kalangan milenial merupakan isu penting untuk menumbuhkan dan mencetak memfasilitasi start up, wirausahawan milenial, women entrepreneur dalam berbagai jenis usaha termasuk ekonomi kreatif. Untuk itu, kebijakan untuk memfasilitasi kepada akses pengetahuan bersamaan, akses permodalan, serta pengembangan kolaborasi dapat menjadikan wirausahawan milenial ini menjadi pilar perekonomian di masa-masa mendatang.

Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman diperlukan ekspose yang lebih luas. Hal ini karena pasar pariwisata Kabupaten Padang Pariaman yang masih lokal. Kebutuhan pariwisata yang semakin meningkat berhadapan dengan pengelolaan objek destinasi wisata dengan penyediaan sarana prasarana dan utilitas serta atraksi.

Pengembangan pariwisata berhadapan dengan isu daya dukung dan akses infrastruktur menuju dan sarana prasarana objek destinasi wisata. Daya dukung dan manfaat sosial masyarakat sekitar kawasan pariwisata perlu menjadi perhatian penting. Perkembangan pariwisata juga perlu didukung dengan penciptaan ekosistem ekonomi kreatif dan



peningkatan inovasi (kuliner, fashion, kerajinan tangan) dan standarisasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

#### 4. Pembangunan Manusia

Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia melalui pembangunan manusia, sejumlah isu-isu strategis pada bidang kesehatan yaitu pandemi covid-19 yang mulai mereda masih tetap mengancam kondisi kesehatan dan risiko kematian bagi penduduk, namun berhadapan dengan mulai melonggarnya penerapan protokol kesehatan meskipun pelaksanaan vaksinasi telah mulai meluas, menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan *test, tracing dan treatment* (pengujian, pelacakan, dan penyembuhan).

Peningkatan akses kepada layanan dasar dan pemerataan layanan kesehatan antar kecamatan masih menjadi persoalan yang membutuhkan upaya yang lebih giat. Relatif rendahnya usia harapan hidup penduduk Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan perlunya peningkatan layanan kesehatan untuk semua penduduk, baik bagi ibu, anak, remaja, pemuda dan lanjut usia. Perlindungan dan penanganan wabah penyakit tidak hanya dari penyakit tidak terduga seperti covid-19, flu burung, namun juga berbagai penyakit terkait pola hidup yang tidak sehat, seperti penyakit jantung, diabetes, tuberculosis, juga HIV/AIDS. Pendekatan preventif melalui pola hidup bersih dan sehat serta kesehatan lingkungan yang belum sepenuhnya diterapkan masyarakat membutuhkan semakin giatnya promosi upaya kesehatan masyarakat.

Disamping itu, pada tahun 2020 masih ditemukan kasus stunting di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 3988 orang, yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah melalui berbagai strategi dan kebijakan, dimana pada saat ini Kabupaten Padang Pariaman dijadikan pilot project penanganan stunting.

Secara umum permasalahan pendidikan yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja pendidikan berupa angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah pada semua jenjang pendidikan, kualitas guru, proses belajar mengajar, ketersediaan sarana prasarana pendidikan. Berkaitan dengan permasalahan pendidikan tersebut, maka pembangunan pendidikan selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada tantangan berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan pendidikan khususnya pada wilayah-wilayah yang potensial jumlah peserta didiknya dan belum tersedia fasilitas sekolah. Disamping itu juga diperhadapkan pada upaya-upaya dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas dan perbaikan tata kelola pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Dengan demikian maka pembangunan pendidikan lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi murni dan





angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan proses belajar mengajar, meningkatkan sarana prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru) untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang semakin meningkat serta meningkatkan luaran pendidikan SD dan SLTP.

## **5. Tata Kelola Pemerintahan**

Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Dengan ini diharapkan kinerja pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal, efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan birokrasi. Jika berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, setidaknya sudah menuju ke arah upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Jadi keberhasilan reformasi birokrasi akan mewujudkan pada tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga upaya pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten

Tata kelola pelayanan publik yang efisien dan efektif serta perkembangan terkini berkonsekuensi kebutuhan untuk melakukan transformasi digitalisasi dan otomatisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memberikan pelayanan publik lebih terbuka, keterbukaan dan penyampaian informasi publik.

Tata kelola pelayanan publik juga mensyaratkan pengendalian dan pengawasan bagi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Untuk itu dibutuhkan kapasitas dan SDM pemerintahan dalam adopsi dan implementasi pelayanan publik secara eelektronik. Begitupula pemanfaatan beragam media termasuk kanal sosial media bagi keterbukaan informasi publik dan kegiatan pemerintahan.

## **6. Optimalisasi Pelayanan Dasar**

Masyarakat belum mendapat pelayanan dasar secara maksimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, air minum, pengelolaan limbah, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan dampak program pembangunan. Pelayanan dasar lain adalah pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat serta penanganan masalah sosial.

## **7. Peningkatan PAD dan Investasi Daerah**

Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggaliannya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh berbagai variabel makro ekonomi. Ada beberapa indikator makro ekonomi yang secara teoritis mempengaruhi PAD,



diantaranya: (1) struktur ekonomi daerah; (2) investasi (PMDN dan PMA); dan (3) pengeluaran pemerintah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya dalam lima tahun ke depan untuk mengoptimalkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan dengan dengan arah kebijakan Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir (2016-2020) adalah sebesar 15,59 persen. Padahal, untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, optimalisasi pajak ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu, pajak juga menjadi perhatian khusus untuk dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investasi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan. Mempermudah perijinan untuk investor adalah langkah kedepan dalam peningkatan investasi daerah.



# **BAB V**

## **VISI, MISI, TUJUAN**

### **DAN SASARAN**



## BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### 5.1 Visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, yaitu: **“PADANG PARIAMAN BERJAYA”**

Visi dimaksud di atas “Padang Pariaman Berjaya” merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan menjadi Kabupaten terdepan dari Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Unggul BERkelanjutan** : Menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- Religius** : Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- SeJAhtera** : suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- BerbudaYA** : suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran



pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat pembangunan jangka panjang daerah. RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, memuat arah kebijakan dan sasaran pokok dalam persepektif pembangunan 20 tahun kedepan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu “ **PADANG PARIAMAN 2025 UNGGUL DIBIDANG AGRIBISNIS DAN PERDAGANGAN BERDASARKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS** ”.

1. Kata “**Unggul**” disini berarti mempunyai kualitas yang tinggi dari segi hasil produk pertanian maupun sumberdaya manusia, serta mampu bersaing dengan pihak luar. Pada tahun 2025 Kabupaten ini ditargetkan telah mampu menghasilkan produk agroindustri yang berkualitas tinggi dan sumberdaya manusia yang unggul sehingga mampu bersaing di era global.
2. Kata ‘**Agribisnis**’, merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menggerakkan sektor pertanian, mulai dari usaha tani yang kokoh sehingga menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi mulai dari hulu sampai hilir. Produk pertanian yang berkualitas (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan) haruslah diolah di dalam daerah Kabupaten Padang Pariaman sendiri, dimana sebagai basisnya adalah masyarakat tani yang menghasilkan produk hilir yang berkualitas tinggi, sehingga nilai tambah dari hasil produk pertanian dinikmati oleh daerah dan masyarakat.
3. Kata “**Perdagangan**” adalah upaya dalam memacu usaha pertanian yang berintegrasi melalui penumbuhan UKM-UKM, serta koperasi yang kokoh sebagai motor penggerak perekonomian rakyat, serta meningkatkan sentra-sentra pemasaran ditingkat Nagari, sehingga mampu memasarkan produk hasil pertanian (mulai dari hulu sampai hilir) yang mempunyai daya saing tinggi di pasaran, baik nasional maupun global.
4. Kata “**Sumberdaya manusia yang berkualitas,**” merupakan suatu tekad pemerintah guna mencetak SDM yang berkualitas di Kabupaten Padang Pariaman, melalui program pendidikan gratis 12 tahun, menyediakan guru-guru yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang baik, menumbuh kembangkan lembaga pendidikan yang ada, serta mendorong siswa yang berprestasi tinggi dengan bantuan beasiswa, sehingga SDM Kabupaten Padang Pariaman di era global nanti akan mampu bersaing dengan daerah lain baik secara nasional maupun regional.



**Tabel 5.1**  
**Keselarasn Visi RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi dengan**  
**RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

RPJPD 2005-2025	RPJMN 2020-2024	RPJMD PROVINSI 2021-2026	RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026
Padang Pariaman 2025 unggul di bidang agribisnis dan perdagangan berdasarkan sumber daya manusia yang berkualitas	Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan	Padang Pariaman Berjaya (unggul <b>BE</b> rkelanjutan, <b>Religius</b> , se <b>JA</b> ntera dan berbuda <b>YA</b> )

**5.2 Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah *Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sktor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD, misi RPJMN, misi RPJMD Provinsi dengan misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 5.2**  
**Keselarasn Misi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi 2021-2026,**  
**RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025**  
**dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026**

RPJMN 2020-2024		RPJMD PROVINSI 2021-2026		RPJPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2005-2025		RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2021-2026	
No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi
1	Peningkatan kualitas manusia indonesia	1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi	4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sktor pendidikan non formal
2	Struktur ekonomi Yang produktif, mandiri dan berdaya saing	3	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1	Mewujudkan sistem agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasis Nagari, didukung oleh teknologi dan informasi mutakhir	3	Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat
		5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	2	Mewujudkan sistem perdagangan yang kuat dan berorientasi ekspor	7	Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
		4	Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital				
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.	6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan	2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang
4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan					6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat



RPJMN 2020-2024		RPJMD PROVINSI 2021-2026		RPJPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2005-2025		RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2021-2026	
No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah <i>Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</i>	4	Mewujudkan kehidupan beragama yang baik dan berkualitas, berlandaskan " <i>Adat Basandi Syara', Syarak' Basandi Kitabullah</i> "	1	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah <i>Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</i> serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
6	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	7	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa	5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga						
8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya						
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan						

### 5.3 Tujuan

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kabupaten. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran serta indikator RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, dapat dilihat dalam penjelasan berikut:



- 1) Misi I : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah *Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban umum.

**Tabel 5.3**  
**Tujuan dan Sasaran Misi I**

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	
1	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	1	Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	1	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah
						2	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
		2	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	2	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1	Persentase penegakan perda
						2	Persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan
						3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
						4	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

#### A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah *adat bersandi syara', syara' basandi kitabullah* serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban umum adalah terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan, yang dapat dilihat atau diukur dari Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa dan Penurunan Jumlah Tindak Pidana.

B. Sasaran

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama adalah Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah dan Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.

2. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah persentase penegakan perda, persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2) Misi II : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.

**Tabel 5.4**  
**Tujuan dan Sasaran Misi II**

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		
1	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	1 Persentase Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	1	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	
					2	Rasio Konektivitas kabupaten	
			2	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	
					2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan kabupaten	
			3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	1	Persentase drainase dalam kondisi baik	
					2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
					3	Persentase areal kawasan kumuh	
					4	Luas Ruang Terbuka Hijau	
			2	Kawasan strategis dan cepat tumbuh	1	Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai	1

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	yeng sesuai dengan rencana tata ruang	dengan perencanaan tata ruang	kawasan strategis dan kawasan perkotaan
			2 Persentase Ketaatan terhadap RTRW
			3 Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya (RTR)
			4 Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat

Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

#### A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang adalah Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan yang dapat dilihat atau diukur dari persentase pemenuhan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dan Kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan rencana tata ruang.

#### B. Sasaran

##### 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya infrastruktur daerah adalah:

- Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang
- Rasio Konektivitas kabupaten

##### 2. Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air adalah:

- Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
- Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan kabupaten

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman adalah:
    - a. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
    - b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
    - c. Persentase areal kawasan kumuh
    - d. Luas Ruang Terbuka Hijau
  4. Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang adalah:
    - a. Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan
    - b. Persentase Ketaatan terhadap RTRW
    - c. Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya
    - d. Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat
- 3) Misi III : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 5.5**  
**Tujuan dan Sasaran Misi III**

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1	Laju pertumbuhan ekonomi	1	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	1	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB
						2	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB
						3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
						4	Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
						5	Jumlah kunjungan wisatawan
2	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	1	Tingkat Kemiskinan				
3	Peningkatan daya beli masyarakat	1	PDRB/Income Per Kapita				
4	Kemandirian Desa	1	Indeks Desa Membangun				

Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran

dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat adalah Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Laju pertumbuhan ekonomi.

B. Sasaran

1. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perdagangan dan pengelolaan ekowisata adalah:

- Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB
- Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB
- Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
- Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
- Jumlah kunjungan wisatawan

2. Berkurangnya jumlah penduduk miskin

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait menurunnya jumlah penduduk miskin adalah tingkat kemiskinan.

3. Peningkatan daya beli masyarakat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya daya beli masyarakat adalah PDRB/Income Per Kapita.

4. Kemandirian Desa

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Kemandirian Desa adalah Indeks Desa Membangun.

4) Misi IV : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.

**Tabel 5.6**  
**Tujuan dan Sasaran Misi IV**

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	
1	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
				2	Peningkatan Mutu Pendidikan	1	Harapan lama sekolah
						2	Rata-rata lama sekolah
				3	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	1	Tingkat Pengangguran Terbuka
4	Peningkatan prestasi pemuda	1	Jumlah pemuda berkarakter				

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	
					dan olahraga daerah		mandiri
						2	Jumlah atlet berprestasi

Dalam rangka pencapaian misi 4, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal adalah Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan, yang dapat dilihat atau diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

B. Sasaran

1. Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

2. Peningkatan Mutu Pendidikan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Peningkatan Mutu Pendidikan adalah Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah.

3. Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing adalah Tingkat Pengangguran Terbuka.

4. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah adalah Jumlah pemuda berkarakter mandiri dan Jumlah atlet berprestasi.

- 5) Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

**Tabel 5.7**  
**Tujuan dan Sasaran Misi V**

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	
1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	1	Indeks reformasi birokrasi	1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan
						2	Tingkat Kapabilitas APIP

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			3 Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
			4 Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB
			5 Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan
			6 Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)
		2 Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	1 Indeks Profesionalitas ASN
			2 Indeks E-Government /SPBE
			3 Indeks Kearsipan Eksternal
		3 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1 Indeks Pelayanan Publik

Dalam rangka pencapaian misi 5, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

#### A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan adalah terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, yang dapat dilihat atau diukur dari indeks reformasi birokrasi.

#### B. Sasaran

##### 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebagai berikut:

- a. Opini BPK atas Laporan Keuangan
- b. Tingkat Kapabilitas APIP
- c. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
- d. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB
- e. Persentase penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan
- f. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)

2. Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)
 

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel) adalah:

    - a. Indeks Profesionalitas ASN
    - b. Indeks *E-Government* / SPBE
    - c. Indeks Kearsipan Eksternal
  3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
 

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas adalah Indeks Pelayanan Publik.
- 6) Misi VI : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 5.8**  
**Tujuan dan Sasaran Misi VI**

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	
1	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	1	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup
				2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1	Laju Pertumbuhan Penduduk
				3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	1	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
				4	Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	1	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
				5	Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	1	Rasio rumah layak huni
				6	Penguatan layanan kebencanaan	1	Nagari tangguh bencana
				7	Pengurangan resiko kebakaran	1	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)
				8	Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	1	Persentase PPKS Mandiri
				9	Peningkatan penanganan masalah sosial	1	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial



Dalam rangka pencapaian misi 6, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

#### A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat adalah Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, yang dapat dilihat atau diukur dari Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar.

#### B. Sasaran

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah Angka usia harapan hidup.
2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk adalah Laju Pertumbuhan Penduduk.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum adalah Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
4. Peningkatan pengolahan air limbah domestik  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Peningkatan pengolahan air limbah domestik adalah Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
5. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni adalah Rasio rumah layak huni.
6. Penguatan layanan kebencanaan  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Penguatan layanan kebencanaan adalah Nagari tangguh bencana.
7. Pengurangan resiko kebakaran  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Pengurangan resiko kebakaran adalah Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)

8. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat adalah Persentase PMKS Mandiri
  9. Peningkatan penanganan masalah sosial  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Peningkatan penanganan masalah sosial adalah Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial
- 7) Misi VII : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

**Tabel 5.9**  
**Tujuan dan Sasaran Misi VII**

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	
1	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan	1	Rasio ketergantungan keuangan daerah	1	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	1	Persentase peningkatan PAD
2	Meningkatkan nilai investasi / penanaman modal	2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Dalam rangka pencapaian misi 7, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

#### A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja adalah:

1. Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan yang dapat dilihat atau diukur dari Rasio ketergantungan keuangan daerah.
2. Meningkatkan nilai investasi/penanaman modal yang dapat dilihat atau diukur dari Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA).

#### B. Sasaran

1. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah persentase peningkatan PAD.



2. Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman adalah Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA).

Selanjutnya Indikator dan target Kinerja RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 secara makro yang akan dicapai sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat pada table 5.10 berikut ini:



**Tabel 5.10**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2021-2026**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
VISI : Padang Pariaman Berjaya						
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama	Penguatan Tata kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya
		Penurunan Jumlah Tindak Pidana	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.	Peningkatan kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana <i>multy culture</i>
					Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku	Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
					Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya	Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi serta kemitraan dengan masyarakat dan



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
					kepentingan	instansi lainnya
				persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	Meningkatkan pengendalian gangguan trantibum dan linmas	Penguatan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam pengendalian trantibum dan linmas
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender
				Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
				Rasio Konektivitas kabupaten	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat	Pemerataan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
				Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	Meningkatkan Infrastruktur pengendalian banjir	Peningkatan infrastruktur bantaran dan tanggul sungai akibat daya rusak air
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	Penyediaan dan Peningkatan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi
						Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
					Menyiapkan dan menerapkan regulasi tentang lingkungan hidup	Pengembangan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
						Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
				Persentase areal kawasan kumuh	Mengembangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penataan kawasan kumuh	Pengurangan luas areal permukiman kumuh
					Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU
						Peningkatan drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air perumahan tidak tersumbat
				Luas Ruang Terbuka Hijau	Mengembangkan regulasi tentang RTH bagi pemukiman	Penyusunan regulasi tentang RTH bagi pemukiman



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
						Peningkatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan
		Kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	Meningkatkan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan	Pengembangan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan
				Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
				Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya	Meningkatkan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital	Penyediaan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital
				Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat	Meningkatkan fasilitasi kepengurusan sertifikat tanah Pemda	Pendataan kepemilikan lahan bersertifikat milik Pemda





Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman	Peningkatan pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan
				Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui diversifikasi dan intensifikasi pangan
				Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Meningkatkan hilirisasi produktivitas perikanan tangkap	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap
				Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Meningkatkan hilirisasi produktivitas perikanan tangkap	Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Meningkatkan hilirisasi produktivitas perikanan tangkap	Peningkatan sarana dan prasarana				



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
						produksi pengolahan ikan serta perluasan pemasaran produk hasil perikanan
				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatkan pengembangan UMKM	Peningkatan pembinaan pedagang kecil dan menengah agar lebih berkembang dan berdaya saing
					Mengembangkan pusat perdagangan dan terminal terpadu sebagai sentra ekonomi masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana di pusat perdagangan
					Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM
				Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Mengembangkan potensi wilayah dengan klasterisasi industri	Pengembangan Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Kunjungan Wisatawan	Mengembangkan dan merevitalisasi Kawasan Wisata	Pelestarian kawasan wisata
					Melakukan promosi wisata dan ekonomi kreatif	Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
						pengoptimalan alokasi dana nagari untuk peningkatan sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif
						Pemberdayaan Pokdarwis dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif
			Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan
			Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat
			Kemandirian Desa	Indeks Membangun Desa	Meningkatkan perekonomian desa/nagari	Pemanfaatan potensi desa/nagari



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatkan gerakan literasi dan budaya membaca	Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan
			Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur pendidikan	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan
					Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
					Rata-rata lama sekolah	Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD	Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD		
			Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program-program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
						Perluasan kesempatan kerja
			Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	Meningkatkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan kepemudaan dalam pembangunan	Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial
				Jumlah atlet berprestasi	Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah	Peningkatan kualitas SDM pemuda
						Pembibitan atlet muda secara berjenjang dan terintegrasi
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks reformasi birokrasi	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi
					Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah	Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset
				Tingkat Kapabilitas APIP	Mengoptimalkan peran APIP	Peningkatan kapabilitas APIP



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
				Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah	Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT
					Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan efisien
					Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah	Peningkatan penataan Produk Hukum Kab Padang Pariaman
						Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
						Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi <i>policy brief</i> (penerapan kebijakan)
				Penggunaan <i>E-Procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan	Meningkatkan kualitas sistem pengadaan barang dan jasa	Peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa
				Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Birokrasi yang efisien dan efektif ( <i>kapabel</i> )	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah	Peningkatan kapasitas aparatur dan Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan
						Peningkatan sistem manajemen kepegawaian
				Indeks E-Government/SPBE	Meningkatkan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi	Peningkatan sarana dan prasarana IT



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	2	3	4	5	6	7	
			Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kearsipan Eksternal	Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan	<p>Peningkatan Pengamanan data daerah</p> <p>Peningkatan manajemen kearsipan berbasis IT pada masing-masing Perangkat Daerah</p>	
				Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	<p>Peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik</p> <p>Pengembangan inovasi pelayanan publik</p> <p>Peningkatan Tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil</p>	
						Meningkatkan pemanfaatan Peta Proses Business	Penerapan SOP di sektor pelayanan publik
Meningkatkan kualitas dan kuantitas	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	





Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat		standar			Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai standar
					Meningkatkan kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Peningkatan Pemenuhan Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman
					Meningkatkan Budaya Hidup Sehat	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
			Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan Total fertility rate (FTR)	Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja
					Peningkatan advokasi dan menggerakkan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga	



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Meningkatkan akses terhadap layanan air minum	Peningkatan infrastruktur dan teknologi penyediaan air minum
			Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Meningkatkan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	Penguatan kelembagaan KPSPAM dan kapasitas SDM penyediaan air minum
			Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	Menyediakan rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
						Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
			Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	Melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan
			Pengurangan resiko kebakaran	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran	Peningkatan penguatan jumlah lokasi/nagari pengurangan resiko bencana
			Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	Persentase Mandiri PPKS	Meningkatkan bantuan sosial kemasyarakatan untuk lansia, gelandangan, pengemis, disabilitas terlantar	Peningkatan kesejahteraan sosial
			Peningkatan penanganan masalah sosial	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan	Peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan	Rasio ketergantungan keuangan daerah	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	Meningkatkan PAD	Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis IT
	Meningkatkan nilai investasi/ penanaman modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkatkan promosi dan kemitraan investasi	Peningkatan promosi investasi di sektor primer dan jasa berbasis IT
					Meningkatkan pelayanan investasi	Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dan kearifan lokal



**Tabel 5.11 (T.C-11)**  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Visi : Padang Pariaman Berjaya												
1 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	1 Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	1 Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1 Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	N/A	26%	27%	28%	29%	30%	31%		
			2 Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	N/A	35%	36%	38%	38%	40%	42%		
		2 Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	3 persentase penegakkan perda	50%	62,5%	65%	67,5%	70%	72,5%	75%		
			4 persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	50%	62,5%	65%	67,5%	70%	72,5%	75%		
			5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.92	93.3	93.6	94	94.3	94.7	95		
			6 Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	12%	12%	13%	13%	14%	14%	14%		
2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan	1 Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	1 Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	64.28%	65,3%	67%	69%	71%	73%	75%		
			2 Rasio Konektivitas kabupaten	1:54	1:54	1:57	1:59	1:61	1:63	1:64		
		2 Meningkatkan Infrastruktur	1 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	50,98%	54,82%	58,72%	62,72%	66,74%	71,04%	75,54%		



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang		Sumberdaya Air	2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	6.67%	7.02%	7.43%	7.95%	8.53%	9.29%	9.94%					
			3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	1	Persentase drainase dalam kondisi baik	20%	55%	60%	70%	75%	80%	85%			
		2			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.38	66.93	67	67.09	67.17	67.25	68.95				
		3			Persentase areal kawasan kumuh	0,66%	0.55%	0.4%	0.33%	0.22%	0.11%	0.00%				
		4			Luas Ruang Terbuka Hijau	850 Ha	852 Ha	854 Ha	856 Ha	858 Ha	860 Ha	862 Ha				
		4	Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	1	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	22%	35%	43%	52%	65%	78%	87%				
				2	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	58%	63%	68%	70%	75%	83%	90%				
				3	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya	25%	37,50%	50%	62,50%	75%	87,50%	100%				
				4	Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat	8.70%	8.80%	8.90%	9%	9.50%	10%	10.50%				
		3	Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian,	1	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Rp. Juta)	2,668,7 93.67	2,731,7 77.20	2,796,2 47.14	2,862,2 38.58	2,929,7 87.41	2,998,93 0.39	3,069,7 05.15
								2	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	7.20%	7.35%	7.50%	7.65%	7.80%	7.95%	8.10%



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat		Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8.30%	8.52%	8.58%	8.60%	8.64%	8.69%	8.71%	
			4 Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	11,19%	11,8%	12,6%	13,3%	14,2%	15,0%	16,0%	
			5 Jumlah Kunjungan Wisatawan	208.872 orang	250.000 orang	265.000 orang	275.000 orang	300.000 orsng	330.000 orang	350.000 orang	
		2 Berkurangnya jumlah penduduk miskin	1 Tingkat Kemiskinan	7,26%	7,11%	6,99%	6,87%	6,74%	6,61%	6,48%	
		3 Peningkatan daya beli masyarakat	1 PDRB/Income Per Kapita ADHB (Rp Juta)	42,95	44.63	46.98	49.46	52.71	55.35	58.72	
		4 Kemandirian Desa	1 Indeks Desa Membangun	4	4	1	1	1	1	1	
4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor	1 Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	1 Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18.62	18.8	18.85	18.88	18.97	19.08	19.36	
			2 Peningkatan Mutu Pendidikan	1 Harapan lama sekolah	13.67 Tahun	13.82 Tahun	13,97 Tahun	14,12 Tahun	14,27 Tahun	14,42 Tahun	14,57 Tahun
		2 Rata-rata lama sekolah		7.87 Tahun	7.91 Tahun	8.03 Tahun	8.16 Tahun	8.29 Tahun	8.41 Tahun	8.54 Tahun	
		3 Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	1 Tingkat Pengangguran Terbuka	7,84%	7,61%	7,15%	7,17%	7,15%	7,1%	7,1%	



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
pendidikan non formal		4 Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	1 Jumlah pemuda berkarakter mandiri	156 Orang	160 Orang	165 Orang	170 Orang	175 Orang	180 Orang	185 Orang	
			2 Jumlah Atlet Berprestasi	357 Orang	360 Orang	365 Orang	370 Orang	375 Orang	380 Orang	385 Orang	
5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan	1 Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			2 Tingkat Kapabilitas APIP	level 3 dengan catatan	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	
			3 Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	
			4 Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	B	B	B	BB	BB	BB	BB	
			5 Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	
			6 Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	2,600 (tinggi)	2,600 (tinggi)	2,700 (tinggi)	2,800 (tinggi)	2,900 (tinggi)	3,000 (sangat tinggi)	3,050 (sangat tinggi)	
		2 Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	1 Indeks Profesionalitas ASN	76	78	80	82	84	86	88	
			2 Indeks E-Government /SPBE	1.9	2.15	2.44	2.76	3.12	3.53	4	
			3 Indeks Kearsipan Eksternal	N/A	73.48	60.80	63.95	65.00	68.50	70.00	
		3 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1 Indeks Pelayanan Publik	4.55	4.56	4.56	4.57	4.57	4.57	4.58	





Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat	1 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	1 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1 Angka usia harapan hidup	68,79 Tahun	68,89 Tahun	68,99 Tahun	69,29 Tahun	69,50 Tahun	69,75 Tahun	70 Tahun	
		2 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1 Laju Pertumbuhan Penduduk	3,61%	3,50%	3,39%	3,29%	3,19%	3,09%	3%	
		3 Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	1 Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	71.86%	88%	90%	92%	95%	97%	100%	
		4 Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	1 Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	79.03%	81%	85%	87%	93%	96%	100%	
		5 Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	1 Rasio rumah layak huni	0.129	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.185	
		6 Penguatan layanan kebencanaan	1 Nagari tangguh bencana	14	15	16	17	18	19	20	
		7 Pengurangan resiko kebakaran	1 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	20 Menit	17,8 Menit	15,8 Menit	14,1 Menit	12,6 Menit	11,2 Menit	10 Menit	



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir			
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
		8	Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	1	Persentase PPKS Mandiri	21%	23%	25%	27%	28%	30%	33%		
		9	Peningkatan penanganan masalah sosial	1	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	72%	75%	73%	76%	79%	83%	85%		
7	Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.	1	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan	1	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	1	Persentase peningkatan PAD	N/A	3%	3,5%	4%	4,5%	5%	5,5%
		2	Meningkatkan nilai investasi / penanaman modal	1	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	330,6 (Milyar)	365,1 (Milyar)	403,3 (Milyar)	445,4 (Milyar)	491,9 (Milyar)	543,7 (Milyar)	600 (Milyar)



**Tabel 5.12**  
**Persandingan Tujuan Dan Sasaran**  
**Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Padang Pariaman**

PROVINSI SUMATERA BARAT				KABUPATEN PADANG PARIAMAN			
M.1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			M.6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat		
T.1	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	S.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	T.1	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		S.2	Menurunnya prevalensi stunting				
				M.4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal		
		S.3	Meningkatnya kualitas Pendidikan	T.1	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	S.2	Peningkatan Mutu Pendidikan
		S.4	Meningkatnya daya saing masyarakat			S.3	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing
				S.4	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah		
M.2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah			M.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban		
T.1	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	T.1	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	S.1	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya
				M.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban		
		S.3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	T.1	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	S.2	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
				M.6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat		
						T.1	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
				M.4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing		



PROVINSI SUMATERA BARAT				KABUPATEN PADANG PARIAMAN			
		S.2	Meningkatnya Budaya Literasi	T.1	saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	S.1	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat
M.3	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			M.3	Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat		
T.1	Meningkatkan kesejahteraan petani	S.1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	T.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.1	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata
		S.2	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan			S.2	Berkurangnya jumlah penduduk miskin
		S.3	Meningkatnya pendapatan Petani Hutan			S.3	Peningkatan daya beli masyarakat
						S.4	Kemandirian Desa
M.4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital						
T.1	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.1	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan				
		S.2	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah				
		S.3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera				
		S.4	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor				
		S.6	Meningkatnya peran ekonomi digital				
M.5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan						
T.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi	S.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat				



PROVINSI SUMATERA BARAT				KABUPATEN PADANG PARIAMAN			
	kreatif	S.2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat				
M.4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital			M.7	Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.		
T.1	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	T.2	Meningkatkan nilai investasi / penanaman modal	S.1	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman
				T.1	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan	S.1	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah
M.6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			M.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang		
T.1	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi	T.1	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi
						S.2	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air
						S.3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman
				M.6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat		
				T.1	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum
						S.4	Peningkatan pengelolaan air limbah domestik
						S.5	Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
				M.6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat		
		S.2	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	T.1	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.6	Penguatan layanan kebencanaan
		S.3	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas			S.7	Pengurangan resiko kebakaran
		S.4	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian			S.8	Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat
						S.9	Peningkatan penanganan masalah sosial



PROVINSI SUMATERA BARAT				KABUPATEN PADANG PARIAMAN			
				M.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang		
		S.5	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	T.1	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.4	Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang
M.7	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas			M.5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan		
T.1	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	S.1	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	T.1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		S.2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi			S.2	Birokrasi yang kapabel
		S.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			S.3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas



**BAB VI**

**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN**

**PROGRAM**

**PEMBANGUNAN DAERAH**

---

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **6.1 Strategi Pembangunan Daerah**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya untuk memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Misi. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi adalah sebagai berikut:



**Tabel 6.1**  
**T-C.12. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**  
**Kabupaten Padang Pariaman**

<b>VISI : PADANG PARIAMAN BERJAYA</b>							
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>			
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban							
1	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	1	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama		
				2	Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.		
		1	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan		
				2	Meningkatkan pengendalian gangguan trantibum dan linmas		
				3	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan		
				4	Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak		
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang					



**VISI : PADANG PARIAMAN BERJAYA**

Tujuan		Sasaran		Strategi		
1	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan	
				2	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat	
		2	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten	
				2	Meningkatkan Infrastruktur pengendalian banjir	
		3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman		1	Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
					2	Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan
					3	Menyiapkan dan menerapkan regulasi tentang lingkungan hidup
					4	Mengembangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penataan kawasan kumuh
					5	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum
					6	Mengembangkan regulasi tentang RTH bagi pemukiman
		4	Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata	1	Meningkatkan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan	



VISI : PADANG PARIAMAN BERJAYA					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
			ruang	2	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
				3	Meningkatkan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital
				4	Meningkatkan fasilitasi kepengurusan sertifikat tanah Pemda
Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat					
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	1	Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman
				2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
				3	Meningkatkan hilirisasi produktivitas perikanan tangkap
				4	Meningkatkan pengembangan UMKM
				5	Mengembangkan pusat perdagangan dan terminal terpadu sebagai sentra ekonomi masyarakat
				6	Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang



**VISI : PADANG PARIAMAN BERJAYA**

Tujuan		Sasaran		Strategi	
					kreatif
				7	Mengembangkan potensi wilayah dengan klasterisasi industri
				8	Mengembangkan dan merevitalisasi Kawasan Wisata
				9	Melakukan promosi wisata dan ekonomi kreatif
		2	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	1	Menurunkan angka kemiskinan
		3	Peningkatan daya beli masyarakat	1	Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat
		4	Kemandirian Desa	1	Meningkatkan perekonomian desa/nagari
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal					
1	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	1	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	1	Meningkatkan gerakan literasi dan budaya membaca
		2	Peningkatan Mutu Pendidikan	1	Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur pendidikan
				2	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
				3	Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan
				4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD
		3	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	1	Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja



VISI : PADANG PARIAMAN BERJAYA					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
		4	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	1	Meningkatkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan kepemudaan dalam pembangunan
				2	meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda
				3	Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan					
1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
				2	Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah
				3	Mengoptimalkan peran APIP
				4	Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah
				5	Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan
				6	Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan
				7	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah



VISI : PADANG PARIAMAN BERJAYA					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
				8	Meningkatkan kualitas sistem pengadaan barang dan jasa
				9	Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
		2	Birokrasi yang kapabel	1	Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah
				2	Meningkatkan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi
				3	Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan
		3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2	Meningkatkan pemanfaatan Peta Proses Business				
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat					
1	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan
				2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				3	Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman
				4	Meningkatkan budaya hidup sehat
		2	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	1	Menurunkan Total fertility rate (FTR)
		3	Peningkatan	1	Meningkatkan



**VISI : PADANG PARIAMAN BERJAYA**

Tujuan		Sasaran		Strategi	
			pemenuhan kebutuhan air minum		akses terhadap layanan air minum
		4	Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	1	Meningkatkan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik
		5	Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	1	Menyediakan rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
		6	Penguatan layanan kebencanaan	1	Melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
		7	Pengurangan resiko kebakaran	1	Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran
		8	Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	1	Meningkatkan bantuan sosial kemasyarakatan untuk lansia, gelandangan, pengemis, disabilitas terlantar
		1	Peningkatan penanganan masalah social	1	Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan
Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.					
1	Optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembangunan	1	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	1	Meningkatkan PAD
2	Meningkatkan nilai investasi/penanaman modal	1	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	1	Meningkatkan promosi dan kemitraan investasi
				2	Meningkatkan pelayanan investasi

## 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

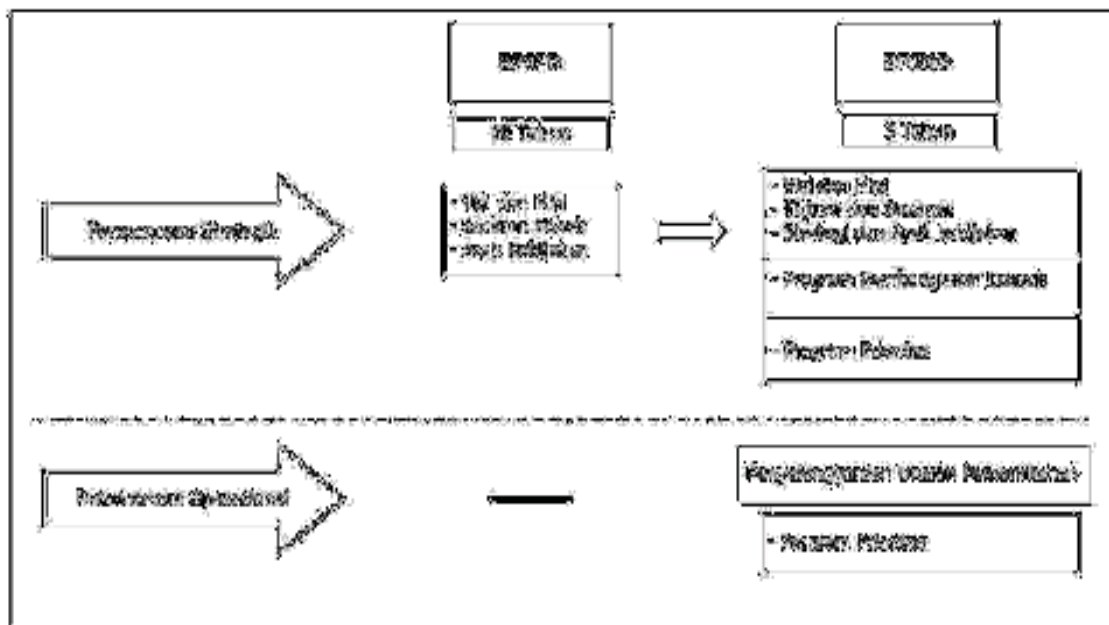
Di samping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut:

- Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut.



Dengan mendasarkan Strategi yang telah dirumuskan maka rumusan Arah kebijakan pada setiap Strategi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:



**Tabel 6.2 (Tabel T-C.13)**  
**Arah Kebijakan Pembangunan**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban							
Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kebudayaan	Penguatan Tata kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya						
	Peningkatan kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multy culture						
	Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila						
	Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya						
Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi serta kemitraan dengan masyarakat dan instansi lainnya						
	Penguatan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam pengendalian trantibum dan linmas						
	Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender						
	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak						
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang							
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten						
	Pemerataan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum						
Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi						
	Peningkatan infrastruktur bantaran dan tanggul sungai akibat daya rusak air						
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	Penyediaan dan Peningkatan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota						
	Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi						
	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						
	Pengembangan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
Pengurangan luas areal permukiman							



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	kumuh					
	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU					
	Peningkatan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air perumahan tidak tersumbat					
	Penyusunan regulasi tentang RTH bagi pemukiman					
	Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi Taman Makam Pahlawan					
Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	Pengembangan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan					
	Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan					
	Penyediaan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital					
	Pendataan kepemilikan lahan bersertifikat milik Pemda					
Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat						
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Peningkatan pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan					
	Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui diversifikasi dan intensifikasi pangan					
	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap					
	Pengoimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu					
	Peningkatan sarana dan prasarana produksi pengolahan ikan serta perluasan pemasaran produk hasil perikanan					
	Peningkatan pembinaan pedagang kecil dan menengah agar lebih berkembang dan berdaya saing					
				Peningkatan sarana dan prasarana di pusat perdagangan		
	Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM					
				Pengembangan Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing		
	Pelestarian kawasan wisata					
Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi						



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	kreatif					
	pengoptimalan alokasi dana nagari untuk peningkatan sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif					
	Pemberdayaan Pokdarwis dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif					
Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan					
Peningkatan daya beli masyarakat	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat					
Kemandirian Desa	Pemanfaatan potensi desa/nagari					
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal						
Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan					
Peningkatan Mutu Pendidikan	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan					
	Peningkatan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan					
	Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi					
	Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD					
Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program-program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)					
	Perluasan kesempatan kerja					
Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial					
	Peningkatan kualitas SDM pemuda					
	Pembibitan atlet muda secara berjenjang dan terintegrasi;					
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan						
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi					
	Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi asset					
	Peningkatan kapabilitas APIP					
	Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					
	Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT					
	Peningkatan pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan efisien					
	Peningkatan penataan Produk Hukum Kab					



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Padang Pariaman					
	Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah					
			Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi <i>policy brief</i> (penerapan kebijakan)			
	Peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa					
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah					
Birokrasi yang kapabel	Peningkatan kapasitas aparatur dan Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan					
	Peningkatan sistem manajemen kepegawaian					
	Peningkatan Budaya kerja yang profesional					
	Peningkatan sarana dan prasarana IT					
	Peningkatan Pengamanan data daerah					
	Peningkatan manajemen kearsipan berbasis IT pada masing-masing Perangkat Daerah					
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik					
	pengembangan inovasi pelayanan publik					
	Peningkatan Tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil					
	Penerapan SOP di sektor pelayanan publik					
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat						
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan					
	Peningkatan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar					
	Peningkatkan pemenuhan penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman					
	Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat					
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi remaja					
	Peningkatan advokasi dan menggerakkan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga					
Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Peningkatan infrstruktur dan teknologi penyediaan air minum					
	Penguatan kelembagaan KPSPAM dan kapasitas SDM penyediaan air minum					
Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem					



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat					
Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni					
Penguatan layanan kebencanaan	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan					
Pengurangan resiko kebakaran	Peningkatan penguatan jumlah lokasi/nagari pengurangan resiko bencana					
	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi korban bencana					
Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	Peningkatan kesejahteraan sosial					
Peningkatan penanganan masalah sosial	Peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan					
Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.						
Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis IT					
Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Peningkatan promosi investasi di sektor primer dan jasa berbasis IT					
	Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dan kearifan lokal					



**Tabel 6.3**  
**Persandingan Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Padang Pariaman**

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1	1	Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian covid-19.	1	Meningkatkan kemampuan SDM dan fasilitas dan laboratorium kesehatan dalam melakukan pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19.					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1	2	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	1	Peningkatan pelayanan ibu dan bayi berkesinambungan di fasilitas layanan kesehatan					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			2	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			3	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan postnatal bagi ibu dan bayi baru lahir, termasuk imunisasi					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			4	Penguatan dan pengembangan pelaksanaan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			5	Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			6	Peningkatan cakupan ASI eksklusif					



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1		7 Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1		8 Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1		9 Penguatan sistem surveilans gizi					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1		10 Revitalisasi posyandu, posbindu, UKS, dan UKBM lainnya untuk edukasi kesehatan, skrining, dan deteksi dini kasus					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1		11 Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1		12 Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan termasuk laboratorium kesehatan					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1		13 Penguatan kemampuan RS Khusus					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1		14 Penguatan pelayanan kesehatan primer					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1		15 Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1		16 Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat					



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			17	Peningkatan akses air bersih dan perilaku higienis	M.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.3	1	Meningkatkan akses terhadap layanan air minum	1	Peningkatan infrastruktur dan teknologi penyediaan air minum
							M.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.3	1	Meningkatkan akses terhadap layanan air minum	2	Penguatan kelembagaan KPSPAM dan kapasitas SDM penyediaan air minum
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			18	Peningkatan pelayanan dasar anak terlantar, disabilitas terlantar dan lanjut usia terlantar di dalam panti							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			19	Penguatan sistem laboratorium kesehatan daerah							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			20	Penguatan <i>reporting</i> dan <i>real time surveillance</i> untuk penyakit berpotensi wabah dan penyakit baru muncul ( <i>new emerging diseases</i> )							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			21	Membangun sistem kewaspadaan dini.							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			22	Meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan untuk respon cepat							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			23	Revitalisasi peralatan kesehatan rumah sakit milik provinsi							





PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN								
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1	3	Peningkatan kapasitas SDM kesehatan	1	Perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan provinsi	M.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.1	2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Peningkatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai standar
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			2	Pengembangan mutu dan kompetensi teknis sumberdaya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1	4	Penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	1	Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan,	M.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.1	3	Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	1	Peningkatkan Pemenuhan Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			2	Menjalankan program promotif preventif melalui pemberdayaan masyarakat, terutama untuk meningkatkan penggunaan obat rasional.							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			3	Memastikan ketersediaan alat kesehatan dan makanan minum							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1	5	Menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan	1	Mendorong kegiatan Germas, kampanye makan ikan, makan buah dan sayur, serta kampanye diet seimbang (isi piringku).	M.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.1	4	Meningkatkan Budaya Hidup Sehat	1	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			2	Meningkatkan metode/cara promosi kesehatan, melalui TV spot, leaflets, booklet, media sosial, dan sebagainya							



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN								
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			3	Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, UKS dan lingkungan kerja sehat.							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			4	Promosi pembudayaan hidup sehat							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			5	Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari komponen APBD, khususnya terkait Upaya Kesehatan Masyarakat							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			6	Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan aktifitas kebugaran							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1	6	Pemenuhan Standar pelayanan minimal bidang kesehatan	1	Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang kesehatan	M.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.1	1	Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan	1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.1			2	Optimalisasi layanan kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit Khusus Pemprov							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2	1	Intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan	1	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			2	Pemberian suplementasi tablet tambah darah							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			3	Promosi dan konseling pemberian ASI eksklusif							



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN						
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			4	Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA)					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			5	Penatalaksanaan gizi buruk					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			6	Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			7	Pemantauan dan promosi pertumbuhan					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			8	Pemasyarakatan Gemar Makan Ikan					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2	2	Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 bulan	1	Pemberian suplementasi tablet tambah darah					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			2	Penatalaksanaan gizi buruk					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			3	Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			4	Pemantauan dan promosi pertumbuhan					



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			5	5						
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2	3	Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum	1	1						
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			2	2						
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			3	3						
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			4	4						
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			5	5						
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			6	6						
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			7	M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.1	2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	1	Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui diversifikasi dan intensifikasi pangan
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			8	8						



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN						
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			9	Advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			10	Advokasi dan sosialisasi konsumsi pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			11	Penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			12	Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2	4	Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah	1	Penyusunan Kebijakan tentang percepatan pencegahan stunting ditingkat Provinsi					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			2	Pelaksanaan Rembuk stunting pada tahapan perencanaan Program/Kegiatan					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			3	Mobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya					



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2	5	Komunikasi Perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting	1 Melaksanakan kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan						
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			2 Memperkuat komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran melalui pengembangan pesan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK, wanita usia subur, dan remaja putri untuk disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti Posyandu, kelas pengasuhan, kelas ibu hamil, pusat pembelajaran keluarga, kunjungan rumah, konseling pra-pernikahan, konseling reproduksi remaja						
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			3 Memastikan advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan						
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			4 Mengembangkan kapasitas pengelola program, dengan memberikan pengetahuan dan meningkatkan kapasitas bagi penyelenggara kegiatan komunikasi perubahan perilaku yang efektif dan efisien						



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2	6	Pelaksanaan aksi Konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat	1	Memastikan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi gizi prioritas					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			2	Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan program untuk memastikan sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK) memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			3	Memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintah, sampai dengan desa untuk memastikan keselarasan penyediaan dan penyelenggaraan pelaksanaan program					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.2			4	Membagi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan untuk menyelenggarakan konvergensi					



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3	1	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	1	Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan	M.4	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	S.2	1	Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur pendidikan	1	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3	2	Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan	1	Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK	M.4	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	S.2	2	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	2	Peningkatan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3			2	Melaksanakan penambahan ruang kelas baru SMA dan SMK	M.4	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	S.2	3	Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan	3	Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3			3	Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA, dan SMK	M.4	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	S.2	4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD	4	Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3			4	Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3			5	Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah SMA dan SMK							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3			6	Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah pendidikan khusus (SLB).							





PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3			7	Pembangunan sekolah baru di zona perbatasan				
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3			8	Revitalisasi SMK sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja penguatan karakter melalui pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa.				
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3			9	Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan terutama yang berada pada daerah 3T secara bertahap				
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3	3	Pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal	1	Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau di sekolah				
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3			2	Mendorong Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3	4	Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan	1	Melaksanakan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota				
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3			2	Melaksanakan Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota				
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3			3	Peningkatan kualitas kompetensi guru				



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3	5	Pelaksanaan Pengendalian perizinan Pendidikan	1	Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3			2	Melaksanakan pembinaan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.3	6	Penguatan Pengembangan bahasa dan sastra	1	Melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.4	1	Meningkatkan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan Vokasi, penguatan BLK dan lembaga produktivitas.	1	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing melalui pelatihan vokasi, penguatan BLK dan peningkatan lembaga produktivitas.	M.4	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	S.3	1	Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja	1	Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program-program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.4	2	Mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal	1	Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	M.4	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	S.3	1	Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja	2	Perluasan kesempatan kerja
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.4			2	Peningkatan kopetensi lulusan SMK yang mampu diterima di dunia usaha dan dunia industri							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.4	3	Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas Pengawasan Ketenagakerjaan	1	Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan							



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.4	4	Meningkatkan suasana Ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial yang harmonis	1	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.4	5	Meningkatkan hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi ( <i>research based policy</i> ).					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.4	6	Optimalisasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1	Pelaksanaan Inovasi dan Teknologi melalui Penelitian, Pengembangan dan perekayasaan, serta Diseminasi Hasil Kelitbangan, dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif.					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.4	7	Optimalisasi perekayasaan Inovasi dan Teknologi	1	Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan perekayasaan melalui kerjasama dengan Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.4	8	Optimalisasi uji coba, penerapan rancang bangun dan diseminasi hasil kelitbangan	1	Penyelenggaraan uji coba dan rancang bangun teknologi dan diseminasi untuk optimalisasi pemanfaatan hasil perekayasaan					
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.4	9	Optimalisasi Pengembangan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif.					



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.4	10	Penciptaan iklim investasi	1	Kemudahan dan fasilitas investasi serta pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi	M.7	Meningkatkan nilai investasi/ penanaman modal	S.2	1	Meningkatkan promosi dan kemitraan investasi	1	Peningkatan promosi investasi di sektor primer dan jasa berbasis IT
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.4			2	Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha	M.7	Meningkatkan nilai investasi/ penanaman modal		2	Meningkatkan pelayanan investasi	1	Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dan kearifan lokal
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.4			3	penyusunan regulasi peningkatan layanan investasi yang lebih efisien, transparan dan akuntabel							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.4			4	Peningkatan upaya promosi investasi							
M.1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	S.4											
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1	1	Meningkatkan fasilitasi pembangunan dan pengembangan bina spiritual masyarakat sebagai landasan utama dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan	1	Meningkatkan fasilitasi dalam upaya revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan keagamaan	M.1	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradab dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	S.1	1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama	1	Penguatan Tata kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya



PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN								
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1			2	Meningkatkan pemberdayaan sarana keagamaan sebagai sentra aktifitas, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan	M.1	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	S.1	2	Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.	1	Peningkatan kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multy culture
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1			3	Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga keagamaan dalam menunjang pembangunan daerah							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1	2	Optimalisasi pelaksanaan koordinasi kebijakan dalam penigkatan Kesejahteraan Rakyat	1	Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	M.1	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	S.1	2	Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.	3	Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1			2	Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,	M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.2	1	Menurunkan angka kemiskinan	1	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN						
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
					Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1			3							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1	3	Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran perda	1							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1	4	Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait	1	M.1	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	S.2	2	Meningkatkan pengendalian gangguan trantibum dan linmas	1	Penguatan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam pengendalian trantibum dan linmas



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1	5	Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat	1	Peningkatan keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kab/Kota	M.1	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	S.2	1	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan	1	Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi serta kemitraan dengan masyarakat dan instansi lainnya
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1	6	Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur serta peningkatan kuantitas dan kualitas Aparatur	1	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur serta kuantitas dan kualitas aparatur							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1	7	Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1	Peningkatan keaktifan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran di Kab/Kota	M.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.7	1	Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran	1	Peningkatan penguatan jumlah lokasi/nagari pengurangan resiko bencana
							M.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.7	1	Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran	2	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi korban bencana
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1	8	Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat	1	Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial							



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1	9	Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat	1	Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (KetaneK)							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1	10	Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	1	Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur	M.1	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	S.1	2	Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.	2	Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila





PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1	11	Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama	1	Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur					
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1	12	Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	1	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya					
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1	13	Terwujudnya Ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	1	Membuat Peta jalan ABS SBK					
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1			2	Pembentukan kurikulum yang bermuatan kearifan lokal sinergis antara Dikdas dan dikmen.					
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1			3	Menyelenggarakan sekolah adat/pelatihan pemangku adat.					
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1			4	Meningkatkan kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan ditengah-tengah masyarakat.					
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.1			5	Peningkatan kualitas kompetensi guru					
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.2	1	Penguatan Pengembangan bahasa dan sastra	1	Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah					



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN								
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.2	2	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Budaya Gemar Membaca Tingkat Provinsi	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	M.4	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	S.1	1	Meningkatkan gerakan literasi dan budaya membaca	1	Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.2			2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.2	3	Menjadikan Perpustakaan, Museum dan Taman Budaya sebagai pusat Pendidikan dan wisata Ipteks	1	Meningkatkan fungsi Perpustakaan, Museum dan Taman Budaya.							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.2			2	Meningkat pelayanan Perpustakaan, Museum dan Taman Budaya berbasis digital							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.2			3	Mengintegrasikan bangunan Perpustakaan, Museum dan Taman Budaya.							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.2	4	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan,	1	Pengelolaan Kebudayaan masyarakat dan Pembinaan lembaga adat yang Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.2			2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.2			3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.2	5	Meningkatkan Pengembangan Kesenian Tradisional,	1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.2	6	Meningkatkan Pembinaan Sejarah	1	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.2	7	Meningkatkan Pelestarian Dan Pengelolaan Warisan Budaya (Cagar Budaya)	1	Penetapan dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, serta Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.2	8	Meningkatkan Pengelolaan Permuseuman	1	Pengelolaan Museum Provinsi							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3	1	Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk	1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3	2	Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal.	M.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.2	1	Menurunkan Total fertility rate (FTR)	1	Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3			2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	M.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.2	1	Menurunkan Total fertility rate (FTR)	2	Peningkatan advokasi dan menggerakkan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN						
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3	3	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	1							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3			2							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3	4	Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	1	M.1	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradab dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	S.2	3	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	1	Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3			2							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3			3							



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3	5	Peningkatan perlindungan hakperempuan,	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	M.1	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	S.2	4	Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3			2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3			3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3	6	peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3			2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							



PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN						
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3			3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3	7	Optimalisasi Pengelolaan Sistem data gender dan Anak untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi	1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3	8	Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya	1	Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3			2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3	9	Peningkatan perlindungan khusus anak,	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3			2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN						
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
M.2	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	S.3			3							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1	1	Optimalisasi Kelembagaan bidang pertanian (BUMD pertanian)	1							Mendorong pengelolaan dan pembentukan BUMD profesional bidang Pertanian
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1	2	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan	1	M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.1	1	Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman	1	Peningkatan pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			2							Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			3							Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			4							Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			5							Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			6							Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			7							Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
					petani dan petugas						
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			8 Pengawasan pupuk bersubsidi						
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			9 Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura						
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			10 Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada						
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			11 Rehabilitasi lahan dan air						
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			12 Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jalan usaha tani						
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1	3	Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna	1 Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian, peternakan dan perikanan						
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			2 Mendorong tumbuh petani milenial						
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			3 Penerapan Inovasi dan Teknologi Pertanian						
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1	4	Mengembangkan Usaha - Usaha Ekonomi Berbasis kelautan dan Perikanan	1 Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan	M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.1	3	Meningkatkan hilirisasi produktivitas perikanan tangkap	1 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap
						M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.1	3	Meningkatkan hilirisasi produktivitas perikanan tangkap	1 Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1	5	Pengembangan <i>system value chain</i>	1	Meningkatkan akses permodalan							
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			2	Peningkatan kapasitas kelembagaan tani							
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			3	Peningkatan pengawasan Agro input							
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			4	Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas pertanian, peternakan dan perikanan							
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			5	Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian perkebunan dan Perikanan							
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			6	Meminimalisir resiko kerugian usaha tani							
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			7	Pengintegrasian program pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lingkungan hidup							
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1	6	Fasilitasi pembangunan industri hilir pertanian, perikanan, peternakan dan hasil kehutanan	1	Memfasilitasi pembangunan industri benih tanaman pangan dan perkebunan							
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			2	Memfasilitasi pembangunan pasca panen tanaman pangan, perkebunan dan produk kehutanan non kayu							
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.1			3	Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan dan peternakan	M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.1	3	Meningkatkan hilirisasi produktivitas perikanan tangkap	1	Peningkatan sarana dan prasarana produksi pengolahan ikan serta perluasan pemasaran produk hasil perikanan



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.2	1	Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok;	1	Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau.							
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.2			2	Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis							
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.2	2	Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat;	1	Penyediaan cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat;							
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.2	3	Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal;	1	Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan;	M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.3	1	Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat	1	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.2			2	Pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal;	M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.4	1	Meningkatkan perekonomian desa/nagari	1	Pemanfaatan potensi desa/nagari
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.2	4	Pemberdayaan daerah rentan pangan	1	Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan;							
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.2	5	Peningkatan keamanan pangan	1	Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen;							
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.2			2	Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar ditingkat produsen dan konsumen							



PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN						
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.2			3	Pengawasan peredaran sarana pertanian					
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.2			4	Pengendalian kesehatan dan keamanan produk hewan					
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.2			5	Pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan					
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.3	1	Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan sosial dalam bentuk HTR, HN dan HKm	1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.3			2	Peningkatan kapasitas SDM petani hutan					
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.3									
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.3	2	Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan	1	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mekanisme perhutanan sosial					
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.3			2	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.3			3	Perbenihan Tanaman Hutan					
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.3			4	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.3			5	Penegakan hukum dalam pengamanan dan perlindungan hutan					



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.3	Tujuan Meningkatkan kesejahteraanpetani	S.3			6	Peningkatan pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak /pengembangan KPH							
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.1	1	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan	1	Penataan,pembinaan dan pengembangan pasar	M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.1	7	Mengembangkan pusat perdagangan dan terminal terpadu sebagai sentra ekonomi masyarakat	1	Peningkatan sarana dan prasarana di pusat perdagangan
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.1			2	Pengembangan system pedagang digital							
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.1			3	Penguatan kelembagaan perdagangan							
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.1	2	Peningkatan perlindungan konsumen Pengawasan perdagangan, dan standardisasi mutu komoditi potensial	1	Peningkatan pengawasan barang dan jasa yang beredar							
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.1			2	Peningkatan kuantitas penyelesaian sengketa konsumen							



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.1			3	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan konsumen					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.1			4	Peningkatan pengawasan komoditi potensial, sarana dan prasarana pengujian komoditi potensial					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.1	3	Pengembangan pasar ekspor	1	Peningkatan nilai tambah dan produk ekspor					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.1			2	Penguatan kerjasama perdagangan regional dan internasional					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.2	1	Peningkatan daya saing produk IKM	1	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan produk					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.2			2	Peningkatan kualitas, kontinuitas produksi, dan sertifikasi produk					



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.2			3	Peningkatan promosi dan pemasaran produk							
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.2			4	Peningkatan kapasitas pelaku IKM							
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.2	2	Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah	1	Peningkatan sarana dan prasarana untuk sentra IKM							
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.2			2	Peningkatan Kerjasama pengembangan sentra IKM							
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.2			3	Pendampingan dan fasilitasi sentra IKM							
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.3	1	Peningkatan kapasitas UMKM dan wirausaha	1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku Koperasi dan UMKM	M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.1	6	Meningkatkan pengembangan UMKM	1	Peningkatan pembinaan pedagang kecil dan menengah agar lebih berkembang dan berdaya saing



PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.3		2	Fasilitasi penumbuhan <i>millenial enterpreuner</i> dan <i>Women enterpreuner</i>					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.3		3	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan usaha, promosi dan pemasaran produk UMKM					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.3		4	Peningkatan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk UMKM					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.3		5	Pengembangan usaha dan diversifikasi produk UMKM					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.3		6	Peningkatan Kemitraan UMKM dengan pengusaha besar					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.3		7	Fasilitasi penerbitan sertifikat hak paten terhadap produk UMKM					



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.3			8	Fasilitasi pelatihan berkelanjutan					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.3	2	Peningkatan akses pembiayaan koperasi dan UMKM	1	Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui KUR, ZISWAF dan skema pembiayaan lainnya					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.3			2	Membentuk Lembaga waqaf pemandu					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.3			3	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang waqaf					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.3			4	Meningkatkan kompetensi nadzir dalam bidang usaha bisnis secara professional					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.3			5	Memperkuat sinergi antar pengelola zakat, infaq, waqaf dan sedekah					





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.3	3	Penguatan kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UMKM	1	Penguatan kelembagaan pengawasan Koperasi dan UMKM	M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.1	8	Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	1	Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.4	1	Penumbuhan dan Peningkatan SDM <i>entrepreneur</i>	1	Penumbuhan dan Peningkatan kualitas SDM <i>entrepreneur</i>	M.4	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	S.4	1	Meningkatkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan kepemudaan dalam pembangunan	1	Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.4			2	Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan <i>entrepreneur</i>	M.4	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	S.4	2	meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda	1	Peningkatan kualitas SDM pemuda
							M.4	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	S.4	3	Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah	1	Pembibitan atlet muda secara berjenjang dan terintegrasi;
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.4	2	Peningkatan fasilitasi <i>entrepreneur</i>	1	Peningkatan kolaborasi melalui sinergisitas dalam rangka pemberdayaan <i>entrepreneur</i>							
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.4			2	Peningkatan fasilitasi akses pembiayaan dan akses pasar bagi <i>entrepreneur</i>							



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.4			3	Peningkatan inovasi, branding dan sertifikasi produk					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.4			4	Peningkatan digitalisasi produk bagi pelaku <i>entrepreneur</i>					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.5	1	Peningkatan layanan investasi dan penanaman modal	1	Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.5			2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.5			3	Pengembangan Layanan Investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.5			4	Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi					



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.5	2	Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat	1	Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.5			2	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.5			3	Peningkatan Upaya Promosi Investasi					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.6	1	Meningkatkan kontribusi ekonomi digital	1	Peningkatan industri kecil dan menengah, UMKM yang berkompeten dan melekat teknologi digital					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.6			2	Penumbuhan dan pengembangan <i>marketplace</i>					
M.4	Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	S.6			3	Fasilitasi penumbuhan pelaku <i>e-commerce</i>					



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.5	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	S..1	1	Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata berbasis aglomerasi	1	Membangun industri pariwisata melalui 1 (satu) destinasi wisata berkelas internasional dan 19 (sembilan belas) destinasi wisata unggulan	M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.1	9	Mengembangkan potensi wilayah dengan klasterisasi industri	1	Pengembangan Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing
M.5	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	S..1			2	Memfasilitasi peningkatan destinasi wisata yang memenuhi aspek 3A (Amenitas, Aksesibilitas, Atraksi) dan 2P (Pemasaran dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah)							
M.5	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	S..1			3	Mengembangkan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya dan buatan (Agrowisata, Ekowisata, Geopark, OCMH, Desa Wisata, dan Wisata Halal)	M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.1	8	Mengembangkan dan merevitalisasi Kawasan Wisata	1	Pelestarian kawasan wisata
M.5	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	S..1			4	Memfasilitasi pengusulan KEK pariwisata							
M.5	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	S..1			5	Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata							
M.5	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	S..1			6	Mengintensifkan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Sustainability)							



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.5	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	S..1	2	Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata	1	Meningkatkan sinergi promosi di bidang pariwisata dengan sektor terkait di dalam dan luar negeri	M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.1	9	Melakukan promosi wisata dan ekonomi kreatif.	1	Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
M.5	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	S..1			2	Meningkatkan efektivitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi							
M.5	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	S..1	3	Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Pariwisata	1	Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan	M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.1	13	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif	1	Pemberdayaan Pokdarwis dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif
M.5	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	S..1			2	Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi SDM pelaku wisata							
M.5	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	S.2	1	Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif	1	Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat	M.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.1	12	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif	1	Pengoptimalan alokasi dana nagari untuk peningkatan sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif
M.5	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	S.2			2	Mendorong pemanfaatan dan perlindungan HKI produk ekraf							
M.5	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	S.2			3	Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi							



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.5	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	S.2	2	Meningkatkan kerjasama dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	1	Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif							
M.5	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	S.2			2	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.1	1	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1	Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.1	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan	1	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.1			2	Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan Provinsi							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.1	2	Mengintegrasikan sistem transportasi antar intermoda	1	Pengembangan dan pengawasan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah – daerah terpencil	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.1	2	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat	1	Pemerataan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.1			2	Dukungan keterpaduan transportasi antar moda ( bandara, Pelabuhan, Terminal dan Stasiun Kereta Api)							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.1			3	Pengembangan jaringan pelayanan angkutan							



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.1			4	Penataan sistem perijinan transportasi					
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.1			5	Perbaikan sarana dan prasarana terminal Tipe B					
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.1			6	Pengendalian angka kecelakaan melalui pengawasan, penyediaan sarana fasilitas keselamatan dan peningkatan kesadaran masyarakat					
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.1			7	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan					
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.1	3	Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis	1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan baru dan jalan lama termasuk lintas pantai barat sumatera barat, sesuai master plan yang telah ada dan interkoneksi dan koneksi antar daerah					
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.1			2	Dukungan akses transportasi ke sentra produksi pertanian dan perikanan, destinasi wisata, industri dan UMKM					
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.1	4	Pemenuhan kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah	1	Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan					



PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN								
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.1			2	Peningkatkan tata kelola ketenagalistrikan yang aman, andal dan akrab lingkungan							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.1	5	Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional	1	Meningkatnya dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.4	1	Meningkatkan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan	1	Pengembangan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.2	1	Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam mitigasi bencana	1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi bencana	M.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.6	1	Melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana	1	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.2	2	Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana	1	Pengembangan nagari dan desa siaga bencana	M.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.8	1	Meningkatkan bantuan sosial kemasyarakatan untuk lansia, gelandangan, pengemis, disabilitas terlantar	1	Peningkatan kesejahteraan sosial
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.2			2	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat	M.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.9	1	Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan	1	Peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.2	3	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1	Penyediaan dan perluasan informasi kebencanaan							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.2			2	Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan bencana							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.2	4	Peningkatan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	1	Penanganan bencana banjir, longsor, gempa bumi, yang berefek pada infrastruktur jalan							





PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN						
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.2			2	Meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi					
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.2			3	Pemulihan daerah pasca bencana					
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3	1	Peningkatan Pelestarian dan pengelolaan lingkungan	1	Pemulihan media lingkungan yang rusak/tercemar					
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			2	Pencegahan terjadinya degradasi lahan/sumber daya alam					
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			3	Pengendalian dan pengurangan beban pencemaran					
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			4	Penanganan limbah B3					
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			5	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan					
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			6	Rehabilitasi Hutan dan lahan					
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			7	Peningkatan upaya Adaptasi mitigasi perubahan iklim					
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			8	Optimalisasi penanganan sampah sebagai sumber energi alternatif ( <i>waste to energy</i> )					



PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN								
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			9	Optimalisasi pengurangan sampah dan meningkatkan efektifitas pengolahan sampah	M.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.4	1	Meningkatkan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	1	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			10	Penanganan terpadu untuk penyelamatan danau prioritas nasional (Danau Maninjau dan Danau Singkarak)							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			11	Meningkatkan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			12	Meningkatkan pengawasan pemakaian air tanah pada Zona Konservasi							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3	2	Pengarusutamaan perencanaan dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Peningkatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan pendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.3	2	Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	3	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			2	Rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan dan perlindungan hutan	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.3	3	Menyiapkan dan menerapkan regulasi tentang lingkungan hidup	1	Pengembangan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			3	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.3	3	Menyiapkan dan menerapkan regulasi tentang lingkungan hidup	2	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup



PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN								
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			4	Pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.3	6	Mengembangkan regulasi tentang RTH bagi pemukiman	1	Penyusunan regulasi tentang RTH bagi pemukiman
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			5	Pengelolaan sampah dan limbah yang akrab lingkungan	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.3	6	Mengembangkan regulasi tentang RTH bagi pemukiman	2	Peningkatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			6	Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			7	Peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3	3	Implementasi valuasi ekonomi lingkungan	1	Pengembangan ekosistem esensial dan kawasan konservasi							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3	4	Peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman	1	Penyediaan PSU Kawasan Permukiman yang aman nyaman berkelanjutan	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.3	5	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum	1	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			2	Fasilitasi penyediaan perumahan layak huni	M.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	S.5	1	Menyediakan rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	1	Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			3	Mengurangi luasan kawasan kumuh	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.3	4	Mengembangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penataan kawasan kumuh	1	Pengurangan luas areal permukiman kumuh
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3	5	Peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan pada Bauran energi daerah	1	peningkatan ketersediaan infrastruktur pemanfaatan Energi Terbarukan							



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN								
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.3			2	Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.4	1	Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan	1	Pembangunan gedung untuk kepentingan strategis							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.4			2	Penataan bangunan dan lingkungan							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.4			3	Pembangunan SPAM Regional							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.4			4	Pembangunan dan pengelolaan TPA Regional	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.3	2	Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	2	Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.4			5	Pembangunan Drainase primer	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.3	1	Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	1	Penyediaan dan Peningkatan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
							M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.2	2	Meningkatkan Infrastruktur pengendalian banjir	2	Peningkatan infrastruktur bantaran dan tanggul sungai akibat daya rusak air
							M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.3	5	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum	2	Peningkatan drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air perumahan tidak tersumbat
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang	S.4			6	Pembangunan IPLT Regional							



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
	handal dan merata												
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.4			7	Memfasilitasi penyelesaian masalah dan konflik pertanahan							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.4			8	Penyediaan PSU Kawasan Permukiman yang aman nyaman berkelanjutan							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.4			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.4	2	Pembangunan Infrastruktur Pertanian	1	Pengembangan dan rehabilitasi Irigasi dan pengairan kewenangan provinsi serta peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.2	1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten	1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.4			2	Peningkatan daya tampung air (pembangunan embung)							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.5	1	Tersusunnya Rencana Tata Ruang yang berkualitas	1	Penyusunan RTR Provinsi dan fasilitasi penyusunan RRTR Kab/Kota							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.5			2	Pembinaan perencanaan tata ruang							
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.5	2	Terlaksananya sinkronisasi rencana pembangunan dengan program penataan ruang	1	Pengendalian pemanfaatan ruang	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.4	2	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	1	Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.5			2	Penyusunan regulasi RTR tingkat provinsi (Perda, Pergub)							



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.5			3	Penyebaran informasi perencanaan tata ruang	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.4	3	Meningkatkan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital	1	Penyediaan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital
M.6	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	S.5			4	Peningkatan pengelolaan penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW	M.2	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	S.4	4	Meningkatkan fasilitasi kepengurusan sertifikat tanah Pemda	1	Pendataan kepemilikan lahan bersertifikat milik Pemda
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	1	Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	1	Meningkatkan peran dari Perangkat Daerah yang menjadi pengampu pelaksanaan 8 area perubahan (area penataan organisasi, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, penguatan ketatalaksanaan, manajemen perubahan dan peraturan perundang-undangan dan penataan Sumber Daya Aparatur).							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1	Melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi) sesuai Peraturan yang berlaku							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan	S.1											



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
	aparatur yang melayani										
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	3	Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas.	1	Mengoptimalkan Pelaksanaan Musrenbang					
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	4	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial	1	Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan					
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1			2	Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.					
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1			3	Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman indikator sesuai bidang urusan					
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	5	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1	Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah					
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1			2	Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)					



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1			3	Pemanfaatan data & informasi yang valid, mudah diakses dan mutakhir berbasis Satu Data							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	6	Peningkatan kuantitas APIP	1	Meningkatkan pemenuhan Rasio Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui penerimaan CPNS, Impassing, dan pengangkatan pejabat fungsional baru							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	7	Peningkatan kualitas APIP	1	Meningkatkan kompetensi APIP melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi dan Kerjasama Pengawasan							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	8	Optimalisasi SPIP	1	Meningkatkan Implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	9	Meningkatkan peran dan layanan APIP	1	Peningkatan kegiatan pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.1	3	Mengoptimalkan peran APIP	1	Peningkatan kapabilitas APIP
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	10	Meningkatnya pelaksanaan TLHP internal dan eksternal	1	Peningkatan pembahasan TLHP internal dan eksternal APIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara periodik	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.1	4	Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah	1	Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN								
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	11	Meningkatkan validasi data keuangan dan aset daerah	1	Peningkatan efektifitas dan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi Perda/Pergub/Kebijakan	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.1	2	Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah	1	Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	12	Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah	1	Peningkatan pengawasan aset daerah	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.2	3	Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan	1	Peningkatan manajemen kearsipan berbasis IT pada masing-masing Perangkat Daerah
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	13	Meningkatkan asistensi dan rekonsinasi data anggaran	1	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.1	1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1	Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	14	Meningkatkan Pelatihan/bimtek pengelolaan keuangan dan aset daerah	1	Sosialisasi peraturan/kebijakan pengelolaan keuangan daerah							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	15	Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal	1	Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan stakeholder terkait							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	16	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan	1	Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.1	5	Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	1	Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	17	Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah	1	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi ASN yang berkelanjutan							



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	18	Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan	1	Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi belanja langsung							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	19	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan	1	Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	20	Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	1	Pelaksanaan Otonomi Daerah terkait fasilitasi admintrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan serta evaluasi dan penyelenggaran pemerintahan	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.1	9	Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1			1	Fasilitasi Kerjasama Daerah terkait fasilitasi kerjasama antar pemerintah , fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	21	Mewujudkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1			2	Mewujudkan PAD untuk mendukung tata kelola pemerintahan							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1			3	Melaksanakan pengawasan terintegrasi antar SKPD berbasis teknologi informasi dan komunikasi							



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN								
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1			4	Melaksanakan pemberian penghargaan dan pembinaan kepada ASN							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1			5	Meningkatkan partisipasi masyarakat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1			6	Meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang mendukung tata kelola birokrasi yang bebas KKN							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	22	Meningkatkan layanan perizinan dan investasi di daerah	1	Penataan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.1	6	Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	1	Peningkatan pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan efisien
							M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.1	6	Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	2	Peningkatan penataan Produk Hukum Kab Padang Pariaman
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1	23	Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah	1	Meningkatkan akurasi data objek pajak kendaraan							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1			2	Menyesuaikan besaran nilai jual kendaraan bermotor							



PROVINSI SUMATERA BARAT					KABUPATEN PADANG PARIAMAN						
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1		3							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1		4							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1		5							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1		6							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1		7							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1		8							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1		9	M.7	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan	S.1	1	Meningkatkan PAD	1	Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis IT



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1			10	Konversi Bank Nagari menjadi bank Syariah				
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.1								
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.	1	Pembentukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	1	Melaksanakan penataan Organisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tepat fungsi, tepat proses dan akuntabel yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.	2	Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Merit	1	Menetapkan dokumen analisis Jabatan dan analisis Beban Kerja				
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.			2	Menetapkan Dokumen Kelas Jabatan				
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.			3	Menetapkan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan				
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.	3	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	Meningkatkan penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.	4	Peningkatan Koordinasi dalam pengelolaan SPBE	1	Meningkatkan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.2	2	Meningkatkan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi	1	Peningkatan sarana dan prasarana IT
							M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.2	2	Meningkatkan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi		
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.	5	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang berkualitas	1	Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.2	2	Meningkatkan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi	2	Peningkatan Pengamanan data daerah
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.			2	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral berdasarkan Prinsip Satu Data	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.2	2	Meningkatkan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi		
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.			3	Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.1	8	Meningkatkan kualitas sistem pengadaan barang dan jasa	1	Peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.	6	Peningkatan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1	Pembangunan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah mendukung SPBE							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.	7	Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Kepegawaian Daerah	1	Peningkatan profesionalitas ASN melalui penerapan Sistem Merit dengan aspek perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan karir, promosi dan mutasi. Manajemen Kinerja, Penggajian,	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.2	1	Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah	1	Peningkatan kapasitas aparatur dan Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
					penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta Sistem Informasi								
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.			2	Penguataan implementasi manajemen ASN melalui penerapan manajemen talenta	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.2	1	Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah	2	Peningkatan sistem manajemen kepegawaian
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.	8	Peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mewujudkan ASN dan stakeholder yang profesional dan berkompeten	1	Pengembangan Kompetensi Teknis	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.2	1	Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah	3	Peningkatan Budaya kerja yang profesional
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.			2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.	9	Terwujudnya kinerja birokrasi	1	Mewujudkan transformasi pemerintah daerah menuju <i>e-Government</i>							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.			2	Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.			3	Meningkatkan produktivitas kerja ASN							



PROVINSI SUMATERA BARAT						KABUPATEN PADANG PARIAMAN							
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.2.			4	Meningkatkan kualitas dan capaian perencanaan	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.1	7	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah	1	Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
							M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.1	7	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah	2	Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi policy brief (penerapan kebijakan)
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.3	1	Terwujudnya kualitas pelayanan Publik	1	Meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik terkait dengan kebijakan dan proses pelayanan publik	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.3	1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1	Peningkatan manajemen
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.3			2	Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berdasarkan elektronik dan teknologi informasi	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.3	1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2	pengembangan inovasi pelayanan publik
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.3			3	Meningkatkan inovasi kerja ASN di SKPD	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.3	1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	3	Peningkatan Tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.3	2	Meningkatkan Ketatalaksanaan Pelayanan Publik	1	Meningkatkan penataan proses bisnis unit kerja pelayanan	M.5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	S.3	2	Meningkatkan pemanfaatan Peta Proses Business	1	Penerapan SOP di sektor pelayanan publik
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.3			2	Meningkatkan penataan Standar Pelayanan Publik							
M.7	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	S.3			3	Meningkatkan Penataan SOP Pelayanan Publik							





**TABEL 6.4 (Tabel T-C.14)  
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 S.D 2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Misi 1: Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban																
Tujuan 1: Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan																
	Sasaran 1: Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	N/A	26%	4,333,284,702	27%	4,392,860,239	28%	3,923,081,035	29%	3,954,682,323	30%	3,945,243,168	31%	3,954,967,234	Sekretariat Daerah Bagian Kesra
		Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	N/A	35%		36%		38%		38%		40%		42%	Disdikbud	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	N/A	100%	2,554,162,818	100%	2,496,470,473	100%	2,436,690,881	100%	2,574,051,495	100%	2,653,947,606	100%	2,702,611,645	Sekretariat Daerah Bagian Kesra
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya	5	6	1,283,620,833	6	1,280,234,246	7	844,243,530	7	849,366,709	7	834,028,804	7	808,878,049	Disdikbud
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISONAL	Rasio Pengembangan Kesenian Tradisional Masyarakat Pelakunya	5	6	245,799,734	6	222,500,604	7	208,616,162	7	209,882,121	7	206,092,060	7	199,877,201	Disdikbud
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rasio Pembinaan Sejarah Lokal	45	50	70,228,495	50	65,038,638	50	61,932,923	50	62,308,755	50	61,183,580	50	59,338,544	Disdikbud
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya	45	50	179,472,822	50	328,616,277	50	371,597,538	50	259,073,243	50	189,991,118	50	184,261,795	Disdikbud
	Sasaran 2: Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	persentase penegakkan perda	50%	62,5%	2,195,051,826	65%	2,852,186,913	67,5%	3,346,333,623	70%	3,299,412,533	72,5%	3,241,441,677	75%	3,546,856,851	Satpol-PP Damkar
		persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	50%	62,5%		65%		67,5%		70%		72,5%		75%	Satpol-PP Damkar	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.92	93.3		93.6		94		94.3		94.7		95	Dinsos P3A	
		Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	12%	12%		13%		13%		14%		14%		14%	Dinsos P3A	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	60%	62%	1,513,542,957	65%	1,244,291,841	67.5%	1,496,169,036	70%	1,329,800,002	72.5%	1,365,359,896	75%	1,689,586,966	Satpol-PP Damkar
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	40%	40%	81,980,844	45%	407,347,260	46%	409,409,218	47%	423,043,651	48%	431,505,250	50%	406,000,565	Dinsos P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	12%	12%	74,334,560	13%	109,538,759	13%	108,871,560	14%	113,467,522	14%	111,418,520	14%	109,307,844	Dinsos P3A



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Penurunan angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	12%	12%	74,124,616	13%	95,846,414	13%	92,573,422	14%	96,414,599	14%	99,181,804	14%	97,440,136	Dinsos P3A
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	40%	40%	16,071,401	45%	273,846,898	46%	40,419,381	47%	40,664,661	48%	41,862,450	50%	40,600,056	Dinsos P3A
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	40%	40%	78,018,396	45%	75,307,897	46%	76,275,284	47%	80,017,559	48%	78,572,598	50%	76,827,799	Dinsos P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penurunan angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tertangani	12%	12%	42,366,510	13%	41,077,035	13%	40,419,381	14%	41,976,424	14%	41,218,412	14%	40,600,056	Dinsos P3A
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	N/A	-	0	-	0	100%	107,567,709	100%	108,220,469	100%	106,266,218	100%	103,061,682	Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase laporan pertanggungjawaban partai politik tepat waktu	100%	100%	25,773,858	100%	22,612,908	100%	215,135,417	100%	298,426,141	100%	212,532,437	100%	206,123,364	Kesbangpol
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas / kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	100%	100%	8,232,340	100%	11,232,857	100%	45,634,785	100%	49,191,122	100%	48,302,827	100%	93,353,584	Kesbangpol
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase pelaksanaan pembinaan penanganan kasus narkoba	N/A	100%	269,209,232	100%	236,192,949	100%	224,914,300	100%	226,279,162	100%	222,193,002	100%	215,492,608	Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	N/A	100%	11,397,109	100%	334,892,095	100%	488,944,130	100%	491,911,222	100%	483,028,265	100%	468,462,190	Kesbangpol
Misi 2: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang																
Tujuan 1: Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan																
	Sasaran 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	64.28%	65,3%	338,713,145,485	67%	317,842,077,657	69%	283,140,861,892	71%	284,912,403,887	73%	279,784,492,891	75%	271,412,594,427	DUPR
		Rasio Konektivitas kabupaten	1:54	1:54		1:57		1:59		1:61		1:63		1:64		Dishub
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	64.28%	65,3%	328,569,437,430	67%	308,811,633,900	69%	274,507,542,800	71%	276,173,355,080	73%	271,186,203,350	75%	263,008,382,732	DPUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	85%	85%	10,135,904,888	87%	8,905,501,110	90%	8,507,497,469	92%	8,605,576,895	93%	8,460,626,485	100%	8,263,673,038	DISHUB



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	21	21	7,803,166	18	124,942,647	16	125,821,623	14	133,471,911	12	137,663,056	10	140,538,657	DISHUB
	Sasaran 2. Meningkatkan Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	50,98%	54,82%	0	58,72%	0	62,72%	23,306,336,843	66,74%	27,038,720,146	71,04%	27,468,207,340	75,54%	27,514,345,979	DPUPR
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	6.67%	7.02%		7.43%		7.95%		8.53%		9.29%		9.94%		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	50,98%	54,82%	0	58,72%	0	62,72%	23,306,336,843	66,74%	27,038,720,146	71,04%	27,468,207,340	75,54%	27,514,345,979	DPUPR
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	6.67%	7.02%		7.43%		7.95%		8.53%		9.29%		9.94%		
	Sasaran 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	20%	55%	17,120,365,868	60%	30,141,266,570	70%	30,234,374,938	75%	32,377,981,857	80%	33,777,680,236	85%	33,908,081,324	DPUPR
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.38	66.93		67		67.09		67.17		67.25		68.95	DLHKPP	
		Persentase areal kawasan kumuh	0,66%	0,55%		0,4%		0,33%		0,22%		0,11%		0,00%	DLHKPP	
		Luas Ruang Terbuka Hijau	850 Ha	852 Ha		854 Ha		856 Ha		858 Ha		860 Ha		862 Ha	DLHKPP / Dinsos P3A	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	20%	55%	8,583,482,773	60%	7,530,789,684	70%	7,171,180,567	75%	7,214,697,916	80%	7,084,414,554	85%	6,870,778,792	DPUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah	N/A	10%	7,803,166,157	20%	6,846,172,440	25.00%	6,519,255,061	30%	6,558,816,288	35%	6,440,376,868	40%	6,246,162,538	DPUPR
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio permukiman layak huni	N/A	N/A	0	0.1	3,835,910,418	0.11	6,830,875,453	0.12	7,577,400,457	0.13	8,261,715,446	0.14	8,496,654,900	DLHKPP
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	63%	63.50%		64%		64.50%		65%		65.5		66%		
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	N/A	N/A	0	20%	5,331,456,788	21%	6,152,546,964	22%	7,272,087,559	23%	8,203,430,035	24%	8,986,666,351	DLHKPP
		Persentase lingkungan permukiman kumuh	0.66%	0.66%		0.65%		0.64%		0.63%		0.62%		0.61%		
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	N/A	N/A		1.23%		3.11%		3.85%		4.66%		5.59%		
		Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	N/A	N/A		1.75%		1.72%		1.70%		1.68%		1.66%		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang tertata	N/A	N/A	0	20%	794,156,003	20.10%	756,233,587	20.20%	859,204,934	20.30%	843,689,370	20.40%	818,247,292	DLHKPP
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	N/A	N/A		50%		55%		60%		65%		70%		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pengembangan Perumahan yang telah tersertifikasi	N/A	N/A	0	3.4%	23,961,604	6.80%	22,817,393	10%	22,955,857	10%	22,541,319	16.90%	21,861,569	DLHKPP
		Persentase Pengembangan Perumahan yang telah teregistrasi	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani	0.0227	0.0019	165,270,860	0.0224	4,361,833,133	0.0223	1,588,377,092	0.0222	1,649,101,196	0.022	1,679,259,332	0.0218	1,382,751,449	DLHKPP
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0.422	0.419		0.417		0.414		0.412		0.41		0.408		
		Persentase cakupan area pelayanan	0.28%	0.28%		0.30%		0.32%		0.34%		0.36%		0.38%		
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	156,063,323	Ada	308,077,760	Ada	228,173,927	Ada	196,764,489	Ada	193,211,306	Ada	31,230,813	DLHKPP
		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten / kota	Tidak Ada	Tidak Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak Ada	Tidak Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	55.41	55.79	83,883,857	55.89	360,622,133	55.99	222,828,138	56.09	237,297,973	56.19	248,469,740	56.29	254,843,432	DLHKPP
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	93.32	91.83		91.93		92.06		92.16		92.26		96.36		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Keanekaragaman Hayati yang dikelola	100%	100%	229,017,347	100%	270,423,811	100%	284,565,483	100%	311,543,774	100%	329,425,277	100%	344,163,556	DLHKPP
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pelayanan pengawasan pengelolaan LB3 terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan	N/A		21,458,668		47,238,549		46,156,279		47,853,067		48,658,268		37,476,975	DLHKPP
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	31%	35%	58,523,746	40%	102,007,969	45%	97,136,900	50%	105,596,942	55%	103,690,068	60%	108,058,612	DLHKPP
		Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0 Orang	2 Orang		2 Orang		3 Orang		3 Orang		4 Orang		5 Orang		
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	N/A	N/A	0	1 Kelompok	20,538,517	1 Kelompok	19,557,765	1 Kelompok	19,676,449	1 Kelompok	19,321,131	1 Kelompok	18,738,488	DLHKPP
		Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	N/A	N/A		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		
		Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	N/A	N/A		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penetapan hak MHA	N/A	N/A		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok	
		Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	N/A	N/A		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok	
		Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana	N/A	N/A		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	0	0	2 Kali	123,231,104	2 Kali	117,346,591	2 Kali	118,058,693	2 Kali	115,926,784	2 Kali	112,430,926	DLHKPP	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Ada	Ada	11,704,749	Ada	54,769,380	Ada	52,154,040	Ada	59,029,347	Ada	57,963,392	Ada	56,215,463	DLHKPP	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUJ LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100%	100%	0	100%	61,615,552	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	57,963,392	100%	56,215,463	DLHKPP
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	100%	100%	7,794,388	100%	68,461,724	100%	66,496,402	100%	68,867,571	100%	67,623,957	100%	65,584,707	Dinsos P3A
		Sasaran 4: Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	22.00%	35%	37,845,715,342	43%	33,443,552,371	52%	31,634,685,183	65%	32,252,979,094	78%	30,092,660,914	87%	26,780,421,881	DPUPR
			Persentase Ketaatan terhadap RTRW	58.00%	63.00%		68.00%		70.00%		75.00%		83.00%		90.00%	DPUPR	
			Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya	25.00%	37.50%		50.00%		62.50%		75.00%		87.50%		100.00%	DPUPR	
			Persentase luas lahan Milik Pemd bersertifikat	8.70%	8.80%		8.90%		9%		9.50%		10%		10.50%	DLHKPP	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis	22.00%	35%	15,606,332,314	43%	13,692,344,881	52%	13,038,510,122	65%	13,117,632,575	78%	12,880,753,735	87%	12,492,325,076	DPUPR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	20.00%	25%	14,669,952,375	30%	12,528,495,566	40%	11,930,236,761	45%	12,330,574,621	50%	11,785,889,668	60%	11,430,477,444	DPUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	25.00%	37.50%	3,511,424,771	50.00%	3,217,701,047	62.50%	2,933,664,777	75.00%	2,951,467,329	87.50%	2,254,131,904	100.00%	936,924,381	DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	26,38%	30,00%	3,511,424,771	35,00%	3,217,701,047	40,00%	2,933,664,777	45,00%	2,951,467,329	50,00%	2,254,131,904	55,00%	936,924,381	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Penyelesaian Izin Lokasi	0	0	0	1	34,230,862	1	32,596,275	1	32,794,081	1	32,201,884	1	31,230,813	DLHKPP



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian kasus tanah Negara	100%	100%	0	100%	102,692,587	100%	114,086,964	100%	114,779,285	100%	112,706,595	100%	109,307,844	DLHPKPP
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	50%	60%	390,517,788	65%	273,846,898	70%	195,577,652	75%	196,764,489	80%	193,211,306	85%	187,384,876	DLHPKPP
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0%	0%	0	5%	205,385,173	15%	260,770,202	20%	327,940,814	20%	322,018,843	25%	374,769,752	DLHPKPP
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Cakupan pelayanan penetapan tanah ulayat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLHPKPP
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan pelayanan pengelolaan tanah kosong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DLHPKPP
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Cakupan pelayanan izin membuka tanah	5%	5%	39,015,831	5%	34,230,862	5%	32,596,275	5%	32,794,081	5%	32,201,884	5%	31,230,813	DLHPKPP
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Lahan milik Pemda yang Bersertifikat	8.70%	8.80%	117,047,492	8.90%	136,923,449	9%	162,981,377	9.50%	196,764,489	10%	225,413,190	10.50%	249,846,502	DLHPKPP
Misi 3: Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat																
Tujuan 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat																
	Sasaran 1: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Rp. Juta)	2,668,793.67	2,731,777.20	29,969,966,423	2,796,247.14	39,402,134,985	2,862,238.58	39,908,041,651	2,929,787.41	41,239,637,645	2,998,930.39	41,631,20,380	3,069,705.15	42,887,724,144	Distan-KP/Disnakeswa
		Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	7.20	7.35		7.50		7.65		7.80		7.95		8.10		Diskan
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	8.30	8.52		8.58		8.60		8.64		8.69		8.71		Disdagnakerkop & UKM
		Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	11,19	11,8		12,6		13,3		14,2		15,0		16,0		DPMPPT
		Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	208.872	250.000		265.000		275.000		300.000		330.000		350.000		Disparpora
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan	70%	75%	1,214,812,514	80%	3,871,510,515	85%	3,686,638,737	90%	3,709,010,611	95%	3,642,033,119	100%	3,532,204,915	Distan-KP
		Persentase penggunaan benih/bibit bermutu per tahun	30%	35%		40%		45%		50%		55%		60%		Distan-KP
		Jumlah pelepasan bibit/benih bersertifikat	0 Varietas	2 Varietas		1 Varietas		0 Varietas		0 Varietas		0 Varietas		0 Varietas		Distan-KP
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Daging (Ton)	2,305	2,340	3,074,447,466	2,375	2,717,930,459	2,410	2,604,442,397	2,446	2,639,923,556	2,483	2,592,251,689	2,520	3,123,081,269	Disnakeswan
		Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana	90%	91%	3,496,247,417	92%	4,594,763,449	93%	3,951,603,428	94%	3,975,583,205	95%	3,903,791,932	96%	3,786,070,198	Distan-KP
		Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	0%	5%		5%		5%		5%		5%		5%		Distan-KP
		Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif	N/A	11.40%		23.50%		35.20%		47.00%		58.82%		70.5%		Distan-KP
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase tersedianya prasarana pengembangan peternakan	6%	12.00%	78,031,662	17.00%	68,461,724	23.00%	65,192,551	29.00%	65,588,163	35.00%	64,403,769	48.0%	62,461,625	Disnakeswan



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan	250 Ha	300 Ha	101,441,160	350 Ha	188,269,742	400 Ha	195,577,652	450 Ha	213,161,529	500 Ha	225,413,190	550 Ha	249,846,502	Distan-KP	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses	N/A	0%	0	100%	17,115,431	100%	16,298,138	100%	16,397,041	100%	16,100,942	100%	15,615,406	Distan-KP	
		Persentase Pelayanan Perizinan Bidang Peternakan	N/A	100%	31,212,665	100%	27,384,690	100%	26,077,020	100%	26,235,265	100%	25,761,507	100%	24,984,650	Disnakeswan	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas kelompok tani	25 Poktan	34 Poktan	225,706,581	34 Poktan	247,660,288	34 Poktan	235,834,052	34 Poktan	237,265,179	34 Poktan	232,980,633	34 Poktan	225,954,930	Distan-KP	
		Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Peternak	0.30%	0.50%	117,047,492	0.50%	102,692,587	0.50%	97,788,826	0.50%	98,382,244	0.50%	96,605,653	0.50%	93,692,438	Disnakeswan	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan jumlah lumbung pangan masyarakat per tahun	N/A	0	0	1 Unit	68,461,724	1 Unit	65,192,551	1 Unit	65,588,163	1 Unit	64,403,769	1 Unit	62,461,625	Distan-KP	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan (PPH)	88.10	88.50	225,487,944	88.90	501,139,823	89.30	561,959,786	89.70	637,516,943	90.10	716,169,908	90.50	850,727,338	Distan-KP	
		Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari)	2,431.00	2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00	
		Ketersediaan protein (Gram/kap/hari)	54.04	54.85		55.66		56.47		57.28		58.09		58.90		58.90	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan daerah rawan pangan/nagari yang rawan pangan	N/A	1 nagari	14,279,794	1 nagari	13,692,345	1 nagari	16,298,138	1 nagari	19,676,449	1 nagari	22,541,319	1 nagari	24,984,650	Distan-KP	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi	70%	75%	9,129,704	80%	42,240,884	85%	43,483,431	90%	47,026,713	95%	49,397,691	100%	53,448,413	Distan-KP	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	25%	30%	244,239,101	35%	243,039,122	40%	273,808,713	45%	306,296,721	50%	343,272,087	55%	1,304,198,738	Disnakeswan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	18,080.30	18,441.90	898,706,409	18,810.73	1,136,464,625	19,186.93	1,193,023,676	19,570.66	1,321,601,482	19,962.06	1,429,763,665	20,361.29	1,433,494,302	Diskan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	52,511.60	53,561.83	1,613,530,169	54,633.06	2,259,236,905	55,725.72	2,341,716,418	56,840.23	2,566,464,813	57,977.03	2,773,483,894	59,136.57	2,529,071,212	Diskan	
		Produksi Benih Ikan (ekor/ tahun)	687,828,985	480,000,000		495,000,000		510,000,000		525,000,000		540,000,000		555,000,000		555,000,000	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi (%)	55	60	11,704,593	70	123,231,104	80	127,125,474	90	127,896,918	100	144,908,480	100	149,907,901	Diskan	
		Cakupan Pembinaan Pokmaswas (%)	55	100		100		100		100		100		100		100	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan (kg/ kapita/ tahun)	43.45	43.95	79,397,216	44.45	263,577,639	44.95	273,808,713	45.45	278,749,692	45.95	286,596,771	46.45	284,200,395	Diskan	
		Produksi Ikan Olahan (ton/ tahun)	176.30	179.82		183.41		187.07		190.81		194.62		198.51		198.51	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan Pusat dan Toko Swalayan	N/A	60%	14,045,699	60%	205,385,173	62%	208,616,162	62%	219,720,346	63%	231,853,567	63%	243,600,339	Disnagkerkop & UKM	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar yang Kondusif	N/A	1 Pasar	173,977,637	1 Pasar	201,962,087	1 Pasar	218,395,045	1 Pasar	242,676,203	1 Pasar	241,514,133	1 Pasar	249,846,502	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	jumlah pasar yang diawasi	N/A	17 Kecamatan	35,114,248	17 Kecamatan	157,461,966	17 Kecamatan	166,241,004	17 Kecamatan	173,808,632	17 Kecamatan	183,550,741	17 Kecamatan	179,264,865	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	N/A	1 Pedagang	14,747,984	1 Pedagang	27,384,690	2 Pedagang	26,077,020	2 Pedagang	32,794,081	2 Pedagang	38,642,261	2 Pedagang	43,723,138	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pasar tertib ukur	N/A	1 Pasar	42,136,504	1 Pasar	141,031,152	1 Pasar	155,810,196	1 Pasar	163,970,407	1 Pasar	175,178,251	1 Pasar	196,129,504	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Terwujudnya pasar BANA	N/A	1 Pasar	31,673,832	1 Pasar	164,308,139	1 Pasar	166,241,004	1 Pasar	183,646,856	1 Pasar	206,092,060	1 Pasar	206,123,364	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	40.91%	41.50%	19,507,915	41.98%	41,077,035	42.80%	42,375,158	43.75%	45,911,714	44.50%	46,370,713	45.00%	49,969,300	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	persentase koperasi sehat	40%	40%	24,423,910	40%	44,500,121	40%	43,027,083	40%	45,255,832	40%	45,082,638	40%	46,846,219	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOOPERASIAN	koperasi mampu melaksanakan RAT tepat waktu	57 Koperasi	57 Koperasi	320,525,974	57 Koperasi	281,216,118	57 Koperasi	275,609,983	57 Koperasi	277,282,485	57 Koperasi	272,275,305	57 Koperasi	264,064,641	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi yang melaksanakan RAT	40%	40%	25,945,527	40%	23,961,604	40%	24,773,169	40%	26,235,265	40%	27,049,583	40%	28,107,731	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM	60%	62%	213,675,660	64%	20,538,517	65%	26,077,020	67%	32,794,081	69%	32,201,884	70%	31,230,813	Disnagkerkop & UKM
		Jumlah UMKM	11.021 Orang	11.297 Orang		11.579 Orang		11.868 Orang		12.165 Orang		12.469 Orang		12.500 Orang		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio wirausaha baru yang berskala mikro	N/A	0.9 %	45,570,490	0.9 %	75,307,897	0.9 %	88,009,943	0.9 %	96,414,599	0.9 %	99,825,841	0.9 %	103,061,682	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	1 sentra	1 sentra	14,949,989,281	1 sentra	13,116,496,886	1 sentra	14,733,516,438	1 sentra	14,757,336,647	1 sentra	14,555,251,721	1 sentra	14,053,865,710	DPMPPTP
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Peningkatan jumlah Industri kecil dan Menengah yang bersertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	0	sertifikasi	0	sertifikasi	162,981,377	sertifikasi	163,970,407	sertifikasi	161,009,422	sertifikasi	156,154,063	DPMPPTP
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya data dan Informasi tentang Industri kecil dan Menengah	1 Dokumen Ranperda	1 Dokumen Ranperda	0	1 Dokumen Ranperda	0	1 Dokumen Ranperda	48,894,413	1 Dokumen Ranperda	180,367,448	1 Dokumen Ranperda	177,110,364	1 Dokumen Ranperda	171,769,470	DPMPPTP
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	4 Objek Wisata	4 Objek Wisata	1,520,951,791	5 Objek Wisata	5,579,630,539	5 Objek Wisata	4,993,749,377	6 Objek Wisata	5,424,141,070	6 Objek Wisata	5,686,852,774	6 Objek Wisata	5,896,377,436	Disparpora
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	41 Orang	41 Orang	673,083,946	45 Orang	1,226,149,484	50 Orang	1,187,156,347	55 Orang	1,214,036,895	60 Orang	1,211,434,889	60 Orang	1,193,641,661	Disparpora
		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	36 Orang	36 Orang		40 Orang		45 Orang		50 Orang		55 Orang		60 Orang		





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	208872 Orang	250000 Orang	312,126,646	265000 Orang	1,266,541,901	275000 Orang	1,206,062,186	300000 Orang	1,213,381,013	330000 Orang	1,191,469,721	350000 Orang	1,467,848,196	Disparpora
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif	2 Paket	2 Paket	117,047,492	3 Paket	342,308,622	4 Paket	358,559,028	5 Paket	393,528,977	6 Paket	418,624,496	7 Paket	499,693,003	Disparpora
	Sasaran 2: Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan (%)	7.26	7.11	280,462,959	6.99	992,695,004	6.87	966,805,526	6.74	984,478,325	6.61	973,012,137	6.48	952,539,787	Dinsos P3A
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	65%	65%	280,462,959	80%	992,695,004	82%	966,805,526	85%	984,478,325	87%	973,012,137	90%	952,539,787	Dinsos P3A
	Sasaran 3: Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita ADHB (Rp Juta)	42.95	44.63	143,326,995	46.98	125,749,126	49.46	122,737,982	52.71	129,656,942	55.35	133,681,370	58.72	136,132,615	Sekretariat Daerah Bag Ekonomi
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	100%	100%	143,326,995	100%	125,749,126	100%	122,737,982	100%	129,656,942	100%	133,681,370	100%	136,132,615	Sekretariat Daerah Bag Ekonomi
	Sasaran 4: Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	4	4	353,804,917	1	2,095,258,390	1	2,294,486,822	1	2,654,672,199	1		1	3,343,446,646	DPMD
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Nagari yang tertata	60%	100%	88,451,229	100%	127,924,806	100%	140,088,584	100%	162,079,496	100%	183,025,556	100%	204,132,227	DPMD
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Nagari yang telah melakukan kerjasama	55%	100%	88,451,229	100%	36,929,144	100%	40,440,566	100%	46,788,870	100%	52,835,547	100%	58,928,590	DPMD
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase administrasi Nagari dengan kategori baik	60%	100%	88,451,229	100%	1,147,902,765	100%	1,257,051,531	100%	1,454,381,747	100%	1,642,336,219	100%	1,831,731,908	DPMD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	65%	100%	88,451,229	100%	782,501,676	100%	856,906,141	100%	991,422,086	100%	1,119,546,779	100%	1,248,653,920	DPMD
Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal																
Tujuan 1: Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan																
	Sasaran 1: Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18.62	18.8	119,376,737	18.85	222,500,604	18.88	213,505,603	18.97	229,558,570	19.08	225,413,190	19.36	218,615,689	Diskearpus
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	90.17	90.20	103,770,405	90.25	167,731,225	90.30	161,351,563	90.40	177,088,040	90.50	173,890,175	91.00	168,646,389	Diskearpus
		Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	2.87	2.90		2.95		3.00		3.20		3.50		4.00		
		Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	0.30%	0.40%		0.45%		0.50%		0.55%		0.60%		0.80%		
		Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	0.14	0.15		0.20		0.20		0.25		0.30		0.45		
		Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	0.33%	0.35%		0.40%		0.40%		0.45%		0.50%		0.55%		



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	0%	10%	15,606,332	20%	54,769,380	30%	52,154,040	40%	52,470,530	50%	51,523,015	60%	49,969,300	Diskearpus
	Sasaran 2: Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	13.67	13.82	95,490,574,263	13.97	79,956,927,163	14.12	71,226,071,078	14.27	71,212,297,449	14.42	69,626,864,832	14.57	67,097,604,146	Disdikbud
		Rata-rata lama sekolah	7.87	7.91		8.03		8.16		8.29		8.41		8.54		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Pengelolaan dan kebutuhan Pendidikan Dasar	53.47%	55.61%	95,308,760,492	70.96%	79,796,042,110	56.31%	71,069,608,957	60.61%	71,051,606,450	45.69%	69,465,855,411	64.30%	66,938,327,001	Disdikbud
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rasio Pelatihan/Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Formal dan Non Formal	53.22%	55.61%	97,539,577	57.21%	85,577,156	58.89%	78,231,061	60.62%	78,705,795	62.42%	77,284,522	64.30%	74,953,950	Disdikbud
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar, TK, Paud dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	50.26%	52.50%	84,274,194	54.80%	75,307,897	52.20%	78,231,061	59.70%	81,985,204	62.30%	83,724,899	65.00%	84,323,194	Disdikbud
	Sasaran 3: Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,84%	7,61%	188,023,531	7,15%	558,768,164	7,17%	538,892,706	7,15%	631,810,773	7,1%	655,115,135	7,1%	679,395,099	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran terbuka	7,84%	7,61%	16,674,196	7,15%	48,607,824	7,17%	46,286,711	7,15%	51,158,767	7,1%	50,234,940	7,1%	48,720,068	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja	N/A	70%	47,809,609	70%	221,101,247	70%	216,736,546	70%	250,546,782	70%	260,191,225	72 %	266,711,140	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	N/A	2400 orang	53,623,358	2400 orang	195,540,377	2430	178,080,623	2500	221,884,755	2500	231,982,375	2500	242,163,722	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	N/A	51%	69,916,369	51%	93,518,716	51%	97,788,826	51%	108,220,469	51%	112,706,595	51%	121,800,169	Disnagkerkop & UKM
	Sasaran 4: Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	156 Orang	160 Orang	1,246,858,400	165 Orang	6,534,671,594	170 Orang	12,534,571,706	175 Orang	7,768,917,893	180 Orang	15,060,821,305	185 Orang	8,762,741,424	Disparpora
		Jumlah Atlet Berprestasi	357 Orang	360 Orang		365 Orang		370 Orang		375 Orang		380 Orang		385 Orang		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	18.51%	37.03%	345,592,709	46.29%	554,539,968	55.55%	580,213,700	64.81%	800,175,587	74.07%	856,570,123	83.33%	830,739,618	Disparpora
		Persentase Wirausaha Muda	0,14%	0,14%		0,14%		0,17%		0,20%		0,25%				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Berprestasi	357 Orang	360 Orang	901,265,691	365 Orang	5,911,669,902	370 Orang	11,872,867,317	375 Orang	6,870,360,061	380 Orang	14,104,425,340	385 Orang	7,832,063,206	Disparpora
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pembina Pramuka yang dilatih	N/a	N/A	0	40 Orang	68,461,724	50 Orang	81,490,688	55 Orang	98,382,244	60 Orang	99,825,841	65 Orang	99,938,601	Disparpora



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan																
Tujuan 1: Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien																
	Sasaran 1: Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	797,159,949,965	WTP	732,499,288,723	WTP	748,865,196,623	WTP	745,562,337,758	WTP	753,981,970,033	WTP	779,637,184,777	SELURUH PERANGKAT DAERAH
		Tingkat Kapabilitas APIP	level 3 dengan catatan	level 3		level 3		level 3		level 3		level 3		level 3		
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	level 3	level 3		level 3		level 3		level 3		level 3		level 3		
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemempuan RB	B	B		B		BB		BB		BB		BB		
		Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	10%	10%		11%		12%		13%		14%		15%		
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	2,600 (tinggi)	2,600 (tinggi)		2,700 (tinggi)		2,800 (tinggi)		2,900 (tinggi)		3,000 (sangat tinggi)		3,050 (sangat tinggi)		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas perencanaan	N/A	100%	623,238,881	100%	807,848,348	100%	917,259,187	100%	1,001,006,542	100%	1,396,157,778	100%	1,088,145,225	Bapelitbangda
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	N/A	90%	928,576,773	92%	896,163,972	93%	938,707,536	94%	1,038,844,353	95%	1,122,093,337	95%	1,197,081,360	Bapelitbangda
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kajian Kelitbang Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	60%	65%	345,867,537	70%	1,506,157,937	75%	1,378,822,445	80%	846,087,301	85%	769,625,036	90%	1,083,709,200	Bapelitbangda
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	11/30/2020	11/30/2021	154,840,025,698	11/30/2022	136,226,718,150	11/30/2023	136,207,722,774	11/30/2024	143,885,995,164	11/30/2025	148,352,079,690	11/30/2026	151,072,333,606	BPKD
		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
		Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	100%	100%	410,145,884	100%	394,075,750	100%	394,020,800	100%	416,232,456	100%	429,151,915	100%	437,021,047	BPKD
		Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
		Persentase BMD yang tertib	65%	65%		70%		75%		80%		85%		90%		



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan yang dilakukan	N/A	60%	1,707,332,755	60%	1,722,633,909	60%	1,884,666,114	60%	2,176,215,244	60%	2,393,211,842	60%	2,504,086,561	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang dilakukan	N/A	60%	568,616,718	60%	573,712,674	60%	628,264,359	60%	725,080,420	60%	809,555,372	60%	896,324,324	Inspektorat
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah produk Peraturan Daerah yang dihasilkan	11	8	12,922,161,764	8	14,633,693,591	8	14,179,379,757	8	14,527,778,077	8	14,072,223,456	8	17,333,101,042	Setwan
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	70%	70%	268,279,680	75%	235,377,399	75%	229,741,136	75%	242,692,053	80%	250,224,984	85%	254,813,228	Sekretariat Daerah Bag Hukum
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase laporan realisasi kegiatan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	144,358,574	100%	126,654,190	100%	123,621,374	100%	130,590,132	100%	134,643,525	100%	137,112,412	Sekretariat Daerah Bagian Fispra
		Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD	10%	10%	311,908,002	11%	273,655,068	12%	267,102,221	13%	282,159,250	14%	290,917,205	15%	296,251,601	Sekretariat Daerah Bagian PBJ
		Persentase pengadaan proses selesai tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri	2,600 (tinggi)	2,600 (tinggi)	236,045,776	2,700 (tinggi)	207,096,716	2,800 (tinggi)	202,137,652	2,900 (tinggi)	213,532,512	3,000 (sangat tinggi)	220,160,358	3,050 (sangat tinggi)	224,197,323	Sekretariat Daerah Bag PUM
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3,825,937,366	100%	4,104,952,832	100%	4,065,622,890	100%	4,152,788,978	100%	4,386,266,875	100%	4,568,963,173	Bapelitbangda
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A	A		A		A		A		A		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	8,190,770,361	100%	7,206,778,716	100%	7,205,773,807	100%	7,611,976,135	100%	7,848,244,639	100%	7,992,153,765	BPKD
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A	A		A		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3,687,290,441	100%	4,006,152,276	100%	13,925,612,899	100%	4,227,742,888	100%	4,500,781,563	100%	4,737,916,395	Diskominfo
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4,850,441,114	100%	4,540,309,691	100%	4,741,505,244	100%	5,019,652,236	100%	5,251,055,459	100%	5,398,799,433	Disdukcapil
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	AA	AA		AA		AA		AA		AA		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Pelayanan Perencanaan Daerah	100%	100%	5,724,974,856	100%	15,257,093,516	100%	15,637,062,962	100%	16,860,656,452	100%	17,684,440,148	100%	18,294,861,059	BKPSDM
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A		A		A		A		A		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Pelayanan Perencanaan Daerah	90%	90%	5,465,523,160	90%	5,715,026,611	92%	6,194,503,329	93%	7,395,031,420	94%	7,980,147,325	95%	8,875,709,304	Inspektorat
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A		A		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Pelayanan Perencanaan Daerah	N/A	100%	5,451,891,023	100%	5,468,769,446	100%	5,230,967,901	100%	5,667,740,238	100%	5,980,452,213	100%	6,210,470,635	BPBD
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Pelayanan Perencanaan Daerah	100%	100%	2,696,533,058	100%	2,524,030,382	100%	2,412,141,282	100%	2,435,994,176	100%	2,395,675,890	100%	2,327,180,209	Diskearpus
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A		A		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Pelayanan Perencanaan Daerah	100%	100%	3,262,380,818	100%	3,285,489,185	100%	3,025,326,240	100%	3,192,515,042	100%	3,534,408,113	100%	3,630,274,149	Diskan
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A		A		A		A		AA		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Pelayanan Perencanaan Daerah	100%	100%	10,351,893,896	100%	9,189,715,897	100%	8,750,889,989	100%	8,808,420,795	100%	8,649,357,908	100%	8,388,530,121	Distan-KP
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A		A		A		A		AA		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Pelayanan Perencanaan Daerah	100%	100%	92,282,067,644	100%	82,722,783,019	100%	79,079,078,567	100%	79,898,112,418	100%	78,821,639,925	100%	76,835,527,967	Dinkes
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A		A		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	17,449,208,722	100%	16,534,077,240	100%	17,014,523,675	100%	18,510,110,849	100%	19,666,886,946	100%	37,442,685,698	RSUD
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	B		BB		BB		BB		BB		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	721,168,616	100%	632,723,257	100%	603,552,634	100%	593,324,426	100%	596,250,090	100%	2,876,121,244	Disnakeswan
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	C	CC		B		BB		A		A		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4,492,198,900	100%	4,333,423,505	100%	4,195,500,843	100%	4,233,324,047	100%	4,832,538,415	100%	4,236,992,248	DPPKB
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A		A		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3,933,144,270	100%	3,534,705,981	100%	3,403,598,536	100%	3,454,554,550	100%	3,414,230,328	100%	3,349,373,278	Dishub
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	BB		BB		BB		BB		BB		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3,267,867,657	100%	3,513,485,419	100%	23,024,259,434	100%	3,610,429,170	100%	3,669,945,947	100%	3,682,421,454	Disparpora
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	BB	BB		BB		BB		BB		BB		BB		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3,606,416,388	100%	4,170,582,142	100%	4,178,097,734	100%	4,936,265,848	100%	6,345,361,818	100%	6,806,986,032	DPMPTP
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A		A		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	65%	100%	3,862,495,992	100%	5,432,194,783	100%	5,948,717,066	100%	6,882,538,468	100%	7,771,991,246	100%	8,668,264,264	DPMD
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	B		B		B		BB		BB		BB		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	65%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1,104,557,834	100%	1,228,833,184	100%	1,283,119,781	100%	1,387,260,480	100%	1,459,973,412	100%	1,537,061,037	Satpol-PP Damkar
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	BB	BB		BB		BB		BB		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	18,718,635,925	100%	18,816,934,534	100%	19,403,694,896	100%	21,517,335,288	100%	22,430,486,167	100%	23,718,365,792	Setwan
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	B		BB		BB		A		A		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3,821,841,021	100%	1,227,861,027	100%	1,192,697,713	100%	1,225,186,883	100%	1,232,688,132	100%	1,221,749,392	Dinsos P3A
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A		A		A		A		A		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	98.57%	95.71%	342,096,367,548	96.29%	299,973,554,885	97%	285,652,229,827	97.57%	287,388,951,556	98%	282,055,969,660	98.86%	273,692,463,394	Disdikbud
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	BB	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4,989,699,839	100%	5,807,501,828	100%	5,818,931,439	100%	6,219,879,753	100%	6,368,474,264	100%	6,724,362,484	DLHPKPP
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	B		BB		BB		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	5,190,956,089	100%	5,323,767,570	100%	5,373,783,483	100%	5,563,679,311	100%	5,450,329,369	100%	5,421,512,381	Disnagkerkop & UKM
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	A		A		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1,321,390,191	100%	996,886,645	100%	746,454,704	100%	750,984,465	100%	737,423,151	100%	715,185,611	Kesbangpol
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	BB	A		A		A		A		AA		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	21,838,641,047	100%	21,040,743,711	100%	22,005,710,142	100%	24,319,067,889	100%	26,234,414,331	100%	27,955,145,726	DPUPR
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A		A		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB	BB	19,865,560,613	BB	17,623,155,892	A	17,201,158,089	A	18,170,818,065	A	18,734,822,986	A	19,078,353,563	Sekretariat Daerah Bagian Renkeu
		Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	B	B	125,801,084	B	151,449,657	BB	147,823,098	BB	156,156,150	BB	161,003,088	BB	163,955,317	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	974,537,421	100%	958,121,833	100%	1,146,411,002	100%	1,370,792,604	100%	1,192,371,373	100%	2,053,113,626	BATANG ANAI
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	1,002,004,207	100%	493,848,649	100%	1,165,926,392	100%	1,053,974,558	100%	1,035,151,695	100%	1,174,664,123	LUBUK ALUNG
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	903,138,092	100%	862,083,041	100%	1,058,792,214	100%	934,145,969	100%	933,523,610	100%	1,055,498,157	ULAKAN TAPAKIS
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B	B		B		BB		BB		BB		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	887,234,818	100%	898,983,911	100%	1,083,565,384	100%	965,628,287	100%	947,692,440	100%	1,064,867,401	NAN SABARIS
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	1,091,662,945	100%	929,025,600	100%	1,242,244,052	100%	1,144,513,442	100%	1,205,960,568	100%	1,351,044,957	SINTUK TOBOH GADANG
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	507,849,032	100%	696,682,222	100%	899,315,100	100%	778,885,522	100%	829,471,659	100%	945,951,239	ENAM LINGKUNG
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1	2	3	4	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												17
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	543,960,582	100%	477,248,321	100%	544,768,182	100%	574,004,184	100%	619,365,070	100%	489,386,835	2X11 ENAM LINGKUNG
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat Perangkat Daerah Evaluasi	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	822,453,713	100%	931,421,761	100%	1,124,897,461	100%	1,359,249,087	100%	1,171,118,130	100%	2,062,482,870	2X11 KAYU TANAM
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat Perangkat Daerah Evaluasi	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	960,764,833	100%	712,600,974	100%	744,852,598	100%	824,309,899	100%	890,366,919	100%	949,868,970	PATAMUAN
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat Perangkat Daerah Evaluasi	B	BB		A		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	826,566,403	100%	814,146,142	100%	875,052,813	100%	939,343,693	100%	926,840,270	100%	1,250,269,136	PADANG SAGO
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat Perangkat Daerah Evaluasi	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	972,976,429	100%	924,327,479	100%	1,020,900,644	100%	1,157,877,161	100%	1,241,841,659	100%	1,314,651,060	VII KOTO SUNGAI SARIK
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat Perangkat Daerah Evaluasi	B	B		BB		BB		A		A		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	861,484,370	100%	1,122,032,209	100%	1,179,756,992	100%	1,215,778,261	100%	1,340,302,000	100%	1,401,427,847	V KOTO TIMUR
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat Perangkat Daerah Evaluasi	A	A		A		A		A		AA		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	903,138,092	100%	862,083,041	100%	1,058,792,214	100%	934,145,969	100%	933,523,610	100%	1,036,759,670	V KOTO KPG DALAM
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat Perangkat Daerah Evaluasi	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	950,425,638	100%	1,011,179,669	100%	1,157,624,121	100%	1,111,142,185	100%	1,005,556,650	100%	1,202,676,860	SUNGAI LIMAU
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	908,574,137	100%	944,353,496	100%	1,146,806,721	100%	777,739,516	100%	1,163,427,592	100%	1,233,761,504	BATANG GASAN
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B	B		B		B		B		B		B		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	1,737,779,929	100%	1,347,955,900	100%	1,528,537,138	100%	1,438,778,014	100%	1,530,293,117	100%	1,587,251,182	SUNGAI GERINGGING
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	935,386,596	100%	986,632,307	100%	1,072,521,009	100%	930,318,718	100%	914,512,388	100%	1,060,513,399	IV KOTO AUR MALINTANG
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	74,130,078	100%	65,038,638	100%	63,888,700	100%	77,394,032	100%	83,724,899	100%	91,818,589	BATANG ANAI
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	2,223,902	100%	6,846,172	100%	9,778,883	100%	13,117,633	100%	16,100,942	100%	18,738,488	LUBUK ALUNG
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	2,223,902	100%	6,846,172	100%	9,778,883	100%	13,117,633	100%	16,100,942	100%	18,738,488	ULAKAN TAPAKIS
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	58,523,746	100%	55,453,997	100%	9,778,883	100%	67,759,131	100%	70,612,936	100%	18,738,488	NAN SABARIS
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	74,130,078	100%	65,723,255	100%	66,496,402	100%	67,555,808	100%	66,979,919	100%	71,830,869	SINTUK TOBOH GADANG
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	41,824,971	100%	47,211,205	100%	61,672,153	100%	68,251,042	100%	73,720,418	100%	78,647,057	ENAM LINGKUNG
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	N/A	100%	5,462,216	100%	4,792,321	100%	15,255,057	100%	18,889,391	100%	20,403,114	100%	27,795,423	2X11 ENAM LINGKUNG
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	58,523,746	100%	65,038,638	100%	65,192,551	100%	81,985,204	100%	90,165,276	100%	96,815,519	2X11 KAYU TANAM
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	64,766,279	100%	62,505,554	100%	65,472,879	100%	72,457,211	100%	78,263,653	100%	83,493,910	PATAMUAN
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	2,223,902	100%	6,846,172	100%	9,778,883	100%	13,117,633	100%	16,100,942	100%	18,738,488	PADANG SAGO
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	2,223,902	100%	6,846,172	100%	9,778,883	100%	13,117,633	100%	16,100,942	100%	18,738,488	VII KOTO SUNGAI SARIK
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	23,409,498	100%	21,223,135	100%	20,926,809	100%	21,847,417	100%	22,310,110	100%	22,551,832	V KOTO TIMUR



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	2,223,902	100%	6,846,172	100%	9,778,883	100%	13,117,633	100%	16,100,942	100%	18,738,488	V KOTO KAMPUNG DALAM
				Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	58,523,746	100%	59,219,392	100%	63,986,488	100%	72,124,023	100%	16,100,942	100%	18,738,488	SUNGAI LIMAU
				Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	11,704,749	100%	11,296,185	100%	11,832,448	100%	13,094,677	100%	14,144,034	100%	18,738,488	BATANG GASAN
				Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	23,409,498	100%	21,223,135	100%	20,926,809	100%	21,847,417	100%	22,310,110	100%	22,551,832	SUNGAI GERINGGING
				Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	2,223,902	100%	6,846,172	100%	9,778,883	100%	13,117,633	100%	16,100,942	100%	18,738,488	IV KOTO AUR MALINTANG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	93,637,994	100%	92,423,328	100%	98,440,751	100%	110,253,702	100%	126,495,442	100%	138,072,048	BATANG ANAI
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	85,834,828	100%	82,838,687	100%	86,771,285	100%	96,027,629	100%	103,722,913	100%	110,654,580	LUBUK ALUNG
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	93,637,994	100%	90,369,476	100%	94,659,583	100%	104,757,414	100%	113,152,269	100%	120,714,087	LILAKAN TAPAKIS
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	93,637,994	100%	90,369,476	100%	94,659,583	100%	104,757,414	100%	113,152,269	100%	120,714,087	NAN SABARIS
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	54,622,163	100%	61,615,552	100%	59,977,147	100%	62,964,636	100%	68,267,995	100%	74,953,950	SINTUK TOBOH GADANG
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	29,839,307	100%	32,204,395	100%	33,733,233	100%	37,331,733	100%	40,323,354	100%	43,018,111	ENAM LINGKUNG
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	90%	28,473,051	92%	24,981,067	100%	42,375,158	100%	46,895,536	100%	50,653,564	100%	52,014,919	2X11 ENAM LINGKUNG
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	62,425,329	100%	62,300,169	100%	66,887,557	100%	75,334,564	100%	88,778,019	100%	97,834,019	2X11 KAYU TANAM
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	58,523,746	100%	56,480,923	100%	59,162,240	100%	65,473,384	100%	70,720,168	100%	75,446,304	PATAMUAN
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	88,175,778	100%	85,097,923	100%	89,137,774	100%	98,646,565	100%	106,551,720	100%	113,672,432	PADANG SAGO
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	187,275,988	100%	85,097,923	100%	89,137,774	100%	98,646,565	100%	106,551,720	100%	113,672,432	VII KOTO SUNGAI SARIK
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	93,637,994	100%	90,369,476	100%	94,659,583	100%	104,757,414	100%	113,152,269	100%	120,714,087	V KOTO TIMUR
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	187,275,988	100%	85,097,923	100%	89,137,774	100%	98,646,565	100%	106,551,720	100%	113,672,432	V KOTO KAMPUNG DALAM
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	187,275,988	100%	85,097,923	100%	89,137,774	100%	98,646,565	100%	106,551,720	100%	113,672,432	SUNGAI LIMAU
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	93,637,994	100%	90,369,476	100%	94,659,583	100%	104,757,414	100%	113,152,269	100%	120,714,087	BATANG GASAN
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	93,637,994	100%	90,369,476	100%	94,659,583	100%	104,757,414	100%	113,152,269	100%	120,714,087	SUNGAI GERINGGING



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	93,637,994	100%	90,369,476	100%	94,659,583	100%	104,757,414	100%	113,152,269	100%	120,714,087	IV KOTO AUR MALINTANG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	66,326,912	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	BATANG ANAI
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	66,326,912	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	LUBUK ALUNG
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	66,326,912	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	ULAKAN TAPAKIS
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	46,818,997	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	NAN SABARIS
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	35,114,248	100%	34,230,862	100%	35,855,903	100%	36,073,490	100%	41,862,450	100%	40,600,056	SINTUK TOBOH GADANG
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	5,702,554	100%	10,638,130	100%	11,143,154	100%	12,331,852	100%	13,320,079	100%	14,210,243	ENAM LINGKUNG
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	5,462,216	70%	4,792,321	75%	6,519,255	80%	7,214,698	85%	7,792,856	90%	7,807,703	2X11 ENAM LINGKUNG
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	23,409,498	100%	30,807,776	100%	39,115,530	100%	52,470,530	100%	61,183,580	100%	59,338,544	2X11 KAYU TANAM
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	19,507,915	100%	18,826,974	100%	19,720,747	100%	21,824,461	100%	23,573,389	100%	25,148,768	PATAMUAN
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	40,576,464	100%	37,653,948	100%	37,485,717	100%	39,352,898	100%	40,574,374	100%	39,350,824	PADANG SAGO
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	66,326,912	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	VII KOTO SUNGAI SARIK
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	66,326,912	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	V KOTO TIMUR
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	66,326,912	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	V KOTO KAMPUNG DALAM
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	39,015,831	100%	34,230,862	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	SUNGAI LIMAU
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	42,917,414	100%	39,707,800	100%	43,222,661	100%	45,865,802	100%	50,829,386	100%	52,040,091	BATANG GASAN
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	66,326,912	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	SUNGAI GERINGGING
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	39,015,831	100%	41,077,035	100%	42,375,158	100%	45,911,714	100%	48,302,827	100%	49,969,300	IV KOTO AUR MALINTANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	156,063,323	100%	147,192,707	100%	172,760,259	100%	406,646,610	100%	276,936,205	100%	268,584,989
	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan		N/A	100%	156,063,323	100%	147,192,707	100%	172,760,259	100%	406,646,610	100%	276,936,205	100%	37,476,975	LUBUK ALUNG



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	156,063,323	100%	147,192,707	100%	172,760,259	100%	406,646,610	100%	276,936,205	100%	268,584,989	ULAKAN TAPAKIS
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	120,949,075	100%	147,192,707	100%	172,760,259	100%	406,646,610	100%	276,936,205	100%		NAN SABARIS
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	124,850,659	100%	119,808,018	100%	120,606,219	100%	128,552,799	100%	135,891,952	100%	141,787,890	SINTUK TOBOH GADANG
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	0	100%	86,261,773	100%	90,356,875	100%	99,995,713	100%	108,008,984	100%	115,227,083	ENAM LINGKUNG
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	4,986,223	100%	4,374,704	100%	65,192,551	100%	72,146,979	100%	77,928,560	100%	76,827,799	2X11 ENAM LINGKUNG
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	50,720,580	100%	78,730,983	100%	91,269,571	100%	108,220,469	100%	122,367,160	100%	124,923,251	2X11 KAYU TANAM
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	45,258,364	100%	43,678,580	100%	45,752,132	100%	50,632,750	100%	54,690,263	100%	58,345,142	PATAMUAN
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	140,456,991	100%	135,896,523	100%	142,021,972	100%	152,908,964	100%	163,874,423	100%	166,705,924	PADANG SAGO
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	140,456,991	100%	135,896,523	100%	142,021,972	100%	152,908,964	100%	163,874,423	100%	166,705,924	VII KOTO SUNGAI SARIK
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	171,669,655	100%	160,885,052	100%	185,798,769	100%	419,764,242	100%	289,816,959	100%	281,077,314	V KOTO TIMUR
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	156,063,323	100%	135,896,523	100%	142,021,972	100%	152,908,964	100%	163,874,423	100%	166,705,924	V KOTO KAMPUNG DALAM
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	167,768,072	100%	160,885,052	100%	189,058,397	100%	426,323,059	100%	299,477,524	100%	281,077,314	SUNGAI LIMAU
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	124,850,659	100%	117,069,549	100%	122,627,188	100%	132,101,119	100%	142,365,175	100%	148,131,555	BATANG GASAN
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	171,669,655	100%	160,885,052	100%	185,798,769	100%	419,764,242	100%	289,816,959	100%	281,077,314	SUNGAI GERINGGING
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	101,441,160	100%	160,885,052	100%	185,798,769	100%	419,764,242	100%	289,816,959	100%	281,077,314	IV KOTO AUR MALINTANG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	78,031,662	100%	77,019,440	100%	88,009,943	100%	137,735,142	100%	167,449,799	100%	193,631,039	BATANG ANAI
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	61,645,013	100%	54,084,762	100%	51,502,115	100%	51,814,649	100%	50,878,977	100%	49,344,684	LUBUK ALUNG
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	77,251,345	100%	67,777,107	100%	64,540,625	100%	64,932,281	100%	63,759,731	100%	61,837,009	ULAKAN TAPAKIS
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	59,304,063	100%	67,777,107	100%	64,540,625	100%	64,932,281	100%	63,759,731	100%	61,837,009	NAN SABARIS



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Persentase terbina dan pengawasaan Desa Pemerintahan	100%	100%	63,985,962	100%	62,300,169	100%	59,325,221	100%	60,996,991	100%	61,827,618	100%	66,209,323	SINTUK TOBOH GADANG
			Persentase terbina dan pengawasaan Desa Pemerintahan	100%	100%	9,082,885	100%	28,619,739	100%	29,978,403	100%	33,176,355	100%	35,834,981	100%	39,213,181	ENAM LINGKUNG
			Persentase terbina dan pengawasaan Desa Pemerintahan	N/A	100%	10,924,433	100%	9,584,641	100%	19,557,765	100%	21,644,094	100%	23,378,568	100%	23,423,110	2X11 ENAM LINGKUNG
			Persentase terbina dan pengawasaan Desa Pemerintahan	100%	100%	78,031,662	100%	77,019,440	100%	88,009,943	100%	111,499,877	100%	141,688,291	100%	187,384,876	2X11 KAYU TANAM
			Persentase terbina dan pengawasaan Desa Pemerintahan	100%	100%	34,333,931	100%	33,135,475	100%	34,708,514	100%	38,411,052	100%	41,489,165	100%	44,261,832	PATAMUAN
			Persentase terbina dan pengawasaan Desa Pemerintahan	N/A	100%	44,478,047	100%	40,597,803	100%	40,308,554	100%	42,378,480	100%	43,584,800	100%	44,373,819	PADANG SAGO
			Persentase terbina dan pengawasaan Desa Pemerintahan	100%	100%	77,251,345	100%	67,777,107	100%	64,540,625	100%	64,932,281	100%	63,759,731	100%	61,837,009	VII KOTO SUNGAI SARIK
			Persentase terbina dan pengawasaan Desa Pemerintahan	100%	100%	57,743,430	100%	55,727,844	100%	51,528,192	100%	53,745,564	100%	54,832,338	100%	55,373,630	V KOTO TIMUR
			Persentase terbina dan pengawasaan Desa Pemerintahan	100%	100%	77,251,345	100%	67,777,107	100%	64,540,625	100%	64,932,281	100%	63,759,731	100%	61,837,009	V KOTO KAMPUNG DALAM
			Persentase terbina dan pengawasaan Desa Pemerintahan	100%	100%	81,933,245	100%	74,623,280	100%	72,363,731	100%	74,114,624	100%	72,776,259	100%	71,830,869	SUNGAI LIMAU
			Persentase terbina dan pengawasaan Desa Pemerintahan	100%	100%	50,720,580	100%	41,419,343	100%	43,385,642	100%	48,013,815	100%	51,861,457	100%	60,883,189	BATANG GASAN
			Persentase terbina dan pengawasaan Desa Pemerintahan	100%	100%	57,743,430	100%	55,727,844	100%	51,528,192	100%	53,745,564	100%	54,832,338	100%	70,989,036	SUNGAI GERINGGING
			Persentase terbina dan pengawasaan Desa Pemerintahan	100%	100%	63,985,962	100%	56,138,614	100%	53,457,891	100%	53,782,294	100%	52,811,090	100%	51,218,533	IV KOTO AUR MALINTANG
		Sasaran 2: Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks Profesionalitas ASN	76	78	5,863,380,363	80	10,302,425,914	82	10,938,019,369	84	12,643,952,682	86	14,594,022,128	88	15,232,754,073	BKPSDM
			Indeks E-Government /SPBE	1.9	2.15		2.44		2.76		3.12		3.53		4		Diskominfo
			Indeks Kearsipan Eksternal	N/A	73.48		60.80		63.95		65.00		68.50		70.00		Diskearpus
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek	93%	93%	1,384,682,954	93%	3,231,749,393	93%	3,357,137,332	93%	3,700,765,654	93%	3,965,966,119	93%	4,197,714,378	BKPSDM
			Persentase peningkatan terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	92%	92%		92%		92%		92%		92%		92%		
			Persentase peningkatan dokumen ASN yang terarsipkan	75%	75%		75%		75%		75%		75%		75%		
			Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN	73%	73%		73%		73%		73%		73%		73%		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN	90%	90%	1,327,709,018	90%	1,764,943,255	90%	1,734,121,846	90%	1,803,772,861	90%	1,823,565,338	90%	1,821,337,507	BKPSDM



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0%	41.00%	114,997,288	59.00%	822,695,012	88.00%	1,098,530,130	100%	1,215,716,055	100%	1,313,138,855	100%	1,400,894,200	Diskominfo
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	9,09%	15,91	22,534,568	61,36%	41,518,869	68,18%	43,489,894	79,55%	48,129,187	90,91%	51,986,074	100%	55,460,236	Diskominfo
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	26,437,127	Ada	48,709,148	Ada	51,021,515	Ada	56,464,246	Ada	60,989,073	Ada	65,064,893	Diskominfo
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi	50%	55%	1,761,784,595	60%	3,190,000,382	62%	3,471,969,236	63%	4,608,287,164	64%	6,126,917,349	65%	6,424,903,124	Diskominfo
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Indeks Pengelola Kearsipan	73.48	73.48	82,924,247	60.80	99,269,500	63.95	101,048,453	65.00	108,220,469	68.50	115,926,784	70.00	112,430,926	Diskearpus
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	8.84%	10.88%		13.95%		16.27%		18.60%		20.93%		23.25%		
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan	N/A	5%	19,507,915	10%	17,115,431	15%	16,298,138	20%	16,397,041	25%	16,100,942	30%	15,615,406	Diskearpus
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	40%	45%	83,492,317	50%	106,115,673	55%	107,567,709	60%	75,426,387	65%	77,284,522	70%	78,077,032	Diskearpus
		Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediasi	20%	30%		40%		45%		50%		60%		70%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	80%	80%	1,039,310,333	85%	980,309,251	90%	956,835,115	95%	1,010,773,618	100%	1,042,147,071	100%	1,061,256,372	Sekretariat Daerah
		Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan	80%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
		Persentase acara daerah yang sesuai standar keprotokolan	80%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
		Persentase kerjasama informasi dengan mass media	80%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
	Sasaran 3: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4.55	4.56	7,997,116,500	4.56	5,297,701,354	4.57	5,648,465,372	4.57	5,875,739,415	4.57	6,126,931,823	4.58	7,278,551,731	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan KTP EL	98.68%	99%	1,077,432,311	99%	0	99%	228,956,238	99%	264,005,473	99%	279,301,112	99%	292,282,430	Disdukcapil
		Persentase penerbitan KK	99.31%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase penerbitan KIA	20.06%	30%		35%		40%		45%		50%		50%		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan akta kelahiran umur 0-17 tahun	91.73%	93%	282,981,821	95%	20,538,517	95%	236,420,785	97%	150,656,010	98%	208,198,063	99%	222,111,666	Disdukcapil
		Persentase Penerbitan akta perkawinan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentasi penerbitan akta perceraian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase penerbitan akta kematian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		



## PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik	7	9	150,617,493	12	146,563,544	15	153,521,351	18	169,898,272	22	183,513,265	26	195,777,215	Disdukcapi
		Jumlah inovasi daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	23	27		30		33		38		43		47		
	PROGRAM PEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah buku laporan data kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan	3	3	11,267,772	3	8,900,024	3	30,510,114	3	10,317,018	3	11,143,784	3	11,888,509	Disdukcapi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah	100%	100%	6,474,817,103	100%	5,121,699,268	100%	4,999,056,885	100%	5,280,862,642	100%	5,444,775,599	100%	6,556,491,911	Sekretariat Daerah
<b>Misi 6: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat</b>																
<b>Tujuan 1: Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal</b>																
	<b>Sasaran 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat</b>	<b>Angka usia harapan hidup</b>	<b>68,79 Tahun</b>	<b>68,89 Tahun</b>	<b>99,160,903,085</b>	<b>68,99 Tahun</b>	<b>102,914,239,852</b>	<b>69,29 Tahun</b>	<b>104,242,034,085</b>	<b>69,50 Tahun</b>	<b>111,782,633,664</b>	<b>69,75 Tahun</b>	<b>117,375,405,606</b>	<b>70 Tahun</b>	<b>121,955,854,798</b>	<b>Dinkes/RSUD</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	70%	75%	43,518,959,943	80%	39,557,807,230	85%	37,877,883,551	90%	38,339,073,916	95%	38,046,355,511	100%	37,325,355,387	Dinkes
		Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana RS (100%)	58.88%	62%	55,094,240,606	65%	62,755,768,427	68%	65,734,971,027	72%	72,747,262,390	76%	78,576,947,710	80%	83,828,141,882	RSUD
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	55%	60%	332,754,102	65%	364,930,709	70%	382,255,052	75%	423,032,188	80%	456,938,798	85%	487,468,547	Dinkes
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100%	100%	74,101,285	100%	81,266,720	100%	85,124,692	100%	94,205,386	100%	101,754,643	100%	108,554,771	Dinkes
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang Ber PHBS	70%	72%	140,847,149	74%	154,466,766	76%	161,799,762	78%	179,059,784	80%	193,408,945	82%	206,334,211	Dinkes
	<b>Sasaran 2: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk</b>	<b>Laju Pertumbuhan penduduk</b>	<b>3.61%</b>	<b>3.50%</b>	<b>4,716,803,256</b>	<b>3.39%</b>	<b>5,093,416,741</b>	<b>3.29%</b>	<b>4,987,296,618</b>	<b>3.19%</b>	<b>5,051,995,145</b>	<b>3.09%</b>	<b>4,800,754,811</b>	<b>3%</b>	<b>5,040,404,571</b>	<b>Dppkb</b>
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Total Fertility Rate ( TFR )	2.42	2.38	474,048,587	2.34	850,416,479	2.31	862,939,450	2.27	807,179,091	2.24	751,384,600	2.22	751,836,843	DPPKB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian alat kontrasepsi ( Contraception Prevalence Rate = CPR )	65.39	65.50	3,187,727,590	65.75	3,144,531,894	66.00	3,072,768,730	66.25	3,187,666,045	66.50	3,228,318,766	66.75	3,239,181,190	DPPKB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	14	14	1,055,027,080	13	1,098,468,368	12	1,051,588,438	11	1,057,150,009	10	821,051,445	9	1,049,386,537	DPPKB
	<b>Sasaran 3: Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum</b>	<b>Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>	<b>71.86%</b>	<b>88%</b>	<b>11,556,489,079</b>	<b>90%</b>	<b>12,323,110,393</b>	<b>92%</b>	<b>13,038,510,122</b>	<b>95%</b>	<b>13,773,514,204</b>	<b>97%</b>	<b>14,812,866,796</b>	<b>100%</b>	<b>11,867,708,822</b>	<b>DPUPR</b>





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	71.86%	88%	11,566,489,079	90%	12,323,110,393	92%	13,038,510,122	95%	13,773,514,204	97%	14,812,866,796	100%	11,867,708,822	DPUPR
	Sasaran 4: Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	79.03%	81%	23,409,498,471	85%	26,015,455,273	87%	31,292,424,292	93%	32,138,199,809	96%	32,201,884,338	100%	31,855,428,943	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	79.03%	81%	23,409,498,471	85%	26,015,455,273	87%	31,292,424,292	93%	32,138,199,809	96%	32,201,884,338	100%	31,855,428,943	DPUPR
	Sasaran 5: Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	0.129	0.13	0	0.14	2,122,484,611	0.15	7,252,834,237	0.16	7,313,244,131	0.17	7,197,282,159	0.185	6,995,858,196	DLHPKPP
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni	0.129	0.13	0	0.14	2,122,484,611	0.15	7,252,834,237	0.16	7,313,244,131	0.17	7,197,282,159	0.185	6,995,858,196	DLHPKPP
	Sasaran 6: Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	14	15	3,655,783,345	16	3,586,082,632	17	3,762,262,096	18	4,073,680,796	19	4,416,166,418	20	4,622,160,278	BPBD
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana	15 Nagari	20 Nagari	3,655,783,345	25 Nagari	3,586,082,632	30 Nagari	3,762,262,096	35 Nagari	4,073,680,796	40 Nagari	4,416,166,418	45 Nagari	4,622,160,278	BPBD
Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana		75%	75%	79%		82%		85%		90%		98%				
Persentase Relawan yang ikut Pelatihan		14.5%	19.4%	24.3%		29.12%		33.98%		38.83%		43.68%				
	Sasaran 7: Pengurangan resiko kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	20 Menit	17,8 Menit	7,325,768,452	15,8 Menit	5,123,401,607	14,1 Menit	5,299,241,669	12,6 Menit	7,539,228,146	11,2 Menit	5,574,790,217	10 Menit	5,680,260,212	Satpol-PP Damkar
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan kejadian kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	N/A	80%	7,325,768,452	85%	5,123,401,607	85%	5,299,241,669	90%	7,539,228,146	90%	5,574,790,217	95%	5,680,260,212	Satpol-PP Damkar
	Sasaran 8: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	Persentase PPKS Mandiri	21%	23%	158,697,282	25%	595,617,002	27%	586,732,955	28%	628,334,600	30%	637,597,310	33%	646,477,823	Dinsos P3A
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek	50%	52%	102,418,507	54%	407,347,260	56%	402,889,963	58%	438,128,928	60%	447,606,192	62%	459,092,947	Dinsos P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial	7%	7%	56,278,775	10%	188,269,742	12%	183,842,993	14%	190,205,672	16%	189,991,118	18%	187,384,876	Dinsos P3A
	Sasaran 9: Peningkatan penanganan masalah sosial	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	72%	75%	117,047,883	73%	225,923,691	76%	282,935,670	79%	284,652,627	83%	309,138,090	85%	299,815,802	Dinsos P3A
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	100%	100%	117,047,883	100%	225,923,691	100%	282,935,670	100%	284,652,627	100%	309,138,090	100%	299,815,802	Dinsos P3A



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Misi 7: Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.																
Tujuan 1:Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan																
	Sasaran 1: Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	N/A	3%	741,182,177	3,5%	787,205,769	4%	787,096,001	4,5%	831,466,007	5%	857,273,922	5,5%	872,993,302	BPKD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD	95%	95%	741,182,177	95%	787,205,769	95%	787,096,001	95%	831,466,007	95%	857,273,922	95%	872,993,302	BPKD
		Persentase Pencapaian Target PAD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Tujuan 2: Meningkatkan nilai investasi / penanaman modal																
	Sasaran 1: Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	330,6 (Milyar)	365,1 (Milyar)	462,702,003	403,3 (Milyar)	450,325,477	445,4 (Milyar)	581,465,397	491,9 (Milyar)	654,792,865	543,7 (Milyar)	712,788,710	600 (Milyar)	712,218,683	DPMPTP
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 dokumen	1 dokumen	50,572,320	1 dokumen	88,740,087	1 dokumen	103,004,230	1 dokumen	112,811,640	1 dokumen	121,723,123	1 dokumen	122,424,786	DPMPTP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1 dokumen 4 Event	1 dokumen 4 Event	31,602,823	1 dokumen 5 Event	27,726,998	1 dokumen 5 Event	127,125,474	1 dokumen 6 Event	144,293,958	1 dokumen 6 Event	157,789,233	1 dokumen 7 Event	153,030,982	DPMPTP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	88	88	86,127,446	89	75,564,628	90	138,534,170	91	154,132,183	92	163,263,554	93	171,769,470	DPMPTP
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Objek Perizinan dan non perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	100 objek	100 objek	276,420,919	110 objek	242,520,182	110 objek	186,724,503	120 objek	214,040,411	120 objek	237,810,916	130 objek	230,639,552	DPMPTP
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi pelayanan yang dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	17,978,495	1 Aplikasi	15,773,581	1 Aplikasi	26,077,020	1 Aplikasi	29,514,673	1 Aplikasi	32,201,884	1 Aplikasi	34,353,894	DPMPTP
<b>TOTAL PAGU</b>					1,490,325,279,308		1,425,897,327,820		1,440,955,301,093		1,456,840,981,489		1,473,212,521,037		1,483,893,139,257	

NB : NAMA PROGRAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020 DAN KATA "DESA" PADA PROGRAM SAMA DENGAN "NAGARI"



**BAB VII**

**KERANGKA PENDANAAN**

**PEMBANGUNAN DAN PROGRAM**

**PERANGKAT DAERAH**

## BAB VII

### KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah. Pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Indikasi rencana program prioritas merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh dan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memwujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati. Dalam implementasinya secara operasional program-program tersebut dijabarkan dalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan kedalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kerangka, sebagai berikut:

- Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
- Prioritas II : membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah
- Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya



Dengan demikian, penentuan pagu indikatif pada masing-masing kelompok diatas, dilakukan secara simultan antara nilai pagu indikatif masing-masing program prioritas, total pagu indikatif, dan dana pada total dana Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III.

Berdasarkan jumlah total dana pada Dana Prioritas I, II dan III, perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan:

1. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan pada program terkait.
2. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
3. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
4. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja perangkat daerah berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap perangkat daerah beberapa tahun sebelumnya.

Dalam hal ini pola pengeluaran per perangkat daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang sudah di perhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun, baik untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 7.1.dan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan disajikan pada Tabel 7.2 berikutnya.



**Tabel 7.1 (Tabel T-C.15)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
<b>BELANJA</b>	<b>1.490.325.279.308</b>	<b>1.425.897.327.820</b>	<b>1.440.955.301.093</b>	<b>1.456.840.981.489</b>	<b>1.473.212.521.037</b>	<b>1.483.893.139.257</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.108.995.151.958</b>	<b>1.062.541.122.903</b>	<b>1.073.166.534.130</b>	<b>1.094.629.864.813</b>	<b>1.107.379.293.194</b>	<b>1.118.453.086.123</b>
Belanja Pegawai	754.398.057.616	754.398.057.616	761.942.038.192	777.180.878.956	784.952.687.745	792.802.214.622
Belanja Barang dan Jasa	286.820.823.657	239.689.031.896	242.085.922.214	246.927.640.658	251.200.046.798	253.712.047.265
Belanja Hibah	67.412.810.000	68.086.938.100	68.767.807.481	70.143.163.631	70.844.595.267	71.553.041.219
Belanja Bantuan Sosial	363.460.685	367.095.291	370.766.243	378.181.568	381.963.384	385.783.017
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>189.560.566.550</b>	<b>169.668.948.509</b>	<b>173.140.238.905</b>	<b>163.669.618.057</b>	<b>165.306.314.238</b>	<b>162.907.870.393</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.564.854.210	38.040.502.752	40.195.508.692	40.999.418.866	41.409.413.054	41.823.507.185
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.649.191.850	50.245.683.768	50.748.140.605	51.763.103.417	52.280.734.451	48.752.034.811
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.995.276.490	81.028.005.549	81.838.285.604	70.541.625.690	71.247.041.947	71.959.512.365
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	351.244.000	354.756.440	358.304.004	365.470.084	369.124.785	372.816.032
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.100.000.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>11.220.000.000</b>	<b>11.332.200.000</b>	<b>11.445.522.000</b>
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.100.000.000	11.000.000.000	11.220.000.000	11.332.200.000	11.445.522.000
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>181.769.560.800</b>	<b>183.587.256.408</b>	<b>183.648.528.058</b>	<b>187.321.498.619</b>	<b>189.194.713.605</b>	<b>191.086.660.741</b>
Belanja Bagi Hasil	6.066.500.000	6.127.165.000	6.188.436.650	6.312.205.383	6.375.327.437	6.439.080.711
Belanja Bantuan Keuangan	175.703.060.800	177.460.091.408	177.460.091.408	181.009.293.236	182.819.386.169	184.647.580.030

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2021



**Tabel 7.2 (Tabel T-C.16)**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar				625,097,053,612		605,360,847,304		597,203,759,364		616,846,412,613		614,922,736,580		602,871,383,363		
1	<b>PENDIDIKAN</b>				<b>95,490,574,263</b>		<b>79,956,927,163</b>		<b>71,226,071,078</b>		<b>71,212,297,449</b>		<b>69,626,864,832</b>		<b>67,097,604,146</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Pengelolaan dan kebutuhan Pendidikan Dasar	53.47%	55.61%	95,308,760,492	70.96%	79,796,042,110	56.31%	71,069,608,957	60.61%	71,051,606,450	45.69%	69,465,855,411	64.30%	66,938,327,001		Disdikbud
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rasio Pelatihan/Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Formal dan Non Formal	53.22%	55.61%	97,539,577	57.21%	85,577,156	58.89%	78,231,061	60.62%	78,705,795	62.42%	77,284,522	64.30%	74,953,950		Disdikbud
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar, TK, Paud dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	50,28	52,50	84,274,194	54,80	75,307,897	52,20	78,231,061	59,70	81,985,204	62,30	83,724,899	65,00	84,323,194		Disdikbud
2	<b>KESEHATAN</b>				<b>99,160,903,085</b>		<b>102,914,239,852</b>		<b>104,242,034,085</b>		<b>111,782,633,664</b>		<b>117,375,405,606</b>		<b>121,955,854,798</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	70%	75%	43,518,959,943	80%	39,557,807,230	85%	37,877,883,551	90%	38,339,073,916	95%	38,046,355,511	100%	37,325,355,387		Dinkes
		Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana RS (100%)	58.88%	62%	55,094,240,606	65%	62,755,768,427	68%	65,734,971,027	72%	72,747,262,390	76%	78,576,947,710	80%	83,828,141,882		RSUD
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	55%	60%	332,754,102	65%	364,930,709	70%	382,255,052	75%	423,032,188	80%	456,938,798	85%	487,468,547		Dinkes
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100%	100%	74,101,285	100%	81,266,720	100%	85,124,692	100%	94,205,386	100%	101,754,643	100%	108,554,771		Dinkes
	PROGRAM MEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang BerPHBS	70%	72%	140,847,149	74%	154,466,766	76%	161,799,762	78%	179,059,784	80%	193,408,945	82%	206,334,211		Dinkes
3	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>417.221.208.140</b>		<b>394.183.404.231</b>		<b>386.671.326.123</b>		<b>394.248.445.298</b>		<b>388.368.860.457</b>		<b>373.159.459.087</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	64.28%	65,3%	328,569,437,430	67%	308,811,633,900	69%	274,507,542,800	71%	276,173,355,080	73%	271,186,203,350	75%	263,008,382,732		DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	50,98%	54,82%	0	58,72%	0	62,72%	23,306,336,843	66,74%	27,038,720,146	71,04%	27,468,207,340	75,54%	27,514,345,979		DPUPR



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	6.67%	7.02%		7.43%		7.95%		8.53%		9.29%		9.94%			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	20%	55%	8,583,482,773	60%	7,530,789,684	70%	7,171,180,567	75%	7,214,697,916	80%	7,084,414,554	85%	6,870,778,792		DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	71.86%	88%	11,556,489,079	90%	12,323,110,393	92%	13,038,510,122	95%	13,773,514,204	97%	14,812,866,796	100%	11,867,708,822		DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	79.03%	81%	23,409,498,471	85%	26,015,455,273	87%	31,292,424,292	93%	32,138,199,809	96%	32,201,884,338	100%	31,855,428,943		DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	N/A	10%	7,803,166,157	20%	6,846,172,440	25.00%	6,519,255,061	30%	6,558,816,288	35%	6,440,376,868	40%	6,246,162,538		DPUPR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	20%	25%	14,669,952,375	30%	12,528,495,566	40%	11,930,236,761	45%	12,330,574,621	50%	11,785,889,668	60%	11,430,477,444		DPUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	25%	37.50%	3,511,424,771	50%	3,217,701,047	62.50%	2,933,664,777	75.00%	2,951,467,329	87.50%	2,254,131,904	100%	936,924,381		DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	26.38%	30%	3,511,424,771	35%	3,217,701,047	40%	2,933,664,777	45%	2,951,467,329	50%	2,254,131,904	55%	936,924,381		DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	22.00%	35%	15,606,332,314	43%	13,692,344,881	52%	13,038,510,122	65%	13,117,632,575	78%	12,880,753,735	87%	12,492,325,076		DPUPR
	<b>4</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>165,270,860</b>		<b>16,469,802,557</b>		<b>22,603,684,725</b>		<b>24,693,994,133</b>		<b>26,207,917,660</b>		<b>26,702,039,758</b>		
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	N/A	N/A	0	0.1	3,835,910,418	0.11	6,830,875,453	0.12	7,577,400,457	0.13	8,261,715,446	0.14	8,496,654,900		DLHKPP
			63%	63.50%		64%		64.50%		65%		65.5		66%			
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	N/A	N/A	0	20%	5,331,456,788	21%	6,152,546,964	22%	7,272,087,559	23%	8,203,430,035	24%	8,986,666,351		DLHKPP
			0.66%	0.66%		0.65%		0.64%		0.63%		0.62%		0.61%			
			N/A	N/A		1.23%		3.11%		3.85%		4.66%		5.59%			
			N/A	N/A		1.75%		1.72%		1.70%		1.68%		1.66%			





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase pemukiman yang tertata	N/A	N/A	0	20%	794,156,003	20.10%	756,233,587	20.20%	859,204,934	20.30%	843,689,370	20.40%	818,247,292	DLHKPP
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	N/A	N/A		50%		55%		60%		65%		70%		
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,	Persentase Pengembang Perumahan yang telah tersertifikasi	N/A	N/A	0	3.4%	23,961,604	6.80%	22,817,393	10%	22,955,857	10%	22,541,319	16.90%	21,861,569	DLHKPP
	KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pengembang Perumahan yang telah teregistrasi	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani	0.0227%	0.0019%	165,270,860	0.0224%	4,361,833,133	0.0223%	1,588,377,092	0.0222%	1,649,101,196	0.0220%	1,679,259,332	0.0218%	1,382,751,449	DLHKPP
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0.422%	0.419%		0.417%		0.414%		0.412%		0.41%		0.408%		
		Persentase cakupan area pelayanan	0.28%	0.28%		0.30%		0.32%		0.34%		0.36%		0.38%		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni	0.129	0.13	0	0.14	2,122,484,611	0.15	7,252,834,237	0.16	7,313,244,131	0.17	7,197,282,159	0.185	6,995,858,196	DLHPKPP
<b>5</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>12,495,094,753</b>		<b>9,953,776,081</b>		<b>10,557,672,801</b>		<b>12,942,708,945</b>		<b>11,356,316,531</b>		<b>11,992,007,456</b>	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas	60%	62%	1,513,542,957	65%	1,244,291,841	67.5%	1,496,169,036	70%	1,329,800,002	72.5%	1,365,359,896	75%	1,689,586,966	Satpol-PP Damkar
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan kejadian kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	N/A	80%	7,325,768,452	85%	5,123,401,607	85%	5,299,241,669	90%	7,539,228,146	90%	5,574,790,217	95%	5,680,260,212	Satpol-PP Damkar
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana	15 Nagari	20 Nagari	3,655,783,345	25 Nagari	3,586,082,632	30 Nagari	3,762,262,096	35 Nagari	4,073,680,796	40 Nagari	4,416,166,418	45 Nagari	4,622,160,278	BPBD
		Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana	75%	75%		79%		82%		85%		90%		98%		
		Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	14.5%	19.4%		24.3%		29.12%		33.98%		38.83%		43.68%		
<b>6</b>	<b>SOSIAL</b>				<b>564,002,511</b>		<b>1,882,697,421</b>		<b>1,902,970,552</b>		<b>1,966,333,123</b>		<b>1,987,371,494</b>		<b>1,964,418,118</b>	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	100%	100%	7,794,388	100%	68,461,724	100%	66,496,402	100%	68,867,571	100%	67,623,957	100%	65,584,707	Dinsos P3A
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	65%	65%	280,462,959	80%	992,695,004	82%	966,805,526	85%	984,478,325	87%	973,012,137	90%	952,539,787	Dinsos P3A



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek	50%	52%	102,418,507	54%	407,347,260	56%	402,889,963	58%	438,128,928	60%	447,606,192	62%	459,092,947	Dinsos P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial	7%	7%	56,278,775	10%	188,269,742	12%	183,842,993	14%	190,205,672	16%	189,991,118	18%	187,384,876	Dinsos P3A
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Tertangulangi Korban Bencana Alam	100%	100%	117,047,883	100%	225,923,691	100%	282,935,670	100%	284,652,627	100%	309,138,090	100%	299,815,802	Dinsos P3A
	<b>B Urusan Wajib Non Dasar</b>				<b>25,017,052,289</b>		<b>34,634,135,531</b>		<b>40,689,237,334</b>		<b>37,980,918,383</b>		<b>47,058,182,921</b>		<b>41,576,718,227</b>	
	<b>1 Tenaga Kerja</b>				<b>188,023,531</b>		<b>558,768,164</b>		<b>538,892,706</b>		<b>631,810,773</b>		<b>655,115,135</b>		<b>679,395,099</b>	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran terbuka	7,84%	7,61%	16,674,196	7,15%	48,607,824	7,17%	46,286,711	7,15%	51,158,767	7,1%	50,234,940	7,1%	48,720,068	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja	N/A	70%	47,809,609	70%	221,101,247	70%	216,736,546	70%	250,546,782	70%	260,191,225	72 %	266,711,140	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	N/A	2400 orang	53,623,358	2400 orang	195,540,377	2430	178,080,623	2500	221,884,755	2500	231,982,375	2500	242,163,722	Disnagkerkop & UKM
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	N/A	51%	69,916,369	51%	93,518,716	51%	97,788,826	51%	108,220,469	51%	112,706,595	51%	121,800,169	Disnagkerkop & UKM
	<b>2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				<b>366,896,328</b>		<b>1,002,964,263</b>		<b>767,968,246</b>		<b>795,584,416</b>		<b>803,759,033</b>		<b>770,776,457</b>	
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	40%	40%	81,980,844	45%	407,347,260	46%	409,409,218	47%	423,043,651	48%	431,505,250	50%	406,000,565	Dinsos P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	12%	12%	74,334,560	13%	109,538,759	13%	108,871,560	14%	113,467,522	14%	111,418,520	14%	109,307,844	Dinsos P3A
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Penurunan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	12%	12%	74,124,616	13%	95,846,414	13%	92,573,422	14%	96,414,599	14%	99,181,804	14%	97,440,136	Dinsos P3A
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	40%	40%	16,071,401	45%	273,846,898	46%	40,419,381	47%	40,664,661	48%	41,862,450	50%	40,600,056	Dinsos P3A
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	40%	40%	78,018,396	45%	75,307,897	46%	76,275,284	47%	80,017,559	48%	78,572,598	50%	76,827,799	Dinsos P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tertangani	12%	12%	42,366,510	13%	41,077,035	13%	40,419,381	14%	41,976,424	14%	41,218,412	14%	40,600,056	Dinsos P3A



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	3	Pangan			248,897,443		625,534,776		686,933,906		769,808,268		852,512,686		991,622,026			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan jumlah lumbung pangan masyarakat per tahun	N/A	0	0	1 Unit	68,461,724	1 Unit	65,192,551	1 Unit	65,588,163	1 Unit	64,403,769	1 Unit	62,461,625	Distan-KP	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan (PPH)	88.10	88.50	225,487,944	88.90	501,139,823	89.30	561,959,786	89.70	637,516,943	90.10	716,169,908	90.50	850,727,338	Distan-KP	
			Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari)	2,431.00	2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00	
			Ketersediaan protein (Gram/kap/hari)	54.04	54.85		55.66		56.47		57.28		58.09		58.90		58.90	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan daerah rawan pangan/nagari yang rawan pangan	N/A	1 nagari	14,279,794	1 nagari	13,692,345	1 nagari	16,298,138	1 nagari	19,676,449	1 nagari	22,541,319	1 nagari	24,984,650	Distan-KP	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi	70%	75%	9,129,704	80%	42,240,884	85%	43,483,431	90%	47,026,713	95%	49,397,691	100%	53,448,413	Distan-KP	
	4	Pertanahan			546,581,111		787,309,831		798,608,745		901,837,240		917,753,704		983,770,600			
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Penyelesaian Izin Lokasi	0	0	0	1	34,230,862	1	32,596,275	1	32,794,081	1	32,201,884	1	31,230,813	DLHPKPP	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian kasus tanah Negara	100%	100%	0	100%	102,692,587	100%	114,086,964	100%	114,779,285	100%	112,706,595	100%	109,307,844	DLHPKPP	
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	50%	60%	390,517,788	65%	273,846,898	70%	195,577,652	75%	196,764,489	80%	193,211,306	85%	187,384,876	DLHPKPP	
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0%	0%	0	5%	205,385,173	15%	260,770,202	20%	327,940,814	20	322,018,843	25	374,769,752	DLHPKPP	
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Cakupan pelayanan pengelolaan izin membuka tanah	5%	5%	39,015,831	5%	34,230,862	5%	32,596,275	5%	32,794,081	5%	32,201,884	5%	31,230,813	DLHPKPP	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Lahan milik Pemda yang Bersertifikat	8.70%	8.80%	117,047,492	8.90%	136,923,449	9%	162,981,377	9.50%	196,764,489	10%	225,413,190	10.50%	249,846,502	DLHPKPP	
	5	Lingkungan Hidup			560,651,691		1,348,524,775		1,126,592,420		1,154,850,080		1,174,629,355		1,019,373,726			
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	156,063,323	Ada	308,077,760	Ada	228,173,927	Ada	196,764,489	Ada	193,211,306	Ada	31,230,813	DLHKPP	
			Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten / kota	Tidak Ada	Tidak Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada			
			Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak Ada	Tidak Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada			



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	55.41	55.79	83,883,857	55.89	360,622,133	55.99	222,828,138	56.09	237,297,973	56.19	248,469,740	56.29	254,843,432	DLHKPP
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	93.32	91.83		91.93		92.06		92.16		92.26		96.36		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Keanekaragaman Hayati yang terkelola	100%	100%	229,017,347	100%	270,423,811	100%	284,565,483	100%	311,543,774	100%	329,425,277	100%	344,163,556	DLHKPP
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pelayanan pengawasan pengelolaan LB3 terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan	N/A		21,458,668		47,238,549		46,156,279		47,853,067		48,658,268		37,476,975	DLHKPP
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	31%	35%	58,523,746	40%	102,007,969	45%	97,136,900	50%	105,596,942	55%	103,690,068	60%	108,058,612	DLHKPP
		Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0 Orang	2 Orang		2 Orang		3 Orang		3 Orang		4 Orang		5 Orang		
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	N/A	N/A	0	1 Kelompok	20,538,517	1 Kelompok	19,557,765	1 Kelompok	19,676,449	1 Kelompok	19,321,131	1 Kelompok	18,738,488	DLHKPP
		Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	N/A	N/A		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		
		Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	N/A	N/A		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		
		Penetapan hak MHA	N/A	N/A		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		
		Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	N/A	N/A		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		
		Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana	N/A	N/A		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Tertaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	0	0	2 Kali	123,231,104	2 Kali	117,346,591	2 Kali	118,058,693	2 Kali	115,926,784	2 Kali	112,430,926	DLHKPP
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Tertaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	11,704,749	Ada	54,769,380	Ada	52,154,040	Ada	59,029,347	Ada	57,963,392	Ada	56,215,463	DLHKPP



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100%	100%	0	100%	61,615,552	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	57,963,392	100%	56,215,463	DLHKPP
	6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1,522,299,397		176,002,086		649,408,487		594,876,773		682,156,224		722,059,820	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan KTP EL	98.68%	99%	1,077,432,311	99%	0	99%	228,956,238	99%	264,005,473	99%	279,301,112	99%	292,282,430	Disukcapil
			Persentase Penerbitan KK	99.31%	100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%		
			Persentase Penerbitan KIA	20.06%	30%		35%		40%		45%		50%		50%		
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan akta kelahiran umur 0-17 tahun	91.73%	93%	282,981,821	95%	20,538,517	95%	236,420,785	97%	150,656,010	98%	208,198,063	99%	222,111,666	Disukcapil
			Persentase Penerbitan akta perkawinan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase penerbitan akta perceraian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase penerbitan akta kematian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik	N/A	100%	150,617,493	100%	146,563,544	100%	153,521,351	100%	169,898,272	100%	183,513,265	100%	195,777,215	Disukcapil
			Jumlah inovasi daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	23	27		30		33		38		43		47		
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah buku laporan data kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan	3	3	11,267,772	3	8,900,024	3	30,510,114	3	10,317,018	3	11,143,784	3	11,888,509	Disukcapil
	7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				353,804,917		2,095,258,390		2,294,486,822		2,654,672,199		2,997,744,101		3,343,446,646	
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Nagari yang tertata	60%	100%	88,451,229	100%	127,924,806	100%	140,088,584	100%	162,079,496	100%	183,025,556	100%	204,132,227	DPMD
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Nagari yang telah melakukan kerjasama	55%	100%	88,451,229	100%	36,929,144	100%	40,440,566	100%	46,788,870	100%	52,835,547	00%	58,928,590	DPMD
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase administrasi Nagari dengan kategori baik	60%	100%	88,451,229	100%	1,147,902,765	100%	1,257,051,531	100%	1,454,381,747	100%	1,642,336,219	100%	1,831,731,908	DPMD
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	65%	100%	88,451,229	100%	782,501,676	100%	856,906,141	100%	991,422,086	100%	1,119,546,779	100%	1,248,653,920	DPMD
	8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				4,716,803,256		5,093,416,741		4,987,296,618		5,051,995,145		4,800,754,811		5,040,404,571	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Total Fertility Rate ( TFR )	2.42	2.38	474,048,587	2.34	850,416,479	2.31	862,939,450	2.27	807,179,091	2.24	751,384,600	2.22	751,836,843	DPPKB
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian alat kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate = CPR)	65.39	65.50	3,187,727,590	65.75	3,144,531,894	66.00	3,072,768,730	66.25	3,187,666,045	66.50	3,228,318,766	66.75	3,239,181,190	DPPKB



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15–19 per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	14	14	1,055,027,080	13	1,098,468,368	12	1,051,588,438	11	1,057,150,009	10	821,051,445	9	1,049,386,537	DPPKB
	9	Perhubungan			10,143,708,055		9,030,443,757		8,633,319,092		8,739,048,807		8,598,289,541		8,404,211,695		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	85%	85%	10,135,904,888	87%	8,905,501,110	90%	8,507,497,469	92%	8,605,576,895	93%	8,460,626,485	100%	8,263,673,038	DISHUB
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penurunan tingkat kecelakaan dipertintasan sebidang	21	21	7,803,166	18	124,942,647	16	125,821,623	14	133,471,911	12	137,663,056	10	140,538,657	DISHUB
	10	Komunikasi dan Informatika			1,876,781,883		4,012,695,394		4,570,499,366		5,824,003,219		7,440,056,204		7,825,797,324		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0%	41.00%	114,997,288	59.00%	822,695,012	88.00%	1,098,530,130	100%	1,215,716,055	100%	1,313,138,855	100%	1,400,894,200	Diskominfo
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi	50%	55%	1,761,784,595	60%	3,190,000,382	62%	3,471,969,236	63%	4,608,287,164	64%	6,126,917,349	65%	6,424,903,124	Diskominfo
	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			649,649,477		486,601,291		499,872,357		523,893,977		522,805,965		523,280,387		
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	40.91%	41.50%	19,507,915	41.98%	41,077,035	42.80%	42,375,158	43.75%	45,911,714	44.50%	46,370,713	45.00%	49,969,300	Disnagkerkop & UKM
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	persentase koperasi sehat	40%	40%	24,423,910	40%	44,500,121	40%	43,027,083	40%	45,255,832	40%	45,082,638	40%	46,846,219	Disnagkerkop & UKM
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	koperasi mampu melaksanakan RAT tepat waktu	57 Koperasi	57 Koperasi	320,525,974	57 Koperasi	281,216,118	57 Koperasi	275,609,983	57 Koperasi	277,282,485	57 Koperasi	272,275,305	57 Koperasi	264,064,641	Disnagkerkop & UKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi yang melaksanakan RAT	40%	40%	25,945,527	40%	23,961,604	40%	24,773,169	40%	26,235,265	40%	27,049,583	40%	28,107,731	Disnagkerkop & UKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM	60%	62%	213,675,660	64%	20,538,517	65%	26,077,020	67%	32,794,081	69%	32,201,884	70%	31,230,813	Disnagkerkop & UKM
			Jumlah UMKM	11.021 Orang	11.297 Orang		11.579 Orang		11.868 Orang		12.165 Orang		12.469 Orang		12.500 Orang		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	N/A	0.9 %	45,570,490	0.9 %	75,307,897	0.9 %	88,009,943	0.9 %	96,414,599	0.9 %	99,825,841	0.9 %	103,061,682	Disnagkerkop & UKM



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	12	Penanaman Modal			462,702,003		450,325,477		581,465,397		654,792,865		712,788,710		712,218,683		
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 dokumen	1 dokumen	50,572,320	1 dokumen	88,740,087	1 dokumen	103,004,230	1 dokumen	112,811,640	1 dokumen	121,723,123	1 dokumen	122,424,786	DPMPTP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1 dokumen 4 Event	1 dokumen 4 Event	31,602,823	1 dokumen 5 Event	27,726,998	1 dokumen 5 Event	127,125,474	1 dokumen 6 Event	144,293,958	1 dokumen 6 Event	157,789,233	1 dokumen 7 Event	153,030,982	DPMPTP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	88	88	86,127,446	89	75,564,628	90	138,534,170	91	154,132,183	92	163,263,554	93	171,769,470	DPMPTP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Objek Perizinan dan non perizinan yang diawasi, dikendalikan dan diterbitkan	100 objek	100 objek	276,420,919	110 objek	242,520,182	110 objek	186,724,503	120 objek	214,040,411	120 objek	237,810,916	130 objek	230,639,552	DPMPTP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi pelayanan yang dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	17,978,495	1 Aplikasi	15,773,581	1 Aplikasi	26,077,020	1 Aplikasi	29,514,673	1 Aplikasi	32,201,884	1 Aplikasi	34,353,894	DPMPTP
	13	Ke pemudaan dan Olah raga			1,246,858,400		6,534,671,594		12,534,571,706		7,768,917,893		15,060,821,305		8,762,741,424		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	18.51%	37.03%	345,592,709	46.29%	554,539,968	55.55%	580,213,700	64.81%	800,175,587	74.07%	856,570,123	83.33%	830,739,618	Disparpora
			Persentase Wirausaha Muda	0,14%	0,14%		0,14%		0,17%		0,20%		0,25%	0,25%			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Berprestasi	357 Orang	360 Orang	901,265,691	365 Orang	5,911,669,902	370 Orang	11,872,867,317	375 Orang	6,870,360,061	380 Orang	14,104,425,340	385 Orang	7,832,063,206	Disparpora
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pembina Pramuka yang dilatih	N/a	N/A	0	40 Orang	68,461,724	50 Orang	81,490,688	55 Orang	98,382,244	60 Orang	99,825,841	65 Orang	99,938,601	Disparpora
	14	Statistik			26,437,127		48,709,148		51,021,515		56,464,246		60,989,073		65,064,893		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	26,437,127	Ada	48,709,148	Ada	51,021,515	Ada	56,464,246	Ada	60,989,073	Ada	65,064,893	Diskominfo
	15	Persandian			22,534,568		41,518,869		43,489,894		48,129,187		51,986,074		55,460,236		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	9,09%	15,91%	22,534,568	61,36%	41,518,869	68,18%	43,489,894	79,55%	48,129,187	90,91%	51,986,074	100%	55,460,236	Diskominfo



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	16	Kebudayaan			1,779,121,884		1,896,389,766		1,486,390,154		1,380,630,829		1,291,295,562		1,252,355,589		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya	5	6	1,283,620,833	6	1,280,234,246	7	844,243,530	7	849,366,709	7	834,028,804	7	808,878,049	Disdikbud
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISONAL	Rasio Pengembangan Kesenian Tradisional Masyarakat Pelakunya	5	6	245,799,734	6	222,500,604	7	208,616,162	7	209,882,121	7	206,092,060	7	199,877,201	Disdikbud
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rasio Pembinaan Sejarah Lokal	45	50	70,228,495	50	65,038,638	50	61,932,923	50	62,308,755	50	61,183,580	50	59,338,544	Disdikbud
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya	45	50	179,472,822	50	328,616,277	50	371,597,538	50	259,073,243	50	189,991,118	50	184,261,795	Disdikbud
	17	Perpustakaan			119,376,737		222,500,604		213,505,603		229,558,570		225,413,190		218,615,689		
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	90.17	90.20	103,770,405	90.25	167,731,225	90.30	161,351,563	90.40	177,088,040	90.50	173,890,175	91.00	168,646,389	Diskearpus
			Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	2.87	2.90		2.95		3.00		3.20		3.50		4.00		
			Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	0.30%	0.40%		0.45%		0.50%		0.55%		0.60%		0.80%		
			Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	0.14	0.15		0.20		0.20		0.25		0.30		0.45		
			Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	0.33%	0.35%		0.40%		0.40%		0.45%		0.50%		0.55%		
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dalihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	0%	10%	15,606,332	20%	54,769,380	30%	52,154,040	40%	52,470,530	50%	51,523,015	60%	49,969,300	Diskearpus
	18	Kearsipan			185,924,479		222,500,604		224,914,300		200,043,897		209,312,248		206,123,364		
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks kearsipan Eksternal	N/A	73.48	82,924,247	60.80	99,269,500	63.95	101,048,453	65.00	108,220,469	68.50	115,926,784	70.00	112,430,926	Diskearpus
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	8.84%	10.88%		13.95%		16.27%		18.60%		20.93%		23.25%		
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan	N/A	5%	19,507,915	10%	17,115,431	15%	16,298,138	20%	16,397,041	25%	16,100,942	30%	15,615,406	Diskearpus
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Peningkatan Status yang terselamatkan	40%	45%	83,492,317	50%	106,115,673	55%	107,567,709	60%	75,426,387	65%	77,284,522	70%	78,077,032	Diskearpus
			Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan	20%	30%		40%		45%		50%		60%		70%		





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C	Urusan Pemerintahan Pilihan					29,071,419,504		38,289,998,918		38,721,235,389		39,945,935,400		40,255,951,729		41,372,821,731	
1	Kelautan dan Perikanan					2,603,338,387		3,782,510,273		3,935,674,280		4,294,712,905		4,634,752,809		4,396,673,810	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	18,080.30	18,441.90	898,706,409	18,810.73	1,136,464,625	19,186.93	1,193,023,676	19,570.66	1,321,601,482	19,962.06	1,429,763,665	20,361.29	1,433,494,302	Diskan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	52,511.60	53,561.83	1,613,530,169	54,633.06	2,259,236,905	55,725.72	2,341,716,418	56,840.23	2,566,464,813	57,977.03	2,773,483,894	59,136.57	2,529,071,212	Diskan
			Produksi Benih Ikan (ekor/tahun)	687,828,985	480,000,000		495,000,000		510,000,000		525,000,000		540,000,000		555,000,000		
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi (%)	55	60	11,704,593	70	123,231,104	80	127,125,474	90	127,896,918	100	144,908,480	100	149,907,901	Diskan
			Cakupan Pembinaan Pokmaswas (%)	55	100		100		100		100						
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan (kg/ kapita/tahun)	43.45	43.95	79,397,216	44.45	263,577,639	44.95	273,808,713	45.45	278,749,692	45.95	286,596,771	46.45	284,200,395	Diskan
			Produksi Ikan Olahhan (ton/tahun)	176.30	179.82		183.41		187.07		190.81		194.62		198.51		
2	Pariwisata					2,623,209,875		8,414,630,546		7,745,526,938		8,245,087,955		8,508,381,880		9,057,560,296	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	4 Objek Wisata	4 Objek Wisata	1,520,951,791	5 Objek Wisata	5,579,630,539	5 Objek Wisata	4,993,749,377	6 Objek Wisata	5,424,141,070	6 Objek Wisata	5,686,852,774	6 Objek Wisata	5,896,377,436	Disparpora
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	41 Orang	41 Orang	673,083,946	45 Orang	1,226,149,484	50 Orang	1,187,156,347	55 Orang	1,214,036,895	60 Orang	1,211,434,889	60 Orang	1,193,641,661	Disparpora
			Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	36 Orang	36 Orang		40 Orang		45 Orang		50 Orang		55 Orang		60 Orang		
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	208872 Orang	250000 Orang	312,126,646	265000 Orang	1,266,541,901	275000 Orang	1,206,062,186	300000 Orang	1,213,381,013	330000 Orang	1,191,469,721	350000 Orang	1,467,848,196	Disparpora
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif	2 Paket	2 Paket	117,047,492	3 Paket	342,308,622	4 Paket	358,559,028	5 Paket	393,528,977	6 Paket	418,624,496	7 Paket	499,693,003	Disparpora
3	Pertanian (Peternakan)					8,583,186,057		12,078,828,006		11,153,261,512		11,287,843,513		11,142,614,522		12,418,110,671	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan	70%	75%	1,214,812,514	80%	3,871,510,515	85%	3,686,638,737	90%	3,709,010,611	95%	3,642,033,119	100%	3,532,204,915	Distan-KP
			Persentase penggunaan benih/bibit bermutu per tahun	30%	35%		40%		45%		50%		55%		60%		
			Jumlah pelepasan bibit/benih bersertifikat	0 Varietas	2 Varietas		1 Varietas		0 Varietas		0 Varietas		0 Varietas		0 Varietas		
			Jumlah Produksi Daging (Ton)	2,305	2,340		2,375		2,410		2,446		2,483		2,520		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana	90%	91%	3,496,247,417	92%	4,594,763,449	93%	3,951,603,428	94%	3,975,583,205	95%	3,903,791,932	96%	3,786,070,198	Distan-KP	
		Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	0%	5%		5%		5%		5%		5%		5%			
		Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif	N/A	11.40%		23.50%		35.20%		47.00%		58.82%		70.5%			
			Persentase tersedianya prasarana pengembangan peternakan	6%	12.00%	78,031,662	17.00%	68,461,724	23.00%	65,192,551	29.00%	65,588,163	35.00%	64,403,769	48.0%	62,461,625	Disnakkeswan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan	250 Ha	300 Ha	101,441,160	350 Ha	188,269,742	400 Ha	195,577,652	450 Ha	213,161,529	500 Ha	225,413,190	550 Ha	249,846,502	Distan-KP	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses	N/A	0%	0	100%	17,115,431	100%	16,298,138	100%	16,397,041	100%	16,100,942	100%	15,615,406	Distan-KP	
		Persentase Pelayanan Perizinan Bidang Peternakan	N/A	100%	31,212,665	100%	27,384,690	100%	26,077,020	100%	26,235,265	100%	25,761,507	100%	24,984,650	Disnakkeswan	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas kelompok tani	25 Poktan	34 Poktan	225,706,581	34 Poktan	247,660,288	34 Poktan	235,834,052	34 Poktan	237,265,179	34 Poktan	232,980,633	34 Poktan	225,954,930	Distan-KP	
		Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Peternak	0.30%	0.50%	117,047,492	0.50%	102,692,587	0.50%	97,788,826	0.50%	98,382,244	0.50%	96,605,653	0.50%	93,692,438	Disnakkeswan	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	25%	30%	244,239,101	35%	243,039,122	40%	273,808,713	45%	306,296,721	50%	343,272,087	55%	1,304,198,738	Disnakkeswan	
	4	Kehutanan (Provinsi)															
	5	Energi dan sumber daya mineral (Provinsi)															
	6	Perdagangan			311,695,904		897,533,207		941,380,431		1,016,616,525		1,076,831,012		1,118,687,711		
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	N/A	60%	14,045,699	60%	205,385,173	62%	208,616,162	62%	219,720,346	63%	231,853,567	63%	243,600,339	Disnagkerkop & UKM
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar yang Kondusif	N/A	1 Pasar	173,977,637	1 Pasar	201,962,087	1 Pasar	218,395,045	1 Pasar	242,676,203	1 Pasar	241,514,133	1 Pasar	249,846,502	Disnagkerkop & UKM
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	jumlah pasar yang diawasi	N/A	17 Kecamatan	35,114,248	17 Kecamatan	157,461,966	17 Kecamatan	166,241,004	17 Kecamatan	173,808,632	17 Kecamatan	183,550,741	17 Kecamatan	179,264,865	Disnagkerkop & UKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	N/A	1 Pedagang	14,747,984	1 Pedagang	27,384,690	2 Pedagang	26,077,020	2 Pedagang	32,794,081	2 Pedagang	38,642,261	2 Pedagang	43,723,138	Disnagkerkop & UKM
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pasar tertib ukur	N/A	1 Pasar	42,136,504	1 Pasar	141,031,152	1 Pasar	155,810,196	1 Pasar	163,970,407	1 Pasar	175,178,251	1 Pasar	196,129,504	Disnagkerkop & UKM



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Terwujudnya pasar BANA	N/A	1 Pasar	31,673,832	1 Pasar	164,308,139	1 Pasar	166,241,004	1 Pasar	183,646,856	1 Pasar	206,092,060	1 Pasar	206,123,364	Disnagkerkop & UKM
7	<b>Perindustrian</b>				<b>14,949,989,281</b>		<b>13,116,496,886</b>		<b>14,945,392,227</b>		<b>15,101,674,502</b>		<b>14,893,371,506</b>		<b>14,381,789,243</b>	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	1 sentra	1 sentra	14,949,989,281	1 sentra	13,116,496,886	1 sentra	14,733,516,438	1 sentra	14,757,336,647	1 sentra	14,555,251,721	1 sentra	14,053,865,710	DPMPPT
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Peningkatan jumlah Industri kecil dan Menengah yang bersertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	0	sertifikasi	0	sertifikasi	162,981,377	sertifikasi	163,970,407	sertifikasi	161,009,422	sertifikasi	156,154,063	DPMPPT
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya data dan Informasi tentang Industri kecil dan Menengah	1 Dokumen Ranperda	1 Dokumen Ranperda	0	1 Dokumen Ranperda	0	1 Dokumen Ranperda	48,894,413	1 Dokumen Ranperda	180,367,448	1 Dokumen Ranperda	177,110,364	1 Dokumen Ranperda	171,769,470	DPMPPT
8	<b>Transmigrasi (Provinsi)</b>															
D	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>				<b>24,220,172,130</b>		<b>24,352,154,740</b>		<b>23,665,126,103</b>		<b>24,548,252,871</b>		<b>24,403,724,263</b>		<b>28,865,923,467</b>	
1	<b>Sekretariat Daerah</b>				<b>11,298,010,365</b>		<b>9,718,461,149</b>		<b>9,485,746,345</b>		<b>10,020,474,793</b>		<b>10,331,500,807</b>		<b>11,532,822,424</b>	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	N/A	100%	2,554,162,818	100%	2,496,470,473	100%	2,436,690,881	100%	2,574,051,495	100%	2,653,947,606	100%	2,702,611,645	Sekretariat Daerah Bagian Kesra
		Persentase Rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	70%	70%	268,279,680	75%	235,377,399	75%	229,741,136	75%	242,692,053	80%	250,224,984	85%	254,813,228	Setda Bag Hukum
		Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri	2,600 (tinggi)	2,600 (tinggi)	236,045,776	2,700 (tinggi)	207,096,716	2,800 (tinggi)	202,137,652	2,900 (tinggi)	213,532,512	3,000 (sangat tinggi)	220,160,358	3,050 (sangat tinggi)	224,197,323	Setda Bag PUM
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu	100%	100%	144,358,574	100%	126,654,190	100%	123,621,374	100%	130,590,132	100%	134,643,525	100%	137,112,412	Sekretariat Daerah
		Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD	10%	10%	311,908,002	11%	273,655,068	12%	267,102,221	13%	282,159,250	14%	290,917,205	15%	296,251,601	
		Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	100%	100%	143,326,995	100%	125,749,126	100%	122,737,982	100%	129,656,942	100%	133,681,370	100%	136,132,615	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	B	B	6,600,618,187	B	5,273,148,926	BB	5,146,879,983	BB	5,437,018,792	BB	5,605,778,687	BB	6,720,447,228	Sekretariat Daerah
		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	80%	80%	1,039,310,333	85%	980,309,251	90%	956,835,115	95%	1,010,773,618	100%	1,042,147,071	100%	1,061,256,372	Sekretariat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolkan	80%	80%		85%		90%		95%		100%		100%			
		Persentase acara daerah yang sesuai standar keprotokolkan	80%	80%		85%		90%		95%		100%		100%			
		Persentase kerjasama informasi dengan mass media	80%	80%		85%		90%		95%		100%		100%			
	2	Sekretariat DPRD			12,922,161,764		14,633,693,591		14,179,379,757		14,527,778,077		14,072,223,456		17,333,101,042		
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah produk Peraturan Daerah yang dihasilkan	11	8	12,922,161,764	8	14,633,693,591	8	14,179,379,757	8	14,527,778,077	8	14,072,223,456	8	17,333,101,042	Setwan
	E	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			160,601,428,921		145,614,862,574		145,714,887,923		153,524,170,338		158,715,913,135		161,770,335,626		
	1	Perencanaan			1,551,815,654		1,704,012,320		1,855,966,723		2,039,850,895		2,518,251,115		2,285,226,585		
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas perencanaan	N/A	100%	623,238,881	100%	807,848,348	100%	917,259,187	100%	1,001,006,542	100%	1,396,157,778	100%	1,088,145,225	Bapelitbangda
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	N/A	90%	928,576,773	92%	896,163,972	93%	938,707,536	94%	1,038,844,353	95%	1,122,093,337	95%	1,197,081,360	Bapelitbangda
	2	Keuangan			155,991,353,758		137,407,999,669		137,388,839,576		145,133,693,627		149,638,505,527		152,382,347,956		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	11/30/2020	11/30/2021	154,840,025,698	11/30/2022	136,226,718,150	11/30/2023	136,207,722,774	11/30/2024	143,885,995,164	11/30/2025	148,352,079,690	11/30/2026	151,072,333,606	BPKD
			Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	100%	100%	410,145,884	100%	394,075,750	100%	394,020,800	100%	416,232,456	100%	429,151,915	100%	437,021,047	BPKD
			Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase BMD yang tertib	65%	65%		70%		75%		80%		85%		90%		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD	95%	95%	741,182,177	95%	787,205,769	95%	787,096,001	95%	831,466,007	95%	857,273,922	95%	872,993,302	BPKD
			Persentase Pencapaian Target PAD	100%	100%		100%		100%		95%		95%		95%		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	Kepegawaian			1,384,682,954		3,231,749,393		3,357,137,332		3,700,765,654		3,965,966,119		4,197,714,378		
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek	93%	93%	1,384,682,954	93%	3,231,749,393	93%	3,357,137,332	93%	3,700,765,654	93%	3,965,966,119	93%	4,197,714,378	BKPSDM
			Persentase peningkatan terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	92%	92%		92%		92%		92%		92%		92%		
			Persentase peningkatan dokumen ASN yang tersampaikan	75%	75%		75%		75%		75%		75%		75%		
			Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN	73%	73%		73%		73%		73%		73%		73%		
	4	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)			1,327,709,018		1,764,943,255		1,734,121,846		1,803,772,861		1,823,565,338		1,821,337,507		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN	90%	90%	1,327,709,018	90%	1,764,943,255	90%	1,734,121,846	90%	1,803,772,861	90%	1,823,565,338	90%	1,821,337,507	BKPSDM
	5	Penelitian dan Pengembangan			345,867,537		1,506,157,937		1,378,822,445		846,087,301		769,625,036		1,083,709,200		
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kajian Kelitbang Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	60%	65%	345,867,537	70%	1,506,157,937	75%	1,378,822,445	80%	846,087,301	85%	769,625,036	90%	1,083,709,200	Bapelitbangda
	F	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah			2,275,949,473		2,296,346,583		2,512,930,473		2,901,295,664		3,202,767,214		3,400,410,886		
	1	Inspektorat Daerah			2,275,949,473		2,296,346,583		2,512,930,473		2,901,295,664		3,202,767,214		3,400,410,886		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan yang dilakukan	N/A	60%	1,707,332,755	60%	1,722,633,909	60%	1,884,666,114	60%	2,176,215,244	60%	2,393,211,842	60%	2,504,086,561	Inspektorat
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang dilakukan	N/A	60%	568,616,718	60%	573,712,674	60%	628,264,359	60%	725,080,420	60%	809,555,372	60%	896,324,324	Inspektorat
	G	Unsur Kewilayahan			5,867,799,214		5,559,791,632		6,000,649,025		8,374,999,209		7,665,347,372		7,327,433,884		
	1	Kecamatan			5,867,799,214		5,559,791,632		6,000,649,025		8,374,999,209		7,665,347,372		7,327,433,884		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	74,130,078	100%	65,038,638	100%	63,888,700	100%	77,394,032	100%	83,724,899	100%	91,818,589	BATANG ANAI
			Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	2,223,902	100%	6,846,172	100%	9,778,883	100%	13,117,633	100%	16,100,942	100%	18,738,488	LUBUK ALUNG
			Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	2,223,902	100%	6,846,172	100%	9,778,883	100%	13,117,633	100%	16,100,942	100%	18,738,488	ULAKAN TAPAKIS



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	58.523,746	100%	55.453,997	100%	9.778,883	100%	67.759,131	100%	70.612,936	100%	18.738,488	NAN SABARIS
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	74.130,078	100%	65.723,255	100%	66.496,402	100%	67.555,808	100%	66.979,919	100%	71.830,869	SINTUK TOBOH GADANG
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	41.824,971	100%	47.211,205	100%	61.672,153	100%	68.251,042	100%	73.720,418	100%	78.647,057	ENAM LINGKUNG
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	N/A	100%	5.462,216	100%	4.792,321	100%	15.255,057	100%	18.889,391	100%	20.403,114	100%	27.795,423	2X11 ENAM LINGKUNG
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	58.523,746	100%	65.038,638	100%	65.192,551	100%	81.985,204	100%	90.165,276	100%	96.815,519	2X11 KAYU TANAM
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	64.766,279	100%	62.505,554	100%	65.472,879	100%	72.457,211	100%	78.263,653	100%	83.493,910	PATAMUAN
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	2.223,902	100%	6.846,172	100%	9.778,883	100%	13.117,633	100%	16.100,942	100%	18.738,488	PADANG SAGO
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	2.223,902	100%	6.846,172	100%	9.778,883	100%	13.117,633	100%	16.100,942	100%	18.738,488	VII KOTO SUNGAI SARIK
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	23.409,498	100%	21.223,135	100%	20.926,809	100%	21.847,417	100%	22.310,110	100%	22.551,832	V KOTO TIMUR
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	2.223,902	100%	6.846,172	100%	9.778,883	100%	13.117,633	100%	16.100,942	100%	18.738,488	V KOTO KAMPUNG DALAM
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	58.523,746	100%	59.219,392	100%	63.986,488	100%	72.124,023	100%	16.100,942	100%	18.738,488	SUNGAI LIMAU
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	11.704,749	100%	11.296,185	100%	11.832,448	100%	13.094,677	100%	14.144,034	100%	18.738,488	BATANG GASAN
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	23.409,498	100%	21.223,135	100%	20.926,809	100%	21.847,417	100%	22.310,110	100%	22.551,832	SUNGAI GERINGGING
		Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	2.223,902	100%	6.846,172	100%	9.778,883	100%	13.117,633	100%	16.100,942	100%	18.738,488	IV KOTO AUR MALINTANG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	93.637,994	100%	92.423,328	100%	98.440,751	100%	110.253,702	100%	126.495,442	100%	138.072,048	BATANG ANAI
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	85.834,828	100%	82.838,687	100%	86.771,285	100%	96.027,629	100%	103.722,913	100%	110.654,580	LUBUK ALUNG
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	93.637,994	100%	90.369,476	100%	94.659,583	100%	104.757,414	100%	113.152,269	100%	120.714,087	ULAKAN TAPAKIS
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	93.637,994	100%	90.369,476	100%	94.659,583	100%	104.757,414	100%	113.152,269	100%	120.714,087	NAN SABARIS
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	54.622,163	100%	61.615,552	100%	59.977,147	100%	62.964,636	100%	68.267,995	100%	74.953,950	SINTUK TOBOH GADANG
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	29.839,307	100%	32.204,395	100%	33.733,233	100%	37.331,733	100%	40.323,354	100%	43.018,111	ENAM LINGKUNG
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	90%	28.473,051	92%	24.981,067	100%	42.375,158	100%	46.895,536	100%	50.653,564	100%	52.014,919	2X11 ENAM LINGKUNG
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	62.425,329	100%	62.300,169	100%	66.887,557	100%	75.334,564	100%	88.778,019	100%	97.834,019	2X11 KAYU TANAM
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	58.523,746	100%	56.480,923	100%	59.162,240	100%	65.473,384	100%	70.720,168	100%	75.446,304	PATAMUAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	88,175,778	100%	85,097,923	100%	89,137,774	100%	98,646,565	100%	106,551,720	100%	113,672,432	PADANG SAGO
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	187,275,988	100%	85,097,923	100%	89,137,774	100%	98,646,565	100%	106,551,720	100%	113,672,432	VII KOTO SUNGAI SARIK
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	93,637,994	100%	90,369,476	100%	94,659,583	100%	104,757,414	100%	113,152,269	100%	120,714,087	V KOTO TIMUR
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	187,275,988	100%	85,097,923	100%	89,137,774	100%	98,646,565	100%	106,551,720	100%	113,672,432	V KOTO KAMPUNG DALAM
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	187,275,988	100%	85,097,923	100%	89,137,774	100%	98,646,565	100%	106,551,720	100%	113,672,432	SUNGAI LIMAU
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	93,637,994	100%	90,369,476	100%	94,659,583	100%	104,757,414	100%	113,152,269	100%	120,714,087	BATANG GASAN
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	93,637,994	100%	90,369,476	100%	94,659,583	100%	104,757,414	100%	113,152,269	100%	120,714,087	SUNGAI GERINGGING
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	N/A	100%	93,637,994	100%	90,369,476	100%	94,659,583	100%	104,757,414	100%	113,152,269	100%	120,714,087	IV KOTO AUR MALINTANG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	66,326,912	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	BATANG ANAI
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	66,326,912	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	LUBUK ALUNG
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	66,326,912	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	ULAKAN TAPAKIS
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	46,818,997	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	NAN SABARIS
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	35,114,248	100%	34,230,862	100%	35,855,903	100%	36,073,490	100%	41,862,450	100%	40,600,056	SINTUK TOBOH GADANG
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	5,702,554	100%	10,638,130	100%	11,143,154	100%	12,331,852	100%	13,320,079	100%	14,210,243	ENAM LINGKUNG
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	5,462,216	70%	4,792,321	75%	6,519,255	80%	7,214,698	85%	7,792,856	90%	7,807,703	2X11 ENAM LINGKUNG
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	23,409,498	100%	30,807,776	100%	39,115,530	100%	52,470,530	100%	61,183,580	100%	59,338,544	2X11 KAYU TANAM
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	19,507,915	100%	18,826,974	100%	19,720,747	100%	21,824,461	100%	23,573,389	100%	25,148,768	PATAMUAN
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	40,576,464	100%	37,653,948	100%	37,485,717	100%	39,352,898	100%	40,574,374	100%	39,350,824	PADANG SAGO



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	66,326,912	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	VII KOTO SUNGAI SARIK
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	66,326,912	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	V KOTO TIMUR
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	66,326,912	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	V KOTO KAMPUNG DALAM
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	39,015,831	100%	34,230,862	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	SUNGAI LIMAU
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	42,917,414	100%	39,707,800	100%	43,222,661	100%	45,865,802	100%	50,829,386	100%	52,040,091	BATANG GASAN
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	66,326,912	100%	58,192,466	100%	58,673,296	100%	59,029,347	100%	61,183,580	100%	59,338,544	SUNGAI GERINGGING
		Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	N/A	100%	39,015,831	100%	41,077,035	100%	42,375,158	100%	45,911,714	100%	48,302,827	100%	49,969,300	IV KOTO AUR MALINTANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	156,063,323	100%	147,192,707	100%	172,760,259	100%	406,646,610	100%	276,936,205	100%	268,584,989	BATANG ANAI
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	156,063,323	100%	147,192,707	100%	172,760,259	100%	406,646,610	100%	276,936,205	100%	37,476,975	LUBUK ALUNG
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	156,063,323	100%	147,192,707	100%	172,760,259	100%	406,646,610	100%	276,936,205	100%	268,584,989	ULAKAN TAPAKIS
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	120,949,075	100%	147,192,707	100%	172,760,259	100%	406,646,610	100%	276,936,205	100%		NAN SABARIS
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	124,850,659	100%	119,808,018	100%	120,606,219	100%	128,552,799	100%	135,891,952	100%	141,787,890	SINTUK TOBOH GADANG
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	0	100%	86,261,773	100%	90,356,875	100%	99,995,713	100%	108,008,984	100%	115,227,083	ENAM LINGKUNG
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	4,986,223	100%	4,374,704	100%	65,192,551	100%	72,146,979	100%	77,928,560	100%	76,827,799	2X11 ENAM LINGKUNG
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	50,720,580	100%	78,730,983	100%	91,269,571	100%	108,220,469	100%	122,367,160	100%	124,923,251	2X11 KAYU TANAM
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	45,258,364	100%	43,678,580	100%	45,752,132	100%	50,632,750	100%	54,690,263	100%	58,345,142	PATAMUAN
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	140,456,991	100%	135,896,523	100%	142,021,972	100%	152,908,964	100%	163,874,423	100%	166,705,924	PADANG SAGO
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	140,456,991	100%	135,896,523	100%	142,021,972	100%	152,908,964	100%	163,874,423	100%	166,705,924	VII KOTO SUNGAI SARIK
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	171,669,655	100%	160,885,052	100%	185,798,769	100%	419,764,242	100%	289,816,959	100%	281,077,314	V KOTO TIMUR





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	156,063,323	100%	135,896,523	100%	142,021,972	100%	152,908,964	100%	163,874,423	100%	166,705,924	V KOTO KAMPUNG DALAM
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	167,768,072	100%	160,885,052	100%	189,058,397	100%	426,323,059	100%	299,477,524	100%	281,077,314	SUNGAI LIMAU
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	124,850,659	100%	117,069,549	100%	122,627,188	100%	132,101,119	100%	142,365,175	100%	148,131,555	BATANG GASAN
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	171,669,655	100%	160,885,052	100%	185,798,769	100%	419,764,242	100%	289,816,959	100%	281,077,314	SUNGAI GERINGGING
		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	N/A	100%	101,441,160	100%	160,885,052	100%	185,798,769	100%	419,764,242	100%	289,816,959	100%	281,077,314	IV KOTO AUR MALINTANG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	78,031,662	100%	77,019,440	100%	88,009,943	100%	137,735,142	100%	167,449,799	100%	193,631,039	BATANG ANAI
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	61,645,013	100%	54,084,762	100%	51,502,115	100%	51,814,649	100%	50,878,977	100%	49,344,684	LUBUK ALUNG
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	77,251,345	100%	67,777,107	100%	64,540,625	100%	64,932,281	100%	63,759,731	100%	61,837,009	ULAKAN TAPAKIS
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	59,304,063	100%	67,777,107	100%	64,540,625	100%	64,932,281	100%	63,759,731	100%	61,837,009	NAN SABARIS
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	63,985,962	100%	62,300,169	100%	59,325,221	100%	60,996,991	100%	61,827,618	100%	66,209,323	SINTUK TOBOH GADANG
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	9,082,885	100%	28,619,739	100%	29,978,403	100%	33,176,355	100%	35,834,981	100%	39,213,181	ENAM LINGKUNG
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	100%	10,924,433	100%	9,584,641	100%	19,557,765	100%	21,644,094	100%	23,378,568	100%	23,423,110	2X11 ENAM LINGKUNG
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	78,031,662	100%	77,019,440	100%	88,009,943	100%	111,499,877	100%	141,688,291	100%	187,384,876	2X11 KAYU TANAM
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	34,333,931	100%	33,135,475	100%	34,708,514	100%	38,411,052	100%	41,489,165	100%	44,261,832	PATAMUAN
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	100%	44,478,047	100%	40,597,803	100%	40,308,554	100%	42,378,480	100%	43,584,800	100%	44,373,819	PADANG SAGO
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	77,251,345	100%	67,777,107	100%	64,540,625	100%	64,932,281	100%	63,759,731	100%	61,837,009	VII KOTO SUNGAI SARIK
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	57,743,430	100%	55,727,844	100%	51,528,192	100%	53,745,564	100%	54,832,338	100%	55,373,630	V KOTO TIMUR
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	77,251,345	100%	67,777,107	100%	64,540,625	100%	64,932,281	100%	63,759,731	100%	61,837,009	V KOTO KAMPUNG DALAM
	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	81,933,245	100%	74,623,280	100%	72,363,731	100%	74,114,624	100%	72,776,259	100%	71,830,869	SUNGAI LIMAU	



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	50,720,580	100%	41,419,343	100%	43,385,642	100%	48,013,815	100%	51,861,457	100%	60,883,189	BATANG GASAN	
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	57,743,430	100%	55,727,844	100%	51,528,192	100%	53,745,564	100%	54,832,338	100%	70,989,036	SUNGAI GERINGGING	
		Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	63,985,962	100%	56,138,614	100%	53,457,891	100%	53,782,294	100%	52,811,090	100%	51,218,533	IV KOTO AUR MALINTANG	
	H	Unsur Pemerintahan Umum			314,612,540		604,930,809		1,082,196,340		1,174,028,115		1,072,322,748		1,086,493,427		
	1	Kesatuan Bangsa dan Politik			314,612,540		604,930,809		1,082,196,340		1,174,028,115		1,072,322,748		1,086,493,427		
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	N/A	-	0	-	0	100%	107,567,709	100%	108,220,469	100%	106,266,218	100%	103,061,682	Kesbangpol
		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase laporan pertanggungjawaban partai politik tepat waktu	100%	100%	25,773,858	100%	22,612,908	100%	215,135,417	100%	298,426,141	100%	212,532,437	100%	206,123,364	Kesbangpol
		PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas / kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	100%	100%	8,232,340	100%	11,232,857	100%	45,634,785	100%	49,191,122	100%	48,302,827	100%	93,353,584	Kesbangpol
		PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persentase pelaksanaan pembinaan penanganan kasus narkoba	N/A	100%	269,209,232	100%	236,192,949	100%	224,914,300	100%	226,279,162	100%	222,193,002	100%	215,492,608	Kesbangpol
		PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	N/A	100%	11,397,109	100%	334,892,095	100%	488,944,130	100%	491,911,222	100%	483,028,265	100%	468,462,190	Kesbangpol
	I	Non Urusan			617,859,791,626		569,184,259,729		585,365,279,143		571,544,968,895		575,915,575,074		595,621,618,645		
	1	Seluruh Perangkat Daerah			617,859,791,626		569,184,259,729		585,365,279,143		571,544,968,895		575,915,575,074		595,621,618,645		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3,825,937,366	100%	4,104,952,832	100%	4,065,622,890	100%	4,152,788,978	100%	4,386,266,875	100%	4,568,963,173	Bapelitbangda
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A	A			A		A		A		AA			
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%			100%		100%		100%		100%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	8,190,770,361	100%	7,206,778,716	100%	7,205,773,807	100%	7,611,976,135	100%	7,848,244,639	100%	7,992,153,765	BPKD
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A	A			A		A		A		A			



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3,687,290,441	100%	4,006,152,276	100%	13,925,612,899	100%	4,227,742,888	100%	4,500,781,563	100%	4,737,916,395	Diskominfo	
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	BB			BB	A		A		A		AA			
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%			100%	100%		100%		100%		100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4,850,441,114	100%	4,540,309,691	100%	4,741,505,244	100%	5,019,652,236	100%	5,251,055,459	100%	5,398,799,433	Disdukcapil	
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	AA	AA			AA	AA		AA		AA		AA			
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%			100%	100%		100%		100%		100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	5,724,974,856	100%	15,257,093,516	100%	15,637,062,962	100%	16,860,656,452	100%	17,684,440,148	100%	18,294,861,059	BKPSDM	
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A			A	A		A		A		AA			
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%			100%	100%		100%		100%		100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	90%	90%	5,465,523,160	90%	5,715,026,611	92%	6,194,503,329	93%	7,395,031,420	94%	7,980,147,325	95%	8,875,709,304	Inspektorat	
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A			A	A		A		A		A			
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%			100%	100%		100%		100%		100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	N/A	100%	5,451,891,023	100%	5,468,769,446	100%	5,230,967,901	100%	5,667,740,238	100%	5,980,452,213	100%	6,210,470,635	BPBD	
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	BB			BB	A		A		A		AA			
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	N/A	100%			100%	100%		100%		100%		100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2,696,533,058	100%	2,524,030,382	100%	2,412,141,282	100%	2,435,994,176	100%	2,395,675,890	100%	2,327,180,209	Diskearpus	
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A			A	A		A		A		A			
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%			100%	100%		100%		100%		100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3,262,380,818	100%	3,285,489,185	100%	3,025,326,240	100%	3,192,515,042	100%	3,534,408,113	100%	3,630,274,149	Diskan	
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A			A	A		A		AA		AA			



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	10,35,893,896	100%	9,189,715,897	100%	8,750,889,989	100%	8,808,420,795	100%	8,649,357,908	100%	8,388,530,121	Distan-KP	
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A		A		A		A		AA		AA			
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	92,282,067,644	100%	82,722,783,019	100%	79,079,078,567	100%	79,898,112,418	100%	78,821,639,925	100%	76,835,527,967	Dinkes	
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A		A		A		A		A		A			
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	17,449,208,722	100%	16,534,077,240	100%	17,014,523,675	100%	18,510,110,849	100%	19,666,886,946	100%	37,442,685,698	RSUD	
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	B		BB		BB		BB		BB		A			
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	721,168,616	100%	632,723,257	100%	603,552,634	100%	593,324,426	100%	596,250,090	100%	2,876,121,244	Disnakeswan	
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	C	CC		B		BB		A		A		AA			
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4,492,198,900	100%	4,333,423,505	100%	4,195,500,843	100%	4,233,324,047	100%	4,832,538,415	100%	4,236,992,248	DPPKB	
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A		A		A		A		A		A			
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3,933,144,270	100%	3,534,705,981	100%	3,403,598,536	100%	3,454,554,550	100%	3,414,230,328	100%	3,349,373,278	Dishub
Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat		Perangkat Evaluasi	B	BB		BB		BB		BB		BB		A		
Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti		BPK	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3,267,867,657	100%	3,513,485,419	100%	23,024,259,434	100%	3,610,429,170	100%	3,669,945,947	100%	3,682,421,454	Disparpora
Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat		Perangkat Evaluasi	BB	BB		BB		BB		BB		BB		BB		
Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti		BPK	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3,606,416,388	100%	4,170,582,142	100%	4,178,097,734	100%	4,936,265,848	100%	6,345,361,818	100%	6,806,986,032	DPMPPT
Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat		Perangkat Evaluasi	A	A		A		A		A		A		A		
Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti		BPK	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	65%	100%	3,862,495,992	100%	5,432,194,783	100%	5,948,717,066	100%	6,882,538,468	100%	7,771,991,246	100%	8,668,264,264	DPMD
Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat		Perangkat Evaluasi	B	B		B		B		BB		BB		BB		
Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti		BPK	65%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1,104,557,834	100%	1,228,833,184	100%	1,283,119,781	100%	1,387,260,480	100%	1,459,973,412	100%	1,537,061,037	Satpol-PP Damkar
Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat		Perangkat Evaluasi	BB	BB		BB		BB		BB		A		A		
Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti		BPK	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	18,718,635,925	100%	18,816,934,534	100%	19,403,694,896	100%	21,517,335,288	100%	22,430,486,167	100%	23,718,365,792	Setwan
Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat		Perangkat Evaluasi	B	B		BB		BB		A		A		AA		
Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti		BPK	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3,821,841,021	100%	1,227,861,027	100%	1,192,697,713	100%	1,225,186,883	100%	1,232,688,132	100%	1,221,749,392	Dinsos P3A
Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat		Perangkat Evaluasi	A	A		A		A		A		A		AA		
Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti		BPK	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	98.57%	95.71%	342,096,367,548	96.29%	299,973,554,885	97%	285,652,229,827	97.57%	287,388,951,556	98%	282,055,969,660	98.86%	273,692,463,394	Disdikbud
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	BB	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4,989,699,839	100%	5,807,501,828	100%	5,818,931,439	100%	6,219,879,753	100%	6,368,474,264	100%	6,724,362,484	DLHPKPP
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	B		BB		BB		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	5,190,956,089	100%	5,323,767,570	100%	5,373,783,483	100%	5,563,679,311	100%	5,450,329,369	100%	5,421,512,381	Disnagkerkop & UKM
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	A		A		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1,321,390,191	100%	996,886,645	100%	746,454,704	100%	750,984,465	100%	737,423,151	100%	715,185,611	Kesbangpol
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	BB	A		A		A		A		AA		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	21,838,641,047	100%	21,040,743,711	100%	22,005,710,142	100%	24,319,067,889	100%	26,234,414,331	100%	27,955,145,726	DPUPR
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A		A		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	BB	BB	19,865,560,613	BB	17,623,155,892	A	17,201,158,089	A	18,170,818,065	A	18,734,822,986	A	19,078,353,563	Sekretariat Daerah Bagian Renkeu
		Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	974,537,421	100%	958,121,833	100%	1,146,411,002	100%	1,370,792,604	100%	1,192,371,373	100%	2,053,113,626	BATANG ANAI
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	1,002,004,207	100%	493,848,649	100%	1,165,926,392	100%	1,053,974,558	100%	1,035,151,695	100%	1,174,664,123	LUBUK ALUNG
Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat		Perangkat Hasil Evaluasi	B	BB	BB	A	A	A								
Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	903,138,092	100%	862,083,041	100%	1,058,792,214	100%	934,145,969	100%	933,523,610	100%	1,055,498,157	ULAKAN TAPAKIS
Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat		Perangkat Hasil Evaluasi	B	B	B	BB	BB	BB								
Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	887,234,818	100%	898,983,911	100%	1,083,565,384	100%	965,628,287	100%	947,692,440	100%	1,064,867,401	NAN SABARIS
Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat		Perangkat Hasil Evaluasi	B	BB	BB	A	A	A								
Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	1,091,662,945	100%	929,025,600	100%	1,242,244,052	100%	1,144,513,442	100%	1,205,960,568	100%	1,351,044,957	SINTUK TOBOH GADANG
Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat		Perangkat Hasil Evaluasi	B	BB	BB	A	A	A								
Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	507,849,032	100%	696,682,222	100%	899,315,100	100%	778,885,522	100%	829,471,659	100%	945,951,239	ENAM LINGKUNG
Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat		Perangkat Hasil Evaluasi	B	BB	BB	A	A	A								
Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	543,960,582	100%	477,248,321	100%	544,768,182	100%	574,004,184	100%	619,365,070	100%	489,386,835	2X11 ENAM LINGKUNG
Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat		Perangkat Hasil Evaluasi	B	BB	BB	A	A	A								
Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	822,453,713	100%	931,421,761	100%	1,124,897,461	100%	1,359,249,087	100%	1,171,118,130	100%	2,062,482,870	2X11 KAYU TANAM
Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat		Perangkat Hasil Evaluasi	B	BB	BB	A	A	A								
Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%								



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	960,764,833	100%	712,600,974	100%	744,852,598	100%	824,309,899	100%	890,366,919	100%	949,868,970	PATAMUAN
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	BB		A		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	826,566,403	100%	814,146,142	100%	875,052,813	100%	939,343,693	100%	926,840,270	100%	1,250,269,136	PADANG SAGO
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	972,976,429	100%	924,327,479	100%	1,020,900,644	100%	1,157,877,161	100%	1,241,841,659	100%	1,314,651,060	VII KOTO SUNGAI SARIK
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	B		BB		BB		A		A		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	861,484,370	100%	1,122,032,209	100%	1,179,756,992	100%	1,215,778,261	100%	1,340,302,000	100%	1,401,427,847	V KOTO TIMUR
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	A	A		A		A		A		AA		AA		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	903,138,092	100%	862,083,041	100%	1,058,792,214	100%	934,145,969	100%	933,523,610	100%	1,036,759,670	V KOTO KPG DALAM
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	950,425,638	100%	1,011,179,669	100%	1,157,624,121	100%	1,111,142,185	100%	1,005,556,650	100%	1,202,676,860	SUNGAI LIMAU
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	908,574,137	100%	944,353,496	100%	1,146,806,721	100%	777,739,516	100%	1,163,427,592	100%	1,233,761,504	BATANG GASAN
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	B		B		B		B		B		B		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	1,737,779,929	100%	1,347,955,900	100%	1,528,537,138	100%	1,438,778,014	100%	1,530,293,117	100%	1,587,251,182	SUNGAI GERINGGING
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	935,386,596	100%	986,632,307	100%	1,072,521,009	100%	930,318,718	100%	914,512,388	100%	1,060,513,399	IV KOTO AUR MALINTANG
		Nilai SAKIP Daerah Hasil Inspektorat	B	BB		BB		A		A		A		A		
		Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>JUMLAH</b>					<b>1,490,325,279,308</b>		<b>1,425,897,327,820</b>		<b>1,440,955,301,093</b>		<b>1,456,840,981,489</b>		<b>1,473,212,521,037</b>		<b>1,483,893,139,257</b>	

NB : NAMA PROGRAM BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020 DAN KATA "DESA" PADA PROGRAM SAMA DENGAN "NAGARI"



## **BAB VIII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

---

## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan, dalam hal ini ditunjukkan dengan parameter kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk mengevaluasi kinerja daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dipergunakan beberapa aspek sebagai tolok ukur. Aspek-aspek tersebut meliputi:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dengan Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial, Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.
2. Aspek Pelayanan Umum, dengan Fokus Layanan Urusan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan.
3. Aspek Daya Saing Daerah, dengan Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Fokus Iklim Berinvestasi dan Fokus Sumber daya Manusia.

Secara Lebih terperinci penetapan indikator kinerja daerah dibagi berdasarkan urusan pemerintahan dapat kita lihat pada tabel 9.1 berikut ini:

#### 8.1 INDIKATOR KERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel T -C.17.



**Tabel 8.1 (T - C.17)  
Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Kabupaten Padang Pariaman**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Utama					Kondisi Akhir	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>1: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban</b>									
1	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	%	N/A	26	27	28	29	30	31
2	Persentase Penegakan PERDA	%	50	62,5	65	67,5	70	72,5	75
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,92	93.3	93.6	94	94.3	94.7	95
<b>2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang</b>									
1	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	64.28	65.30	67	69	71	73	75
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50.98	54.82	58.72	62.72	66.74	71.04	75.54
3	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	58	63	68	70	75	83	90
<b>3 : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat</b>									
1	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Rp. Juta	2.668.793,67	2.731.777,20	2.796.247,14	2.862.238,58	2.929.787,41	2.998.930,39	3.069.705,15
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	8.30	8.52	8.58	8.60	8.64	8.69	8.71



Indikator Kinerja Utama		Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Utama					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	11.19	11.8	12.6	13.3	14.2	15.0	16.0
4	Tingkat Kemiskinan	%	7.26	7.11	6.99	6.87	6.74	6.61	6.48
5	PDRB/Income Per Kapita ADHB	(Rp. Juta)	42.95	44.63	46.98	49,46	52.71	55.35	58.72
<b>4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal</b>									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	18,62	18,8	18,85	18,88	18,97	19,08	19,36
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,67	13,82	13,97	14,12	14,27	14,42	14,57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.84	7.61	7.15	7.17	7.15	7.1	7.1
<b>5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan</b>									
1	Opini BPK atas laporan keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Nilai	B	B	B	BB	BB	BB	BB
3	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Nilai	2,600 (tinggi)	2,600 (tinggi)	2,700 (tinggi)	2,800 (tinggi)	2,900 (tinggi)	3,000 (sangat tinggi)	3,050 (sangat tinggi)
4	Indeks E-Government /SPBE	Indeks	1,9	2,15	2,44	2,76	3,12	3,53	4
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,55	4,56	4,56	4,57	4,57	4,57	4,58



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Utama					Kondisi Akhir	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat</b>									
1	Angka usia harapan hidup	Tahun	68,79	69,89	68,99	69,29	69,50	69,75	70
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,61	3,50	3,39	3,29	3,19	3,09	3
3	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	71,86	88	90	92	95	97	100
4	Nagari tangguh bencana	Nagari	14	15	16	17	18	19	20
<b>7 : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.</b>									
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	330,6	365,1	403,3	445,4	491,9	543,7	600

## 8.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara rinci dapat dilihat pada Tabel. T-C 18.



**Tabel 8.2 (T-C 18)**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah**  
**Kabupaten Padang Pariaman**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
<b>INDIKATOR MAKRO DAERAH</b>										
1	Pertumbuhan PDRB Menurut harga konstan	%	6,13	6,2	6,28	6,35	6,43	6,51	6,58	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Angka	-10,46	5,3	8,36	7,82	4,04	4,14	4,27	
3	Laju inflasi	%	6,63	5	5	4,5	4,5	3,5	3,5	
4	PDRB									
4.1	Atas harga berlaku	Juta Rp	15.820.438,20	18.497.852,21	21.628.385,52	25.288.722,97	29.568.527,39	34.572.635,90	40.423.628,06	
4.2	Atas harga konstan	Juta Rp	11.084.500,70	11.822.217,24	12.609.031,67	13.448.211,66	14.343.242,33	15.297.840,77	16.315.971,44	
4.3	PDRB per kapita Atas harga berlaku (Juta Rp)	Juta Rp	42,95	44,63	46,98	49,46	52,71	55,35	58,72	IKU
4.4	PDRB per kapita Atas harga konstan (Juta Rp)	Juta Rp	28,58	29,36	31,59	33,81	34,93	36,12	37,40	
4.5	Pertumbuhan PDRB per Kapita	%	5,34	5,39	5,45	5,5	5,56	5,61	5,67	
5	Indeks Gini Ratio	%	0,299	0,299	0,298	0,294	0,290	0,285	0,280	
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	91,14	91,09	91,35	91,47	91,74	92,46	92,75	
6.1	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	31,26	30,45	30,15	29,83	29,49	29,13	28,75	
6.2	Tingkat kemiskinan	%	7,26	7,11	6,99	6,87	6,74	6,61	6,48	IKU
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,13	7,91	7,81	7,68	7,55	7,38	7,21	IKU
7.1	Tingkat Pengangguran Terbuka Laki-Laki	%	5	4,85	4,36	3,93	3,53	3,18	2,86	
7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6	5,05	3,94	3,08	2,4	1,87	1,46	





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perempuan									
8	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	70.61	71.07	71.53	72.19	72.85	73.52	74.09	
8.1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,87	7,91	8,03	8,16	8,29	8,41	8,54	
8.2	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68,79	69,08	69,35	69,63	69,90	70,18	70,45	IKU
8.3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,67	13,82	13,97	14,12	14,27	14,42	14,57	IKU
8.4	Pengeluaran perkapita yang disesuaikan	Ribu/Rp	10.998	11.133	11.186	11.382	11.622	11.878	12.156	
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,92	93,3	93,6	94	94,3	94,7	95	IKU
10	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Ribu	330.598.007,30	365.100.000	403.300.000	445.400.000	491.900.000	543.700.000	600.000.000	IKU
11	Ekspor	Juta Rp	1.807.409,77	2.132.743,53	2.516.637,36	2.969.632,09	3.504.165,87	4.134.915,72	4.879.200,55	
12	Impor	Juta Rp	855.248,80	795.381,38	739.704,69	687.925,36	639.770,58	594.986,64	553.337,58	
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>1.</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>									
1.1	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	%	50,5	52,5	54,8	57,2	59,7	62,3	65	SPM
1.2	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	2,79	2,87	2,96	2,53	2,18	1,19	1,18	SPM
1.3	Jumlah Warga Negara usia 5. 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	68,62	70	71,5	73	74,5	76	77,5	SPM



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,12	13,82	13,97	14,12	14,27	14,42	14,57	IKU
<b>1.5</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>									
1.5.1	Angka partisipasi murni SD/SDLB	%	94,58	94,67	94,77	94,86	94,96	95,05	95,15	
1.5.2	Angka partisipasi kasar SD/SDLB/paket A	Angka	87.47	88.7	89.9	91.2	92.4	93.7	95	
1.5.3	Angka partisipasi murni SMP/SMPLB	Angka	58.38	60.90	63.50	66.2	69	71.9	75	
1.5.4	Angka partisipasi kasar SMP/SMPLB/paket B	%	94,6	95	96	97	98	99	100	
1.5.5	Rasio guru/murid	Ratio	20,87	21	22	23	24	25	26	
	Rasio ruang kelas/rombel	Ratio	0,93	0,94	0,95	0,96	0,98	1	1,02	
<b>1.6</b>	<b>Fasilitas Pendidikan</b>									
1.6.1	Sekolah SD/SDLB kondisi bangunan baik	%	95,25	95,5	96	97	98	99	100	
1.6.2	Sekolah SMP/SMPLB kondisi bangunan baik	%	80,23	82	84	86	90	95	97	
<b>1.7</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>									
1.7.1	Angka Partisipasi kasar PAUD	Angka (%)	20.45	52.5	54.8	57.2	59.7	62.3	65	
<b>1.8</b>	<b>Angka Putus Sekolah</b>									
1.8.1	Angka Putus Sekolah SD	Angka (%)	0.51	0.45	0.4	0.36	0.32	0.28	0.25	
1.8.2	Angka Putus Sekolah SMP	Angka (%)	1.8	1.63	1.48	1.34	1.22	1.1	1	
<b>1.9</b>	<b>Mutu Pendidikan</b>									
1.9.1	Angka Kelulusan (AL) SD	Angka (%)	100	100	100	100	100	100	100	
1.9.2	Angka Kelulusan (AL) SMP	Angka (%)	100	100	100	100	100	100	100	
1.9.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	Angka (%)	82.26	85	87.8	90.7	93.7	96.8	100	
1.9.4	Angka Melanjutkan (AM) dari	Angka (%)	81	83	85	87.8	90.7	93.7	96.8	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SMP ke SMA/SMK									
1.9.5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	91,44	92,8	94,2	95,6	97,1	98,5	100	
<b>2.</b>	<b>URUSAN KESEHATAN</b>									
2.1	Persentase Orang terduga TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TB sesuai dengan Standar	%	34,60	100	100	100	100	100	100	SPM
2.2	Persentase Orang usia 15-59 Tahun Mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	47,8	100	100	100	100	100	100	SPM
2.3	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	45,9	100	100	100	100	100	100	SPM
2.4	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	82,2	100	100	100	100	100	100	SPM
2.5	Persentase Penderita Hypertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	39,9	100	100	100	100	100	100	SPM
2.6	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	71,3	100	100	100	100	100	100	SPM
2.7	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,9	100	100	100	100	100	100	SPM
2.8	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	86,8	100	100	100	100	100	100	SPM



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar	%	80,2	100	100	100	100	100	100	SPM
2.10	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	73,4	100	100	100	100	100	100	SPM
2.11	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	23,2	100	100	100	100	100	100	SPM
2.12	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	82,2	100	100	100	100	100	100	SPM
2.13	Angka Usia Harapan Hidup	Angka	68,79	68,89	68,99	69,29	69,50	69,75	70	IKU
2.14	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Angka	0,067/1000 pddk	0,21 per 1000 pddk	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	IKK
2.15	Persentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan	%	74,49	80	85	90	95	100	100	
2.16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Orang	49	48	47	46	45	44	43	
2.17	Angka kelangsungan hidup bayi (Jumlah Kelahiran Hidup)	%	86,6	89,6	92,6	95,6	98,6	100	100	
2.18	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Orang	7	6	4	3	2	1	0	
2.19	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Orang	17	16	15	14	13	12	11	
2.20	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Orang	9	8	7	6	5	4	3	
2.21	Persentase puskesmas dengan	%	30	35	47	59	71	83	83	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	jenis tenaga kesehatan sesuai standar									
2.22	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.23	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	36,6	79,30	83	87,90	91,60	95	95	
2.24	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.25	Prevalensi Balita Stunting	%	15,5	21,1	18,4	16	14	14	14	
2.26	Cakupan Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.27	Persentase Balita Kurus yang Mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.28	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	61,10	80	83	86	89	92	95	
2.29	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Angka	2,33	4	4	4	4	4	4	
2.30	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.31	Cakupan penemuan dan pengobatan TB	%	37	90	90	90	90	90	90	
2.32	Case Notifikasi Rate TB per 100.000 penduduk	Angka	137/100.000 pddk	316/100.000 pddk	328/100.000 pddk	324/100.000 pddk	316/100.000 pddk	324/100.000 pddk	324/100.000 pddk	
2.33	Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	7	10	9	8	7	6	5	



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.34	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate)	%	87	90	90	90	90	90	90	
2.35	Penemuan kasus DBD per 100.000 pddk (Insiden Rate)	Angka	<45 per 100.000 pddk	<45 per 100.000 pddk	<44 per 100.000 pddk	<43 per 100.000 pddk	<42 per 100.000 pddk	<41 per 100.000 pddk	<40 per 100.000 pddk	
2.36	Persentase tatalaksanaan Diare sesuai standar	%	52	52	55	57	60	60	60	
2.37	Penemuan kasus malaria	Angka	<1 per 1000 pddk	<1 per 1000 pddk	<1 per 1000 pddk	<1 per 1000 pddk	<1 per 1000 pddk	<1 per 1000 pddk	<1 per 1000 pddk	
2.38	Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.39	Cakupan Pelayanan Kunjungan Nifas Lengkap ( KF3 )	%	80,4	100	100	100	100	100	100	
2.40	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.41	Cakupan Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.42	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ter akreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.43	Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119 sebanyak 25 Puskesmas	Angka	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	
2.44	Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penye lidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.45	Persentase Korong dengan Stop Buang Air Besar	%	17,18	20	30	40	50	60	70	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.46	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Angka	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas	
2.47	Persentase Alkes yang sesuai standar permenkes	%	64,57	65	68	70	73	75	80	
2.48	Jumlah Kecamatan Sehat	Angka	11 Kecamatan	12 Kecamatan	13 Kecamatan	14 Kecamatan	15 Kecamatan	16 Kecamatan	17 Kecamatan	
2.49	Indeks Keluarga Sehat	%	0,083	0,09	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	
2.50	Persentase Rumah Tangga PHBS	%	70	72	74	76	78	80	82	
2.51	Jumlah IRT-P yang diawasi	Angka	126 IRT-P	130 IRT-P	135 IRT-P	140 IRT-P	145 IRT-P	150 IRT-P	155 IRT-P	
<b>2.a</b>	<b>Kesehatan (RSUD)</b>									
2a.1	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana RS (100%)	Angka(%)	58.88	62	65.2	68.6	72.2	76	80	
2a.2	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar dari RS (Net Death Rate=NDR=Angka kematian neto)2.5%	angka/seribu	2,5	2.43	2.36	2.29	2.23	2.16	2.1	
2a.3	Waktu tunggu pasien dirawat jalan ≤ 60 menit	Menit	50	45.9	42.2	38.7	35.6	32.7	30	
2a.4	Angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar RS (Gross Death Rate=GDR 4.5%	angka/seribu	4,50%	4.36	4.22	4.08	3.95	3.82	3.7	
2a.5	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien (≥90%)	Menit	90	90.8	91.6	92.5	93.5	94.1	95	
2a.6	Persentase limbah cair & padat RS yang memenuhi baku mutu (BOD <30 mg/l dan PH 6-9) mencapai (100%)	%	100	100	100	100	100	100	100	
2a.7	Angka pemanfaatan tempat tidur	Angka(%)	49.9	54	58.4	63.2	68.4	73.9	80	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RS (Bed Occupancy Rate=BOR) (60%-85%)									
<b>3</b>	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
3.1	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	71,86	88	90	92	95	97	100	SPM/IKU
3.2	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	79,03	81	85	87	93	96	100	SPM
3.3	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	64,28	65,30	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	IKU
3.4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,98	54,82	58,72	62,72	66,74	71,04	75,54	IKU
3.5	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	58	63	68	70	75	83	90	IKU
3.6	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	%	6,67	7,02	7,43	7,95	8,53	9,29	9,94	
3.7	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	20	55	60	70	75	80	85	
3.8	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	%	22	35	43	52	65	78	87	
3.9	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta	%	25,00	37,50	50,00	62,50	75,00	87,50	100,00	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital									
3.10	Persentase Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	%	58,65	60,65	62,87	64,70	66,85	67,90	68,90	
3.11	Kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan rencana tata ruang	Jumlah Kawasan	9	9	9	9	9	9	9	
3.12	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah	%	N/A	10	20	25	30	35	40	
3.13	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	%	20	25	30	40	45	50	60	
3.14	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	26,38	30	35	40	45	50	55	
3.15	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	79,03	81	85	87	93	96	100	
<b>4.</b>	<b>URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
4.1	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah(%)	100	100	100	100	100	100	100	SPM
4.2	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumah(%)	100	100	100	100	100	100	100	SPM



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,66	0,55	0,44	0,33	0,22	0,11	0,00	
4.4	Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	850	852	854	856	858	860	862	
4.5	Rasio rumah layak huni	Angka	0,129	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,185	
4.6	Rasio permukiman layak huni	Nilai	N/A	N/A	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	
4.7	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00	65,50	66,00	
4.8	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	N/A	N/A	20	21	22	23	24	
4.9	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,66	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	
4.10	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	N/A	N/A	1,23	3,11	3,85	4,66	5,59	
4.11	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	N/A	N/A	1,75	1,72	1,70	1,68	1,66	
4.12	Persentase pemukiman yang tertata	%	N/A	N/A	20,00	20,10	20,20	20,30	20,40	
4.13	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	N/A	N/A	50	55	60	65	70	
4.14	Persentase Pengembang Perumahan yang telah tersertifikasi	%	N/A	N/A	3,40	6,80	10,00	10,00	16,90	
4.15	Persentase Pengembang Perumahan yang telah teregistrasi	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	
4.16	Timbulan sampah yang ditangani	%	0,0227	0,0019	0,0224	0,0223	0,0222	0,022	0,0218	
4.17	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	0,422	0,419	0,417	0,414	0,412	0,41	0,408	
4.18	Persentase cakupan area pelayanan	%	0,28	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.19	Persentase penanganan sampah	%	5	8	10	12	14	16	16	
<b>5.</b>	<b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>									
<b>5.1</b>	<b>SATPOL PP DAMKAR</b>									
5.1.1	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
5.1.2	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
5.1.3	Persentase penegakkan PERDA	%	50	62,5	65	67,5	70	72,5	75	IKU
5.1.4	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	Jumlah	592	562	532	482	462	402	382	
5.1.5	Persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	%	50	62,5	65	67,5	-k a	72,5	75	
5.1.6	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Menit	20	17,8	15,8	14,1	12,6	11,2	10	
5.1.7	Rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	jml	732	733	734	735	736	737	738	
5.1.8	Cakupan patrol petugas Satpol PP	jam	1,41	1,41	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46	
5.1.9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	72,73	73,64	74,55	75,45	76,36	77,27	78,18	
5.1.10	Persentase aparaturn pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	96,08	96,17	97,14	98,11	99,09	100	100	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.11	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	unit	5	6	7	8	9	9	9	
5.1.12	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	42.59	50	55	60	65	70	75	
5.1.13	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	17.65	20.30	23.30	26.30	29.30	32.30	35.30	
<b>5.2</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>									
5.2.1	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	%	100	20	40	60	80	100	100	SPM
5.2.2	Persentase warga Negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	58	70	75	83	100	100	SPM
5.2.3	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	70	75	80	85	95	100	SPM
5.2.4	Nagari tangguh bencana	Nagari	14	15	16	17	18	19	21	IKU
5.2.5	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	menit	15	15	15	15	15	15	10	
5.2.6	Persentase sarana dan prasarana kebencanaan yang ramah bencana	%	40,31	41,69	42,57	43,04	44,07	45,72	46,38	
<b>6</b>	<b>URUSAN SOSIAL</b>									
6.1	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
6.2	Persentase anak telantar yang	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti									
6.3	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
6.4	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
6.5	Persentase Warga Negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
6.6	Tingkat kemiskinan	%	7,26	7,11	6,99	6,87	6,74	6,61	6,48	IKU
6.7	Persentase PPKS Mandiri	%	21	23	25	27	28	30	33	
6.8	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	%	72	74	76	78	80	82	85	
6.9	Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.10	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	%	65	65	80	82	85	87	90	
6.11	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek	%	50	52	54	56	58	60	62	
6.12	Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.13	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	%	86	88	89	90	91	92	93	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	memperoleh bantuan sosial									
6.14	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.15	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Jumlah	7	7	7	8	8	8	8	
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>1</b>	<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>									
1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,84	7,61	7,15	7,17	7,15	7,1	7,1	IKU
1.2	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	N/A	70	70	70	70	70	72	
1.3	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	N/A	2.400	2.400	2.430	2.500	2.500	2.500	
1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	N/A	51	51	51	51	51	51	
1.5	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	N/A	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
1.6	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Angka	10	10	10	10	10	10	10	
1.7	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	60	62	64	66	68	70	72	
1.8	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	3,20	6,00	6,15	6,20	6,25	6,30	6,50	
1.9	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	57,77	57,77	57,77	59	60	61	62	
1.10	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program	%	68,57	71	73	75	78	80	82	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jamsostek									
1.11	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	
1.12	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah	650 orang	670	700	720	730	750	800	
1.13	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah	20 orang	40	60	80	100	120	160	
1.14	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah	40 orang	80	100	120	140	160	180	
1.15	Rasio lulusan S1/S2/S3	Ratio(%)	56.63	56.78	56.86	56.97	57.23	57.43	67.60	
1.16	Rasio penduduk yg bekerja	%	70,9	70,9	70,92	70,93	70,94	70,95	70,96	
1.17	Angka partisipasi angkatan kerja	%	70,9	70,9	70,92	70,93	70,94	70,95	70,96	
1.18	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	jml	23	24	24	25	26	27	28	
1.19	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	1,41	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
1.20	Pencari kerja yang ditempatkan	%	3,2	3,2	4	4,2	4,5	5,5	6	
1.21	Persentase Pengangguran/mencari Pekerjaan	%	19,54	17,98	16,54	15,22	14	12,88	11,85	
1.22	Rasio daya serap tenaga kerja	%	115	127	140	154	169	186	186	
1.23	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	orang	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92,92	93,3	93,6	94	94,3	94,7	95	IKU



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	12	12	13	13	14	14	14	
2.3	Persentase Keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	%	40	40	45	46	47	48	50	
2.4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	65	66	67	68	69	70	71	
2.5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	0	0	0	0	1	1	1	
2.6	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	28	30	32	33	35	37	38	
2.7	Rasio KDRT	Ratio	0,78	0,78	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	
2.8	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0.23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
2.9	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Angka	52	53	54	55	56	57	58	
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.11	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.12	Cakupan perempuan dan anak korban Kekerasan yang	%	100	100	100	100	100	100	100	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mendapatkan layanan bantuan hukum									
2.13	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.14	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.15	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	
<b>3</b>	<b>URUSAN PANGAN</b>									
3.1	Skor pola pangan harapan (PPH)	Nilai	88,10	88,50	88,90	89,30	89,70	90,10	90,50	
3.2	Ketersediaan pangan utama (beras) per tahun	Ton	153.776,00	156.083,00	158.424,00	160.800,00	163.212,00	165.660,00	168.145,00	
3.3	Ketersediaan energi	Kkal/kap/hari	2.431	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
3.4	Ketersediaan protein	Gram/kap/hari	54,04	54,85	55,66	56,47	57,28	58,09	58,90	
3.5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
<b>4</b>	<b>URUSAN PERTANAHAN</b>									
4.1	Persentase luas lahan milik Pemda bersertifikat	%	8,70	8,80	8,90	9,00	9,50	10,00	10,50	
4.2	Penyelesaian Izin Lokasi	Izin	0	0	1	1	1	1	1	
4.3	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.4	Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	50	60	65	70	75	80	85	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.5	Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	0	0	5	15	20	20	25	
4.6	Cakupan pelayanan pengelolaan izin membuka tanah	%	5	5	5	5	5	5	5	
<b>5</b>	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>									
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,38	66,93	67	67,09	67,17	67,25	68,95	
5.2	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten / kota	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.4	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Angka	55,41	55,79	55,89	55,99	56,09	56,19	56,29	
5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Angka	93,32	91,83	91,93	92,06	92,16	92,26	96,36	
5.7	Persentase Keanekaragaman Hayati yang terkelola	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.8	Cakupan pelayanan pengawasan pengelolaan LB3 terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5.9	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	%	31	35	40	45	50	55	60	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH									
5.10	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	0	2	2	3	3	4	5	
5.11	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kelompok	N/A	N/A	1	1	1	1	1	
5.12	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Kelompok	N/A	N/A	1	1	1	1	1	
5.13	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Kelompok	N/A	N/A	1	1	1	1	1	
5.14	Penetapan hak MHA	Kelompok	N/A	N/A	1	1	1	1	1	
5.15	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Kelompok	N/A	N/A	1	1	1	1	1	
5.16	Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana	Kelompok	N/A	N/A	1	1	1	1	1	
5.17	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	0	0	2	2	2	2	2	
5.18	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.19	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kabupaten/kota.									
5.20	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	55	60	70	80	85	90	95	
5.21	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal atau UKL-UPL	%	23,81	20,23	24,72	24,73	25,51	27,18	27,18	
5.22	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	
<b>6</b>	<b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									
6.1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,55	4,56	4,56	4,57	4,57	4,57	4,58	
6.2	Persentase Penerbitan KTP EL	%	98,68	99	99	99	99	99	99	
6.3	Persentase Penerbitan KK	%	99,31	100	100	100	100	100	100	
6.4	Persentase Penerbitan KIA	%	20,06	30	35	40	45	50	50	
6.5	Persentase penerbitan akta kelahiran	%	91,73	93	95	95	97	98	99	
6.6	Persentase Penerbitan akta perkawinan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.7	Persentasi penerbitan akta kematian	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.8	Persentase database kependudukan yang disusun	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
6.9	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	Ratio	3:02	3:02	3:02	3:02	3:02	3:02	3:02	
6.10	Rasio bayi berakte kelahiran	Ratio	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	
6.11	Rasio pasangan berakte nikah	Ratio	1:02	1:02	2:03	2:03	3:04	3:04	3:04	
6.12	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6.13	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>									
7.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	4	4	1	1	1	1	1	
7.2	Persentase Nagari yang tertata	%	60	100	100	100	100	100	100	
7.3	Persentase Nagari yang telah melakukan kerjasama	%	55	100	100	100	100	100	100	
7.4	Persentase administrasi Nagari dengan kategori baik	%	60	100	100	100	100	100	100	
7.5	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	%	65	100	100	100	100	100	100	
7.6	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga berdayaan masyarakat (LPM)	%	90	90	90	92	94	96	98	
7.7	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.8	Persentase LPM aktif	%	70	72	74	78	81	85	95	
7.9	Persentase LPM Berprestasi	%	67	68	72	75	77	80	95	
7.10	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.11	Persentase Posyandu aktif	%	70	75	80	85	90	95	100	
<b>8</b>	<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,61	3,5	3,39	3,29	3,19	3,09	3	IKU
8.2	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2.42	2.38	2.34	2,31	2.27	2.24	2.22	
8.3	Persentase Pemakaian alat kontrasepsi ( Contraception Prevalence Rate = CPR )	%	65,39	65,50	65,75	66,00	66,25	66,50	66,75	
8.4	Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15-19) per 1.000	Angka	14	14	13	12	11	10	9	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)									
8.5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	10	11	13	15	17	19	22	
8.6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	NA	20	25	30	35	40	45	
8.7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	NA	NA	1	1	2	3	4	
8.8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	NA	2	4	6	8	10	12	
8.9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	NA	3	5	7	10	12	15	
8.10	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	%	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	
8.11	Ratio Akseptor KB	%	65.39	65.5	65.75	66	66,25	66,5	66,75	
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20	%	N/A	N/A	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	tahun									
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12.8	12.5	12	11.75	11.5	11.25	11	
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24,7	24,75	24,9	25	25,15	25,25	25,5	
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	34.39	34.5	34.7	34.9	35	35,15	35,25	
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	50.12	50.62	51.12	51.62	52.12	52.62	53.16	
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	40.36	40.86	41.36	41.86	42.36	42.86	43.36	
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	39.47	39.97	40.47	40.97	41.47	41.97	42.47	
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	411	423	435	447	458	470	482	
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling remaja/Mahasiswa	%	335	335	347	358	370	382	394	
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	44.37	44.37	44.47	44.57	44.67	44.77	44.87	
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	%	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(UPPKS) yang ber-KB mandiri									
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	25	25	30	35	40	45	50	
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	20	20	22	24	26	28	30	
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	70.51	71	71.5	72	72.5	73	73.5	
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	62.04	62.54	63.04	63.54	64.04	64.54	65.04	
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	22	22	22.5	23	23,5	24	24,5	
8.30	Rata -rata usia kawin pertama wanita	%	44.37	44.37	44.47	44.57	44.67	44.77	44.87	
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga	%	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes									
<b>9</b>	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>									
9.1	Rasio Konektivitas kabupaten	Rasio	1:54	1:54	1:57	1:59	1:61	1:63	1:64	IKS
9.2	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	%	85	85	87	90	92	93	100	
9.3	Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	Angka	21	21	18	16	14	12	10	
9.4	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	5,995,318	5,995,318	5,995,320	5,995,325	5,995,330	5,995,335	5,995,340	
9.5	Rasio Izin Trayek	Ratio	33	33	38	43	46	48	50	
9.6	Jumlah Uji kir Angkutan Umum	Jumlah	4254	5600	5750	5900	6150	6300	6450	
9.7	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	Jumlah	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3	
9.8	Persentase Layanan Angkutan Udara	%	60	60	65	70	75	75	80	
9.9	Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	%	2570	2800	2925	3050	3225	3320	3500	
9.10	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	Jumlah	975	975	980	985	990	995	995	
9.11	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		0.541607	0.541607	0.541617	0.541627	0.541637	0.541647	0.541657	
9.12	Jumlah orang /barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	5,995,318	5,995,318	5,995,319	5,995,320	5,995,325	5,995,330	5,995,335	
9.13	Jumlah orang /barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	Jumlah	5,995,350	5,995,350	5,995,355	5,995,360	5,995,365	5,995,370	5,995,375	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.14	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	20	20	20	20	20	20	20	
9.15	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	
9.16	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	Jml buah	600 buah	675	750	825	900	975	975	
<b>10</b>	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
10.1	Indeks E-Government /SPBE	Indeks	1,9	2,15	2,44	2,76	3,12	3,53	4	IKU
10.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0	41	59	88	100	100	100	
10.3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	50	55	60	62	63	64	65	
10.4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	75	76	77	78	79	80	81	
10.5	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	35	36	38	40	42	44	46	
10.6	Jumlah jaringan komunikasi	jml	112	112	112	112	112	112	112	
10.7	Jumlah penyiaran radio Lokal	bh	3	3	3	3	3	3	3	
10.8	Web site milik pemerintah daerah	jml	1	1	1	1	1	1	1	
<b>11</b>	<b>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>									
11.1	Persentase koperasi aktif	%	40.91	41,5	41,98	42,8	43,75	44,5	45	
11.2	Persentase koperasi sehat	%	40	40	40	40	40	40	40	
11.3	Koperasi mampu melaksanakan rat tepat waktu	Koperasi	57 Koperasi	57 Koperasi	57 Koperasi	57 Koperasi	57 Koperasi	57 Koperasi	57 Koperasi	
11.4	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	40	40	40	40	40	40	40	
11.5	Persentase UMKM	%	60	62	64	65	67	69	70	



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah UMKM	Orang	11.021	11.297	11.579	11.868	12.165	12.469	12.500	
11.6	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	N/A	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
11.7	Jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom	unit	47	49	51	53	55	57	59	
11.8	Jumlah BPR/LKM	unit	15	15	18	21	24	27	30	
11.9	Jumlah BUMNAG	unit	NA						103	
<b>12</b>	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>									
12.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	330,6	365,1	403,3	445,4	491,9	543,7	600	IKU
12.2	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
12.3	Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Dokumen / Event	1 dokumen 4 Event	1 dokumen 4 Event	1 dokumen 5 Event	1 dokumen 5 Event	1 dokumen 6 Event	1 dokumen 6 Event	1 dokumen 7 Event	
12.4	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	Angka	88	88	89	90	91	92	93	
12.5	Jumlah Objek Perizinan dan non perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	Objek	100	100	110	110	120	120	130	
12.6	Jumlah Aplikasi pelayanan yang dikembangkan	Aplikasi	1	1	1	1	1	1	1	
12.7	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jml Perusahaan	75	83	91	100	110	121	133	
12.8	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi	Rp.(Milyar)	55,00	60,50	66,55	73,21	80,53	88,58	97,44	
12.9	Lama Proses Perizinan (Rata-rata lama proses perizinan)	hari kerja	7	7	7	7	7	7	7	
12.10	Jumlah dan Macam Pajak dan	Angka	2	2	2	2	2	2	2	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Retribusi Daerah									
12.11	Jumlah perda yang mendukung iklim investasi	Perda	1	1	1	1	1	1	1	
<b>13</b>	<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>									
13.1	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	357	360	365	370	375	380	385	IKS
13.2	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	18,51	37,03	46,29	55,55	64,81	74,07	83,33	
13.3	Persentase Wirausaha Muda	%	0,14	0,14	0,14	0,17	0,20	0,25	0,25	
13.4	Cakupan pembinaan olahraga	Kegiatan	36	36	36	38	39	40	41	
13.5	Jumlah lapangan olahraga	Jumlah	246	246	246	247	248	248	249	
<b>14</b>	<b>URUSAN STATISTIK</b>									
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Jumlah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	buku	1	1	1	1	1	1	1	
14.3	Buku "PDRB kabupaten"	buku	1	1	1	1	1	1	1	
<b>15</b>	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>									
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	9,09	15,91	61,36	68,18	79,55	90,91	100	
<b>16</b>	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>									
16.1	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	N/A	35	36	38	38	40	42	IKS
16.2	Rasio pengembangan kebudayaan masyarakat pelakunya	%	5	6	6	7	7	7	7	
16.3	Rasio pengembangan kesenian tradisional masyarakat pelakunya	Rasio	5	6	6	7	7	7	7	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.4	Rasio pelestarian dan pengelolaan/penetapan cagar budaya	Rasio	45	50	50	50	50	50	50	
16.5	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jml	1	3	5	5	5	5	5	
16.6	Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jml	20	25	30	35	40	45	50	
16.7	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jml	4	4	4	4	5	5	5	
16.8	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jml	12	12	15	18	21	24	26	
16.9	Rasio grup kesenian/10.000 penduduk	%	0,46	0,61	0,72	0,83	0,94	1,05	1,16	
16.10	Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	2	2	3	3	4	4	4	
<b>17</b>	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>									
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	18,62	18,8	18,85	18,88	18,97	19,08	19,36	IKU
17.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	Indeks	90,17	90,20	90,25	90,30	90,40	90,50	91,00	
17.3	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	2,87	2,90	2,95	3,00	3,20	3,50	4,00	
17.4	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	%	0,30	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,80	
17.5	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	0,14	0,15	0,20	0,20	0,25	0,30	0,45	
17.6	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	0,33	0,35	0,40	0,40	0,45	0,50	0,55	
17.7	Persentase Naskah Kuno dan	%	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar									
17.8	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,05	0,06	0,065	0,07	0,075	0,08	0,085	
17.9	Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	
17.10	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Ratio	0,98	1,01	1,03	1,05	1,08	1,1	1,13	
17.11	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Jumlah (Org)	15.344	18.413	19.947	21.482	23.016	24.551	26.085	
17.12	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	6.134	6.184	6.234	6.284	6.334	6.384	6.434	
17.13	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	-	3	3	3	4	5	6	
<b>18</b>	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>									
18.1	Indeks kearsipan Eksternal	Indeks	N/A	73,48	60,80	63,95	65,00	68,50	70,00	IKS
18.2	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	%	8,84	10,88	13,95	16,27	18,60	20,93	23,25	
18.3	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan.	%	N/A	5	10	15	20	25	30	
18.4	Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	%	40	45	50	55	60	65	70	
18.5	Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan	%	20	30	40	45	50	60	70	IKD
18.6	Peningkatan SDM pengelola	Orang	2	4	5	6	7	8	9	IKD



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kearsipan									
<b>C.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
<b>1</b>	<b>URUSAN PERIKANAN</b>									
1.1	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	IKS
1.2	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	18.080,30	18.441,90	18.810,73	19.186,93	19.570,66	19.962,06	20.361,29	
1.3	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	52.511,60	53.561,83	54.633,06	55.725,72	56.840,23	57.977,03	59.136,57	
1.4	Produksi Benih Ikan	Ekor/ Tahun	687.828.985	480.000.000	495.000.000	510.000.000	525.000.000	540.000.000	555.000.000	
1.5	Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi	%	55	60	70	80	90	100	100	
1.6	Cakupan Pembinaan Pokmaswas	%	50	100	100	100	100	100	100	
1.7	Konsumsi ikan	Kg/ Kapita / Tahun	43,45	43,95	44,45	44,95	45,45	45,95	46,45	
1.8	Produksi Ikan Olahan	Ton/ Tahun	176,30	179,82	183,41	187,07	190,81	194,62	198,51	
1.9	Cakupan bina kelompok nelayan	%	16.95	24.59	31.75	38.46	44.78	50.72	57.14	
1.10	Produksi perikanan kelompok nelayan	ton	12.656,21	12.909,33	13.167,51	13.430,85	13.699,46	13.973,44	14.252,90	
1.11	Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan	%	27,62	34,56	41,07	47,19	52,94	58,37	64	
1.12	Jumlah unit pengolah ikan	unit	193	193	194	195	196	197	198	
<b>2.</b>	<b>URUSAN PARIWISATA</b>									
2.1	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Objek Wisata	4	4	5	5	6	6	6	
2.2	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	Orang	41	41	45	50	55	60	60	
2.3	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	36	36	40	45	50	55	60	
2.4	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	208.872	250.000	265.000	275.000	300.000	330.000	350.000	
<b>3</b>	<b>URUSAN PERTANIAN</b>									



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Rp. Juta)	Rp./Juta	2.668.793,67	2.731.777,20	2.796.247,14	2.862.238,58	2.929.787,41	2.998.930,39	3.069.705,15	IKU
3.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	14,87	15	15	15	15	15	15	
3.3	Produktivitas pangan utama (padi) per hektar	Ton/Ha	4,68	4,80	4,92	5,04	5,17	5,29	5,43	
3.4	Produksi tanaman pangan (padi) per tahun	Ton	283.127,72	287.374,00	291.685,00	296.060,00	300.501,00	305.008,00	309.583,00	
3.5	Cakupan bina kelompok petani	%	25.24	25.88	26.52	27.19	27.87	28.56	29.28	
<b>3a</b>	<b>URUSAN PERTANIAN SUB SEKTOR PETERNAKAN</b>									
3a.1	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	Rp/M	232.175,46	236.818,50	241.554,36	246.385,08	251.312,70	256.338,24	264.647,60	
3a.2	Jumlah populasi ternak besar (sapi, kerbau)	Ekor	54.360	55.447	56.556	57.647	58.841	60.038	61.218	
3a.3	Jumlah populasi ternak kecil (kambing)	Ekor	35.258	35.786,87	36.323,67	36.868,53	37.421,56	37.982,88	38.552,62	
3a.4	Jumlah populasi ternak unggas (ayam, itik, puyuh)	Ekor	14.625.869,00	14.845.257,04	15.067.935,89	15.293.954,93	15.523.364,25	15.756.214,72	15.992.557,94	
3a.5	Jumlah produksi hasil ternak	Daging/Ton	17.082,08	17.338,31	17.342,15	17.342,21	17.602,34	17.866,38	18.134,38	
3a.6	Jumlah produksi telur	Ton	24.364.974	24.730.448,61	25.101.405,34	25.477.926,42	25.860.095,32	26.247.996,75	26.641.716,70	
3a.7	Jumlah produksi susu	Liter	121.900	123.728,50	125.584,43	127.468,19	129.380,22	131.320,92	133.290,73	
3a.8	Persentase peningkatan fasilitas sarana peternakan	%	2,05	4,37	6,37	8,37	10,37	12,37	12,37	
3a.9	Persentase peningkatan fasilitas prasarana peternakan	%	6	12	17	23	29	35	48,0	
3a.10	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	25	30	35	40	45	50	50	





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3a.11	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	Jumlah	350	550	675	800	925	1.050	1.050	
3a.12	Jumlah ternak/hewan yang di vaksin	Jumlah	300	500	550	600	650	700	700	
3a.13	Jumlah penurunan kejadian penyakit jembrana, SE, AI, Rabies	Jumlah	300	250	200	150	100	50	750	
3a.14	Pendapatan peternak	Rp.(Ribu)	6.15	6.27	6.4	6.25	6.65	6.79	7.01	
3a.15	Persentase pelayanan perizinan bidang peternakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3a.16	Persentase peningkatan kelas kelompok tani Peternak	%	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
<b>4</b>	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>									
4.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	%	8,30	8,52	8,58	8,60	8,64	8,69	8,71	IKU
4.2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	60	60	60	62	62	63	63	
4.3	Jumlah Pasar yang Kondusif	Pasar	N/A	1	1	1	1	1	1	
4.4	jumlah pasar yang diawasi	Kecamatan	N/A	17	17	17	17	17	17	
4.5	Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	Pedagang	N/A	1	1	2	2	2	2	
4.6	Pasar tertib ukur	Pasar	N/A	1	1	1	1	1	1	
4.7	Terwujudnya pasar BANA	Pasar	N/A	1	1	1	1	1	1	
4.8	Ekspor Perdagangan Bersih	Rp.(Juta)	1.807.409,77	4.879.200,55	5.250.300,25	5.550.100,30	5.870.200,20	6.540.300,75	6.800.250,11	
4.9	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	67	67,3	67,4	67,7	67,80%	67,9	68,1	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5</b>	<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>									
5.1	Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	11,19	11,8	12,6	13,3	14,2	15,0	16,0	IKU
5.2	Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	Sentra	1	1	1	1	1	1	1	
5.3	Peningkatan jumlah Industri kecil dan Menengah yang bersertifikasi	Sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	
5.4	Tersedianya data dan Informasi tentang Industri kecil dan Menengah	Dokumen Ranperda	1	1	1	1	1	1	1	
5.5	Cakupan bina kelompok pengrajin	Jumlah	150	155	160	165	170	175	180	
5.6	Pertumbuhan Industri	%	2,37	2,4	2,42	2,45	2,47	2,5	2,55	
<b>D</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
1.1	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	%	N/A	26	27	28	29	30	31	IKU
1.2	PDRB/Income Per Kapita ADHB	Rp Juta	42,95	44,63	46,98	49,46	52,71	55,35	58,72	IKU
1.3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A	A	A	A	A	A	A	IKU
1.4	Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Nilai	B	B	B	BB	BB	BB	BB	IKU
1.5	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Nilai	2,600 (tinggi)	2,600 (tinggi)	2,700 (tinggi)	2,800 (tinggi)	2,900 (tinggi)	3,000 (sangat tinggi)	3,050 (sangat tinggi)	IKU
1.6	Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	Orang	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	Ind. Tujuan



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	54	60	63	63	64	65	66	Ind. Tujuan
1.8	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	%	74,83	75,33	75,83	76,33	76,83	77,33	78,16	Ind. Tujuan
1.9	Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	%	10	10	11	12	13	14	15	IKS
1.10	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.11	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.12	Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD	%	N/A	10	11	12	13	14	15	
1.13	Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.14	Persentase Rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	%	70	70	75	75	75	80	85	
1.15	Persentase Laporan Realisasi kegiatan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
1.16	Persentase peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	%	80	80	85	90	95	100	100	
1.17	Persentase kegiatan pimpinan	%	80	80	85	90	95	100	100	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	daerah yang difasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan									
1.18	Persentase acara daerah yang sesuai standar keprotokolan	%	80	80	85	90	95	100	100	
1.19	Persentase kerjasama informasi dengan mass media	%	80	80	85	90	95	100	100	
<b>2</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>									
2.1	Jumlah produk Peraturan Daerah yang dihasilkan	Perda	11	8	8	8	8	8	8	
2.2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
2.3	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
2.4	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
2.5	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.6	Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat	%	100	100	100	100	100	100	100	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	waktu									
2.7	Cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	%	60	70	72	75	77	80	80	
2.8	Cakupan kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	%	75	80	81	82	83	85	85	
<b>E</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN</b>									
1.1	Indeks kualitas perencanaan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	%	N/A	90	92	93	94	95	95	
1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1.4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1.5	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1.6	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	70	75	80	85	90	93	95	
1.7	Persentase Peningkatan kualitas musrenbang	%	70	75	80	85	90	93	95	
1.8	Kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	%	70	75	80	85	90	93	95	
<b>2</b>	<b>KEUANGAN</b>									
2.1	Opini BPK Atas Laporan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keuangan									
2.2	Persentase Peningkatan PAD	%	N/A	3	3,5	4	4,5	5	5,5	IKS
2.3	Persentase Tingkat ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat	%	90,21	81,81	82,22	82,31	82,23	82,17	82,23	Ind. Tujuan
2.4	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Tanggal	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022	30/11/2023	30/11/2024	30/11/2025	30/11/2026	
2.5	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.6	Persentase kualitas laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.7	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.8	Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.9	Persentase Pencapaian Target PAD	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.10	Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun.	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	
2.11	Jumlah Perbub tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	
2.12	Rasio belanja modal terhadap APBD	Rasio	19	20,5	22	25	28,1	30,2	33,1	
2.13	Persentase kenaikan pajak dan retribusi daerah	%	-9,4	5	5,5	6	6,5	7	7,5	
2.14	Rasio PAD terhadap penerimaan APBD	Rasio	6,2	6,33	6,94	7,19	8,45	9,72	10,01	
2.15	Rasio PAD terhadap pengeluaran APBD	Rasio	6,3	6,48	6,98	7,25	8,64	9,87	10,53	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3</b>	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	76	78	80	82	84	86	88	IKS
3.2	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek	%	93	93	93	93	93	93	93	
3.3	Persentase peningkatan terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	%	92	92	92	92	92	92	92	
3.4	Persentase peningkatan dokumen ASN yang terarsipkan	%	75	75	75	75	75	75	75	
3.5	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN (Kepegawaian)	%	73	73	73	73	73	73	73	
3.6	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN (Diklat)	%	90	90	90	90	90	90	90	
3.7	Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial	%	81	81	81	81	81	81	81	
3.8	Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis	%	20	20	25	30	35	40	45	
3.9	Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3	%	37	40	41	42	43	44	45	
3.10	Tingkat penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai	%	75	80	80	85	85	90	90	
3.11	Persentase tingkat kehadiran ASN	%	80	80	80	85	85	90	90	
3.12	Persentase prestasi ASN berdasarkan masa kerja PNS	%	44	47	50	53	56	59	62	
3.13	Persentase penerbitan SK tepat waktu	%	65	67	69	71	73	75	77	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.14	Persentase pengisian jabatan sesuai formasi dan kompetensi	%	96	96	97	97	97	97	97	
3.15	Persentase record data kepegawaian yang akurat	%	30	30	60	100	100	100	100	
3.16	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	%	63	63	70	75	75	85	85	
<b>4</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>									
5.1	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	%	60	65	70	75	80	85	90	
5.2	Jumlah Kerjasama Penelitian	jml	1	1	4	6	8	10	12	
5.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	30	35	40	41	42	43	44	
5.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	20	25	35	40	45	50	55	
<b>F</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>1</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>									
1.1	Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Level	B	B	B	BB	BB	BB	BB	IKU
1.2	Tingkat kapabilitas APIP	Level	level 3 dengan catatan	level 3 dengan catatan	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	IKS
1.3	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	IKS
1.4	Persentase pengawasan yang dilakukan	%	N/A	60	60	60	60	60	60	
1.5	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang	%	N/A	60	60	60	60	60	60	





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dilakukan									
1.6	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	%	70	70	75	75	75	80	80	
1.7	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD	Jumlah	15	12	12	11	11	11	10	
1.8	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Nilai	B	B	B	BB	BB	BB	BB	
1.9	Jumlah OPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sesuai nilai akuntabilitas kinerja Pemda	unit	4	6	10	12	14	15	18	
1.10	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK	%	63	65	65	70	70	75	75	
1.11	Jumlah OPD yang memperoleh level maturitas sesuai level maturitas Pemda	unit	0	10	10	10	10	15	15	
<b>G</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
<b>1</b>	<b>KECAMATAN</b>									
1.1	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dikecamatan									
1.5	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
<b>H UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>										
<b>1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>										
1.1	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	%	-	-	100	100	100	100	100	
1.2	persentase laporan pertanggungjawaban partai politik tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3	persentase ormas / kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	persentase pelaksanaan pembinaan penanganan kasus narkoba	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
1.5	persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										
<b>KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH</b>										
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	ratio	51.97	51.60	51.40	51.25	51.00	49.95	49.70	
1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	ratio	48.03	48.06	48.10	48.15	48.17	48.19	48.25	
2.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Unit	7	7	7	7	8	9	9	
2.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	buah	3	3	3	4	4	5	5	
2.3	Ketersediaan restoran	buah	25	27	29	30	32	35	40	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	Rumah makan	buah	75	75	80	85	87	90	95	
2.5	Cafe	Buah	10	11	12	13	14	15	16	
2.7	Hotel Non Bintang	Buah	3	3	4	4	5	5	5	
3.1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	Persen	70	72	73	75	76	77	80	
4.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	Persen	91.98	91.98	92.04	92.04	92.26	92.26	93.02	
<b>IKLIM BERINVESTASI</b>										
1.1	Angka kriminalitas	Kasus	5	5	4	3	2	2	2	
1.2	Jumlah demo	Kali	1	1	1	1	0	0	0	
1.3	Lama proses perijinan (rata-rata)	Hari	7	7	7	6	6	5	5	
1.4	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.5	persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



# **BAB IX**

# **PENUTUP**

## BAB IX PENUTUP

RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.

RPJMD menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan Urusan Pilihan. Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
2. RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Padang Pariaman yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidaksesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran.
4. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *corporate social responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
5. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat Renstra baru.



6. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/Renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.

BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR







No	KODE (PN/PP)	Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RPJMD PROVINSI							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	RPJMD KABUPATEN/KOTA						
			Target							Target									Target						
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
																	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari)	2,431.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
																	ketersediaan protein (Gram/kap/hari)	54.04	54.85	55.66	56.47	57.28	58.09	58.90	
							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)				82.5	83	84	84.5										
		Angka Kecukupan Energi (AKE) (kcal/hari)	2100	2100	2100	2100	2100	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)				291.79	292.98	294.15	295.31									
								PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)				82.5	83	84	84.5									
		Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	57	57	57	57	57	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)				291.79	292.98	294.15	295.31									
								PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)				82.5	83	84	84.5									
		Prevalensi Ketidakecukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Under nourishment/PoU)	6.2	5.8	5.5	5.2	5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)				291.79	292.98	294.15	295.31									
								PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)				82.5	83	84	84.5									
		Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5.2	4.8	4.5	4.2	4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)				291.79	292.98	294.15	295.31									
								PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)				82.5	83	84	84.5									
																	Skor pola pangan harapan (PPH)	88.1	88.5	88.9	89.3	89.7	90.1	90.5	





























No	KODE (PN/PP)	Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPJMD KABUPATEN/KOTA												
			Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100											
								PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100											
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data (inovasi)		3	6	9	12	15	18	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah (%)		1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1											
								PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun (dokumen)		3	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase database kependudukan yang disusun	N/A	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
								PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya (%)		80	80	85	90	90	90	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Total Fertility Rate ( TFR )	2.42	2.38	2.34	2.31	2.27	2.24	2.24	2.22	
								PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54.44	55.12	55.46	55.89	56.32	56.75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Pemakaian alat kontrasepsi ( Contraception Prevalence Rate = CPR )	65.39	65.50	65.75	66.00	66.25	66.50	66.50	66.75	
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)		51.74	59.3	61.38	63.46	65.54	67.62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	14	14	13	12	11	10	9		
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78.7		0		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	65%	65%	80%	82%	85%	87%	90%		





































































No	KODE (PN/PP)	Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA										
			Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66.34	68.1	69.87	71.66	73.49	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)			2	3	4	5	6	7									
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)			83.5	84	88	92	96	100									
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)			2	3	4	5	6	7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	40%	40%	45%	46%	47%	48%	50%
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)			83.5	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tertangani	35%	35%	38%	40%	41%	43%	45%
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.21165	91.27794	91.27896	91.3347	91.38627	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)			11.54	11.54	13.2	13.2	15.09	15.09	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73.24481	73.5005	73.74052	73.96592	74.17748	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)			11.54	11.54	13.2	13.2	15.09	15.09									
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52.512	53.134	53.756	54.378	55	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)			11.54	11.54	13.2	13.2	15.09	15.09									
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)			84	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	35%	35%	35%	37%	38%	39%	40%
									PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga (indeks)			69.5	70	70.5	71	71.5	72	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	35%	35%	35%	37%	38%	39%	40%
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55.33	56.5	56.5	58.17	57.67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan (%)			14	15	16	17	18	20	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	18.51%	37.03%	46.29%	55.55%	64.81%	74.07%	83.33%



No	KODE (PN/PP)	Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPJMD KABUPATEN/KOTA												
			Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	Target								
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke	44.8	46.6	48.4	50.2	52.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)			50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Pengelolaan Pendidikan Dasar	53.47%	55.61%	70.96%	56.31%	60.61%	45.69%	64.30%
																				Rasio Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	50.28%	52.50%	54.80%	52.20%	59.70%	62.30%	65.00%
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)			31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27									
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)			52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57									
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)			28.62	31.4	35.72	36.04	36.34	36.68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja	N/A	70%	70%	70%	70%	70%	72%
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University : 1. Top 200, 2. Top 300, 3. Top 500	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 1; 2. 2; 3. 3.																			
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43	45	47	48	50	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)			28.62	31.4	35.72	36.04	36.34	36.68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja	N/A	70%	70%	70%	70%	70%	72%
4		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan																									
		Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	0				0		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi (nilai)			2.7	2.71	2.72	2.73	2.74	2.75	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	N/A	-	-	100%	100%	100%	100%





No	KODE (PN/PP)	Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KABUPATEN/KOTA									
			Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	Target									
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
							PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah (Orang)		N/A	6	12	18	24	30												
							PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP (%)			1.41	1.52	1.62	1.72		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	90.17	90.20	90.25	90.30	90.40	90.50	91.00			
																PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	2.87	2.90	2.95	3.00	3.20	3.50	4.00			
																PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	0.30%	0.40%	0.45%	0.50%	0.55%	0.60%	0.80%			
																PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	0.14	0.15	0.20	0.20	0.25	0.30	0.45			
																PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	0.33%	0.35%	0.40%	0.40%	0.45%	0.50%	0.55%			
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)		42.85	50	50	62.5	62.5	62.5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kajian Kelitbitangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%			
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang terinovatif (%)		20	30	30	40	40	50												
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)		2	10	10	10	12	12												
5		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar																									
		Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92.84	93.44	94	94.63	95	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni	0.129	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.185		







No	KODE (PN/PP)	Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							RPJMD KABUPATEN/KOTA												
			Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100										
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)					8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang BerPHBS	70%	72%	74%	76%	78%	80%	82%
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)					8	11	14	17	19									
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)					8	11	14	17	19									
								PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)			1	20	20	20	20	20	20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase pemukiman yang tertata	N/A	N/A	20%	20.10%	20.20%	20.30%	20.40%
																			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	N/A	N/A	50%	55%	60%	65%	70%
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7.3	8.4	10	12.2	15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)			82	82	84	86	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	71.86%	88%	90%	92%	95%	97%	100%
								PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)			0	3	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni	0.129	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.185
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52.5019	55.18146	57.06	58.10498	58.49863	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)			52.28	53.78	55.28	56.78	58.28	59.78	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	50,98%	54,82%	58,72%	62,72%	66,74%	71,04%	75,54%

No	KODE (PN/PP)	Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RPJMD PROVINSI							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
			Target							Target									Target							
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
																	PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	6.67%	7.02%	7.43%	7.95%	8.53%	9.29%	9.94%	
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68.8	70.36	71.92	73.48	75.04	76.6										
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64.75	66.51	68.27	70.03	71.79	73.5										
		Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52.28	53.78	55.28	56.78	58.28	59.78										
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68.8	70.36	71.92	73.48	75.04	76.6										
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64.75	66.51	68.27	70.03	71.79	73.5										
		Luas lahan pertanian padi dan non padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45229.17	115942.7	116142.7	116342.7	116342.7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52.28	53.78	55.28	56.78	58.28	59.78										
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68.8	70.36	71.92	73.48	75.04	76.6										
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64.75	66.51	68.27	70.03	71.79	73.5										
		Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana	14 Nagari	20 Nagari	25 Nagari	30 Nagari	35 Nagari	40 Nagari	45 Nagari	
																		Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana	75%	75%	79%	82%	85%	90%	98%	
																		Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	14.5%	19.4%	24.3%	29.12%	33.98%	38.83%	43.68%	

No	KODE (PN/PP)	Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KABUPATEN/KOTA														
			Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target														
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
		Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4.27	11.4325	11.4325	11.4325	11.4325	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)								52.28	53.78	55.28	56.78	58.28	59.78										
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)								68.8	70.36	71.92	73.48	75.04	76.6										
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)								64.75	66.51	68.27	70.03	71.79	73.5										
								PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Fasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi (lokasi)								1	10	10	10	10	10										
		Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)								20	20	40	60	80	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	85%	85%	87%	90%	92%	93%	100%	
								PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)								1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45										
	Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)			0			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)								80	85	90	95	95	95										
		Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)			0																											
		Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan masa			0																											
		Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)			0			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tersusunnya Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi (dokumen)								1	1	1	1	1	1	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	21	21	18	16	14	12	10



No	KODE (PN/PP)	Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KABUPATEN/KOTA										
			Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum asal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)			0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)			20	20	40	60	80	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	64.28%	65,3%	67%	69%	71%	73%	75%	
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)			1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45										
		Energi Dan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)			99.3	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9										
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)			99.3	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9										
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4.71	4.92	5.36	5.91	6.07	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Forsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)			28	29	33.3	35.7	51.7	51.8										
		Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (Skala 1-5) (indeks)			3	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi	50%	55%	60%	62%	63%	64%	65%	
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72.6	74.2	79.2	80.7	82.3																				
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97.5	98	98.5	99	100																				
			Proporsi individu yang menguasai/miliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75.7																				
6		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim																										
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)			60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	55.41	55.79	55.89	55.99	56.09	56.19	56.29	
																						93.32	91.83	91.93	92.06	92.16	92.26	96.36

No	KODE (PN/PP)	Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA									
			Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target									
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		Indeks Kualitas Air (IKA)	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)																			
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58.5	59	59.5	60	60.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)																			
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61.6	62.5	63.5	64.5	65.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)																			
								PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatnya (Kabupaten/Kota)									PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Keanekaragaman Hayati yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																					
			0.34	0.59	0.81	1	1.15																					
		Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4.5	4	3.5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)																			
		Pembangunan Rendah Karbon	11.8	12.5	12.8	12.8	13.2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)																			
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45.8	50.7	53.1	57.2	58.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)										PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	
																			Persentase penggunaan benih/bibit bermutu per tahun	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%		







